



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN BANJAR**

**TAHUN ANGGARAN  
2024**



## **BUPATI BANJAR**

### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar hingga saat ini. Berkenaan dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, kami selaku Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

Penyampaian LPPD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Banjar selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang dipertegas lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Ruang lingkup LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan Bab V Penutup.

Melalui dukungan berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh agama dan alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang telah tercapai selama tahun 2024 yang lalu. Selain dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ini, kami pun menyadari masih terdapat berbagai kekurangan termasuk pula dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Bupati Banjar,



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.*







## BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR MASA JABATAN 2021 – 2024



**H. SAIDI MANSYUR**  
*Bupati Banjar*



**H. SAID IDRUS**  
*Wakil Bupati Banjar*



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Penjelasan Umum .....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	15
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	29
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	34
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	34
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia .....	34
2.1.2. Angka Kemiskinan .....	36
2.1.3. Angka Pengangguran .....	38
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi .....	40
2.1.5. Pendapatan Per Kapita .....	41
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan .....	43
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	44
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) .....	44
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	49
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	49
A. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja .....	49
B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya..	75
C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah .....	78
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi dan Nasional .....	81
E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang dilakukan .....	84
F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai .....	107
G. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja .....	110
H. Realisasi Anggaran .....	128
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	134
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	136
4.1. Urusan Pendidikan .....	136
4.2. Urusan Kesehatan .....	141
4.3. Urusan Pekerjaan Umum .....	158
4.4. Urusan Perumahan Rakyat .....	162
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...	165
4.6. Urusan Sosial .....	197
4.7. Program dan Kegiatan .....	203
BAB V PENUTUP .....	287



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Penjelasan Umum

##### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Selanjutnya dijelaskan sejarah perkembangan kewilayahan Kabupaten Banjar sebagai berikut.

Pembentukan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar yang berada di tanah Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 24 September 1526 sampai dengan 11 Juni 1860. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya (sekarang Kabupaten Banjar). Ketika Ibukota berkedudukan di Martapura maka disebut juga Kesultanan Kayu Tangi. Pada saat itu wilayah ibukotanya masih berada di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Lahirnya Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kesultanan Negara Daha, yaitu Kesultanan Hindu yang beribukota di kota Nagara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Era Kesultanan Banjar berakhir pada tahun 1905, pada saat setelah berakhirnya perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Gusti Muhammad Seman dan para pengikutnya yang setia pada tahun periode 1859-1905. Kemudian Martapura diperintah oleh Belanda dan pada tahun 1942-1945 Martapura diperintah oleh Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah kalah oleh Tentara Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pada masa revolusi fisik bangsa Indonesia berkobar dengan hebatnya untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1948, Pemerintah Belanda (NICA) di Kalimantan Selatan justru memaksakan kehendaknya untuk membentuk sebuah Dewan yang disebut Dewan Banjar yang wilayahnya meliputi Afdeling Banjarmasin dan Hulu Sungai.



Pembentukan Dewan Banjar tersebut merupakan hasil Konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook.

Pembentukan Dewan Banjar ternyata tidak mendapat dukungan dari Rakyat Kalimantan Selatan, sehingga keinginan Belanda untuk mendirikan negara bagian dengan tujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia tidak tercapai. Walaupun demikian Pemerintah Belanda tetap saja melaksanakan kehendaknya tersebut dengan mengangkat anggota-anggotanya dengan harapan dapat menjadi alat Pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 Dewan Banjar dibubarkan dan Afdeling Banjarmasin dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada saat itu belum memungkinkan adanya otonomi untuk Kabupaten Banjar. Namun atas dasar Kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 tanggal 13 Agustus 1950, ditetapkan Susunan Wilayah dan Jabatan Pemerintahan dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Surat Keputusan tersebut antara lain memuat perubahan *Afdeling* Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjarmasin.

Selain itu pula melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Sementara Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Banjarmasin. Pada tanggal 23 Desember 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) telah dibentuk dengan jumlah anggota 22 orang dengan Ketua K.H. Hasan Corong. Dengan dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara tersebut, maka resmiah terbentuknya Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten Banjar dengan Martapura sebagai Ibukotanya. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Banjarmasin, meliputi :

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala Berangas
- 4) Kewedanaan Tanah Laut Pelaihari

Dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Nomor DPRDS/43/2 tanggal 27 Pebruari 1952 mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan dan Pemerintah Pusat agar nama Kabupaten Banjarmasin dirubah jadi nama Kabupaten Banjar, juga mengusulkan perubahan Kewedanaan, yaitu:

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura



- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala
- 4) Kewedanaan Tanah Laut
- 5) Kewedanaan Ulin Gambut

Usul penambahan Kewedanaan tersebut disetujui oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Nomor C-246-2-3 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menyetujui perubahan sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarmasin menjadi Daerah Kabupaten Banjar. Pada awalnya Kabupaten Banjar terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

#### b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada  $114^{\circ} 30' 20''$  dan  $115^{\circ} 33' 37''$  Bujur Timur serta  $2^{\circ} 49' 55''$  dan  $3^{\circ} 43' 38''$  Lintang Selatan. Luas wilayahnya  $4.668,50 \text{ Km}^2$  atau sekitar  $12,20 \%$  dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
- Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu  $1.166,35 \text{ Km}^2$  ( $0,250\%$ ) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu  $29,99 \text{ Km}^2$  ( $0,006\%$ ).



Secara topografis, ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50– 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,78 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (0,0 mm) dan tertinggi pada bulan April (613,0 mm). Dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (23 hari), sebaliknya jumlah hujan terendah pada bulan September (0 hari).

#### c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2024 semester I sebanyak 584.684 Jiwa yang terdiri atas 295.169 Jiwa penduduk laki-laki dan 289.515 Jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penduduk tersebut



mengalami kenaikan sebesar 9.569 Jiwa. Rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

### JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023			JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Aluh-Aluh	15.012	14.481	29.493	15.379	14.728	30.107
Kertak Hanyar	20.711	20.860	41.571	21.110	21.215	42.325
Gambut	22.397	22.536	44.933	23.029	23.130	46.159
Sungai Tabuk	31.547	30.643	62.190	31.885	30.983	62.868
Martapura	62.560	62.604	125.164	63.676	63.679	127.355
Karang Intan	18.441	18.140	36.581	18.723	18.432	37.155
Astambul	18.150	18.073	36.223	18.345	18.244	36.589
Simpang Empat	12.225	11.732	23.957	12.366	11.870	24.236
Pengaron	8.826	8.566	17.392	9.039	8.798	17.837
Sungai Pinang	7.515	7.006	14.521	7.825	7.327	15.152
Aranio	4.858	4.519	9.377	4.929	4.593	9.522
Mataraman	12.729	12.496	25.225	12.741	12.466	25.207
Beruntung Baru	7.512	7.289	14.801	7.514	7.314	14.828
Martapura Barat	9.989	9.375	19.364	10.107	9.445	19.552
Martapura Timur	15.476	14.983	30.459	15.641	15.190	30.831
Sambung Makmur	6.325	6.161	12.486	6.649	6.494	13.143
Paramasan	1.974	1.741	3.715	2.029	1.797	3.826
Telaga Bauntung	1.700	1.649	3.349	1.715	1.670	3.385
Tatah Makmur	6.583	6.601	13.184	6.671	6.693	13.364
Cintapuri Darussalam	5.741	5.389	11.130	5.796	5.447	11.243
<b>Jumlah</b>	<b>290.271</b>	<b>284.844</b>	<b>575.115</b>	<b>295.169</b>	<b>289.515</b>	<b>584.684</b>

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjar, 2025

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Banjar terbagi kedalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

### LUAS WILAYAH KABUPATEN BANJAR MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Aluh-Aluh	82,48	19	
2.	Beruntung Baru	61,42	12	
3.	Gambut	129,30	12	2
4.	Kertak Hanyar	45,83	10	3
5.	Tatah Makmur	35,47	13	
6.	Sungai Tabuk	147,30	20	1
7.	Martapura	42,03	19	7
8.	Martapura Timur	29,99	20	
9.	Martapura Barat	149,38	14	
10.	Astambul	216,50	22	
11.	Karang Intan	215,35	26	
12.	Aranio	1.166,35	12	
13.	Sungai Pinang	458,65	11	
14.	Paramasan	560,85	4	
15.	Pengaron	433,25	12	
16.	Sambung Makmur	134,65	7	
17.	Mataraman	148,40	15	
18.	Simpang Empat	141,10	15	
19.	Telaga Bauntung	158,00	4	
20.	Cintapuri Darussalam	428,29	11	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.668,5</b>	<b>277</b>	<b>13</b>

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



**JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

No.	Perangkat Daerah	Sekretariat	Sub bagian	Bagian / Bidang	Sub bidang / Seksi	UPT
1.	Sekretariat Daerah					
	- Sekretaris Daerah	1		10 Bagian	29 Sub Bagian	
	- Asisten	3				
	- Staf Ahli	3				
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	3 Bagian	9 Sub Bagian	
3.	Inspektorat Daerah	1	3			
	- Inspektur Pembantu Wilayah	4				
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	1	3	5	12	
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	3	6	
6.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1	3	6	18	
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	3	9	
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	3	6	
9.	Dinas Pendidikan	1	3	4	12	40
10.	Dinas Kesehatan	1	3	4	12	29
11.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	3	6	18	
12.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	3	5	15	2
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	3	6	
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3	5	13	1
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	3	6	
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	3	5	11	1
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	4	8	2
18.	Dinas Perhubungan	1	2	3	6	2
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	4	8	
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	3	3	9	
21.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1	3	5	14	1
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	5	10	
23.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1	3	5	13	
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	3	2	4	
25.	Dinas Pertanian	1	3	6	18	4
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	2	2	4	
27.	Kecamatan (20 Camat)	20	40	-	80	
28.	Kelurahan (13 Lurah)	20	-	-	20	

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2025

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jumlah aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Banjar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 8.035 yang terdiri atas 2.920 laki-laki dan 5.115 perempuan.



## JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah	Laki-Laki		Perempuan		Total		Jumlah Keseluruhan
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sekretariat Daerah	64	3	56	6	120	9	129
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16	7	14	1	30	8	38
3	Inspektorat Daerah	18	2	25	1	43	3	46
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	6	27	2	47	8	55
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11	2	7	0	18	2	20
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	4	9	3	22	7	29
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	31	2	27	0	58	2	60
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	15	9	16	4	31	13	44
9	Satuan Polisi Pamong Praja	42	3	4	0	46	3	49
10	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	159	21	288	42	447	63	510
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	24	1	15	1	39	2	41
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10	4	11	1	21	5	26
13	Dinas Kesehatan	237	103	785	312	1022	415	1437
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	17	0	25	3	42	3	45
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	13	2	12	5	25	7	32
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan	20	2	23	2	43	4	47
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	42	6	19	5	61	11	72
18	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12	67	5	8	17	75	92
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	1	14	3	23	4	27
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	1	21	2	35	3	38
21	Dinas Pendidikan	1037	375	1792	1168	2829	1543	4372
22	Dinas Perhubungan	27	5	8	1	35	6	41
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7	5	14	9	21	14	35
24	Dinas Pertanian	64	54	93	42	157	96	253
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	59	5	25	5	84	10	94
26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11	2	26	3	37	5	42
27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11	3	12	0	23	3	26
28	Kecamatan Aluh-Aluh	11	0	0	2	11	2	13
29	Kecamatan Aranio	10	0	2	1	12	1	13
30	Kecamatan Astambul	7	0	3	1	10	1	11
31	Kecamatan Beruntung Baru	10	2	2	0	12	2	14
32	Kecamatan Cintapuri Darrusalam	7	1	0	0	7	1	8
33	Kecamatan Gambut	17	0	10	1	27	1	28
34	Kecamatan Karang Intan	10	0	3	1	13	1	14
35	Kecamatan Kertak Hanyar	13	1	13	0	26	1	27
36	Kecamatan Martapura	33	1	35	0	68	1	69
37	Kecamatan Martapura Barat	7	1	6	1	13	2	15
38	Kecamatan Martapura Timur	10	0	4	0	14	0	14
39	Kecamatan Mataraman	10	0	3	1	13	1	14
40	Kecamatan Paramasan	7	1	1	0	8	1	9
41	Kecamatan Pengaron	10	0	3	1	13	1	14
42	Kecamatan Sambung Makmur	10	0	0	1	10	1	11
43	Kecamatan Simpang Empat	7	0	3	1	10	1	11
44	Kecamatan Sungai Pinang	8	1	0	0	8	1	9
45	Kecamatan Sungai Tabuk	11	0	7	1	18	1	19
46	Kecamatan Tatah Makmur	7	0	4	1	11	1	12
47	Kecamatan Telaga Bauntung	8	1	1	0	9	1	10
<b>TOTAL</b>		<b>2216</b>	<b>704</b>	<b>3473</b>	<b>1642</b>	<b>5689</b>	<b>2346</b>	<b>8035</b>

Sumber : Data Diolah BKPSDM 2025



**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
BERDASARKAN JENIS JABATAN TAHUN 2024**

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian Asn			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	43	23	63	129
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	12	8	18	38
3	Inspektorat Daerah	9	34	3	46
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	22	18	55
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	2	6	20
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	7	9	29
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	27	3	30	60
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	20	14	10	44
9	Satuan Polisi Pamong Praja	12	15	22	49
10	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	17	421	72	510
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	23	3	15	41
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10	9	7	26
13	Dinas Kesehatan	51	1314	72	1437
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	21	5	19	45
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	17	7	8	32
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan	25	4	18	47
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	28	15	29	72
18	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10	75	7	92
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16	4	7	27
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	17	9	38
21	Dinas Pendidikan	20	4098	254	4372
22	Dinas Perhubungan	15	8	18	41
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10	19	6	35
24	Dinas Pertanian	32	202	19	253
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	28	12	54	94
26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	23	5	14	42
27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12	5	9	26
28	Kecamatan Aluh-Aluh	8	2	3	13
29	Kecamatan Aranio	7	1	5	13
30	Kecamatan Astambul	8	1	2	11
31	Kecamatan Beruntung Baru	7	2	5	14
32	Kecamatan Cintapuri Darrusalam	6	1	1	8
33	Kecamatan Gambut	16	1	11	28
34	Kecamatan Karang Intan	8	1	5	14
35	Kecamatan Kertak Hanyar	20	1	6	27
36	Kecamatan Martapura	41	1	27	69
37	Kecamatan Martapura Barat	8	2	5	15
38	Kecamatan Martapura Timur	7	0	7	14
39	Kecamatan Mataraman	8	1	5	14
40	Kecamatan Paramasan	7	1	1	9
41	Kecamatan Pengaron	8	1	5	14
42	Kecamatan Sambung Makmur	8	1	2	11
43	Kecamatan Simpang Empat	8	1	2	11
44	Kecamatan Sungai Pinang	7	1	1	9
45	Kecamatan Sungai Tabuk	13	1	5	19
46	Kecamatan Tatah Makmur	8	1	3	12
47	Kecamatan Telaga Bauntung	7	1	2	10
<b>Total</b>		<b>743</b>	<b>6373</b>	<b>919</b>	<b>8035</b>

Sumber : Data Diolah BKPSDM 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



## REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PROGRAM DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Hibah		Belanja Bantuan Sosial		Belanja Modal Tanah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Belanja Modal Aset Lainnya		Belanja Tidak Terduga		Belanja Bagi Hasil		Belanja Bantuan Keuangan		Jumlah (Anggaran)	Jumlah (Realisasi)			
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	532.131.517.650,00	447.454.570.011,00	108.669.521.736,00	95.454.230.654,00	24.156.907.883,00	23.789.547.482,00	-	-	-	-	16.591.751.643,00	16.489.724.293,00	48.935.006.681,00	47.447.006.700,00	200.000.000,00	199.705.000,00	3.185.200.100,00	3.147.584.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	733.869.905.693,00	633.982.368.240,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	269.413.853.791,00	225.534.896.591,00	304.841.279.785,00	278.910.146.768,00	650.000.000,00	649.807.852,00	-	-	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	32.050.074.433,00	31.217.176.927,00	9.772.056.500,00	8.005.366.250,00	3.764.200.000,00	3.745.250.000,00	17.000.000,00	70.000.000,00	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	624.176.464.509,00	550.769.434.788,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.847.346.688,00	9.528.681.268,00	46.948.733.624,00	42.338.593.089,00	14.797.426.209,00	14.510.570.290,00	-	-	-	-	846.054.600,00	728.174.232,00	9.891.576.068,00	9.013.545.179,00	294.883.016.728,00	271.748.049.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.214.153.917,00	347.867.613.457,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	8.160.000,00	3.820.000,00	494.942.100,00	432.432.714,00	-	-	-	-	-	-	8.606.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511.708.100,00	436.252.714,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	165.080.000,00	155.680.000,00	18.960.364.784,00	17.722.648.921,00	-	-	2.175.000.000,00	2.172.794.973,00	-	-	2.585.408.000,00	2.548.420.000,00	-	-	19.073.244.800,00	18.422.620.029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.959.097.584,00	41.022.163.923,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.529.318.507,00	9.931.413.591,00	35.242.022.526,00	34.210.492.474,00	-	-	-	-	-	-	13.352.093.245,00	13.163.590.700,00	3.949.206.999,00	3.537.779.000,00	601.046.568,00	596.046.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.673.687.845,00	61.439.322.333,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.418.905.721,00	16.054.941.084,00	28.642.424.835,00	24.540.170.206,00	-	-	-	-	-	-	12.887.246.600,00	12.638.516.600,00	775.555.393,00	757.064.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.724.132.549,00	53.990.692.790,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.337.843.278,00	6.097.472.590,00	12.903.817.681,00	10.853.796.317,00	-	-	1.474.600.000,00	1.365.980.000,00	-	-	1.823.659.000,00	1.609.577.000,00	1.252.566.000,00	1.150.664.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.792.485.959,00	21.077.489.907,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	1.334.741.000,00	765.971.163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334.741.000,00	765.971.163,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	8.714.729.300,00	8.172.325.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.714.729.300,00	8.172.325.887,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.243.282.031,00	4.071.040.350,00	6.303.693.412,00	4.058.741.761,00	-	-	-	-	-	-	836.084.000,00	807.885.650,00	1.070.936.000,00	865.018.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.453.995.443,00	9.802.685.874,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	206.253.000,00	202.015.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.253.000,00	202.015.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.734.143.227,00	6.337.174.642,00	4.776.078.844,00	4.303.995.197,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	653.217.000,00	630.134.300,00	372.872.700,00	298.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.602.311.771,00	11.635.544.139,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.440.000,00	28.860.000,00	4.220.380.000,00	3.851.071.720,00	1.096.150.000,00	1.060.751.900,00	-	-	-	-	233.458.000,00	230.171.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.583.428.000,00	5.170.855.312,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	4.686.137.815,00	3.727.216.717,00	5.090.624.936,00	4.686.681.328,00	-	-	-	-	-	-	1.694.000.000,00	1.610.038.800,00	-	-	-	-	12.500.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.483.262.751,00	10.035.436.845,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.635.727.920,00	4.124.170.215,00	14.080.891.866,00	13.188.162.769,00	-	-	-	-	-	-	877.903.000,00	855.307.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.936.743.972,00	4.826.939.765,00	6.938.307.460,00	6.449.487.325,00	-	-	-	-	-	-	3.463.481.635,00	3.417.394.400,00	1.774.945.900,00	1.769.666.000,00	-	-	15.000.000,00	14.906.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.128.478.967,00	16.478.393.680,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.949.156.692,00	4.290.800.570,00	13.683.415.938,00	13.433.012.198,00	-	-	-	-	-	-	943.808.200,00	911.947.000,00	397.800.000,00	397.087.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.974.180.830,00	19.032.847.668,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	126.998.500,00	125.598.500,00	-	-	-	-	-	-	467.512.000,00	461.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.510.500,00	586.598.500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN	-	-	87.013.800,00	78.714.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.013.800,00	78.714.200,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.953.249.706,00	6.720.535.224,00	6.362.764.199,00	5.627.066.127,00	-	-	-	-	-	-	897.863.380,00	863.544.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.263.877.285,00	13.236.145.351,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.050.000,00	-	1.596.404.246,00	1.417.611.761,00	-	-	-	-	-	-	85.670.700,00	85.105.000,00	1.106.000.000,00	1.098.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.790.124.946,00	2.601.166.761,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.420.000,00	26.100.000,00	2.313.501.600,00	2.157.799.387,00	-	-	-	-	-	-	192.092.000,00	185.598.000,00	-	-	-	-	25.850.000,00	25.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.863.600,00	2.395.197.387,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.664.268.485,00	5.210.141.175,00	5.351.824.173,00	5.104.510.090,00	-	-	-	-	-	-	4.119.348.250,00	4.065.485.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-	-	300.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.194.240.908,00	14.438.921.265,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDIAN DAN OLAHRAGA	6.312.993.492,00	5.793.121.881,00	6.202.173.720,00	5.637.306.750,00	5.775.000.000,00	5.541.460.122,00	-	-	-	-	96.605.000,00	95.765.000,00	130.800.000,00	130.500.000,00	-	-	100.000.000,00	95.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.617.572.212,00	17.293.513.753,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.140.599.400,00	2.023.050.426,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.185.000,00	19.185.000,00	4.797.713.300,00	4.659.100.238,00	-	-	-	-	-	-	225.230.000,00	225.220.000,00	298.279.000,00	296.700.000,00	206.500.000,00	205.788.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.548.907.300,00	5.405.993.238,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.951.144.406,00	4.231.133.758,00	2.197.200.993,00	1.902.785.180,00	-	-	-	-	-	-	828.263.000,00	813.130.250,00	59.280.962,00	29.300.000,00	-	-	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.255.889.361,00	7.196.349.188,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	282.919.000,00	270.946.332,00	-	-	-	-	-	-	47.974.000,00	45.366.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.893.000,00	316.312.332,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	31.062.510.801,00	28.640.453.800,00	17.848.309.413,00	16.114.915.642,00	-	-	-	-	-	-	1.186.003.760,00	1.129.791.100,00	2.047.869.828,00	2.039.090.000,00	158.509.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.303.202.802,00	47.924.250.542,00	
SEKRETARIAT DAERAH	20.603.044.741,00	19.516.189.082,00	36.028.561.292,00	32.752.185.870,00	9.985.743.600,00	9.510.432.711,00	-	-	-	-	11.548.335.000,00	9.943.848.770,00	4.079.060.000,00	3.823.342.425,00	-	-	6.600.000,00	2.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.251.344.633,00	75.548.578.858,00	
SEKRETARIAT DPRD	34.732.798.092,00	32.503.191.379,00	58.725.515.228,00	46.880.889.187,00	-	-	-	-	-	-	7.698.837.280,00	7.110.286.320,00	200.000.000,00	199.168.000,00	-	-	40.705.000,00	24.037.500,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.447.855.600,00	86.717.572.386,00
PERENCANAAN	6.872.244.806,00	6.104.176.084,00	7.490.179.050,00	6.906.206.046,00																											



**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2024**

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	112.811.617.107,00	130.670.608.239,00	115,83
Pendapatan Retribusi Daerah	6.616.430.250,00	7.173.930.214,00	108,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.008.793.672,00	11.008.793.672,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.758.396.998,00	166.923.560.983,86	120,30
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>269.195.238.027,00</b>	<b>315.776.893.108,86</b>	<b>117,30</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79
Dana Alokasi Umum	821.309.221.000,00	811.192.115.956,00	98,77
Dana Alokasi Khusus	333.983.476.000,00	324.862.914.934,00	97,27
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.948.908.996.000,00</b>	<b>2.149.004.448.651,00</b>	<b>110,27</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>			
Dana Insentif Daerah	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00
Dana Desa	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>261.961.747.000,00</b>	<b>261.961.747.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>123.230.277.838,00</b>	<b>236.242.857.763,00</b>	<b>191,71</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>2.334.101.020.838,00</b>	<b>2.647.209.053.414,00</b>	<b>113,41</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	6.567.047.850,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.141.869.641,00	27.478.863.689,00	97,64
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>34.708.917.491,00</b>	<b>27.478.863.689,00</b>	<b>79,17</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.638.005.176.356,00</b>	<b>2.990.464.810.211,86</b>	<b>113,36</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78
Belanja Barang dan Jasa	840.045.250.913,00	751.010.064.067,75	89,40
Belanja Hibah	112.423.465.582,00	110.285.853.619,00	98,10
Belanja Bantuan Sosial	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	96,96
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>2.084.239.244.704,00</b>	<b>1.832.523.930.763,75</b>	<b>87,92</b>
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Tanah	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50
Belanja Peralatan dan Mesin	124.951.640.416,00	119.703.156.020,20	95,80
Belanja Gedung dan Bangunan	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.467.805.100,00	3.426.392.790,00	98,81
Belanja Aset Lainnya	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>540.534.604.731,00</b>	<b>504.865.104.227,51</b>	<b>93,40</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			



Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1.534.226.050,00</b>	<b>15,34</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>			
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	87,70
Belanja Bantuan Keuangan	397.435.135.662,00	397.435.135.662,00	100,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>406.351.661.462,00</b>	<b>405.254.913.251,00</b>	<b>99,73</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.041.125.510.897,00</b>	<b>2.722.459.988.810,26</b>	<b>89,52</b>
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(403.120.334.541,00)</b>	<b>246.286.635.919,60</b>	<b>(61,10)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	429.120.334.541,00	429.120.334.540,89	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	26.024.000,00	
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>429.120.334.541,00</b>	<b>429.146.358.540,89</b>	<b>100,01</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.000.000.000,00</b>	<b>26.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>403.120.334.541,00</b>	<b>403.146.358.540,89</b>	<b>100,01</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>649.432.994.460,49</b>	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar, 2025

a. Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 2.990.464.810.211,86 Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah adalah 113,36% pada Tahun Anggaran 2024 yaitu:

- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp. 315.776.893.108,86 dengan capaian 117,30%
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 2.647.209.053.414,00 dengan capaian 113,41%.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 27.478.863.689,00 dengan capaian 79,17%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 315.776.893.108,86 atau sebesar 117,30% dari target sebesar Rp. 269.195.238.027,00 terdiri atas :

- Pendapatan pajak daerah terealisasi Rp. 130.670.608.239,00 atau sebesar 115,83% dari target sebesar Rp. 112.811.617.107,00
- Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 7.173.930.214,00 atau sebesar 108,43% dari target sebesar Rp. 6.616.430.250,00



- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 11.008.793.672,00 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp. 11.008.793.672,00
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 166.923.560.983,86 atau sebesar 120,30% dari target sebesar Rp. 138.758.396.998,00

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi Rp. 2.647.209.053.414,00 atau sebesar 113,41% dari target Rp. 2.334.101.020.838,00 Pendapatan transfer terbagi atas 3 (dua) hal yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi Rp. 2.149.004.448.651,00 dari anggaran Rp. 1.948.908.996.000,00 atau capaian 110,27% terdiri atas : Dana Bagi Hasil Pajak (realisasi Rp. 57.236.999.000,00 dari anggaran Rp. 57.236.999.000,00 atau capaian 100%); Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (realisasi Rp. 955.712.418.761,00 dari anggaran Rp. 736.379.301.000,00 atau capaian 129,79%); Dana Alokasi Umum (realisasi Rp. 811.192.115.956,00 dari anggaran Rp. 821.309.221.000,00 atau capaian 98,77%); Dana Alokasi Khusus (realisasi Rp. 324.862.914.934,00 dari anggaran Rp. 333.983.476.000,00 atau capaian 97,27%).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah (realisasi Rp. 236.242.857.763,00 dari anggaran Rp. 123.230.277.838,00 atau capaian 191,71%) terdiri atas : Pendapatan Bagi Hasil (realisasi Rp. 236.242.857.763,00 dari anggaran Rp. 123.230.277.838,00 atau capaian 191,71%)

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 27.478.863.689,00 atau sebesar 79,17% dari anggaran Rp. 34.708.917.491,00 terdiri atas : Pendapatan Hibah (realisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 6.567.047.850,00 atau sebesar 0%); Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (realisasi Rp. 27.478.863.689,00 dari anggaran Rp.28.141.869.641,00 atau sebesar 97,64 %).

## b. Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga 4) belanja transfer. Selama tahun 2023, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 2.744.178.174.292,26 dengan komponen belanja operasi 87,92% atau sebesar Rp. 1.832.523.930.763,75 kemudian belanja modal 93,40% atau Rp. 504.865.104.227,51 selanjutnya belanja tak terduga sebesar 15,34%



atau Rp. 1.534.226.050,00 dan belanja transfer sebesar 99,73% atau Rp. 405.254.913.251,00

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah Rp. 2.744.178.174.292,26 atau 90,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.041.125.510.897,00 Adapun realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.832.523.930.763,75 atau 87,92% dari anggaran Rp. 2.084.239.244.704,00 terdiri atas: belanja pegawai (realisasi Rp. 967.689.238.104,00 dari anggaran Rp. 1.128.120.928.209,00 atau capaian 85,78%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 751.010.064.067,75 dari anggaran Rp. 840.045.250.913,00 atau capaian 89,40%); Belanja hibah (realisasi Rp. 110.285.853.619,00 dari anggaran Rp. 112.423.465.582,00 atau capaian 98,10%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 3.538.774.973,00 dari anggaran Rp. 3.649.600.000,00 atau capaian 96,96%).
- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 504.865.104.227,51 atau 93,40% dari anggaran Rp. 540.534.604.731,00 terdiri atas: belanja tanah (realisasi Rp. 2.620.790.400,00 dari anggaran Rp. 3.615.000.000,00 atau capaian 72,50%); belanja Peralatan dan Mesin (realisasi Rp. 119.703.156.020,20 dari anggaran Rp. 124.951.640.416,00 atau capaian 95,80%); belanja gedung dan bangunan (realisasi Rp. 81.543.291.953,81 dari anggaran Rp. 86.804.990.119,00 atau capaian 93,94%); belanja jalan, jaringan, dan irigasi (realisasi Rp. 297.042.963.062,500 dari anggaran Rp. 321.041.819.096,00 atau capaian 92,52%); belanja modal aset tetap lainnya (realisasi Rp. 3.426.392.790,00 dari anggaran Rp. 3.467.805.100,00 atau capaian 98,81 %); belanja aset lainnya (realisasi Rp. 528.510.001,00 dari anggaran Rp. 653.350.000,00 atau capaian 80,89%);
- 3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 1.534.226.050,00 atau 15,34% dari anggaran Rp. 10.000.000.000,00
- 4) Belanja Transfer dengan realisasi Rp. 405.254.913.251,00 atau 99,73% dari anggaran Rp. 406.351.661.462,00 terdiri atas: belanja bagi hasil (realisasi Rp. 7.819.777.589,00 dari anggaran Rp. 8.916.525.800,00 atau 87,70%); belanja bantuan keuangan (realisasi Rp. 397.435.135.662,00 dari anggaran Rp. 397.435.135.662,00 atau 100%).

c. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 429.146.358.540,89 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 429.120.334.541,00 atau 100,01%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasinya sebesar Rp. 26.000.000.000,00 dari anggaran Rp. 26.000.000.000,00 atau 100% terdiri atas: penyertaan modal pemerintah daerah (realisasi Rp. 26.000.000.000,00 dari anggaran Rp. 26.000.000.000,00 atau 100%).



### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2024 yang berhubungan dengan prioritas daerah adalah sebagai berikut:

#### **PRIORITAS, SASARAN DAN PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2024**

Prioritas 1	Penurunan Daya Beli
Permasalahan	1. Pendapatan riil masyarakat turun
	2. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka dampak pandemi covid 19
	3. Ketimpangan pendapatan terjadi peningkatan
	4. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
	5. Nilai Tukar Nelayan Perikanan Masih Rendah
	6. Banyaknya koperasi yang tidak aktif
	7. Usaha Mikro tidak berkembang
	8. Pengelolaan pasca panen hasil perkebunan yang belum optimal
	9. Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman masih rendah
	10. Realisasi Investasi Masih Rendah
Prioritas 2	Pembangunan Manusia Belum Kompetitif
Permasalahan	1. Rata-Rata lama Sekolah Dibawah angka provinsi karena banyak peserta didik yang setelah lulus sekolah dasar langsung masuk pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
	2. Angka kematian ibu disebabkan 4 T, terlalu muda, Terlalu tua melahirkan, terlalu dekat dan Terlalu banyak anak
	3. PHBS perlu ditingkatkan
	4. Stunting masih di angka 17.91 Masih membutuhkan perhatian serius
	5. Kepesertaan Jaminan Sosial ideal 95% dari jumlah penduduk. - Namun saat ini masih 54% dari jumlah penduduk
	6. ODF masih cukup tinggi
	7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal
	8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih Rendah
	10. Konsumsi energi dan protein masih rendah
Prioritas 3	Penurunan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan
Permasalahan	1. Kerusakan Infrastruktur dampak banjir
	2. Cakupan Air minum ( persoalan pendanaan, pipanisasi, persebaran yang jauh
	3. Penyediaan Angkutan Umum Masih Rendah
	4. Masih ada rumah tidak layak huni
	5. Indeks kualitas Air Masih Rendah
	6. Timbunan Sampah yang makin meningkat, disebabkan Sarana prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan
	7. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) cakupan saat ini hanya 2%
	8. Ancaman Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan, Bencana banjir mengancam pada saat musim hujan dengan intensitas tinggi pada bulan Desember, Januari dan Maret, hampir setiap tahun selalu ada wilayah yang terkena banjir terutama didekat bantaran sungai martapura. Pada musim kemarau bencana yang mengancam adalah kebakaran hutan dan lahan
Prioritas 4	Nilai-Nilai Agama belum Terinternalisasi
Permasalahan	1. Adanya Kasus HIV / AIDS
	2. Meningkatnya Kasus Napza
	3. Masih Tingginya kasus Peekat
Prioritas 5	Pelayanan Publik belum Optimal
Permasalahan	1. Indeks SPBE masih rendah
	2. Kecamatan belum terkoneksi karena aspek geografis
	3. Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan rendah;
	4. Pelayan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang belum maksimal.
	5. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal

Sumber : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024

#### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**, dengan Misi :

**Misi I** Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia

**Misi II** Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

**Misi III** Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



**Misi IV** Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

**Misi V** Penguatan Karakter Masyarakat yang Religius, Berakhlak Baik dan Berkepribadian Luhur, serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Dan Demokratis

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berikut ini kami sajikan data program pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar periode 2021 - 2026.

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		
<b>Tujuan 1:</b> Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	<b>Sasaran 1.1</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan	<b>Strategi 1.1</b> Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
	<b>Sasaran 1.2</b> Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	<b>Strategi 1.2</b> Meningkatkan <i>hard skill &amp; soft skill</i> berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil & produktif
	<b>Sasaran 1.3</b> Meningkatnya daya beli masyarakat	<b>Strategi 1.3a</b> Melakukan upaya untuk menstabilkan harga & akses masyarakat miskin & berdaya beli rendah terhadap barang2 kebutuhan pokok
		<b>Strategi 1.3b</b> Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
	<b>Sasaran 1.4</b> Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	<b>Strategi 1.4</b> Melakukan upaya diversifikasi keanekaragaman pangan serta upaya ketahanan pangan dan gizi masyarakat secara terpadu
<b>Sasaran 1.5</b> Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	<b>Strategi 1.5</b> Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan & anak	
<b>Misi 2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan</b>		
<b>Tujuan 2.1:</b> Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan	<b>Sasaran 2.1.1</b> Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	<b>Strategi 2.1.1</b> Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan
	<b>Sasaran 2.1.2</b> Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	<b>Strategi 2.1.2a</b> Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat, mekanisasi pertanian



Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
yang inklusif & berkualitas	<b>Sasaran 2.1.3</b> Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	<b>Strategi 2.1.2b</b> Ekstensifikasi pertanian melalui revitalisasi dan rehabilitasi lahan tidur dan lahan pertanian yang rusak menjadi lahan pertanian yang produktif.
		<b>Strategi 2.1.2c</b> Meningkatkan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kemampuan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan serta pemasar hasil perikanan
		<b>Strategi 2.1.3a</b> Meningkatkan daya saing industri besar, menengah & kecil serta industri kreatif, serta meningkatkan fasilitas sarana & prasarana pelayanan untuk menunjang perkembangan Industri. Hulunilasi dan hilirisasi sektor industri yang terintegrasi dengan baik
<b>Tujuan 2.2</b> Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	<b>Sasaran 2.2.1</b> Menurunnya Angka Pengangguran	<b>Strategi 2.1.3b</b> Peningkatan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
		<b>Strategi 2.1.3c</b> Pengembangan infrastruktur digital dan program-program inovasi digital sektor perekonomian dan usaha produktif masyarakat dengan mengutamakan produk unggulan Kabupaten Banjar
		<b>Strategi 2.2.1a</b> Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link &amp; match</i> antara kebutuhan <i>supply &amp; demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur
		<b>Strategi 2.2.1b</b> Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan, sektor ekonomi kreatif, dan sektor ekonomi unggulan
		<b>Strategi 2.2.2a</b> Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi
		<b>Strategi 2.2.3</b> Upaya pengembangan hasil pertanian & perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani/ Nelayan & Masyarakat Pengguna hasil pertanian/perikanan
	<b>Sasaran 2.2.2</b> Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	<b>Strategi 2.2.4a</b> Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS
		<b>Strategi 2.2.4b</b> Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM
		<b>Strategi 2.2.5</b> Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa untuk melakukan inovasi, partisipatif inklusif, transparan serta akuntabel.
		<b>Strategi 2.2.6</b> Upaya peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera khususnya melalui usaha mandiri ibu rumah tangga
<b>Sasaran 2.2.3</b> Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		
<b>Sasaran 2.2.4</b> Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial		
<b>Sasaran 2.2.5</b> Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan		
<b>Sasaran 2.2.6</b> Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga		



<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	<b>Sasaran 2.2.7</b> Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	<b>Strategi 2.2.7</b> Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat.
<b>Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan 3</b> Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	<b>Sasaran 3.1</b> Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	<b>Strategi 3.1</b> Upaya mensinkronkan rencana tata ruang dengan realisasi pembangunan
	<b>Sasaran 3.2</b> Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	<b>Strategi 3.2</b> Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni
	<b>Sasaran 3.3</b> Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	<b>Strategi 3.3</b> Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar siap, tangguh dan sadar akibat bencana alam
	<b>Sasaran 3.4</b> Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	<b>Strategi 3.4</b> Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
<b>Misi 4 Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif</b>		
<b>Tujuan 4:</b> Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih & efektif	<b>Sasaran 4.1</b> Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	<b>Strategi 4.1</b> Upaya ekstensi dan intensifikasi sumber PAD seperti penggalian potensi transaksi perdagangan dan ekonomi berbasis elektronik
	<b>Sasaran 4.2</b> Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	<b>Strategi 4.2</b> Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
	<b>Sasaran 4.3</b> Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	<b>Strategi 4.3a</b> Upaya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan sistem yang terintegrasi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pelaporan
		<b>Strategi 4.3b</b> Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh SKPD berdasar standar akuntansi pemerintah
	<b>Strategi 4.3c</b> Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
	<b>Sasaran 4.4</b> Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<b>Strategi 4.4</b> Upaya pengembangan kinerja sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih & berintegritas
	<b>Sasaran 4.5</b> Berkembangnya profesionalitas ASN	<b>Strategi 4.5</b> Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit
<b>Sasaran 4.6</b> Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	<b>Strategi 4.6</b> Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana & prasarana IT yang memadai	
		<b>Strategi 4.7</b> Percepatan dalam koordinasi dan kolaborasi pengembangan e-government yang terintegrasi
<b>Misi 5 Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis</b>		
<b>Tujuan 5</b> Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dan berkepribadian luhur	<b>Sasaran 5.1</b> Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama	<b>Strategi 5.1</b> Pengarutamaan nilai-nilai pancasila dan agama dalam bidang pendidikan sejak usia dini
	<b>Sasaran 5.2</b> Mengembangkan seni budaya Banjar & seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar	<b>Strategi 5.2</b> Upaya mendorong pengembangan kelompok budaya dan seni khas Banjar secara berkelanjutan secara nasional maupun internasional



Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	<b>Sasaran 5.3</b> Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	<b>Strategi 5.3</b> Upaya fasilitasi peran pemuda dan santri yang berkinerja tinggi dalam seni budaya dan olah raga
	<b>Sasaran 5.4</b> Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat	<b>Strategi 5.4</b> Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional
		<b>Strategi 5.5</b> Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Banjar yaitu:

- 2022 Peningkatan kualitas SDM khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam koridor karakter masyarakat yang agamis.
- 2023 Kemandirian ekonomi rakyat dengan dukungan SDM berkualitas serta Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan baik sebagai penunjangnya.
- 2024 Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan Ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan.
- 2025 Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan hasil reformasi birokrasi dan ekonomi hijau lingkungan dengan dukungan pemenuhan infrastruktur penunjangnya.
- 2026 Pembentukan karakter masyarakat yang religius agamis dalam mendukung SDM yang berkualitas dan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

#### Prioritas Daerah

- Misi 1 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia, memiliki sasaran dan program prioritas sebagai berikut :
  - 1) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 2) Sasaran Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengelolaan Pendidikan
  - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Program Pengembangan Kurikulum
  - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 3) Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat, Programnya adalah :
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - Program Pengembangan Ekspor
  - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 4) Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 5) Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, Programnya adalah :
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - Program Perlindungan Perempuan
  - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Misi 2 : Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan, sasaran dan program prioritas sebagai berikut :
- 1) Sasaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Penyelenggaraan Jalan
  - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - Program Pengelolaan Pelayaran
- 2) Sasaran Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan, Programnya adalah :



- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Program Penyuluhan Pertanian
  - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - Program Perizinan Usaha Pertanian
  - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 3) Sasaran Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
  - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Program Pemasaran Pariwisata
- 4) Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Program Penempatan Tenaga Kerja
  - Program Perencanaan Tenaga Kerja
  - Program Hubungan Industrial
- 5) Sasaran Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - Program Pengembangan UMKM
- 6) Sasaran Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Program Penyuluhan Pertanian
  - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - Program Perizinan Usaha Pertanian
  - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 7) Sasaran Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pemberdayaan Sosial
  - Program Rehabilitasi Sosial
  - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Program Penanganan Bencana
- 8) Sasaran Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Peningkatan Kerjasama Desa
  - Program Administrasi Pemerintahan Desa
  - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
  - Program Penataan Desa
- 9) Sasaran Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - Program Pengendalian Penduduk
- 10) Sasaran Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - Program Pengembangan Pemukiman
  - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
  - Program Penataan Bangunan Gedung
  - Program Penyelenggaraan Jalan



- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, sasaran dan program prioritas sebagai berikut :
  - 1) Sasaran Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah, programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    - Program Pengelolaan Izin Lokasi
    - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
    - Program Penatagunaan Tanah
    - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
    - Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  - 2) Sasaran Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Pengelolaan Persampahan
    - Program Kawasan Permukiman
    - Program Pengembangan Perumahan
    - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
    - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - 3) Sasaran Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan, Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan, Programnya adalah:
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Penanggulangan Bencana
  - 4) Sasaran Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
    - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
    - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
    - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    - Program Pengelolaan Persampahan



- Misi 4 : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif, sasaran dan program prioritas sebagai berikut :
  - 1) Sasaran Terselenggaranya Reformasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
    - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 2) Sasaran Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Pendaftaran Penduduk
    - Program Pencatatan Sipil
    - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    - Program Promosi Penanaman Modal
    - Program Pelayanan Penanaman Modal
    - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    - Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
    - Program Pembinaan Perpustakaan
    - Program Pengelolaan Arsip
    - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
    - Program Perizinan Penggunaan Arsip
    - Program Perekonomian dan Pembangunan
    - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
    - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 3) Sasaran Terselenggaranya Reformasi dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
    - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 4) Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Programnya adalah :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 5) Sasaran Berkembangnya Profesional ASN, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Kepegawaian Daerah
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 6) Sasaran Berkembangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - Program Aplikasi Informatika
  - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- Misi 5 : Penguatan Karakter Masyarakat yang Religius, Berakhlak baik dan Berkepribadian Luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang Tertib, Aman dan Demokratis, sasaran dan program prioritas sebagai berikut :
- 1) Sasaran Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 2) Sasaran Berkembangnya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminkan Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengembangan Kebudayaan
  - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - Program Pembinaan Sejarah
- 3) Sasaran Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri dalam Memajukan Olahraga, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
  - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Sasaran Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Masyarakat, Programnya adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum



- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 terdapat 138 Program, 281 Kegiatan dan 845 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.1.842.067.827.694,-. Untuk RKPD Perubahan Tahun 2024 terdapat 139 Program, 282 Kegiatan dan 863 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.892.569.617.752,- yang terinci pada tabel berikut ini :

**Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen RKPD Tahun 2024 Sesuai Urusan**

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024 (Rp)	RKPD-P 2024 (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	3	7	7	101	101	733.869.905.693,00	688.165.214.212	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	4	10	10	55	51	418.017.174.827,00	316.079.415.393	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							206.159.289.682,00	206.645.820.682	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	14	14	46	53	379.214.153.917,00	368.375.710.126	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	8	8	16	16	42.959.097.584,00	37.742.294.364	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	10	10	37	36	21.599.622.062,00	20.914.628.062	Satuan Polisi Pamong Praja



No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024 (Rp)	RKPD-P 2024 (Rp)	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							25.734.615.064,00	23.803.425.264	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.389.895.423,00	13.510.406.423	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4	4	7	7	30	30	23.792.485.959,00	22.155.423.750	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	8	8	15	15	12.453.969.443,00	11.973.969.443	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	11	11	12	12	1.334.741.000,00	1.324.891.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	7	7	12	12	12.602.311.771,00	12.470.681.471	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	6	6	511.708.100,00	721.708.100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	9	12	12	29	29	50.867.874.737,00	51.290.153.457	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							12.805.813.108,00	6.816.163.500	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	3	5	5	8	8	11.483.262.751,00	11.483.262.751	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	4	20	20	191.855.594.148,00	191.556.841.858	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	6	6	11	11	8.714.729.300,00	8.423.024.300	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	11	11	27	27	18.128.478.967,00	17.723.911.831	Dinas Perhubungan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2	3	3	12	12	19.974.180.830,00	19.675.917.830	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	7	8	8	13	13	14.263.877.285,00	14.250.694.785	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	5	5	11	11	15.194.240.908,00	11.744.240.908	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	2	7	7	9	9	18.617.572.212,00	18.804.064.522	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	4	4	594.510.500,00	594.510.500	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian



No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024 (Rp)	RKPD-P 2024 (Rp)	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2	2	5	5	87.013.800,00	87.013.800	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	6	6	8	8	2.140.599.400,00	1.897.913.400	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	3	3	7	7	8.255.889.361,00	8.252.374.361	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	7	7	13	13	330.893.000,00	334.408.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	11	11	19	20	5.583.428.000,00	5.503.214.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	5	5	10	10	5.548.907.300,00	5.548.907.300	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	16	16	32	32	52.303.202.802,00	50.710.202.802	Dinas Pertanian
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	7	11	12	19	20	2.790.124.946,00	2.725.399.446	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	8	8	2.570.863.600,00	2.328.771.600	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	1	1	206.279.000,00	206.279.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	SEKRETARIAT DAERAH	2	2	8	8	20	20	82.251.344.633,00	79.699.809.633	Sekretariat Daerah
36	SEKRETARIAT DPRD	1	1	3	3	7	7	101.447.855.600,00	93.725.944.599	Sekretariat DPRD
37	PERENCANAAN	2	2	6	6	26	26	15.042.244.856,00	14.995.287.856	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
38	KEUANGAN	3	3	7	7	46	46	317.454.039.013,00	308.874.602.841	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
39	KEPEGAWAIAN	1	1	4	4	22	22	14.421.512.144,00	13.695.764.644	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	2	7	7	6.753.517.500,00	6.994.075.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	4	4	5	5	1.512.705.060,00	750.205.460	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
42	INSPEKTORAT DAERAH	2	2	3	3	11	11	20.046.993.895,00	19.491.795.895	Inspektorat Daerah
								5.091.890.454,00	4.896.890.454	Kecamatan Kertak Hanyar
								597.218.721,00	583.230.600	Kelurahan Manarap Lama
								626.927.171,00	612.939.050	Kelurahan Kertak Hanyar I
								579.132.671,00	565.144.550	Kelurahan Mandar Sari
								2.604.856.444,00	2.594.856.523	Kecamatan Astambul
								5.168.250.392,00	5.152.090.392	Kecamatan Gambut
43	KECAMATAN	5	5	11	11	33	33	756.814.121,00	742.826.000	Kelurahan Gambut
								711.826.421,00	697.838.300	Kelurahan Gambut Barat
								3.367.218.857,00	3.357.218.857	Kecamatan Karang Intan
								10.440.795.995,00	10.079.545.995	Kecamatan Martapura
								706.730.122,00	692.742.000	Kelurahan Sungai Paring
								620.805.000,00	606.817.000	Kelurahan Murung Keraton



No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024	RKPD-P 2024	APBD-P 2024 (Rp)	RKPD-P 2024 (Rp)	
								675.593.122,00	661.605.000	Kelurahan Jawa
								1.549.804.000,00	915.011.000	Kelurahan Keraton
								737.808.800,00	723.820.800	Kelurahan Sekumpul
								636.785.000,00	622.797.000	Kelurahan Tanjung Rema Darat
								624.253.000,00	610.265.000	Kelurahan Pasayangan
								2.847.716.747,00	2.837.723.627	Kecamatan Aranio
								5.200.375.761,00	5.200.375.761	Kecamatan Sungai Tabuk
								857.542.200,00	843.554.400	Kelurahan Sungai Lulut
								3.269.445.173,00	3.253.445.513	Kecamatan Aluh-Aluh
								3.004.569.771,00	3.004.618.771	Kecamatan Mataraman
								2.624.613.272,00	2.614.613.272	Kecamatan Simpang Empat
								3.628.865.249,00	3.628.865.249	Kecamatan Pengaron
								2.631.828.048,00	2.631.853.648	Kecamatan Sungai Pinang
								2.712.328.614,00	2.712.328.614	Kecamatan Beruntung Baru
								3.165.627.872,00	3.165.827.704	Kecamatan Martapura Barat
								2.384.118.699,00	2.312.544.402	Kecamatan Sambung Makmur
								3.291.177.652,00	3.281.177.652	Kecamatan Martapura Timur
								2.421.484.167,00	2.421.509.167	Kecamatan Paramasan
								2.932.664.022,00	2.932.664.022	Kecamatan Tatah Makmur
								2.581.189.967,00	2.581.189.967	Kecamatan Telaga Bauntung
								2.544.268.073,00	2.544.268.073	Kecamatan Cintapuri Darussalam
44	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	5	5	15	15	66.265.271.138,00	65.564.406.138	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
45	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	1	1	15	15	69	71	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>281</b>	<b>282</b>	<b>857</b>	<b>863</b>	<b>3.041.125.510.897,00</b>	<b>2.892.569.617.752</b>	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual



memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:



1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penerapan pelayanan standar pelayanan minimal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kentenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan



Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar; dan

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 188.45/18/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar.

Berikut adalah Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar yang mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024.

### PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR YANG Mendukung PENERAPAN SPM TAHUN 2024

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar		
2.	Pendidikan Dasar				
3.	Pendidikan Kesetaraan				
<b>BIDANG KESEHATAN</b>					
4.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar		
5.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin.				
6.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.				
7.	Pelayanan kesehatan balita.				
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.				
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.				
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.				
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.				
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.				
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif				
<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>					
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan			Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>					
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar		
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar		
<b>BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Program Ketenteraman dan Peningkatan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar		
21.	Pelayanan informasi rawan bencana.				



No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Bencana	Penanggulangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan, Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kabupaten Banjar
<b>BIDANG SOSIAL</b>				
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Banjar
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.			
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.			
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, dan			
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.			

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2025

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

Kebijakan Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM termuat dalam RPJMD.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banjar Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	% Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.01	74.41	0,54
2.	Angka Kemiskinan	2.44 %	2.36	-3,279
3.	Angka Pengangguran	2.73	2.71	-0,737
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4.35	4.76	9,43
5.	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku) (miliar rupiah)	Rp. 38.266.000	Rp40.027.390	4,60
6.	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	0.297	0.297	0

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

##### 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan oleh penduduk. Pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah (jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas) dan harapan lama sekolah (jumlah tahun pendidikan yang diharapkan untuk ditempuh oleh anak usia sekolah). Standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai proksi untuk pendapatan.

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024
1	Banjarbaru	81,25	81,65
2	Banjarmasin	79,98	80,53
3	Tabalong	75,43	75,97
4	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>74,66</b>	<b>75,19</b>
5	tanah Bumbu	73,86	74,50
6	<b>Banjar</b>	<b>74,01</b>	<b>74,41</b>
7	Tapin	73,52	74,06
8	Hulu Sungai Selatan	73,21	73,95
9	Balangan	72,97	73,83
10	Tanah Laut	72,98	73,42
11	Hulu sungai Tengah	72,76	73,33
12	Kota Baru	72,01	72,42
13	Hulu sungai Utara	71,12	71,74
14	Barito Kuala	70,67	71,40

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

Kabupaten Banjar mencatat angka IPM yang cukup baik pada tahun 2023 dan 2024, meskipun masih berada di bawah rata-rata beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Banjar mencapai 74,01, meningkat menjadi 74,41 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Banjar. Meski demikian, IPM Kabupaten Banjar masih sedikit lebih rendah



dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan, yang tercatat sebesar 74,66 pada tahun 2023 dan naik menjadi 75,19 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Kalimantan Selatan, seperti Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar tertinggal cukup jauh. Kota Banjarbaru mencatat IPM tertinggi, yaitu 81,25 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 81,65 pada tahun 2024. Kota Banjarmasin berada di peringkat kedua dengan IPM sebesar 79,98 pada tahun 2023 dan naik menjadi 80,53 pada tahun 2024. Keunggulan Banjarbaru dan Banjarmasin ini mencerminkan keberhasilan mereka dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, serta pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Dibandingkan dengan kedua kota ini, IPM Kabupaten Banjar masih tertinggal hampir 7 poin, menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam ketiga dimensi pembangunan manusia.

Selain itu, dibandingkan dengan kabupaten Tabalong, yang mencatat angka IPM sebesar 75,43 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 75,97 pada tahun 2024, Kabupaten Banjar juga masih tertinggal. Tabalong berada di atas rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kabupaten tersebut lebih maju dibandingkan Kabupaten Banjar. Hal ini mengindikasikan bahwa ada potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di Kabupaten Banjar untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakatnya.

Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang memiliki IPM lebih rendah, Kabupaten Banjar menunjukkan performa yang cukup baik. Sebagai contoh, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat IPM sebesar 71,12 pada tahun 2023 dan naik menjadi 71,74 pada tahun 2024, menjadikannya salah satu kabupaten dengan IPM terendah di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki IPM sebesar 70,67 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 71,40 pada tahun 2024. Kedua kabupaten ini tertinggal lebih dari 2 poin dibandingkan Kabupaten Banjar, mencerminkan ketertinggalan dalam akses pendidikan dan standar hidup masyarakatnya. Selain itu, Kabupaten Banjar juga lebih unggul dibandingkan kabupaten seperti Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut, yang memiliki IPM di kisaran 72-73. Sebagai contoh, Hulu Sungai Tengah mencatat IPM sebesar 72,76 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 73,33 pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar berada dalam posisi yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dibandingkan beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan.

Meskipun peningkatan IPM Kabupaten Banjar dari 2023 ke 2024 terlihat positif, angka ini menunjukkan tantangan signifikan karena masih dibawah dari Rata-rata IPM Kalimantan Selatan. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar telah dilaksanakan dengan maksimal dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini. Pemerintah Kabupaten Banjar berperan strategis dalam pelaksanaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam sektor pendidikan, pemerintah melakukan perluasan akses ke layanan pendidikan



dengan membangun fasilitas sekolah, menyediakan program biaya personil peserta didik, dan melaksanakan program pendidikan kesetaraan guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan teknologi pembelajaran. Di bidang kesehatan, peran pemerintah daerah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, penyelenggaraan program UHC sampai 98%, serta edukasi preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung peningkatan standar hidup layak dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberian bantuan sosial. Dengan perencanaan yang inklusif dan alokasi anggaran yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan, Kabupaten Banjar mampu menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan daerah secara keseluruhan.

### 2.1.2. Angka Kemiskinan

Wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan tingkat pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Angka ini menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana semakin rendah angka penduduk miskin, semakin baik kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Capaian Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024
1	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>4,29</b>	<b>4,11</b>
2	Tanah Laut	3,73	3,74
3	Kotabaru	4,32	4,45
4	<b>Banjar</b>	<b>2,44</b>	<b>2,36</b>
5	Barito Kuala	4,6	4,36
6	Tapin	3,19	3,33
7	Hulu Sungai Selatan	4,01	3,38
8	Hulu Sungai Tengah	5,84	5,81
9	Hulu Sungai Utara	6,25	5,75
10	Tabalong	5,77	5,64
11	Tanah Bumbu	4,12	3,41
12	Balangan	5,22	4,87
13	Kota Banjarmasin	4,63	4,58
14	Kota Banjar Baru	3,92	3,79

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

Kabupaten Banjar menunjukkan performa yang sangat baik dalam menekan angka penduduk miskin dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, angka penduduk miskin di Kabupaten Banjar tercatat sebesar **2,44%**, dan angka ini turun menjadi **2,36%** pada tahun 2024. Angka ini tidak hanya jauh di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar **4,29%** pada tahun 2023 dan **4,11%** pada tahun 2024, tetapi juga lebih rendah dibandingkan hampir seluruh kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Banjar dalam memastikan masyarakatnya memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi.



Di sisi lain, wilayah dengan angka penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten **Hulu Sungai Utara**, dengan angka sebesar **6,25%** pada tahun 2023 dan menurun menjadi **5,75%** pada tahun 2024. Angka ini hampir **tiga kali lipat** lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar, mencerminkan adanya tantangan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Hulu Sungai Tengah juga mencatat angka penduduk miskin yang tinggi, yaitu **5,84%** pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi **5,81%** pada tahun 2024. Dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah memiliki angka yang lebih dari dua kali lipat lebih besar, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.

Beberapa wilayah lain menunjukkan angka kemiskinan yang mendekati rata-rata provinsi, seperti Kota Banjarmasin yang mencatat angka **4,63%** pada tahun 2023 dan turun menjadi **4,58%** pada tahun 2024. Meskipun Kota Banjarmasin adalah pusat perekonomian provinsi, angka kemiskinan ini tetap hampir **dua kali lipat lebih tinggi** dibandingkan Kabupaten Banjar. Kabupaten **Tanah Laut** memiliki angka penduduk miskin sebesar **3,73%** pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi **3,74%** pada tahun 2024, sementara Kabupaten **Tapin** mencatat angka **3,19%** pada tahun 2023 dan **3,33%** pada tahun 2024. Kedua wilayah ini masih menunjukkan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar, meskipun cenderung lebih baik dibandingkan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan. Kabupaten **Balangan**, misalnya, mencatat penurunan angka penduduk miskin dari **5,22%** pada tahun 2023 menjadi **4,87%** pada tahun 2024. Penurunan yang serupa juga terlihat di Kota Banjarbaru, di mana angka kemiskinan menurun dari **3,92%** pada tahun 2023 menjadi **3,79%** pada tahun 2024. Namun, meskipun ada tren positif, angka di wilayah-wilayah ini masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar, yang terus mempertahankan angka kemiskinan yang sangat rendah. Untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar, diterapkan tiga strategi utama, yaitu:

- Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, pasar murah, bedah rumah tidak layak huni, serta pemberian bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), termasuk kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, diberikan pula bantuan jaminan kesehatan (PBI APBD), disertai dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur publik, seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi, agar masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar akibat buruknya infrastruktur. Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dilakukan melalui pengelolaan pasar dan kebijakan stok pangan.
- Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai upaya, seperti penyediaan lapangan kerja berbasis padat karya, pemberian



bantuan bagi individu maupun kelompok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan. Strategi ini juga mencakup pengembangan kapasitas UMKM, peningkatan akses pasar, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM, serta penguatan akses ke lembaga keuangan formal, baik bank maupun non-bank, dengan melibatkan kerja sama bersama dunia usaha.

- Strategi ketiga adalah penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air layak minum. Selain itu, dilakukan pula peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur jalan. Pemanfaatan data DTKS/P3KE digunakan untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan secara akurat dan mengembangkan kebijakan yang spesifik guna mengatasi kebutuhan di wilayah tersebut.

Dengan penerapan ketiga strategi tersebut, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, menjadi kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, Kabupaten Banjar dapat mengurangi disparitas sosial-ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat

### 2.1.3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran adalah persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja di suatu daerah. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Capaian Angka Pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024
1	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>4,29</b>	<b>4,11</b>
2	Tanah Laut	3,73	3,74
3	Kotabaru	4,32	4,45
4	<b>Banjar</b>	<b>2,44</b>	<b>2,36</b>
5	Barito Kuala	4,6	4,36
6	Tapin	3,19	3,33
7	Hulu Sungai Selatan	4,01	3,38
8	Hulu Sungai Tengah	5,84	5,81
9	Hulu Sungai Utara	6,25	5,75
10	Tabalong	5,77	5,64
11	Tanah Bumbu	4,12	3,41
12	Balangan	5,22	4,87
13	Kota Banjarmasin	4,63	4,58
14	Kota Banjar Baru	3,92	3,79

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

Kabupaten Banjar menonjol sebagai wilayah dengan angka pengangguran terendah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 2,44% dan 2,36%. Angka ini jauh di bawah rata-rata provinsi yang tercatat sebesar 4,29% pada tahun 2023 dan 4,11% pada tahun 2024, menunjukkan



keberhasilan Kabupaten Banjar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencatat angka pengangguran tertinggi sebesar 6,25% pada tahun 2023 dan 5,75% pada tahun 2024, perbedaan ini sangat mencolok. Bahkan dengan Kabupaten/Kota yang mendekati rata-rata provinsi, seperti Kota Banjarmasin yang mencatat angka pengangguran 4,63% pada tahun 2023 dan 4,58% pada tahun 2024, Kabupaten Banjar tetap jauh lebih unggul. Tren positif Kabupaten Banjar juga terlihat dibandingkan daerah lain dengan angka pengangguran mendekati, seperti Tanah Laut dengan 3,73% pada tahun 2023 dan 3,74% pada tahun 2024.

Adapun usaha peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam upaya menurunkan angka pengangguran adalah dengan:

- Melaksanakan peningkatan kapasitas dari angkatan kerja .Peningkatan kapasitas angkatan kerja dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi teknis, keterampilan, dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan ini mencakup berbagai sektor seperti teknologi, manufaktur, pertanian, pariwisata, dan layanan. Pelatihan berbasis kompetensi juga dirancang agar peserta mampu mendapatkan sertifikasi yang diakui, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, pelatihan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu juga diberikan untuk membantu tenaga kerja lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
- Melaksanakan penyediaan lapangan kerja melalui pelaksanaan Job Fair. Penyelenggaraan Job Fair menjadi salah satu langkah strategis untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam Job Fair, perusahaan dapat langsung melakukan wawancara awal atau bahkan proses seleksi lebih lanjut terhadap calon tenaga kerja. Selain itu, Job Fair juga memberikan akses informasi kepada pencari kerja terkait peluang kerja yang tersedia, kualifikasi yang dibutuhkan, dan jenis pekerjaan yang sedang diminati di pasar kerja. Untuk meningkatkan efektivitas, pelaksanaan Job Fair dilakukan secara rutin, baik dalam format fisik maupun virtual, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pencari kerja di berbagai wilayah.

Melaksanakan pendampingan ataupun mediasi antara pihak perusahaan dan pekerja. Dalam upaya menjaga hubungan industrial yang harmonis, pemerintah atau pihak terkait melakukan pendampingan dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Pendampingan ini mencakup pemberian edukasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta pemberian solusi yang adil dan transparan dalam setiap kasus yang dihadapi. Proses mediasi dilakukan secara profesional dengan melibatkan mediator yang kompeten, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Langkah ini tidak hanya menciptakan hubungan kerja yang kondusif, tetapi juga mendorong produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.



#### 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika kegiatan ekonomi suatu daerah, apakah berkembang, stagnan, atau menurun.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Pertumbuhan Ekonomi 2020	Pertumbuhan Ekonomi 2021	Pertumbuhan Ekonomi 2022	Pertumbuhan Ekonomi 2023**	Pertumbuhan Ekonomi 2024**
1	Kota Banjarmasin	-1,91	3,41	5,11	-	-
2	Kota Banjarbaru	6,92	-1,88	3,32	-	-
3	Kabupaten Banjar	-1,96	3,21	4,48	4,35	4,76
4	Kabupaten Tanah Laut	-1,99	3,47	5,12	-	-
5	Kabupaten Tapin	-1,49	3,41	-	-	-
6	Kabupaten Tanah Bumbu	3,63	-1,46	5,45	-	-
7	Kabupaten Kotabaru	-1,88	3,35	4,58	-	-
8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	-1,19	4,18	-	-	-
9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-1,01	3,01	3,93	-	-
10	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-0,67	-	-	-	-
11	Kabupaten Balangan	-2,47	3,27	5,24	-	-
12	Kabupaten Tabalong	-2,62	-	-	-	-
13	Kabupaten Barito Kuala	-1,06	3,17	3,59	-	-
14	Provinsi Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada Tahun 2024 sebesar 4,76% mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebesar 4,35%%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,05%. Pada laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 komponen/lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten banjar yang paling tinggi disumbangkan oleh kategori pertanian sebesar 15,02%\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara), kategori pertambangan sebesar 20,82%\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara), dan kategori perdagangan sebesar 14,78%\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara). PDRB ADHB Tahun 2024 Kabupaten Banjar sebesar Rp 24.042.010.000.000,-\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara) dan PDRB ADHK Tahun 2024 sebesar Rp13.829.330.000.000,-\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan didorong oleh sektor-sektor utama yaitu pertanian, pertambangan, dan perdagangan yang menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Sektor pertanian mengalami kenaikan paling tinggi dari sekitar 2% menjadi sekitar 5% yang didukung oleh data Kerangka Sampel Area (KSA) yang menunjukkan peningkatan produksi pertanian.

Sektor pertambangan dan penggalan juga mengalami kenaikan, meskipun dalam angka yang relatif kecil. Dan sektor perdagangan yang merupakan *Commodity Flow* dari sektor-sektor lainnya, termasuk sektor utama juga mengalami kenaikan dan tetap menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh sebagai berikut:

- Kenaikan Luas Panen



Tidak adanya serangan hama tungro dan kekeringan yang terjadi pada tahun 2023 menjadikan tahun 2024 sebagai periode yang lebih baik bagi para petani. Hal ini mendorong banyak petani untuk kembali menanam padi pada tahun 2024.

- Kenaikan Produktivitas Tanaman Pangan Padi  
Kondisi cuaca yang lebih mendukung serta rendahnya intensitas serangan hama berkontribusi pada peningkatan hasil produksi padi yang lebih baik secara rata-rata di Kabupaten Banjar.
- Kenaikan Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura  
Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi tanaman perkebunan dan hortikultura yaitu seperti pisang, jeruk, cabai, serta komoditas lainnya yang menunjukkan hasil yang sangat baik pada tahun 2024.
- Peningkatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)  
Pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kenaikan hasil produksi pertanian

#### 2.1.5. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)

Pendapatan per kapita adalah indikator ekonomi yang mencerminkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun. Indikator ini diperoleh dengan membagi nilai total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita sering kali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana semakin tinggi nilai pendapatan per kapita, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap individu.

**PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Rp. Triliun/T)**

PDRB	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
ADHB	16,53 T	17,93 T	21,07 T	22,63 T	24,04 T
ADHK	11,73 T	12,10 T	12,65 T	13,20 T	13,82 T

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025

**PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Rupiah)**

PDRB	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
ADHB	29.292.639	31.307.766	36.189.177	38.265.344	40.027.390
ADHK	20.794.623	21.138.293	21.728.510	22.318.055	23.024.366

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Banjar

**PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.917,83	3.008,16	3.176,26	2.360,95	3.610,81
B	Pertambangan dan Penggalian	2.231,37	2.884,09	4.860,82	4.990,45	5.006,36
C	Industri Pengolahan	1.130,20	1.223,63	1.321,49	1.347,08	1.463,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,25	27,11	29,45	32,30	34,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,74	42,12	47,70	51,79	54,39
F	Konstruksi	1.732,04	1.855,07	2.020,99	2.205,43	2.378,84



G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.419,90	2.568,43	2.882,38	3.304,90	3.553,62
H	Transportasi dan Pergudangan	792,30	819,43	903,64	1.047,65	1.134,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	549,31	576,06	632,35	701,36	778,22
J	Informasi dan Komunikasi	676,07	740,45	800,48	870,06	950,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	376,80	403,65	414,07	442,93	476,58
L	Real Estat	596,43	643,28	683,46	733,85	788,81
M,N	Jasa Perusahaan	62,26	65,03	71,46	81,06	90,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.270,84	1.261,90	1.290,26	1.347,08	1.474,74
P	Jasa Pendidikan	988,69	1.039,07	1.086,67	1.163,98	1.239,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	426,49	475,24	519,10	567,30	606,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	291,87	302,19	330,69	359,24	398,77
	PDRB	16.527,38 T	17.934,87 T	21.071,26 T	22.634,41 T	24.042,01 T

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025

**PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)**

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.984,09	2.003,37	2.028,28	2.064,66	2.181,02
B	Pertambangan dan Penggalian	2.116,52	2.232,11	2.391,22	2.464,79	2.544,20
C	Industri Pengolahan	753,73	784,37	815,55	834,08	869,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,04	15,73	16,95	18,39	19,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,96	29,19	30,90	32,38	33,54
F	Konstruksi	1.174,93	1.220,19	1.267,09	1.336,71	1.394,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.581,03	1.617,60	1.725,67	1.839,85	1.930,08
H	Transportasi dan Pergudangan	560,92	573,43	602,44	648,68	677,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	378,51	386,98	417,05	452,58	487,07
J	Informasi dan Komunikasi	514,46	559,59	593,89	630,96	677,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	246,47	251,62	249,43	262,73	277,90
L	Real Estate	433,61	458,11	479,60	502,35	521,72
M,N	Jasa Perusahaan	37,82	38,95	41,35	44,59	47,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	784,25	768,45	770,67	789,55	815,17
P	Jasa Pendidikan	655,84	672,54	693,43	723,93	763,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,54	306,17	325,56	343,58	360,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	186,96	190,82	202,42	211,59	228,23
	PDRB	11.732,66 T	12.109,22 T	12.651,49 T	13.201,40 T	13.829,33 T

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 Kabupaten Banjar sebesar Rp24.042.010.000.000.-\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara) mengalami kenaikan dibandingkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 sebesar Rp22.634.410.000.000.-\* (\*Angka Sementara). Pada tahun 2024 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar sebesar Rp13.829.330.000.000.-\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara) juga mengalami kenaikan dibandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023 sebesar Rp13.201.400.000.000.-\* (\*Angka Sementara).



PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 Kabupaten Banjar sebesar Rp40.027.390.-\*\* (\*\*Angka Sangat Sementara) meningkat dibandingkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 sebesar Rp38.265.344.-\* (\*Angka Sementara).

Meskipun Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan. Untuk meningkatkan kinerja PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Banjar yaitu ada beberapa langkah yang dapat diambil antara lain dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, memperbesar produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga menjadi faktor penting. Upaya lain yang dapat dilakukan termasuk peningkatan investasi asing, pengembangan inovasi teknologi, kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan volume perdagangan, serta diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi.

#### 2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan distribusi pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu wilayah. Ketimpangan ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya adalah Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang sangat merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama), dan nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi (satu orang memiliki semua pendapatan).

Capaian Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2023	2024
1	Provinsi Kalimantan Selatan	0.313	0,302
2	Kabupaten Tanah Laut	0.259	-
3	Kabupaten Kotabaru	0.316	-
4	Kabupaten Banjar	0.297	-
5	Kabupaten Barito Kuala	0.312	-
6	Kabupaten Tapin	0.281	-
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0.293	-
8	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0.225	-
9	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0.271	-
10	Kabupaten Tabalong	0.284	-
11	Kabupaten Tanah Bumbu	0.280	-
12	Kabupaten Balangan	0.258	-
13	Kota Banjarmasin	0.370	-
14	Kota Banjarbaru	0.321	-

Sumber : Data Diolah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, 2025

*Gini Ratio* merupakan salah satu data yang penting untuk memahami tingkat kesenjangan pendapatan di daerah. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, dengan mengetahui angka Gini Ratio, kebijakan pembangunan ekonomi, distribusi bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang secara lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diberikan BPS



Kabupaten Banjar, untuk perhitungan **Gini Ratio Tahun 2024 Kabupaten Banjar** belum tersedia. Sehingga data yang ditampilkan merupakan data tahun 2023

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,386%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.a.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,358%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.a.3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72,837%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.a.4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85,467%	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,164%	Dinas Kesehatan	
1.b.2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	88,699%	Dinas Kesehatan	
1.b.4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,09%	Dinas Kesehatan	
1.b.5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,586%	Dinas Kesehatan	
1.b.6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,365%	Dinas Kesehatan	
1.b.7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,670%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.8		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	73,069%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	82,721%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1.b.10		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,867%	Dinas Kesehatan	
1.b.11		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.12		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.b.13		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.b.14		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
1.c.01		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	41,103%	DPUPRP	
1.c.02		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	66,683%	DPUPRP	
1.c.03		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,818%	DPUPRP	
1.c.04	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	76,253%	DPUPRP	
1.c.05		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,526%	DPUPRP	
1.c.06		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPRP	
1.c.07		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	52,171%	DPUPRP	
1.c.08		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPRP	
1.c.09		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPRP	
1.d.01		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	DPRKPLH & BPBD	
1.d.02		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0%	DPRKPLH	
1.d.03	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	12,766%	DPRKPLH	
1.d.04		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	85,71%	DPRKPLH	
1.d.05		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	94,943%	DPRKPLH	
1.e.01		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
1.e.02		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85,71%	Satpol PP	
1.e.03	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
1.e.04		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
1.e.05		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.e.06		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	96,88%	DPKP	
1.e.07		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9 Menit 13 Detik	DPKP	
1.f.01	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	75,815%	DSP3AP2KB	
1.f.02		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DSP3AP2KB	
2.a.01		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.02		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,959%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.03		Tingkat produktifitas tenaga kerja	44.741.792,087	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.04	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	35,974%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.05		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	44,931%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.g.01		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,847%	DSP3AP2KB	
2.g.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	DSP3AP2KB	
2.g.03		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,562	DSP3AP2KB	
2.h.01	Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	160,92%	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
2.i.01		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUPRP & DPMPSTSP	
2.i.02		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DPUPRP	
2.i.03	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPRP & DPMPSTSP	
2.i.04		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	DPUPRP	
2.i.05		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	DPUPRP & Kantor Pertanahan (BPN)	
2.i.06		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	DPUPRP	
2.j.01		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	74,59	DPRKPLH	
2.j.02	Lingkungan Hidup	Terlaksanakannya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	72,653%	DPRKPLH dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.j.03		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3,333%	DPRKPLH	
2.k.1.01	Administrasi Kependudukan	Perekaman KTP Elektronik	99,144%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.k.1.02	dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usi 01 - 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50,58%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.03		Kepemilikan akta kelahiran	95,52%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.04		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	43,48%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.l.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0%	<a href="https://idm.kemendes.go.id/">https://idm.kemendes.go.id/</a>	
2.l.02		Persentase peningkatan status desa mandiri	56,10%	<a href="https://idm.kemendes.go.id/">https://idm.kemendes.go.id/</a>	
2.m.01	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	2,16	DSP3AP2KB	
2.m.02		Persentase pemakaian kontrasepsi modern ( <i>modern contraceptive prevalence rate / mCPR</i> )	76,526%	DSP3AP2KB	
2.m.03		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmeet need</i> )	5,36%	DSP3AP2KB	
2.n.01	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,925	Dinas Perhubungan	
2.n.02		V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,36	Dinas Perhubungan	
2.o.01	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.o.02		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85,714%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.o.03		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjjar	
2.p.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,610%	DKUMPP	
2.p.02		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	16,711%	DKUMPP	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	8,47%	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
2.r.01	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,04%	Disbudporapar	
2.r.02		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,988%	Disbudporapar	
2.r.03		Peningkatan Prestasi Olahraga	23 Medali	Disbudporapar	
2.s.01	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.s.02		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	57,36%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Disbudporapar	
2.v.01	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.v.02		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,8	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.01	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	78,96%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.02		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		publik dan kesejahteraan rakyat			
3.a	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	99,107%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
3.b.01		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-50,410%	Disbudporapar	
3.b.02		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	146,318%	Disbudporapar	
3.b.03	Pariwisata	Tingkat hunuan akomodasi	36,41%	Disbudporapar	
3.b.04		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,236%	BPS Kab.Banjara	
3.b.05		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,483%	BPKPAD	
3.c.01		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	392,648 ton/hektar	Dinas Pertanian	
3.c.02	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0%	Dinas Pertanian	
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	100%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	100%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	100%	Pemerintah Kab.Banjara	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	100%	Pemerintah Kab.Banjara	
3.d	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	Pemerintah Kab.Banjara	
3.f.01		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DKUMPP	
3.f.02	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi pupuk	39,725%	DKUMPP	
3.f.03		Persentase alat – alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	78,365%	DKUMPP	
3.g.01		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0%	DKUMPP	
3.g.02		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	52,71%	DKUMPP	
3.g.03		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	5,856%	DKUMPP	
3.g.04	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DKUMPP	
3.g.05		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	DKUMPP	
3.g.06		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DKUMPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.h	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2025

## 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan & Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,739%	BPKPAD	
		Rasio PAD	10,559%	BPKPAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i> )	62,63%	BPKPAD	
		Opini Laporan Keuangan	10	BPKPAD	
2	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	43,997%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	54,702%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	48,615%	Pemerintah Kabupaten Banjar	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	74,701%	BKPSDM	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20,516%	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	68,764%	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	0,5731%	BPKPAD	
		Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD	26,1594%	BPKPAD	
		<i>Assets Management</i>	1	BPKPAD	
			1	BPKPAD	
			1	BPKPAD	
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	28,712%	BPKPAD			
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang Sumber Data yang Tersedia untuk Pelayanan	86,911%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	
		Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	BPKPAD	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2025

## 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### A. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banjar yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator



keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau Indikator Kinerja Sasaran RPJMD.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun untuk menyampaikan capaian atas realisasi target indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021-2026, dimana telah dilaksanakan pengukuran secara mandiri terhadap 6 Tujuan dengan 11 indikator, serta 20 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/402/KUM/2024 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar.

Berikut adalah penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan dalam Reviu RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

a. Target Tujuan dalam RPJMD

Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan dalam dokumen Reviu RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, ada 6 (enam) Tujuan dengan 11 (sebelas) Indikator Tujuan didalamnya, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

**Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Banjar**

No	Tujuan	Indikator	Target 2024
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,16
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,64
2	Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,92-6,05
		Pendapatan Per Kapita	23.405.521
3	Terwujudnya penurunan kemiskinan dan Ketimpangan distribusi pendapatan	Persentase Penduduk miskin	2,41
		Indeks Gini	0,296
4	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,95
5	Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5
		Indeks Inovasi Daerah	54,2
6	Terwujudnya masyarakat religius yang bertoleransi	Rasio Kriminalitas	7,67
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,85

b. Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Bupati Banjar.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan kepala Daerah tahun 2024, target kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2024 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,47	DINKES
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	63,01	DISDIK
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,09	DKUMPP
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,73	DKPP
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,473	DINSOSP3AP2KB
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,24	
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	DISHUB/ DPUPRP
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2,5	DISTAN
		LPE sub sektor perikanan	3,88	DKPP
		Nilai Tukar Petani (NTP)	114,68	DISTAN,DKPP
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2,31	DKUMPP
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.500.000	DISBUDPORAPAR
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72	DISNAKERTRANS
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	42,34	DKUMPP
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,2	
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,734	DPMD
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	79,25	DPUPRP
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	DPUPRP
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,04	DPRKPLH
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	132,94	BPBD



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	BPKPAD
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	SETDA
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	76,32	SETDA/BA PPEDALIT BANG
		Nilai Opini BPK	WTP	BPKPAD
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,12	ITDA
		Indeks SPBE	2,92	DKISP
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65,5	BPKPSDM
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	BAKESBANGPOL

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Banjar Tahun 2024

c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk 11 (sebelas) indikator Tujuan yang diperjanjikan pada tahun 2024, dari hasil pengukuran didapatkan nilai realisasi sebagaimana berikut:

**Realisasi Indikator Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Banjar**

No	Tujuan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,16	74,41
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,64	92,49
2	Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,92-6,05	4,43
		Pendapatan Per Kapita	23.405.521	23.024.366
3	Terwujudnya penurunan kemiskinan dan Ketimpangan distribusi pendapatan	Persentase penduduk miskin	2,41	2,36
		Indeks Gini	0,296	N/A
4	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,95	74,59
5	Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	78,53
		Indeks Inovasi Daerah	54,2	57,75
6	Terwujudnya masyarakat religius yang bertoleransi	Rasio Kriminalitas	7,67	15
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,85	74,01

Sampai laporan ini disusun dari 11 (sebelas) target indikator tujuan yang ditetapkan untuk dipenuhi pada tahun 2024, baru ada 10 (Sepuluh) indikator yang nilai realisasinya bisa didapatkan, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yakni Indeks Gini masih belum bisa didapatkan karena belum dikeluarkan atau dipublikasi secara



resmi oleh BPS. Untuk indikator yang belum keluar nilai realisasinya, diperkirakan nilainya akan bisa didapatkan pada bulan Maret tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan pencapaian target RPJMD ditahun 2024 telah berjalan cukup optimal yang ditandai dengan terpenuhinya mayoritas target 53 indikator Tujuan pada tahun 2024. Pada Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, Tujuan ini dapat dikatakan cukup berhasil yang ditandai dengan tercapainya target pada 53 indikator IPM, dan target indikator IPG yang indikator terpenuhi walau belum bisa mencapai angka 100 persen.

Dari 6 Tujuan dengan total 11 indikator, tercatat ada 6 indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase penduduk miskin, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Ada 4 indikator yang capaiannya masih dibawah target yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Rasio Kriminalitas. Sedangkan untuk 53 indikator Indeks Gini belum bisa didapatkan nilai realisasinya karena belum dipublikasi oleh BPS selaku penanggung jawab ketersediaan data.

Adapun untuk Sasaran Strategis, berdasarkan laporan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab atas pencapaian Sasaran Straategis Kepala Daerah, dari hasil pengukuran terhadap 20 sasaran strategis dengan 28 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2024 maka secara umum realisasi atas 53 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

#### Realisasi Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,47	82,38	99,89
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	63,01	62,72	99,54
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,09	79,72	100,80
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,73	81,54	99,77
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,473	0,53	87,95
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,24	59,20	85,50
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	84,44	103,15
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2,5	6,71	268,40
		LPE sub sektor perikanan	3,88	4,13	106,44
		Nilai Tukar Petani (NTP)	114,68	114,35	99,71
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2,31	4,26	184,42
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.500.000	5.763.538	128,08



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72	2,71	100,37
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	42,34	41,61	98,28
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,2	16,71	109,93
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,734	0,7743	105,49
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	79,25	87,723	110,69
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	94,526	100
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,04	8,58	105,09
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	132,94	118,31	111
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	13,61	340,25
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,67	100,78
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	76,32	67,06	87,87
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,12	3,96	96,12
		Indeks SPBE	2,92	2,87	98,29
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65,5	78,22	119,42
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					119,54

Sumber : diolah dari berbagai data.

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2024 memperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 119,54 persen. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan kesejahteraan, ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan dalam Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).



Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Indeks Kesehatan merupakan indikator atas Sasaran strategis “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, untuk tahun 2024 ditargetkan Indeks Kesehatan Kabupaten Banjar adalah sebesar 82,47 dan setelah akhir periode tahun berjalan didapatkan nilainya realisasinya adalah sebesar 82,38 yang artinya target kinerjanya terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 99,89 persen. Nilai Indeks Kesehatan tahun 2024 ini meningkat pesat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 73,86 yang artinya ada kenaikan sebesar 8,53 persen.

Untuk menghitung Indeks Kesehatan yang merupakan komponen dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ Maks} - AHH \text{ min}} \times 100$$

Dimana untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut:

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

AHH (Angka Harapan Hidup) Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah 73,55 sehingga perhitungan Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kesehatan} &= \frac{73,55 - 20}{85 - 20} \times 100 \\ &= 82,38 \end{aligned}$$



## 2. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ukuran yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir. Dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS), sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf, dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Asumsi yang digunakan adalah kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Kemudian untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren, sumber data pesantren berasal dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Pada tahun 2024 Indeks pendidikan di Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar 63,01 dan setelah akhir tahun didapatkan nilai indeksnya adalah sebesar 62,72 dengan persentase capaian sebesar 99,54 persen.

Dengan langkah perhitungan Indeks Pendidikan sebagai berikut:

i. Indeks Harapan Lama Sekolah

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$IHLS = \frac{13,04 - 0}{18 - 0} = 0,7244$$

ii. Indeks Rata rata Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{7,95 - 0}{15 - 0} = 0,53$$

iii. Indeks Pendidikan

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

$$0,7244 + 0,53$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\quad}{2} \times 100$$

$$= 62,72$$

Jadi realisasi Indeks Pendidikan tahun 2024 adalah = 62,72



### 3. INDEKS DAYA BELI

Indeks daya beli adalah indikator yang mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita. Indeks daya beli adalah cerminan dari standar hidup layak diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (dalam hal ini konsumsi riil per kapita). Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok. Besaran nilai tingkat daya beli (*purchasing power parity*/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Indikator kinerja atas sasaran strategis Meningkatnya daya beli masyarakat adalah Indeks Daya Beli, dimana pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja sebesar 79,09 dan realisasi capaiannya adalah sebesar 79,72 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100,80 persen.

### 4. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.

Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan Indeks Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.



6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan Penduduk.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Indikator-indikator tersebut digabungkan penilaiannya untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sesuai publikasi resmi dari Badan Pangan Nasional, bahwa untuk nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten banjar tahun 2024 realisasinya adalah sebesar 81,54, dimana untuk target indikator tahun 2024 ditetapkan sebesar 81,73 sehingga persentasenya adalah sebesar 99,77 persen.

#### 5. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan beberapa penyesuaian. Di Indonesia, kesetaraan gender diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP.

Indeks Ketimpangan Gender merupakan indeks komposit yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi diwakili oleh dua indikator, yaitu proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun (MHPK20). Selanjutnya, dimensi pemberdayaan diwakili oleh dua indikator, yaitu persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan, dan persentase penduduk laki-laki dan perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA. Kemudian, dimensi pasar tenaga kerja diwakili oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak” dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dimana pada tahun 2024 ditargetkan realisasi atas indikator ini sebesar 0,473 dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 0,530, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 87,95 persen.

#### 6. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Indeks ini menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak merupakan sebuah wawasan baru dalam melihat anak dan mendefinisikan kembali makna anak bagi keluarga dan masyarakat, yaitu anak bukan obyek milik orang tua atau negara.

Konvensi Hak Anak mengajak setiap negara melihat anak sebagai individu manusia yang utuh dan memiliki hak asasi yang melekat dan tidak dapat



diambil oleh siapa pun. Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA- IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I hak sipil dan kebebasan; Klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Klaster IV pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta Klaster V perlindungan khusus.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak” dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA), pada tahun 2024 ditargetkan nilai indeks sebesar 69,24 dan dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didapatkan hasil indeks sebesar 59,2 dengan persentase capaian sebesar 85,5persen.

## 7. INDEKS KONEKTIVITAS

Indeks Konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung melalui jaringan transportasi. Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks konektivitas adalah jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 60% dan sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai sebesar 40%.

Untuk Indeks Konektivitas yang merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas, ditahun 2024 targetnya adalah 81,86, dan dari hasil perhitungan didapatkan nilai indeks ini adalah sebesar 98,95 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 120,88 persen.

Untuk memperoleh nilai persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60%) dengan definisi operasional jalan kabupaten dan desa dengan kondisi mantap adalah jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana dengan rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60\%)} &= \text{Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan desa dalam Kondisi Mantap} \\ &= \frac{653,1 \text{ Km} + 879,46172 \text{ Km}}{781,65 \text{ km} + 1.116,69 \text{ km}} \\ &= \frac{1.532,56 \text{ Km}}{1.898.34 \text{ Km}} \\ &= 80,73 \% \end{aligned}$$

Sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai (40%), yang perhitungannya terdiri atas.



$$\begin{aligned}
 IK1 &= \frac{\text{Jumlah trayek} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}} \\
 &= \frac{12 \times 1}{12} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 IK2 &= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan penyeberangan}} \\
 &= \frac{2 \times 1}{3} \\
 &= 0,67
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Konektivitas Kabupaten} &= (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{bobot angkutan sungai}) \\
 &= (1 \times 70) + (0,67 \times 30) \\
 &= 70 + 20,1 \\
 &= 90,01
 \end{aligned}$$

#### INDEKS KONEKTIVITAS

$$\begin{aligned}
 &= \text{Sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai} \times (40\%) + \text{Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap} \times (60\%) \\
 &= (90,01 \times 40\%) + (80,73 \times 60\%) \\
 &= 36 + 48,44 \\
 &= 84,44
 \end{aligned}$$

#### 8. LPE SUB SEKTOR PERTANIAN

Merupakan pertumbuhan sub sektor pertanian pada produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Banjar atas dasar harga konstan. Penyusunan PDRB untuk Sub Sektor Pertanian Kabupaten Banjar menggunakan pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor pertanian Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya. Meliputi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.

Sasaran strategis Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan diukur dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian. Pada tahun 2024 LPE Sub Sektor Pertanian ditargetkan sebesar 2,5 dan sesuai data yang dipublikasi oleh BPS maka realisasi yang didapat atas target ini adalah sebesar 6,71 persen, sehingga persentase capaiannya adalah sejumlah 268,40 persen.

Cara/metode penghitungan Perhitungan pertumbuhan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikali dengan 100 persen.

#### 9. LPE SUB SEKTOR PERIKANAN

LPE adalah indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu yang



perhitungannya menggunakan indikator PDRB (produk domestik regional bruto). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Perikanan adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor perikanan Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor perikanan tahun sebelumnya.

Sasaran strategis "Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan" salah satu indikatornya diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Perikanan. Pada tahun 2024 target indikator kinerja ini sebesar 3,88 sedangkan dari perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS nilai LPE untuk sektor perikanan ini adalah sebesar 4,13 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 106,44 persen.

#### 10. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP merupakan salah satu indikator relatif yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). BPS sebagai instansi yang mengeluarkan dan mempublikasi NTP baru bisa menyajikan nilai NTP sampai dengan tingkat provinsi, dengan asumsi kondisi NTP provinsi akan mewakili kondisi NTP di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor penunjang yaitu dengan meningkatkan hasil produksi sektor pertanian dalam arti luas. yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan. Dan dari hasil produksi tersebut nantinya untuk menjaga stabilitas harga dan daya saing maka perlu dilakukan sektor pertanian sub. sektor pangan dan hortikultura serta sektor perkebunan dengan memfasilitasi usaha pertanian untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha. Sektor peternakan dengan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

Pada sasaran strategis Meningkatkan keunggulan pertanian dan perikanan dengan indikator Nilai tukar petani (NTP), pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah sebesar 114,35 persen, dengan target yang ditetapkan sebesar 114,68, maka dengan demikian persentase capaiannya adalah sebesar 99,71 persen.

#### 11. LPE SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN.

LPE sektor industri pengolahan adalah persentase pertumbuhan PDRB sub sektor Industri pengolahan yang merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan mencakup kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi



barang jadi atau setengah jadi melalui proses produksi, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik..

Laju pertumbuhan sektor ini dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Jika pertumbuhan positif, berarti sektor ini mengalami ekspansi, sementara jika negatif, berarti mengalami kontraksi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini meliputi:

- Permintaan domestik dan ekspor
- Investasi dan inovasi teknologi
- Harga bahan baku dan energi
- Kebijakan pemerintah dan regulasi industri
- Kondisi ekonomi global dan inflasi

Pada tahun 2024 ditargetkan nilai atas LPE Sektor Industri Pengolahan ini sebesar 2,31, dengan nilai realisasi sebesar 4,26 sehingga persentase capaian pada indikator ini adalah 184,42 persen.

## 12. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Jumlah kunjungan wisatawan adalah Penjumlahan dari wisatawan perhari yang berkunjung ke tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar selama setahun. Sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat kunjungan wisatawan di Kabupaten Banjar mencapai jumlah 5.763.538 jiwa atau mencapai 128,08 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar 4.500.000 jiwa ditahun 2024. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan realisasi penjumlahan dari wisatawan per hari yang berkunjung ke tempat-tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar serta menghadiri event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar seperti event keagamaan, budaya, olahraga, expo, dan event lainnya.

Berikut adalah rincian jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banjar selama tahun 2024:

### Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banjar

No	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah
1	Januari	1.395	3.294.727	3.296.122
2	Februari	364	202.343	202.707
3	Maret	63	189.989	190.052
4	April	364	249.384	249.748
5	Mei	449	259.990	260.439
6	Juni	358	233.110	233.468
7	Juli	63	218.549	218.612
8	Agustus	2.822	204.112	206.934
9	September	76	210.215	210.291
10	Oktober	164	194.696	194.860
11	November	208	144.191	144.399
12	Desember	858	355.048	355.906
		<b>7.184</b>	<b>5.756.354</b>	<b>5.763.538</b>



Jumlah wisatawan lokal yang tercatat berkunjung di Kabupaten Banjar pada tahun 2024 adalah sebanyak 5.756.354, dan 7.184 untuk wisatawan mancanegara sehingga total jumlahnya adalah sebanyak 5.763.538.

### 13. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase dari angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan pada periode tertentu. Angkatan Kerja meliputi semua orang yang berusia kerja dan aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pasar tenaga kerja dimana terjadi supply (penawaran) tenaga kerja melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

*(TPT adalah Indikator dimana nilai semakin kecil maka nilai semakin baik/bagus)*

Pada tahun 2024 sesuai dengan publikasi resmi dari BPS jumlah pengangguran di Kabupaten Banjar tercatat sejumlah 8.604 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 317.696 orang, maka bila angka ini dimasukkan dalam rumus seperti dicantumkan diatas, didapatkan lah angka 2,71 sebagai besaran TPT Kabupaten Banjar ditahun 2024.

Untuk sasaran strategis “Menurunnya tingkat pengangguran” dengan indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” ditargetkan pada tahun 2024 nilainya sebesar 2,72 dan sampai akhir tahun 2024 tercatat nilai TPT nya adalah sebesar 2,71 persen sehingga capaian persentasenya sebesar 100,37 persen.

### 14. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

Persentase koperasi yang berkualitas adalah perbandingan jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha dan aset terhadap jumlah seluruh koperasi aktif. Koperasi dikategorikan berkualitas apabila memenuhi kriteria antara lain melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), volume usaha meningkat, dan nilai aset meningkat.

Pada tahun 2024 tercatat jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset berjumlah 62 koperasi, dari jumlah keseluruhan



koperasi yang aktif 149 koperasi sehingga didapatkan angka 41,61 persen untuk Persentase koperasi yang berkualitas.

Persentase Koperasi Berkualitas adalah target atas sasaran strategis “Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM” pada tahun 2024 targetnya adalah sebesar 42,34 persen, dan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 41.61 persen, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,28 persen.

#### 15. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUUSAHA

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha merupakan perbandingan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha terhadap jumlah usaha mikro keseluruhan.

Menurut Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan (usahanya) serta telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Usaha mikro diklasifikasikan menjadi wirausaha apabila telah memiliki legalitas usaha minimal Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sampai dengan tahun 2024 ini wirausaha berskala mikro tercatat ada penambahan sebanyak 2018 unit dari 9.920 unit ditahun sebelumnya yakni tahun 2023, sehingga jumlah kumulatifnya adalah sebanyak 11.240 Unit ditahun 2024, berbanding total usaha mikro di Kabupaten Banjar yang sebanyak 67.258 unit.

Target untuk indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha tahun 2024 adalah sebesar 15,2 persen dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 16,71 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 109,93 persen.

#### 16. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek-aspek penting pembangunan desa, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Melalui pengukuran ini, desa-desa dapat mengetahui posisi mereka dalam skala pembangunan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Secara pengertian IDM adalah indikator komposit yang mengukur kinerja desa dalam empat aspek utama: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Indikator-indikator ini terdiri dari berbagai sub-indikator yang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan desa. Desa-desa diberi skor berdasarkan kinerja masing-masing aspek, yang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor IDM keseluruhan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan potret dari tingkat keberhasilan desa, agar dapat diketahui pembangunan desa tersebut berhasil atau tidak. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indeks komposit diambil berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKEL).



Adapun tujuan dari indeks Desa Membangun (IDM) yaitu:

1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.

Yang dimaksud dengan status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Yang merupakan status desa ditetapkan 5 (lima) yaitu:

1. Desa Mandiri.
2. Desa Maju.
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa sangat tertinggal.

Hasil perkembangan dari Indeks Desa Membangun yang ada di Pemerintah Kabupaten dari Tahun 2015 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

#### Kriteria IDM

NO	KRITERIA IDM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	31	31	17	7	7	3	0	0	0	0
2	Tertinggal	181	181	115	80	80	49	40	13	0	0
3	Berkembang	63	63	143	187	187	214	214	191	123	54
4	Maju	2	2	2	3	11	11	23	68	123	137
5	Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	5	31	86
<b>JUMLAH</b>		<b>277</b>									

Sumber : Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa (diterbitkan setiap tahun dengan berupa Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)

Untuk sasaran strategis “Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan” yang menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) target indikator kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2024 adalah sebesar 0,734, dan realisasi atas target Indeks desa membangun ini adalah 0,7743 dengan persentase capaian sebesar 105,49 persen.

#### 17. INDEKS INFRASTRUKTUR

Merupakan fasilitas infrastruktur dasar yang dapat diakses rumah tangga meliputi jaringan drainase, akses air minum, sistem air limbah ditambah persentase panjang jalan poros desa dalam kondisi mantap, jaringan irigasi, luas Kawasan strategis dan tersedianya tata bangunan dan lingkungan.

Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

1. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (10%)
2. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (30%)
3. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (25%)
4. Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (35%)

Berikut adalah tabel realisasi atas pengukuran variabel Indeks Infrastruktur:



## Indeks Infrastruktur

Indikator Program	Persentase	Realisasi	Persentase x Realisasi
Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	10%	51,57	5,157
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	30%	100	30
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	25%	100	25
Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	35%	78,76	27,566
Realisasi Indeks Infrastruktur			87,723

Target untuk indikator Indeks infrastruktur pada tahun 2024 adalah sebesar 79,25, adapun nilai indeks yang didapatkan dari hasil pengukuran adalah sebesar 87,723 sehingga persentase atas rata-rata capaiannya adalah sebesar 110,7 persen.

### 18. PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang adalah pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan formulasi perhitungan Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang = 70% (Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang) + 30% (Persentase Ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang).

Persentase kepatuhan terhadap rencana tata ruang dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang. Formulasi perhitungan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang:

$$\frac{\sum \text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\sum \text{Luas Lahan Kabupaten}} \times 100 \%$$

$$= 423.014 \text{ Ha} / 458.900 \text{ Ha}$$

$$= 92,18$$

- Jumlah Luas lahan sesuai peruntukannya = 423.014 Ha
- Jumlah luas lahan kabupaten = 458.900 Ha

2. Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang. Formulasi Perhitungan Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang:

$$\frac{\sum \text{Realisasi koordinasi tentang izin lokasi yang diterbitkan}}{\sum \text{Rencana keg koordinasi tentang izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100$$

Dengan nilai persentase capaian sebesar 100 persen karena semua Ijin yang dikeluarkan telah sesuai dengan tata ruang.

3. Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan yakni :



$$\begin{aligned} &= 70\% \text{ (Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang} \\ &\quad \text{terhadap Rencana Tata Ruang)} + 30\% \text{ (Persentase Ijin} \\ &\quad \text{yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang)} \\ &= (70\% \times 92,18) + (30\% \times 100) \\ &= 64,526 + 30 \\ &= 94,526 \end{aligned}$$

Target atas indikator "Persentase Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang" pada tahun 2024 adalah sebesar 94,526 persen, adapun nilai yang didapatkan dari pengukuran atas target ini adalah sebesar 94,526 dengan persentase capaian sebesar 100 persen, yang didapat dari nilai kesesuaian pemanfaatan ruang dan ijin sesuai tata ruang.

#### 19. PERSENTASE KAWASAN KUMUH.

Pada sasaran strategis "Terciptanya Pemukiman yang Nyaman dan Layak Huni" dengan indikator kinerja berupa Persentase Kawasan Kumuh. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 9,04 dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar 8,58 persen sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 105,09 persen. Metode perhitungan kawasan kumuh ini adalah dengan menghitung luas total kawasan kumuh dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani berbanding dengan luas total kawasan kumuh di Kabupaten Banjar dikalikan 100 persen. Sebagaimana tergambar pada perhitungan dibawah ini:

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Kawasan Kumuh} - (\text{luas kawasan kumuh-total kawasan} \\ &\quad \text{kumuh yang tertangani}) / \text{Luas Permukiman Terbangun} \times 100 \\ &= (343,98 - 69,78) / 3.195,84 \times 100 \\ &= 274,20 / 3195,84 \times 100 \\ &= 8,58 \end{aligned}$$

#### 20. INDEKS RISIKO BENCANA

Indeks Risiko Bencana adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu wilayah rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kejadian lain yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan.

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan,



pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.

Pada tahun 2024 nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar 132,94, dari rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana didapatkan nilai realisasi atas IRB tahun 2024 yakni sebesar 118,31, sehingga persentase capaian kinerja yang didapatkan adalah sebesar 111 persen, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya pemenuhan komponen kapasitas, kerentanan dan ancaman dalam unsur Indeks Risiko Bencana telah cukup berhasil khususnya melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (coping capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.

#### 21. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan daerah” dengan indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada tahun 2024 ditargetkan kenaikan sebesar 4 persen, dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 12,17 dengan persentase capaian 304,25 persen. Hasil tersebut didapat dari perhitungan rata-rata pertumbuhan dari 4 (empat) komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Cara perhitungan untuk indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini adalah dengan mengukur rata-rata pertumbuhan dari 4 (empat) komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Cara menghitung pertumbuhan PAD dari 4 (empat) komponen adalah dengan menghitung realisasi tahun n – realisasi tahun (n-1) dibandingkan dengan realisasi tahun n-1 dikalikan dengan 100%.

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>201.527.482.752,77</b>	<b>277.948.453.970,04</b>	<b>315.776.893.108,86</b>
Pajak Daerah	93.731.388.091,00	109.824.795.009,00	130.670.608.239,00
Retribusi Daerah	6.599.136.034,00	8.372.925.539,00	7.173.930.214,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.167.770.066,00	8.916.250.334,00	11.008.793.672,00



Lain-Lain PAD Yang Sah	94.011.058.809,77	150.834.483.088,04	166.923.560.983,86
------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

$$= \frac{315.776.893.108,86 - 277.948.453.970,04}{277.948.453.970,04} \times 100$$

$$= 13,61 \%$$

## 22. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, Survey Kepuasan Masyarakat harus memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

No.	Kode Unsur	Nama Unsur
1.	U1	Persyaratan
2.	U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3.	U3	Waktu Penyelesaian
4.	U4	Biaya/Tarif
5.	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6.	U6	Kompetensi Pelaksana
7.	U7	Perilaku Pelaksana
8.	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9.	U9	Sarana dan Prasarana

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai Rata-rata tertimbang	=	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$	=	$\frac{1}{9}$	=	0,11
----------------------------------	---	---	---	---------------	---	------

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus :

IKM	=	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	x	Nilai penimbang
-----	---	---	---	-----------------

### Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 101 (seratus satu) Unit Pelayanan Publik (UPP) atau semua UPP telah menyampaikan laporannya, yang terdiri atas :

1. 47 (empat puluh tujuh) Perangkat Daerah yang terdiri atas Dinas, Badan dan Kecamatan.
2. 13 (tiga belas) Kelurahan
3. 41 (empat puluh satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dan dari hasil pengukuran atas laporan SKM dari semua Unit Pelayanan Publik (UPP) diatas dapat diketahui nilai IKM Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebesar 86,67.

Untuk tahun 2024 nilai IKM di targetkan pada angka 86, realisasi yang didapat ditahun 2024 adalah sebesar 86,67, sehingga persentase capaiannya adalah 100,78 persen

### 23. NILAI SAKIP

Sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan” salah satunya diukur menggunakan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP atau Nilai akuntabilitas kinerja merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Penilaian SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada tahun 2024 indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada angka 76,32 dan adapun nilai hasil evaluasi yang didapatkan oleh Kabupaten Banjar adalah sebesar 67,06 dengan persentase capaian 87,87 persen.

Nilai SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan penilaian atas pelaksanaan SAKIP Kabupaten Banjar dari tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2024, Kabupaten Banjar mendapat predikat B, yaitu antara >60-70, yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome*) pada pemerintah Kabupaten Banjar sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu melakukan perbaikan. Rincian Hasil Evaluasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,40	22,18
b. Pengukuran Kinerja	30	19,88	19,60



c. Pelaporan Kinerja	15	10,96	10,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,86	14,53
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,10	67,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

#### 24. NILAI OPINI BPK

Pada sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan” dengan indikator “Nilai Opini BPK – WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berhasil mendapat Nilai Opini BPK–WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Pada tahun 2024 nilai opini BPK ditargetkan, dan berhasil memperoleh nilai WTP sehingga capaian kinerja adalah 100 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Hingga akhirnya BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 25. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (PAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyusunan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

SPAK adalah satu survei yang telah dilaksanakan oleh BPS dari tahun ke tahun, akan tetapi karena angka yang dihasilkan dari SPAK adalah angka



nasional (IPAK Indonesia) maka tidak semua kabupaten/kota menjadi sampel dari pelaksanaan SPAK ini. Kabupaten Banjar termasuk salah satu kabupaten yang tidak menjadi sampel SPAK, sehingga untuk pemenuhan data perilaku anti korupsi ini Kabupaten Banjar khususnya Inspektorat Daerah melakukan kerjasama dengan BPS Kabupaten Banjar untuk membantu melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) di Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2024, nilai IPAK Kabupaten Banjar sebesar 3,96, nilai ini lebih rendah dibanding target yang ditetapkan untuk 2024 yakni sebesar 4,12, dengan persentase capaian 96,12 persen. Nilai tahun 2024 ini juga lebih rendah dibanding realisasi tahun 2022 yakni sebesar 4,06. Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai IPAK Nasional Tahun 2024 yakni sebesar 3,85. Hal ini berarti dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, di tahun 2024 masyarakat lebih permisif terhadap perilaku koruptif. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Dimensi Persepsi di tahun 2024 adalah sebesar 3,81 naik 0,14 poin dibandingkan tahun 2023 (3,67). Akan tetapi Indeks Dimensi Pengalaman tahun 2024 (4,03) menurun sebesar 0,2 poin dibanding tahun 2022 (4,23). Melihat dua dimensi di atas, Indeks persepsi mengalami peningkatan dari tahun 2022, artinya pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi mengalami perbaikan. Masyarakat secara umum memandang perilaku korupsi sebagai perilaku yang kurang wajar. Sebaliknya indeks pengalaman mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi di tahun 2022. Indeks pengalaman secara umum dapat mengukur pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik atau pengalaman lainnya. Penurunan yang terjadi pada indeks pengalaman ini dapat berarti persentase masyarakat yang melakukan atau berinteraksi dengan perilaku koruptif meningkat. Peningkatan ini dapat terjadi saat masyarakat mengakses pelayanan publik dan membayar layanan lebih dari tarif yang telah ditetapkan, baik secara terpaksa atau tidak. Kemungkinan lain yang kemungkinan besar terjadi adalah fenomena yang marak terjadi di masa pemilu/pilkada, dimana masyarakat menerima bingkisan dari pihak-pihak yang mengharapkan suara mereka di saat pemilu/pilkada.

## 26. INDEKS SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat adopsi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan administrasi dan pelayanan publik oleh suatu pemerintahan. Indeks ini membantu dalam mengukur sejauh mana sebuah negara atau pemerintah telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam



penyelenggaraan pemerintahan serta layanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB omor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE maka telah disebutkan adanya keterkaitan antara Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE yaitu bahwa Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Kategori Indeks SPBE :

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4.2 – 5.0	Memuaskan
2	3.5 – < 4.2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

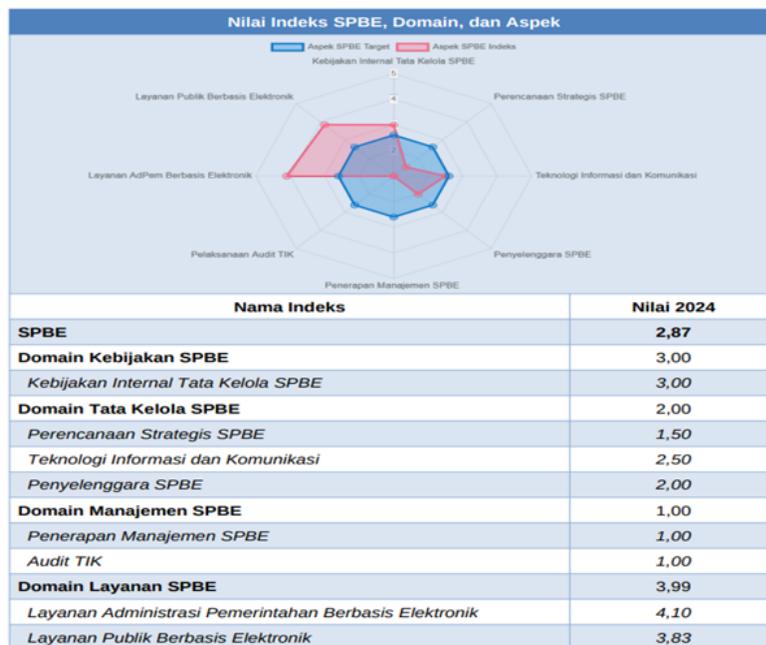
1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Pada tahun 2024 target Indeks SPBE Kabupaten Banjar adalah sebesar 2,92, kemudian sesuai Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB didapatkan nilai yang diterima oleh Kabupaten Banjar adalah sebesar 2,87, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 98,29 persen.



**INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. BANJAR**

**2,87**  
(Baik)



**27. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (IPA)**

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Dimana menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Standar dan Dimensi pengukuran Indeks professional ASN mencakup :

1. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.
2. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar 78,22, nilai ini melebihi target yang ditetapkan yakni 65,5 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 119,42 persen.

**28. ANGKA KASUS KONFLIK IDEOLOGI, SARA, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT**

Secara umum Konflik dapat diartikan sebagai kejadian benturan atau bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan terganggunya stabilitas didaerah. Sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat tidak ada terjadi konflik dibidang Ideologi, SARA, Sosial, Budaya Dan Ekonomi



diwilayah Kabupaten Banjar sehingga target menciptakan 0 (nol) kasus konflik dapat terpenuhi dan capaian atas target indikator sasaran ini adalah 100 persen,

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui peningkatan kinerja yang dicapai maka perlu membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

### Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,36	73,43	100,10	73,76	73,86	100,14	82,47	82,38	99,89
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	60,39	61,85	102,42	62,32	62,66	100,55	63,01	62,72	99,54
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	78,04	77,84	99,74	78,29	78,85	100,72	79,09	79,72	100,80
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,19	80,17	99,98	80,29	81,63	101,67	81,73	81,54	99,77
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Belum menjadi Indikator			0,483	0,498	96,89	0,473	0,53	87,95
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,64	61,52	93,72	67,43	61,25	90,83	69,24	59,2	85,50
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	68,28	66	96,66	72,70	79,10	108,80	81,86	84,44	103,15
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2	3,21	160,50	2,25	3,21	142,67	2,5	6,71	268,40
		LPE sub sektor perikanan	3,6	3,05	84,72	3,74	3,43	91,71	3,88	4,13	106,44
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,82	104,5	100,65	106,42	113,16	106,33	114,68	114,35	99,71
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	1,98	2,47	124,75	4,02	2,47	61,44	2,31	4,26	184,42
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.000.000	2.105.446	52,64	4.250.000	5.847.300	137,58	4.500.000	5.763.538	128,08
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,11	2,72	112,54	2,7	2,73	98,88	2,72	2,71	100,37
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	36,94	37,73	102,14	39,64	39,72	100,20	42,34	41,61	98,28
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	7,74	10,87	140,44	13,85	13,71	98,99	15,2	16,71	109,93
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6679	0,6793	101,71	0,6793	0,7280	107,17	0,734	0,7743	105,49



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembangunan Perdesaan											
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	73,25	75,34	102,85	76,83	78,55	102,24	79,25	87,723	110,69
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,51	94,51	100,00	94,52	94,52	100,00	94,526	94,526	100,00
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,67	9,33	103,52	9,18	9,12	101,00	9,04	8,58	105,09
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	151,6	151,6	100	150,6	133,44	111,39	132,94	118,31	111
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	8,29	207,25	4,00	30,00	100,00	4	13,61	340,25
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,97	101,15	85	85,56	100,66	86	86,67	100,78
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	72,65	68,03	93,64	74,49	68,10	91,42	76,32	67,06	87,87
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,05	4,06	133,11	4,20	4,06	96,67	4,12	3,96	96,12
		Indeks SPBE	2,2	2,56	116,36	2,66	2,87	107,89	2,92	2,87	98,29
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	60	46,50	77,50	61,50	63,98	104,03	65,5	78,22	119,42
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					107,71	102,14	119,54				

Persentase rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 119,54 persen, nilai ini mengalami peningkatan pesat dibanding tahun 2023, dimana ada peningkatan sebesar 17,51 persen dari rata-rata capaian kinerja tahun sebelumnya yang sebesar 102,14 persen, dan rata-rata capaian tahun 2024 ini juga lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yakni sebesar 107,44 persen. Namun sebagai informasi pada tahun 2024 ada pengurangan jumlah sasaran strategis yang digunakan beserta indikatornya, dimana pada tahun sebelumnya di 2023 ada 26 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja, kemudian setelah dilakukan evaluasi diputuskan di 2024 untuk mengurangi sasaran strategis menjadi 20 sasaran dengan menggunakan 28 indikator kinerja.

Dari 28 indikator yang tetap dipertahankan ditahun 2024, sejatinya ada 13 indikator kinerja yang realisasi persentasenya menurun daripada tahun sebelumnya, lalu ada 12 indikator yang meningkat persentasenya, dan 3



yang nilainya tetap. Meningkatnya persentase rata-rata capaian kinerja ini disumbang oleh meningkatnya rata-rata capaian kinerja pada indikator LPE sub sektor pertanian, LPE sub sektor perikanan, LPE sektor industri Pengolahan, LPE sektor industri Pengolahan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, Indeks Infrastruktur, Persentase Kawasan Kumuh, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Profesionalitas ASN.

Secara keseluruhan dari 28 indikator pada 20 Sasaran Strategis di atas terdapat 20 indikator yang persentase realisasi kinerjanya 100 persen keatas, dan ada 8 indikator yang nilai persentase capaiannya dibawah 100 persen, untuk indikator dengan persentase pencapaian kinerja diatas 100 persen yang memiliki capaian paling tinggi adalah pada indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian 340,25 persen, kemudian disusul oleh indikator LPE sub sektor pertanian dengan persentase capaian 268,40 persen, kemudian diposisi ketiga diikuti oleh indikator LPE sektor industri Pengolahan yang memiliki capaian 184,42 persen, kemudian diikuti indikator Jumlah kunjungan wisatawan yang memiliki capaian 127,01 persen, lalu diposisi kelima adalah Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 119,42 persen.

Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2023, ditahun 2024 jumlah indikator yang memiliki persentase capaian kinerja 100 persen keatas jumlahnya berkurang menjadi 19 indikator, dimana ditahun 2023 tercatat ada 20 indikator yang lebih dari 100 persen persentase capaian kinerjanya, dimana indikator LPE sub sektor pertanian menduduki posisi teratas dengan besaran 142,67 persen persentase capaian kinerjanya, disusul dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dengan persentase capaian 137,58 persen, dan dikuti oleh indikator Indeks Resiko Bencana dengan nilai persentase capaian 111,39 persen.

Adapun untuk tahun 2022 dari sejumlah indikator yang bisa disandingkan sebagaimana yang tercantum dalam tabel ada tercatat 19 indikator yang memiliki persentase capaian 100 persen keatas, dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator yang paling tinggi persentase capaiannya sebesar 207,25 persen, kemudian disusul oleh indikator LPE sub sektor pertanian dengan capaian persentase 160,50 persen, dan diikuti indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha diposisi ketiga sebagai dengan 140,44 persen realisasi capaian kinerjanya.



### C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2021-2026 yakni tahun 2026 maka hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap target indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Capaian dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,94	82,38	109,93
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	62,29	62,72	100,69
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,02	79,72	100,89
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,59	81,54	101,18
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,451	0,53	82,48
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,89	59,2	81,22
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	80,96	84,44	104,30
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	3	6,71	223,67
		LPE sub sektor perikanan	4,21	4,13	98,10
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,98	114,35	108,92
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	3,42	4,26	124,56
		Jumlah kunjungan wisatawan	5.000.000	5.763.538	115,27
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,71	109,97
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	47,75	41,61	87,14

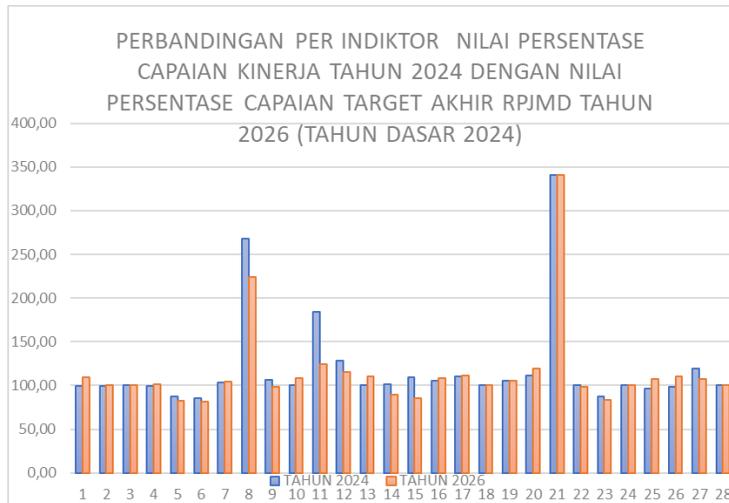


No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi 2024	Persentase capaian
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	19,64	16,71	85,08
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7135	0,7743	108,52
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	78,82	87,723	111,30
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,54	94,526	99,99
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,05	8,58	105,19
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	147,6	118,31	119,84
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	13,61	340,25
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	86,67	98,14
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	80	67,06	83,83
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,69	3,96	107,32
		Indeks SPBE	2,6	2,87	110,38
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73	78,22	107,15
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					115,15

Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2026 sebagai periode akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 115,19 persen. Dibandingkan nilai rata-rata capaian kinerja perbandingan akhir periode RPJMD tahun lalu yakni tahun 2023 yang nilainya sebesar 96,58 persen, maka nilai rata-rata tahun 2024 lebih tinggi 18,61 persen. Secara umum nilai capaian sebesar 115,19 persen sebagai capaian rata-rata tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar merupakan pencapaian yang sangat bagus mengingat masih ada tersisa 2 tahun lagi untuk bisa mencapai secara lebih optimal. Namun tentunya berbagai upaya perbaikan dan peningkatan harus terus dilakukan terutama pada beberapa indikator yang capaiannya masih kurang optimal, sehingga target akhir periode RPJMD dapat tercapai dengan baik dan tuntas.



Berikut disajikan grafik perbandingan persentase realisasi capaian tahun 2024 dengan persentase capaian periode akhir RPJMD 2021-2026 dengan perbandingan tahun dasar 2024:



Terdapat 20 indikator yang capaian kinerjanya seratus persen keatas sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui sebab tercapainya target periode akhir RPJMD 2021-2026 ditahun 2024, namun tentunya perlu ada pemilahan dalam melakukan evaluasi karena ada beberapa indikator yang memiliki target tetap setiap tahun sampai akhir periode RPJMD seperti pada indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Nilai Opini BPK, dan Angka kasus konflik Ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di masyarakat yang tertangani. Berikut indikator yang memiliki persentase capaian seratus persen ketas:

#### Indikator Kinerja dengan Capaian Kinerja melebihi Target Akhir dalam RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,94	82,38	109,93
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	62,29	62,72	100,69
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,02	79,72	100,89
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,59	81,54	101,18
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	80,96	84,44	104,30
6	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP)	3 105,98	6,71 114,35	223,67 107,90
7	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan	LPE sektor industri Pengolahan	3,42	4,26	124,56



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Jumlah kunjungan wisatawan	5.000.000	5.763.538	115,27
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,71	109,97
9	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7135	0,7743	108,52
10	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	78,82	87,723	111,30
11	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,05	8,58	105,19
12	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	147,6	118,31	119,84
13	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	13,61	340,25
14	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,69	3,96	107,32
		Indeks SPBE	2,6	2,87	110,38
15	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73	78,22	107,15
16	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0	100,00

Pada sasaran strategis yang capaian target indikatornya telah mencapai angka seratus persen persen keatas dibandingkan target akhir periode RPJMD 2021-2026 maka harus dilakukan evaluasi dan reuiu kembali untuk menentukan target angka yang sesuai dengan melakukan pendalaman hasil capaian di tahun 2024 serta membuat analisa capaian dan kendala yang kemungkinan akan dihadapi apabila melakukan perubahan target.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Bila dilakukan perbandingan data realisasi kinerja Kabupaten Banjar dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dan realisasi Nasional maka hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap target indikator kerjanya adalah sebagai berikut:



### Perbandingan dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Prov	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,47	82,38	83,35	83,31
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	63,01	62,72	64,48	66,19
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,09	79,72	79,08	76,56
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80,39	81,54	82,95	Belum keluar
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,473	0,53	0,507	0,447
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,24	59,2	Belum keluar	Belum keluar
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	84,44		
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2,5	6,71	11,35	0,82
		LPE sub sektor perikanan	3,88	4,13	8,08	0,68
		Nilai Tukar Petani (NTP)	114,68	114,35	114,35	119,62
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2,31	4,26	10,95	4,43
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.500.000	5.763.538	12.638.929	13.902.420
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72	2,71	4,20	4,91
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	42,34	41,61		
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,2	16,71		
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,734	0,7743	0,7903	0,7034
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	79,25	87,723		
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	94,526		
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,04	8,58		
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	132,94	118,31	122,11	122,11



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Prov	Realisasi Nasional
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	13,61		
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,67		
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	76,32	67,06	82,04	
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,12	3,96		3,85
		Indeks SPBE	2,92	2,87	3,63	3,12
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65,5	78,22		
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0		

Sebagian besar nilai realisasi kinerja pada indikator sasaran strategis Kabupaten Banjar tidak bisa diperbandingkan dengan nilai realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dan realisasi Nasional karena banyak indikator yang ditetapkan dan dipakai di Kabupaten Banjar berbeda atau tidak digunakan ditingkat provinsi dan tingkat nasional. Namun masih ada beberapa sasaran yang indikator kinerjanya memiliki kesamaan dan bisa dibandingkan dengan indikator dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan serta realisasi Nasional seperti Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Daya beli, Indeks Ketimpangan Gender (IKG, LPE sub sektor pertanian, LPE sub sektor perikanan, Nilai Tukar Petani (NTP), LPE sektor industri Pengolahan, Jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Resiko Bencana, Nilai SAKIP, Nilai Opini BPK, Indeks Perilaku Anti Korupsi, dan Indeks SPBE.

Umumnya capaian kinerja Kabupaten Banjar dibawah rata-rata capaian Provinsi ataupun nasional, kecuali pada indikator Indeks Daya beli yang realisasinya sebesar 79,72 lebih tinggi dibanding realisasi provinsi maupun nasional, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang nilainya adalah 2,71 ternyata jauh dibawah nilai capaian Provinsi yang sebesar 4,20 persen maupun dengan capaian nasional yang sebesar 4,91 persen, dimana pada pengukuran TPT nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka disini capaian Kabupaten Banjar lebih baik dari capaian provinsi dan nasional.

Masih rendahnya nilai capaian Kabupaten Banjar pada beberapa indikator yang bisa dibandingkan, menunjukkan bahwa masih perlunya upaya-upaya dan aksi nyata untuk bisa meningkatkan capaian, perlu komitmen bersama antara pimpinan dan pemangku kinerja serta stakeholder terkait, yang diikuti dengan kerjasama yang solid dan kerja keras semua pihak.



## **E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang dilakukan**

Terkait hasil atau realisasi capaian yang telah didapatkan ditahun 2024 harus dilakukan analisis atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja serta ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi atas capaian untuk peningkatan capaian kinerja ditahun berikutnya. Secara lebih rinci berikut disampaikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan atau penyebab kegagalan, atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dapat diambil sebagaimana dibahas perindikator sebagai berikut:

### **1. INDEKS KESEHATAN**

Untuk Indikator Indeks Kesehatan secara realisasi yang didapatkan nilainya hampir mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 82,47, tercapai di angka 82,38 dengan capaian 99,89 persen.

Walaupun tidak bisa dikatakan berhasil secara sempurna secara capaian target namun realisasi yang didapatkan oleh Kabupaten Banjar ini sudah sangat bagus karena persentase capaiannya sudah menyentuh angka 99,89 persen.

Adapun hal-hal atau kondisi dilapangan yang mendukung terpenuhi target tersebut adalah antara lain:

- a. Adanya peningkatan kapasitas Nakes (Pelatihan APN, OJT kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Pelatihan Neonatal Esensial), Pendampingan Tenaga Ahli Sp A dan Sp OG ke Puskesmas, Semua Puskesmas sudah memiliki USG dan sudah ada dokter yang terlatih, tiap desa ada kelas ibu hamil serta praktek kalakarya MTBS sebagai strategi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus dan Angka Kematian Bayi.
- b. Telah dilaksanakannya berbagai pelaksanaan intervensi gizi spesifik seperti PMT Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang, kampanye TTD pada remaja dan Ibu Hamil, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita pemberdayaan masyarakat, terpenuhinya antropometri standar untuk semua posyandu, pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita bagi kader posyandu serta konseling PMBA. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan prevalensi stunting pada balita.
- c. Adanya komitmen Kepala UPTD Puskesmas / RS dalam kerjasama lintas program dan koordinasi dengan lintas sektor terkait upaya pencegahan dini penyakit menular dan tidak menular.
- d. Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS dalam melaksanakan akreditasi, dan adanya kebijakan Pemda setempat sebagai dukungan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Kesehatan guna meningkatkan Indeks Kesehatan



Namun dalam prakteknya masih ditemui berbagai hambatan dalam usaha peningkatan layanan kesehatan ini seperti:

- a. Masih ada persalinan non nakes/ ibu melahirkan tidak di faskes (DK), masih ada ibu melahirkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana alkes sesuai standar.
- b. Belum maksimalnya keterlibatan lintas program dan lintas sektor tentang promosi kesehatan, pemahaman petugas/pengelola di Puskesmas dalam penginputan data capaian SPM masih belum sinkron, belum ada pemantauan kualitas layanan intervensi spesifik yang dilaksanakan.
- c. Belum maksimalnya peran UKBM di tingkat Desa/Kelurahan (Posyandu), terbatasnya kemampuan puskesmas untuk memenuhi indikator pembinaan Germas, kurangnya koordinasi lintas program untuk pemenuhan pembinaan germas di Puskesmas
- d. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah mengenai pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular baik di puskesmas maupun kunjungan ke posbindu serta periksa rutin minimal satu kali dalam satu bulan (penderita tidak mau periksa jika tidak ada keluhan)

Adapun beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil menjadi solusi dalam memecahkan masalah sebagaimana yang disebutkan diatas antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan dan manfaat pendampingan tenaga kesehatan saat persalinan melalui berbagai sosialisasi dan edukasi.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk kapasitas petugas/pengelola penginputan data capaian SPM.
- c. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerah perdesaan.
- d. Meningkatkan program penyuluhan dan kampanye kesehatan di masyarakat terkait sanitasi dan perilaku hidup bersih, dan penyebaran penyakit menular.

## 2. INDEKS PENDIDIKAN

Untuk Indikator Indeks Pendidikan realisasi yang didapatkan nilainya hampir mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 63,01 sedangkan nilai realisasinya adalah sebesar 62,72 dengan capaian 99,54 persen.

Adapun faktor yang mendukung terpenuhi target tersebut adalah antara lain:

- a. Peningkatan daya tampung dan sarana prasarana pendidikan



- b. Ketersediaan jalur pendidikan kesetaraan/pendidikan non formal sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat selain pendidikan formal.
- c. Adanya program program yang mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih berkualitas, pengembangan diri dan kemampuan siswa, dan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih baik.
- d. Adanya Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, seperti Gerakan Orang Tua Asuh dan Sosialisasi untuk menumbuhkan minat anak untuk terus bersekolah dalam semua jenjang dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pemberian beasiswa bagi yang tidak mampu
- e. Meningkatnya peranan orang tua dan masyarakat dalam mendorong motivasi dan minat belajar siswa.

Walaupun diluar hal diatas masih ditemui berbagai kendala dalam usaha memajukan pendidikan seperti:

- a. Masih terdapat wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil.
- b. Kualitas pengajaran dan kurikulum yang belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dan kualitas merata di semua satuan pendidikan.
- c. Belum meratanya kompetensi, kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang berminat memasukan anaknya ke jalur pendidikan formal dan cenderung lebih memilih jalur pendidikan keagamaan
- e. Biaya Pendidikan, meskipun sekarang pendidikan dasar gratis atau tidak ada pungutan biaya akan tetapi masih ada keperluan-keperluan lain yang memerlukan biaya seperti ATK (buku tulis, Pensil, balpoint dan lain-lain), seragam, tas, dan uang saku dll, yang hal ini masih cukup membebani untuk warga yang kurang mampu.
- f. Masih adanya angka putus sekolah, salah satu faktornya karena pernikahan dini, banyak orang tua dikawasan perdesaan menganggap bahwa kalau anak perempuan sudah baligh dan ada yang melamar maka lebih baik dikawinkan saja biar saja berhenti sekolah karena akan ada suaminya yang menanggung dan bertanggung jawab atas dirinya

Beberapa usaha perbaikan atau solusi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan capaian kinerja pada sasaran kinerja ini antara lain:

- a. Perlunya meningkatkan anggaran pendidikan untuk peningkatan fasilitas dan prasarana pendidikan khususnya pada daerah terpencil.
- b. Memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik agar lebih merata sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Mendorong adanya kerja sama antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta dalam menyediakan program peningkatan kualitas pendidik.



- d. Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru
  - e. Memberikan bantuan sosial dan program beasiswa bagi anak dari keluarga miskin.
  - f. Mengembangkan sekolah yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan formal dengan pendidikan keagamaan, seperti madrasah atau sekolah berbasis pesantren yang tetap mengajarkan mata pelajaran umum.
3. INDEKS DAYA BELI.

Indeks daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik. Pada tahun 2024 realisasi indeks ini adalah sebesar 79,72 dengan realisasi persentase capaian sebesar 100,8 persen. Terpenuhinya target atas sasaran ini didukung oleh:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil
- b. Terkendalinya inflasi/stabilitas harga
- c. Adanya peningkatan Upah minimum
- d. Infrastruktur yang relatif baik
- e. Pemberian kredit dan pembiayaan yang terjangkau
- f. Pemberdayaan UMKM

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target dalam sasaran ini adalah

- a. Adanya ketergantungan beberapa bahan pokok dari luar daerah
- b. Faktor cuaca/bencana alam sehingga membuat terhambatnya arus distribusi
- c. Masih rendahnya literasi digital masyarakat pelaku usaha perdagangan sehingga belum optimal memanfaatkan pemasaran produk melalui e commerce

Alternatif upaya perbaikan yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan yang ada terkait daya beli antara lain:

- a. Mendorong kemitraan antara petani dan ritel modern agar produk lokal lebih mudah dipasarkan.
- b. Menetapkan harga minimum yang menguntungkan petani agar mereka tidak merugi.
- c. Membangun pusat distribusi di beberapa lokasi strategis sehingga pasokan tetap tersedia meskipun jalur utama terganggu.
- d. Membuat panduan sederhana dalam bentuk video, e-book, atau infografis yang menjelaskan langkah-langkah berjualan online, pemasaran digital, dan manajemen keuangan digital.
- e. Mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam membantu pelaku usaha kecil dalam mengadopsi teknologi digital.

4. INDEKS KETAHANAN PANGAN



Berdasarkan data sementara realisasi atas target indikator ini adalah sebesar 81,54 sedikit lebih rendah dari target yang dipatok untuk tahun 2024 yakni sebesar 81,73, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 99,77 persen.

Faktor Pendorong atas pencapaian target ini adalah

- a. Ketersediaan pangan yang cukup
- b. Akses yang baik dalam memenuhi pangan
- c. Konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Sedangkan yang menjadi hambatan adalah

- a. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal terutama untuk pangan non beras
- b. Konsumsi sayuran dan buah yang masih rendah

Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi hal ini antara lain:

- a. Mendorong budidaya tanaman alternatif.
- b. Memberikan insentif dan subsidi kepada petani yang membudidayakan pangan non-beras.
- c. Mempermudah akses kredit dan modal usaha bagi petani serta pelaku UMKM yang bergerak di sektor pangan lokal.

#### 5. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Untuk indikator kinerja ini realisasinya adalah sebesar 0,53 sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan ditahun 2024 yakni sebesar 0,473 dengan persentase capaian sebesar 89,95 persen, dimana untuk indikator ini nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target ini adalah:

- a. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
- b. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan perlindungan kerja yang rendah.
- c. Masih tingginya angka kelahiran remaja (pernikahan dini dan kehamilan remaja).

Adapun faktor yang menjadi pendorong dalam usaha pencapaian target sasaran ini antara lain:

- a. Adanya peningkatan akses pendidikan yang setara bagi perempuan.
- b. Adanya perubahan norma sosial yang lebih inklusif.
- c. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender.
- d. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik juga meningkatkan kesetaraan.

Hal yang dapat menjadi upaya perbaikan ditahun mendatang antara lain.

- a. Menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi perempuan agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
- b. Mendorong kebijakan rekrutmen yang lebih inklusif dan menghapus diskriminasi berbasis gender di dunia kerja.
- c. Meningkatkan peran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan



manajerial.

- d. Mengadakan sosialisasi tentang dampak kehamilan di usia remaja, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- e. Mendorong kebijakan yang memperketat batas usia pernikahan dan menegakkan aturan terkait pencegahan pernikahan dini.

6. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Realisasi target atas indikator ini masih dibawah dari target yang ditetapkan dimana dari target sebesar 69,24 yang ditetapkan di tahun 2024, realisasi yang diperoleh baru ditingkat 59,2 untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) nya dengan persentase capaian 85,5 persen. Adapun faktor penghambat atas pencapaian target ini adalah:

- a. Kemiskinan, yang menyebabkan masih banyaknya anak-anak dibawah umur bekerja atau dieksploitasi oleh keluarganya.
- b. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2024 terdapat 48 kasus kekerasan terhadap anak. Dimana kekerasan fisik, emosional, dan seksual masih marak terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga perundungan (bullying) masih sangat marak di sekolah maupun dunia maya.
- c. Akses layanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah terpencil
- d. Gizi buruk dan stunting yang menghambat tumbuh kembang anak
- e. Terbatasnya akses informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak anak dan cara melindungi anak, baik di kalangan orangtua maupun masyarakat umum.

Namun terlepas dari segala hambatan tersebut tentunya terdapat faktor yang mendorong dalam pencapaian sasaran kinerja ini seperti:

- a. Telah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan anak, seperti program anti-kekerasan dan akses pendidikan dan kesehatan.
- b. Adanya bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil dan sehat.
- c. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang mendukung perlindungan anak turut mempercepat pencapaiannya

Adapun alternatif solusi yang bisa diambil untuk mengatasi hambatan ini antara lain:

- a. Pemerintah harus memastikan adanya implementasi pada berbagai kebijakan perlindungan anak yang telah dikeluarkan/terbitkan.
- b. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam menegakkan perlindungan anak.
- c. Membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman bagi anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi.



- d. Meningkatkan kesadaran orang tua, guru, dan masyarakat tentang pola asuh yang positif dan tanpa kekerasan.
- e. Memastikan layanan kesehatan yang ramah anak, termasuk vaksinasi, pemantauan tumbuh kembang, dan kesehatan mental.
- f. Meningkatkan program gizi untuk mencegah stunting dan kekurangan nutrisi pada anak.
- g. Mengembangkan kampanye sosial melalui media untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka.

## 7. INDEKS KONEKTIVITAS

Ketercapaian atas indikator ini dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah:

- a. Ketersediaan jalan raya, jembatan, dan jalur transportasi yang baik
- b. Pengembangan jaringan logistik untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
- c. Adanya kebijakan yang mendukung investasi di sektor infrastruktur dan digital.
- d. Program pembangunan konektivitas di daerah terpencil dan tertinggal.

Namun yang menjadi hambatan dalam pencapaian ini antara lain:

- a. Masih ada beberapa lokasi atau ruas jalan rusak yang belum diperbaiki sehingga menghambat konektivitas.
- b. Terbatasnya jumlah dan trayek transportasi umum.
- c. Anggaran pembangunan yang terbatas sehingga perlu menetapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

Upaya perbaikan yang bisa diambil antara lain:

- a. Meningkatkan anggaran infrastruktur dan mendorong ada peran swasta.
- b. Memperbaiki perencanaan tata kota dan integrasi transportasi.

## 8. LPE SUB SEKTOR PERTANIAN

Faktor Pendorong dalam peningkatan pencapaian target ini antara lain:

- a. Adanya kegiatan mitigasi bencana akibat DPI
- b. Koordinasi dengan kementerian terkait kalender tanam
- c. Adanya bantuan sarana produksi melalui dana APBD prov dan APBN
- d. Adanya dukung anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
- e. Adanya potensi lahan pertanian yang dapat dioptimalkan dalam peningkatan produksi pertanian
- f. Mengoptimalkan penyelenggaraan kelembagaan petani (kelembagaannya, peningkatan SDMP-nya, sarana dan prasarana penunjang penyuluhannya)
- g. Adanya pengendalian OPT pada komoditas pertanian
- h. Adanya pengendalian penyakit pada ternak dengan vaksinasi, pemberian vitamin dan pengobatan serta tersedianya dana operasional



- SIKOMANDAN dari APBD Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik untuk peningkatan populasi ternak
- i. Aktivitas/kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS)
  - j. Adanya pembinaan dan bimbingan kepada kelompok untuk meningkatkan luas tanam pertanian melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya secara komersil dan menerapkan teknologi terkini
  - k. Meningkatnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi; (b) pusat gerakan pembangunan pertanian; (c) pusat pembelajaran; (d) pusat konsultasi agribisnis; dan (e) pusat pengembangan jejaringan kemitraan
  - l. Adanya program penumbuhan dan pengembangan petani dalam rangka optimalisasi regenerasi petani.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat antara lain.

- a. Terdapat adanya ketidaksesuaian waktu kegiatan (dana pusat) dengan kondisi lapangan (kebutuhan saprodi petani)
- b. Petani relatif masih menggunakan benih padi varietas lokal daripada benih unggul untuk usaha taninya
- c. Sebagian besar kelompok tani di Kabupaten Banjar belum berbadan hukum, sementara kelompok tani di Kabupaten Banjar Sebagian besar belum terintegrasi dan berbadan hukum dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, maka bantuan tersebut hanya bisa diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum, minimal 3 tahun. Akibatnya realisasi bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat kepada Poktan/gapoktan berpotensi menjadi terhambat/tidak terserap, tidak tepat sasaran dan akan menimbulkan permasalahan dengan hukum
- d. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mempengaruhi produksi pertanian
- e. Adanya penyakit yang menyerang pada ternak
- f. Terdapatnya keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
- g. Adanya fluktuasi harga pasar dan pasca pasar untuk hasil pertanian.

Beberapa alternatif upaya perbaikan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah diatas antara lain:

- a. Mengembangkan dan mendistribusikan benih unggul yang tahan hama dan cuaca ekstrem.
- b. Mendorong petani menanam komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura, rempah-rempah, dan tanaman obat.
- c. Memberikan edukasi tentang pertanian modern, manajemen usaha tani, dan akses pembiayaan.



- d. Mendorong dan memfasilitasi kelompok tani agar mau mendaftarkan kelompoknya untuk berbadan hukum.

#### 9. LPE SUB SEKTOR PERIKANAN

Yang menjadi pendorong dalam usaha pencapaian indikator ini antara lain:

- a. Potensi yang melimpah pada perikanan budidaya di air tawar, payau, dan laut.
- b. Program permodalan dan kredit usaha untuk sektor perikanan.

Sedangkan yang menjadi hambatan adalah

- a. Iklim/cuaca yang tidak dapat diprediksi
- b. Harga pakan yang relatif mahal
- c. Kualitas air yang rendah

Solusi tindak lanjut yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain:

- a. Mendorong nelayan dan pembudidaya ikan untuk menggunakan aplikasi/teknologi untuk monitoring harga, memantau cuaca, dan hasil tangkapan agar produksi lebih optimal.
- b. Mendorong adanya kerja sama antara pihak nelayan atau pembudidaya perikanan dengan pihak rumah makan/warung, maupun ritel.
- c. Mengembangkan sistem irigasi dan pengolahan air yang lebih baik di tambak perikanan.

#### 10. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani (indeks harga hasil produksi) dengan harga yang harus dibayar petani (indeks harga kebutuhan produksi dan konsumsi). Jika NTP meningkat, artinya daya beli dan kesejahteraan petani juga meningkat.

Yang mendorong pencapaian target ini antara lain:

- a. Adanya permintaan pasar yang cukup tinggi
- b. Subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian dari pemerintah.
- c. Efisiensi penggunaan air dan energi dalam pertanian.
- d. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
- e. Kemudahan akses modal bagi petani kecil dan menengah.
- f. Perbaikan irigasi, jalan tani, dan akses pasar.
- g. Adanya program stabilisasi harga melalui Bulog atau lembaga lain.
- h. Peningkatan peran koperasi dan kelompok tani dalam pemasaran hasil.

Faktor Penghambat.

- a. Ketidakstabilan harga hasil pertanian akibat musim panen raya (*oversupply*).
- b. Mahalnya harga pupuk, benih, dan pestisida.
- c. Minimnya akses terhadap alat dan teknologi pertanian yang efisien



- d. Sistem tata niaga yang tidak berpihak pada petani, misalnya dominasi tengkulak dalam rantai distribusi.
- e. Gagal panen akibat kekeringan, banjir, dan serangan hama
- f. Kurangnya literasi keuangan petani untuk mengelola pendapatan dan investasi.

Beberapa alternatif jalan yang bisa diambil untuk menghadapinya adalah:

- a. Memperkuat koperasi petani untuk meningkatkan daya tawar dalam penjualan hasil pertanian.
- b. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian di tingkat desa untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
- c. Menyediakan bantuan atau kredit Alsintan agar petani bisa beralih ke mekanisasi dan mengurangi biaya tenaga kerja.

#### 11. LPE SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Pencapaian atas target ini didukung oleh beberapa hal, seperti:

- a. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja
- b. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor industri (subsidi, insentif pajak).
- c. Adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah dalam usaha pemasaran produk unggulan daerah melalui expo lokal dan nasional.
- d. Adanya usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai pelatihan.

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah:

- a. Adanya kenaikan harga energi dan bahan baku
- b. Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit.
- c. Kurangnya investasi di bidang ini

Beberapa alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah di atas antara lain:

- a. Adanya penyederhanaan proses perizinan.
- b. Penguatan sektor hulu dan optimalisasi bahan baku lokal.
- c. Mendorong adanya peningkatan kerja sama dengan pihak perbankan

#### 12. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Untuk indikator ini capaian atas target mencapai 128,08 persen, dimana dari target sebanyak 4.500.000 jumlah wisatawan telah tercapai sebanyak 5.763.538 jumlah wisatawan berkunjung pada tempat wisata dan atau menghadiri event event yang dibuat di Kabupaten Banjar. Adapun hal yang mendorong pencapaian ini antara lain:

- a. Tersedianya anggaran untuk pendataan kunjungan wisata maupun pendataan pelaku usaha pariwisata.
- b. Penyebaran informasi melalui media sosial yang cukup efisien sebagai media promosi dan jangkauannya sangat luas. Adanya even haul Guru Sekumpul yang menyumbang angka kunjungan wisatawan yang sangat besar khususnya dalam ranah wisata religi.



- c. Kekayaan Alam dan potensi pariwisata yang cukup memadai
- d. Adanya amenities di beberapa titik destinasi
- e. Adanya petugas pendata yang tersebar di 24 titik pendataan
- f. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi dan pendataan kunjungan wisata
- g. Dengan adanya aplikasi OSS (Online Single Submission) maka memudahkan pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat untuk memperoleh izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

Sedangkan faktor yang menjadi penghambatnya adalah

- a. Kondisi cuaca yang masih berada pada musim hujan menyulitkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata serta event-event yang diselenggarakan oleh Disbudporapar Kabupaten Banjar.
- b. Ada spot / titik destinasi wisata yang kurang terpelihara.
- c. pembuatan konten yang stagnan dan kurang kreatif untuk mempromosikan pariwisata.
- d. Akses antar destinasi yang berjauhan bahkan melintas di kabupaten lain
- e. Akomodasi yang berada di luar kabupaten/ kota dan cukup jauh dari destinasi wisata.
- f. Tingkat hunian akomodasi pada destinasi pariwisata belum memadai.

Dengan alternatif solusi berupa:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan transportasi umum menuju destinasi wisata.
- b. Pelatihan bagi pelaku wisata mengenai pelayanan yang ramah dan profesional.
- c. Menganggarkan biaya renovasi untuk tempat wisata yang kurang terpelihara.
- d. Mendorong/memberikan kemudahan pembangunan penginapan atau losmen yang layak pada sekitar kawasan wisata

### 13. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Indikator ini capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2024, dengan persentase capaian sebesar 100,37 persen. Adapun kondisi yang mendukung pencapaian target ini antara lain:

- a. Adanya peran aktif Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya penyebaran informasi Bursa Kerja
- c. Tersedianya sistem digital platform untuk memfasilitasi pendaftaran Pencari Kerja secara online di BKK
- d. Meningkatnya wawasan pencari kerja terkait informasi tentang tren industri dan peluang kerja yang sedang berkembang
- e. Tersedianya informasi dan layanan migrasi yang aman dan terlindungi



- f. Adanya kesadaran dari Perusahaan dalam pemenuhan Hubungan Industrial yang harmonis.
- g. Adanya minat dari pihak Perusahaan dalam mengikuti kegiatan Bimtek Struktur Skala Upah, Kegiatan Dialog Sosial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kegiatan Dialog Sosial Penyusunan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.
- h. Adanya partisipasi dari perangkat daerah teknis dalam memberikan informasi untuk pekerja rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

Sedangkan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian antara lain:

- a. Terbatasnya Instruktur yang berkompeten
- b. Masih adanya BKK yang belum aktif melaksanakan Pelayanan Antar Kerja
- c. Masih rendahnya pengetahuan pencari kerja dalam kesiapan memasuki dunia kerja
- d. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tata cara prosedur bekerja keluar negeri yang legal
- e. Kurangnya respon dari Perusahaan terhadap pembinaan Hubungan Industrial

Dari poin hambatan diatas beberapa alternatif solusi yang bisa diambil untuk tindak lanjut dimasa yang akan datang antara lain:

- a. Mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan industri (*link and match*) untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
- b. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi agar lebih siap bersaing di pasar kerja.
- c. Memperkuat sistem informasi pasar kerja agar pencari kerja lebih mudah menemukan lowongan yang sesuai.
- d. Memperluas kerja sama dengan perusahaan dan dunia usaha untuk meningkatkan peluang kerja.
- e. Mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam program magang dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.
- f. Mengembangkan layanan antar kerja berbasis digital untuk mempermudah penempatan tenaga kerja.

#### 14. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

Ketercapaian realisasi indikator ini dengan capaian 101,44 persen di tahun 2024 ditunjang dengan kondisi:

- a. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan.
- b. Kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi mendapatkan akses ke sumber pembiayaan.
- c. Digitalisasi tata kelola agar lebih efisien dan transparan



- d. Mendorong koperasi memiliki sistem keuangan yang sehat dengan audit berkala dan pelaporan keuangan yang transparan.
- e. Penyederhanaan regulasi untuk mempermudah koperasi berkembang.
- f. Peningkatan pengawasan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas dan kredibilitas koperasi.
- g. Meningkatkan kerja sama koperasi dengan sektor swasta, pemerintah, dan BUMN.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam usaha peningkatan kualitas koperasi seperti antara lain:

- a. Banyak koperasi yang masih dikelola secara tradisional dan tidak profesional.
- b. Banyak anggota yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam koperasi.
- c. Partisipasi anggota yang rendah dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan pengambilan keputusan.
- d. Koperasi sering mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan, termasuk buruknya pencatatan keuangan dan kurangnya transparansi.
- e. Minimnya inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti investasi atau kemitraan strategis.
- f. Minimnya insentif bagi koperasi berkualitas untuk berkembang lebih jauh.

Solusi yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- a. Pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi mengenai manajemen modern, akuntansi, dan strategi bisnis.
- b. Pengawasan berkala oleh pemerintah dan asosiasi koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional.
- c. Mendorong penggunaan teknologi dalam administrasi koperasi, seperti sistem pencatatan keuangan digital.
- d. Mendorong koperasi untuk menerapkan sistem laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh anggota.

#### 15. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Realisasi indikator ini ditahun 2024 sebesar 16,71 dengan capaian 109,93 persen Dalam pencapaian indikator ini beberapa hal atau kondisi yang mendukung antara lain:

- a. Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pendanaan lain dengan bunga rendah bagi usaha mikro yang ingin berkembang.
- b. Adanya pelatihan manajemen usaha ntuk meningkatkan keterampilan wirausaha.
- c. Adanya berbagai event pameran dan bazar UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan jaringan usaha.
- d. Penyederhanaan perizinan usaha agar lebih banyak usaha mikro dapat



berkembang menjadi wirausaha formal.

Adapun faktor yang menjadi penghambat antara lain:

- a. Adanya kondisi masyarakat sulit mendapatkan kredit usaha karena kurangnya jaminan atau histori keuangan yang baik.
- b. Tingginya bunga pinjaman dari lembaga keuangan yang justru membebani usaha.
- c. Banyak usaha mikro masih menggunakan model bisnis tradisional tanpa inovasi produk.
- d. Kurangnya strategi pemasaran yang efektif, terutama dalam memanfaatkan platform digital.
- e. Proses perizinan usaha yang masih dianggap rumit dan memakan waktu.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan pada indikator ini antara lain:

- a. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah bagi usaha mikro.
- b. Memberikan edukasi manajemen keuangan agar usaha mikro bisa lebih mudah mendapatkan pinjaman.
- c. Mendorong usaha mikro untuk berinovasi dalam desain, kualitas, dan kemasan produk.
- d. Pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan e-commerce, media sosial, dan *marketplace*.

#### 16. INDEKS DESA MEMBANGUN

Pada indikator ini targetnya dapat terlampaui ditahun 2024, dari target sebesar 0,734 nilai yang didapatkan sebesar 0,7743 dengan persentase capaian sebesar 105,49

Adapun yang menjadi pendukung dalam pencapaiannya antara lain:

- a. Adanya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan pembangunan.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk perencanaan yang lebih inklusif.
- c. Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor ekonomi desa.
- d. Penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa.
- e. Pembangunan dan perbaikan jalan desa untuk mendukung aksesibilitas ekonomi.
- f. Adanya usaha dari Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang memadai didesa-desa.

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah:

- a. Akses internet yang terbatas menghambat digitalisasi dan peluang



ekonomi berbasis teknologi.

- b. Kurangnya pemahaman kepala desa dan aparat dalam usaha peningkatan status desa.
- c. Kurangnya akses ke modal dan perbankan bagi UMKM dan BUMDes, menghambat pertumbuhan ekonomi desa.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja desa.
- e. Akses layanan kesehatan terbatas, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis.
- f. Digitalisasi administrasi desa masih rendah, menyebabkan pelayanan publik lambat.

Beberapa alternatif yang bisa diambil untuk menghadapi kendala diatas antara lain:

- a. Meningkatkan jangkauan/perluasan akses internet dengan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dan program desa digital.
- b. Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan desa.
- c. Mendorong transparansi dalam penggunaan dana desa dan musyawarah desa yang lebih inklusif.
- d. Akses permodalan bagi UMKM dan usaha tani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- e. Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mendukung ekonomi lokal.

#### 17. INDEKS INFRASTRUKTUR

Persentase capaian indikator ini sebesar 110,7 persen, dengan didukung oleh faktor-faktor:

- a. Adanya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur strategis.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana dan peralatan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- c. Tersedianya dokumen SSK (Strategis Sanitasi Kabupaten/Kota)
- d. Telah tersedianya dokumen kajian yang menjadi alat/sumber dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan faktor yang jadi penghambat adalah:

- a. Ketergantungan pada anggaran pemerintah, dengan realisasi yang sering tidak optimal.
- b. Pembangunan yang tidak merata, menyebabkan daerah terpencil tertinggal dalam akses infrastruktur.
- c. Kurangnya standar kualitas dalam proyek konstruksi, menyebabkan infrastruktur cepat rusak.
- d. Keterbatasan tenaga kerja terampil dalam bidang konstruksi dan teknologi infrastruktur.



- e. Penyalahgunaan anggaran proyek infrastruktur, menyebabkan pembangunan tidak sesuai spesifikasi.

Dalam menghadapi hambatan diatas dapat ditempuh beberapa alternatif solusi seperti:

- a. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan jalan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan.
- b. Meningkatkan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan konstruksi/infrastruktur untuk memastikan pengerjaan sudah sesuai standar.
- c. Mendorong adanya transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana desa serta anggaran pembangunan daerah.

#### 18. PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Pada tahun 2024 indikator ini tercapai secara 100 persen dengan realisasi sejumlah 94,526 dari target sejumlah yang sama.

Faktor Pendorong atas keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. Adanya regulasi yang jelas dan tegas tentang Rencana Tata Ruang (RTR)
- b. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk denda atau pembongkaran bangunan ilegal.
- c. Proses perizinan yang cepat, mudah, dan berbasis digital untuk mengurangi hambatan administrasi.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang melalui musyawarah dan konsultasi publik.
- e. Evaluasi RTR yang dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan wilayah.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan antara lain:

- a. Dalam proses penyusunan produk hukum daerah khususnya Produk Hukum Daerah tentang Tata Ruang diperlukan koordinasi dengan Kementerian terkait sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembuatan Persub dan Revisi RTRW dan RDTR dan juga belum tersedianya NSPK dari turunan PP Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terkait aturan lebih lanjut dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan ruang.
- b. Sulitnya mencari saksi atas permasalahan tanah dan seringkali tidak adanya data dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.
- c. Tanah yang ada masih milik desa walaupun sudah tercatat di KIB Pemkab Banjar sehingga harus ada surat hibah dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten banjar.
- d. Birokrasi yang panjang menyebabkan banyak pelaku usaha dan masyarakat memilih membangun tanpa izin.
- e. Banyak masyarakat yang tidak memahami RTR dan dampak dari



pelanggaran tata ruang

Ada beberapa hal yang dapat menjadi solusi atau upaya perbaikan atas hambatan diatas seperti:

- a. Meningkatkan penegakan hukum dengan sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang.
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang manfaat kepatuhan terhadap RTR untuk keberlanjutan lingkungan dan pembangunan.
- c. Mendorong pendekatan mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian konflik tata ruang.
- d. Menyusun kebijakan land consolidation untuk mengurangi tumpang tindih kepemilikan lahan.

#### 19. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Indikator ini tercapai sesuai dengan target dengan persentase capaian sebesar 105,09 persen.

Faktor pendukung dalam pencapaian antara lain:

- a. Adanya Kolaborasi dalam penangan kawasan kumuh antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Adanya pelaksanaan Updating data Kumuh di Kabupaten Banjar yang merupakan dasar pertimbangan dalam penangan Kumuh, yang akan menjadi acuan dalam melakukan Revisi Surat Keputusan Bupati terkait Penetapan Lokasi Kumuh.
- c. Pembangunan rumah subsidi dan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan lingkungan.
- e. Penegakan aturan tata ruang untuk mencegah pertumbuhan permukiman liar.
- f. Pengembangan UMKM dan koperasi di daerah padat penduduk agar ekonomi lokal berkembang.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain adalah:

- a. Adanya kendala dalam pembagian kewenangan dan peran pada perangkat daerah yang menangani kawasan kumuh.
- b. Belum adanya peraturan daerah khusus tentang penanganan kumuh di Kabupaten Banjar.
- c. Berakhirnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan sangat membantu penangan kumuh di Kabupaten/kota

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal diatas antara lain:

- a. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penanganan kumuh
- b. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi
- c. Relokasi dan Pembangunan hunian yang layak
- d. Peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh.



- e. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program penataan kawasan kumuh.

## 20. INDEKS RESIKO BENCANA

Faktor Pendukung dalam pencapaian target ini antara lain.

- a. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, baik dalam bentuk alokasi anggaran, kebijakan yang mendukung, Khususnya dalam pembuatan Dokumen-dokumen Kebencanaan seperti Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Dokumen Rencana Kontingensi yang menjadi bagian sangat penting dalam peningkatan indeks risiko bencana.
- b. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana sangat penting. Dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana dan pentingnya mitigasi, mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, simulasi, dan penyuluhan. Keterlibatan masyarakat ini mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
- c. Kerja sama yang baik antara BPBD dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah lainnya dimana dalam isian kuisioner 71 indikator dalam pengumpulan data dan penilaian IKD untuk menunjang tercapainya nilai IRB ada pada kegiatan SKPD terkait, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang baik dalam penanggulangan bencana dan dalam pelaksanaan pencapaian nilai IRB.
- d. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem peringatan dini (*early warning systems*), aplikasi pemetaan risiko bencana berbasis GIS, serta penggunaan data meteorologi dan geologi, membantu BPBD dalam menganalisis dan memonitor bencana di Kabupaten Banjar. Teknologi ini juga meningkatkan efisiensi dalam merencanakan dan mengimplementasikan langkah mitigasi dan penurunan nilai risiko bencana di Kabupaten Banjar.
- e. Pelatihan yang berkelanjutan untuk aparatur BPBD dan relawan merupakan faktor pendorong utama. Dengan sumber daya manusia yang terlatih, BPBD dapat lebih sigap dalam menghadapi bencana dan melaksanakan strategi mitigasi yang efektif. Peningkatan kapasitas ini berkontribusi pada penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Banjar.

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah:

- a. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Banjar adalah keterbatasan anggaran setiap stakeholder terkait kebencanaan dalam rangka mendukung pemenuhan syarat yang



ditentukan pada pemenuhan penilaian 71 indikator Indeks kapasitas daerah.

- b. Meskipun BPBD Kabupaten Banjar telah melakukan pelatihan, namun masih ada kekurangan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih di lapangan. Hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan risiko bencana yang efektif, khususnya pada saat terjadi bencana besar.
- c. Infrastruktur yang belum memadai, seperti fasilitas *Early Warning System* yang dimiliki masih minim sehingga mempengaruhi dalam penilaian indeks risiko bencana.

Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan pada indikator ini antara lain:

- a. Optimalisasi dana desa dan anggaran daerah untuk program pengurangan risiko bencana.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi dan tanggap darurat.
- c. Pemberdayaan komunitas siaga bencana (Relawan, BPBD, dan tim SAR lokal).
- d. Penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

## 21. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dengan persentase capaian sebesar 304,25 persen, pendukung keberhasilan target indikator ini antara lain:

- a. Adanya dukungan dari pimpinan
- b. Komitmen bersama dengan seluruh tim dalam meningkatkan PAD
- c. Penerapan Aplikasi Zona Nilai Tanah (ZNT)
- d. Efektivitas Pos pemantau MBLB
- e. Rekon Pajak dan Retribusi serta BLUD
- f. Adanya aplikasi INTAN DARA
- g. Adanya aplikasi Smart Gov
- h. Meningkatnya pembayaran secara online

Faktor Penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan yakni:

- a. Integrasi aplikasi dengan SKPD terkait belum dapat dilakukan (dalam proses)
- b. Validasi data Wajib Pajak memerlukan waktu dan proses yang cukup Panjang
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perpajakan
- d. Adanya masalah penghitungan PAD khususnya terkait pada Dinas Kesehatan dan BLUD

Sedangkan opsi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan diatas antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia dibidang perpajakan.



- b. Digitalisasi sistem pajak daerah untuk mempermudah pembayaran dan meningkatkan transparansi.

## 22. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya komitmen pihak terkait untuk memberikan layanan yang terbaik, sehingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan hasilnya telah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan publik kedepannya

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah Pengumpulan data atau laporan dari perangkat daerah yang tidak tepat waktu, laporan yang disampaikan banyak yang kurang sesuai dengan ketentuan baik dari sisi bentuk format maupun isi materi.

Adapun untuk mengatasi hambatan dalam pengumpulan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu ada sosialisasi/desk untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah untuk bisa berkomitmen menyampaikan laporan yang sesuai dengan format yang dibagikan dan agar bisa tepat waktu dalam penyampaian.

## 23. NILAI SAKIP

Pencapaian target di indikator ini masih belum bisa maksimal, masih dibawah target yang ditetapkan, hambatannya adalah masih ada beberapa catatan dari evaluator KemenPANRB ditahun sebelumnya yang belum bisa ditindaklanjuti dengan baik dan optimal oleh pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga pada penilaian evaluasi SAKIP tahun 2024 nilai yang didapatkan Kabupaten Banjar justru sedikit lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung dalam pencapaian target sasaran kinerja ini antara lain adanya dukungan dan kerjasama yang solid pada perangkat daerah yang mengawal implementasi SAKIP, dan adanya Penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal implementasi SAKIP, serta adanya niat dan kemauan yang kuat untuk bisa maju dan lebih baik dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sebagai usaha perbaikan maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu berkomitmen penuh untuk bisa memenuhi semua catatan/rekomendasi yang didapat dari LHE AKIP KemenPANRB, dan terus berusaha meningkatkan implementasi akuntabilitas pada setiap unsur penilaian.

## 24. NILAI OPINI BPK

Faktor Pendukungnya adalah:

- a. Sumber daya manusia penyusunan laporan keuangan baik di Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah sudah memadai (mampu menggunakan aplikasi dan memahami pengelolaan keuangan)
- b. Seluruh belanja dilakukan dengan transaksi non tunai melalui aplikasi pada Bank Kalsel
- c. Pada bidang akuntansi dan bidang aset rutin dilakukan pelaporan



bulanan, pelaporan triwulanan, pelaporan semesteran dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk desk, rekonsiliasi, koordinasi dan konsultasi.

d. Adanya aturan/regulasi yang jelas sebagai dasar acuan pelaksanaan.

Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Jaringan internet yang kerap bermasalah.
- b. Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan sehingga cenderung tidak stabil.
- c. Adanya sebagian perangkat daerah yang terlambat dalam penyampaian Laporan BMD
- d. Pada kebanyakan perangkat daerah koordinasi internalnya masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang.
- e. Tidak semua Pengurus Barang memahami mekanisme Pelaporan BMD.

Dalam hal ini yang bisa menjadi alternatif solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut antara lain:

- a. Perlu ada koordinasi dengan pihak penyedia jaringan internet agar bisa menyelesaikan masalah koneksi yang sering bermasalah dan menambah kecepatan pada jaringan yang digunakan.
- b. Sosialisasi atau peningkatan kapasitas para Bendahara Barang seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam penatausahaan barang milik daerah.
- c. Mendorong agar penyampaian laporan bisa lebih tepat waktu.

## 25. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

Faktor keberhasilan capaian IPAK tersebut didukung oleh adanya:

- a. Adanya sosialisasi dan kampanye kebijakan anti korupsi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Adanya dukungan anggaran yang memadai.
- c. Adanya dukungan BPS dan *stakeholder* lainnya untuk melaksanakan Survei.
- d. Terlaksananya dengan baik *Survey* Perilaku Anti Korupsi yang merupakan survey untuk memetakan risiko korupsi dari dimensi persepsi dan pengalaman.

Dimana yang menjadi hambatannya adalah:

- a. Persepsi masyarakat Kabupaten Banjar masih permisif pada perilaku-perilaku korupsi.
- b. Masih rendahnya kendali diri terhadap pengaruh buruk korupsi.
- c. Perbedaan penerimaan informasi pada sosialisasi anti korupsi mempengaruhi persepsi perilaku anti korupsi.



Adapun beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
- b. Mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran negara.
- c. Meningkatkan transparansi dalam proses hukum agar tidak terjadi intervensi dari pihak tertentu.
- d. Meningkatkan jumlah pelaksanaan pelatihan/sosialisasi kepada aparatur negara dan masyarakat tentang bahaya serta dampak korupsi.

## 26. INDEKS SPBE

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a. Telah dimulainya penerapan Standar nasional terkait tata kelola SPBE di level pemerintah daerah.
- b. Jaringan internet yang relatif stabil dengan jangkauan yang cukup merata untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital.

Sedangkan yang menjadi hambatan adalah:

- a. Kurangnya literasi SPBE pada unsur perangkat daerah.
- b. Belum tersusunnya Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE dan Proses Bisnis Terintegrasi SPBE.

Solusi yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan ini adalah:

- a. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banjar adalah belum adanya Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE dan Proses Bisnis Terintegrasi SPBE, sehingga hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah menyatukan persepsi antar instansi terkait konsep pelaksanaan SPBE, dan segera menyiapkan segala sesuatunya untuk tersusunnya peta rencana, arsitektur dan proses bisnis SPBE ditahun 2025 ini.
- b. Memberikan edukasi yang lebih mendalam kepada para aparat pemerintahan tentang pentingnya penerapan SPBE, dan penyampaian secara detil kepada instansi terkait peran serta tanggungnya masing-masing.

## 27. INDEKS PROFESIONAL ASN

Faktor pendukung untuk pencapaian sasaran strataegis ini adalah:

- a. Pelaksanaan evaluasi kinerja individu melalui sistem digitalisasi E-Kinerja memudahkan dalam proses pengisian SKP individu masing-masing pegawai secara lebih efektif.
- b. Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai pelatihan teknis dan manajerial.
- c. Adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait pengembangan kompetensi ASN.

Faktor Penghambat

- a. Masih rendahnya nilai pada dimensi kompetensi dikarenakan belum



optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis 20 JP sehingga berkontribusi terhadap rendahnya nilai IP ASN dimensi kompetensi dan mempengaruhi nilai IP ASN secara keseluruhan.

- b. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk melakukan updating data di SIASN.
- c. Masih kurangnya kesadaran tentang aturan disiplin, profesionalisme dan tanggung jawab, serta sanksi yang diberikan masih kurang tegas.

Sehingga langkah tindak lanjut yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi hambatan di indikator ini antara lain:

- a. Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja ASN berbasis merit.
- b. Meningkatkan program pelatihan berbasis kebutuhan kerja
- c. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kode etik dan aturan disiplin.
- d. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku menyimpang.
- e. Mengembangkan budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

## 28. ANGKA KASUS KONFLIK IDEOLOGI, SARA, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT YANG TERTANGANI

Yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain:

- a. Adanya kerjasama dan koordinasi yang intensif antara pihak Pemerintah Daerah dengan institusi terkait seperti TNI, Polri, BIN, dan BNN, serta dengan mitra kerja lainnya seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS) dan lain-lain dalam menangani segala potensi konflik yang muncul.
- b. Adanya aturan dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat yang mengatur tentang pelaksanaan penanganan konflik sosial.
- c. Makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberagaman agama, budaya dan pandangan hidup.

Adapun hambatan yang ditemui antara lain:

- a. Masih ada kelompok masyarakat yang memegang sikap eksklusif terhadap kelompok lain yang berbeda dalam hal agama, budaya, atau ideologi.
- b. Maraknya beredar kabar hoax yang membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

sehingga pemerintah disini perlu:

- a. Meningkatkan dialog terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan melibatkan mediator yang netral seperti tokoh masyarakat



atau pemuka agama.

- b. Mengadakan pelatihan resolusi konflik bagi masyarakat dan pemimpin lokal.
- c. Mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi melalui media sosial dan kampanye publik.
- d. Mendukung masyarakat supaya kritis dan tidak langsung percaya pada informasi-informasi yang beredar yang cenderung bombastis dan bisa menciptakan reaksi emosional berlebihan.

#### F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai

Terkait penerapan anggaran berbasis kinerja yang dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran, hal ini sejalan dengan tujuan reformasi dibidang anggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam anggaran. Efisiensi anggaran dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Efisiensi Ekonomis.

Sejauh mana biaya yang dikeluarkan menghasilkan output maksimal dengan pengeluaran minimal.

- b. Efisiensi Operasional:

Bagaimana suatu entitas mengelola anggarannya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan.

- c. Efisiensi Alokatif:

Seberapa baik anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi atau proyek.

- d. Efisiensi Hasil (Outcome Efficiency)

Mengukur dampak nyata dari anggaran yang digunakan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya khususnya dalam membandingkan antara capaian indikator sasaran strategis yang diperjanjikan oleh Kepala Daerah dengan capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah:

#### Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,47	82,38	99,89	352.470.993.692	302.986.945.665	85,96
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	63,01	62,72	99,54	733.869.905.693	632.824.872.207	86,23
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	79,09	79,72	100,8	2.790.124.946	2.601.166.761	93,23
4	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,73	81,54	99,77	12.602.311.711	11.635.544.139	92,33

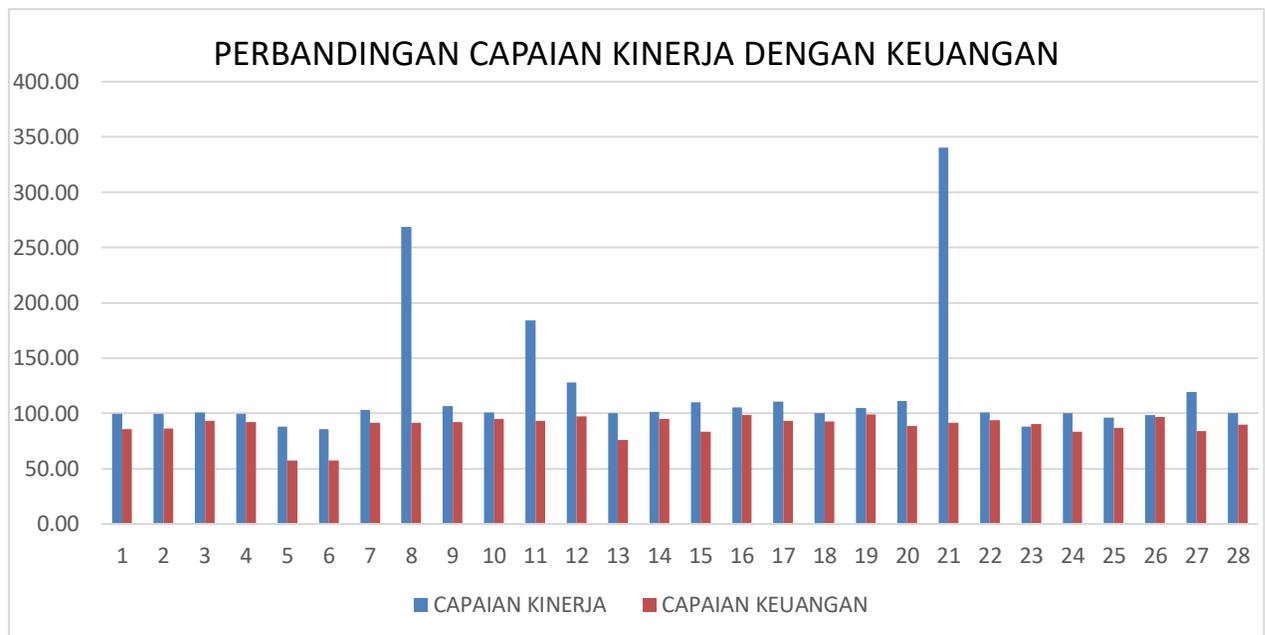


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,473	0,53	87,95	667.370.500	382.985.582	57,39
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,24	59,20	85,50	667.370.500	382.985.582	57,39
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	84,44	103,15	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
7	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	2,5	6,71	268,40	52.303.202.802	47.924.250.542	91,63
		LPE sub sektor perikanan	3,88	4,13	106,44	4.996.059.000	4.611.987.076	92,31
		Nilai Tukar Petani (NTP)	114,68	114,35	99,71	587.369.000	558.868.236	95,15
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2,31	4,26	184,42	2.570.863.600	2.395.197.387	93,17
		Jumlah kunjungan wisatawan	4.500.000	5.763.538	128,08	5.548.907.300	5.405.993.238	97,42
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72	2,71	100,37	12.040.139.443	9.107.235.874	75,64
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	42,34	41,61	98,28	708.728.000	672.961.150	94,95
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,2	16,71	109,93	1.363.136.660	1.140.929.466	83,70
11	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,734	0,7743	105,49	191.855.594.148	189.179.812.584	98,61
12	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	79,25	87,723	110,69	195.641.810.090	183.017.983.140	93,55
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	94,526	100	2.387.134.200	2.220.081.564	93,00
14	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	9,04	8,58	105,09	6.487.197.800	6.421.115.052	98,98
15	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	132,94	118,31	111	5.510.265.200	4.873.778.951	88,45
16	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4	13,61	340,25	313.801.304.303	287.446.300.746	91,60
17	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,67	100,78	181.870.400	171.244.990	94,16
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	76,32	67,06	87,87	16.554.949.916	14.927.896.712	90,17
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	3.652.734.710	3.054.223.791	83,61
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,12	3,96	96,12	250.750.000	217.563.400	86,77
19	Berkembangnya profesional ASN	Indeks SPBE	2,92	2,87	98,29	15.949.156.692	15.407.359.798	96,60
		Indeks Profesionalitas ASN	65,5	78,22	119,42	21.175.029.644	17.854.411.222	84,32
20	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	0	100	2.977.163.900	2.667.256.277	89,59
Rata-rata capaian kinerja					119,54			88,48

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase rata-rata realisasi



keuangan atas sasaran strategis kepala daerah ditahun 2024 adalah sebesar 88,48 persen, angka ini sebenarnya masih angka sementara, karena sampai laporan ini disusun masih dilaksanakan finalisasi dalam pengukuran realisasi anggaran Kabupaten Banjar tahun 2024, namun dapat terlihat dari perbandingan antara kedua capaian bahwa secara capaian anggaran dan capaian kinerja pada sasaran strategis berbanding lurus, dimana capaian kinerja melebihi capaian keuangan kondisi ini menunjukkan bahwa ada upaya efisiensi pendanaan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja.



Secara singkat efisiensi anggaran dapat dilihat dapat tabel berikut, yang menampilkan capaian kinerja pada indikator kinerja yang mencapai 100 persen keatas:

#### Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	2.790.124.946	2.601.166.761	93,23	188.958.185	6,77
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47	15.497.180.295	8,53
3	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	52.303.202.802	47.924.250.542	91,63	4.378.952.260	8,37
		LPE sub sektor perikanan	4.996.059.000	4.611.987.076	92,31	384.071.924	7,69
4	Meningkatnya industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	2.570.863.600	2.395.197.387	93,17	175.666.213	6,83
		Jumlah kunjungan wisatawan	5.548.907.300	5.405.993.238	97,42	142.914.062	2,58
5	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	12.040.139.443	9.107.235.874	75,64	2.932.903.569	24,36



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah Efisiensi	Tingkat Efisiensi
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1.363.136.660	1.140.929.466	83,70	222.207.194	16,30
7	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	191.855.594.148	189.179.812.584	98,61	2.675.781.564	1,39
8	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	195.641.810.090	183.017.983.140	93,55	12.623.826.950	6,45
9	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	2.387.134.200	2.220.081.564	93,00	167.052.636	7,00
10	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	6.487.197.800	6.421.115.052	98,98	66.082.748	1,02
11	Meningkatnya mitigasi kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	5.510.265.200	4.873.778.951	88,45	636.486.249	11,55
12	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	313.801.304.303	287.446.300.746	91,60	26.355.003.557	8,40
13	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	181.870.400	171.244.990	94,16	10.625.410	5,84
14	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Opini BPK	3.652.734.710	3.054.223.791	83,61	598.510.919	16,39
15	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	21.175.029.644	17.854.411.222	84,32	3.320.618.422	15,68
16	Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	2.977.163.900	2.667.256.277	89,59	309.907.623	10,41
Rata-rata capaian kinerja					90,80		9,20

Dari total 28 indikator kinerja pada sasaran strategis kabupaten, ada 18 indikator kinerja yang persentase capaian kinerjanya telah mencapai 100 persen, dan kalau dibandingkan dengan efisiensi yang diperoleh per indikator kinerja dapat diketahui dari tabel diatas bahwa rata-rata efisiensi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 9,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memastikan bahwa dana atau anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Namun tentunya tingkat efisiensi ini masih perlu ditingkatkan karena setiap instansi pemerintah dituntut menghasilkan output maksimal dengan pengeluaran minimal, dan bisa mengelola anggaran sebaik-



baiknya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan.

## **G. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh program/kegiatan sebagai alat atau sarana mencapai tujuan sesuai target yang ditetapkan, untuk itu harus dilakukan analisis atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tercapai tidaknya target kinerja. Berikut dijabarkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

### **1. INDEKS KESEHATAN**

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan 4 program di Dinas Kesehatan yakni:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas antara lain adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB), Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, Pengelolaan Upaya Pengurangan



Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## 2. INDEKS PENDIDIKAN

Pada Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab atas sasaran dan indikator kinerja Indeks Pendidikan ini, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian targetnya adalah:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah

- Pengumpulan data Anak Tidak Sekolah (ATS) terdiri dari belum pernah bersekolah, putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan.
- Pemberian biaya personil bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu
- Pendekatan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai baik jumlah maupun kualitas.
- Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar terkait data pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk peningkatan kesadaran para orang tua dan warga belajar untuk dapat menempuh pendidikan.
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- Peningkatan pemahaman dan implementasi kurikulum nasional maupun muatan lokal.
- Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak pendukung (stakeholder) lainnya untuk mencapai keberhasilan
- Memfasilitasi pembentukan dewan pendidikan sebagai lembaga mitra pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan.

## 3. INDEKS DAYA BELI

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan 2 program di Dinas KUMPP yakni:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- 2) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah

- Pemantauan Harga dan Stok Bapokting
- Sidak Gejolak Harga Bapokting



- Operasi Pasar/Pasar Murah
- Revitalisasi/rehab Pasar Rakyat
- Pelayanan Tera/tera ulang dan Pengawasannya
- Fasilitasi Perijinan Berusaha Sektor Perdagangan dan pengawasan
- Sosialisasi P3DN
- Fasilitasi Pemasaran pada ritel modern, marketplace, dan expo
- Pelatihan Pengembangan Ekspor

#### 4. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Dalam mencapai pemenuhan target indikator ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sedangkan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah

- Intensifikasi pertanian dengan penggunaan benih unggul dan pupuk yang tepat.
- Diversifikasi produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
- Pengelolaan stok pangan oleh pemerintah dan masyarakat
- Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kecil di sektor pertanian dan pangan.
- Pengawasan rantai distribusi untuk mencegah spekulasi harga oleh pedagang besar.
- Pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan dan banjir.

#### 5. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Dalam pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan maka beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiannya antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 3) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 4) Program Perlindungan Perempuan

Dalam pelaksanaan program ini kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ARG bagi perencana, SKPD dan Kecamatan Tahun 2024
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,



Hukum, Sosial dan Ekonomi

- Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Gambut, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Desa Pemurus Kec. Aluh-Aluh, Pengaron, Mataraman, dan Sambung Makmur
- Rapat Koordinasi TPK2D
- Lomba TPK2D
- Sosialisasi Pencegahan Perkawinan anak
- Rakor PUSPAGA
- Sosialisasi PUSPAGA
- Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
- Pelayanan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

#### 6. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 2) Program Perlindungan Khusus Anak

Dengan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas berupa:

- Kegiatan Kabupaten Layak Anak (Mesjid Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, Desa Kelurahan Layak anak)
- Evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
- Pendampingan Kepada Anak Korban Kekerasan (Fasilitasi layanan Pendampingan Psikolog Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Mediasi, Layanan konseling terhadap kasus anak, Melakukan penjangkauan)
- Sosialisasi anti kekerasan (bullying) dan anti pernikahan dini di Kecamatan

#### 7. INDEKS KONEKTIVITAS

Untuk Indeks Konektivitas penanggung jawab atas keberhasilan dan pencapaian indikator ini ada pada 2 perangkat daerah yakni Dinas PUPRP dan Dinas Perhubungan. Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan program yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas dengan indikator Indeks Konektivitas ini. Adapun beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

Dinas PUPRP

- Melaksanakan Penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan.



- Melaksanakan survey kondisi jalan/jembatan
- Melaksanakan pembangunan jalan baru dan perawatan jalan agar tetap layak digunakan.
- Meningkatkan kualitas jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan transportasi logistik.
- Mengembangkan jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya untuk menghubungkan daerah terpencil.
- Merancang tata ruang yang mendukung integrasi transportasi.

#### Dinas Perhubungan

- Menyusun kebijakan dan perencanaan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- Mengembangkan infrastruktur jalan, terminal, dan pelabuhan yang mendukung konektivitas.
- Meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil atau tertinggal.
- Mengatur trayek angkutan umum untuk memastikan konektivitas yang optimal.
- Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih nyaman dan efisien.
- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan transportasi untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.

#### 8. LPE SUB SEKTOR PERTANIAN

Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 6) Program Penyuluhan Pertanian

Sedangkan kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam berbagai program tersebut antara lain adalah:

- Melakukan penyesuaian pengadaan saprodi dari pusat dengan kondisi lapangan (kebutuhan saprodi petani) untuk menunjang dalam peningkatan produksi pertanian
- Karena terbatasnya pendanaan APBD untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, maka dilakukan pengusulan bantuan saprodi melalui dana APBD prov dan APBN
- Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok tani melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya secara komersil dan menerapkan teknologi terkini agar petani menggunakan benih varietas unggul untuk usahatani



- Menyebarluaskan program penumbuhan dan pengembangan petani dalam rangka optimalisasi rigenerasi petani, agar minat petani muda bekerja disektor pertanian
- Adanya kegiatan Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS) guna mendukung dalam hal bantuan modal kepada petani untuk usaha dibidang pertanian
- Melakukan gerakan pengendalian dan penanganan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) untuk meningkatkan produksi pertanian.
- Melakukan pengendalian penyakit pada ternak dengan vaknisasi, pemberian vitamin dan pengobatan serta tersedianya dana operasional SIKOMANDAN dari APBD Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik untuk peningkatan populasi ternak
- Mengoptimalkan penyelenggaraan kelembagaan petani (kelembagaannya, peningkatan SDMP-nya, sarana dan prasarana penunjang penyuluhannya)
- Meningkatkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi; (b) pusat gerakan pembangunan pertanian; (c) pusat pembelajaran; (d) pusat konsultasi agribisnis; dan (e) pusat pengembangan jejaringan kemitraan
- Mengoptimalkan koordinasi dengan stekaholder baik secara vertikal (Dinas instansi terkait) maupun horizontal (Bupati, dan Kementerian)

#### 9. LPE SUB SEKTOR PERIKANAN

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Sedangkan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program di atas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah:

- Pembinaan bagi nelayan dan pembudidaya dalam hal budidaya maupun tangkapan untuk meningkatkan produksi
- Bantuan sarana dan prasarana
- Fasilitasi pembentukan kelompok dan akses modal
- Memberikan rekomendasi bagi nelayan dan pembudidaya agar mudah memperoleh bantuan sarana/prasarana
- Fasilitasi bantuan pendanaan, pendampingan pemberian pelatihan kepada kelompok usaha atau masyarakat.
- Melakukan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudi dayaan ikan kecil
- Pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan



- Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
- Pelaksanaan Sosialisasi Gemarikan Tahun 2024 sebanyak 5 kali.

#### 10. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 7) Program Penyuluhan Pertanian

Adapun beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- Mendorong penggunaan benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen.
- Memperkuat pendampingan dan penyuluhan bagi petani agar menerapkan praktik pertanian yang efisien.
- Mengembangkan program diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen dan ketergantungan pada satu komoditas.
- Mengembangkan mekanisme serapan hasil panen melalui koperasi atau BUMD pertanian untuk menghindari anjloknya harga saat panen raya.
- Memberikan subsidi atau bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.
- Menyediakan pupuk bersubsidi dan akses ke sarana produksi dengan harga terjangkau.
- Memfasilitasi akses ke irigasi yang baik untuk mengurangi biaya penggunaan air bagi petani.
- Memfasilitasi petani dalam mengakses kredit usaha tani (KUR) dengan bunga rendah.

#### 11. LPE SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sedangkan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah:

- Fasilitasi Perijinan Usaha Sektor Perindustrian



- Pelatihan Diversifikasi Industri
- Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi industri al: PIRT, HALAL, TKDN
- Fasilitasi Kemasan Produk
- Fasilitasi Pemasaran IKM pada Dekranasda, Ruang Pamer, dan Expo dalam dan luar Daerah
- Sertifikasi Batu mulia/permata
- Pengawasan perijinan Industri
- Fasilitasi keterampilan IKM pengolahan batu permata/perhiasan pada Workshop Batu Permata/Perhiasan
- Pengolah data Industri pada SIINAS

## 12. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Pada Dinas Porapar sebagai penanggung jawab atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian targetnya adalah:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- Pengembangan Destinasi Wisata
- Promosi dan Pemasaran Pariwisata
- Peningkatan Aksesibilitas dan Transportasi
- Pengembangan Wisata Berbasis Komunitas
- Peningkatan Event dan Festival Wisata
- Digitalisasi dan Inovasi Layanan Wisata

## 13. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 2) Program Hubungan Industrial
- 3) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah:

- Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
  - Program Pelatihan vokasional dan teknis untuk meningkatkan keterampilan pekerja.
  - Pelatihan kewirausahaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
- Penyediaan Informasi dan Konseling Karir
  - Bursa Kerja Dan Job Fair, Pameran karir untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan.



- Layanan konseling karir untuk membantu pencari kerja dalam merencanakan karir mereka.
- Mengembangkan portal pekerjaan online yang menyediakan informasi tentang lowongan kerja.
- Program Penempatan Kerja
  - Kerjasama dengan perusahaan untuk menempatkan pencari kerja,
  - Melaksanakan program kerja sama antar daerah atau internasional untuk penempatan kerja
- Penguatan Kebijakan dan Regulasi Tenaga Kerja
  - Peninjauan dan perbaikan regulasi terkait ketenagakerjaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
  - Implementasi kebijakan upah minimum yang adil.
  - Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan peningkatan kondisi kerja.

#### 14. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 4) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- 5) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Dimana dalam program diatas dilaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas dalam mencapai sasaran dan target indikator seperti:

- Fasilitasi Perijinan Koperasi
- Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Pelatihan Perkoperasian
- Fasilitasi akses permodalan
- Fasilitasi Akses pemasaran
- Fasilitasi Kemitraan

#### 15. Pendampingan oleh tenaga pendamping koperasi

##### PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 2) Program pengembangan UMKM

Adapun beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- Memberikan fasilitasi dalam perijinan
- Memberikan fasilitasi permodalan
- Melaksanakan pelatihan Kewirausahaan



- Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi al: PIRT, Halal, HKI
- Memberikan fasilitasi kemitraan usaha
- Memberikan fasilitasi untuk akses pemasaran

#### 16. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai IDM guna mendorong desa mencapai status desa maju dan mandiri. Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah:

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat .

Berikut peranan Dinas PMD dalam meningkatkan IDM melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

- Memastikan desa memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan sarana umum seperti air bersih dan listrik.
- Mendorong pengelolaan administrasi desa yang lebih baik melalui penerapan sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
- Memfasilitasi pendampingan desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan.
- Mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja.
- Mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan UMKM, pertanian, dan pengolahan hasil desa.
- Memfasilitasi akses permodalan dan bantuan untuk usaha produktif di desa.
- Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap desa dalam pengisian data IDM secara berkala.
- Menyusun strategi peningkatan status desa berdasarkan hasil evaluasi IDM.
- Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan dalam percepatan pembangunan desa.

DPMD berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan pengawas dalam pembangunan desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, diharapkan bisa mempercepat transformasi desa menuju desa mandiri dan sejahtera.

#### 17. INDEKS INFRASTRUKTUR

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air



Minum

- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 5) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 6) Program Penyelenggaraan Jalan (kegiatan. Rehabilitasi jalan)
- 7) Program pengembangan jasa konstruksi

Adapun beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- Membangun dan memperluas jaringan jalan dan jembatan .
- Meningkatkan konektivitas multimoda antara darat, laut, dan udara
- Membangun dan memperluas jaringan listrik ke daerah terpencil
- Membangun dan memperluas jaringan air bersih ke daerah yang masih kekurangan akses..
- Meningkatkan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan internet
- Mendorong pembangunan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengelola tata ruang kota agar lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Meningkatkan fasilitas umum, seperti taman kota, trotoar, dan jalur sepeda.
- Meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
- Mengoptimalkan penggunaan APBN/APBD untuk proyek infrastruktur prioritas.
- Melakukan audit berkala terhadap infrastruktur yang sudah ada untuk memastikan efisiensi dan keamanan.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kondisi infrastruktur.

#### 18. PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah:

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung
- 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 4) Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- 5) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- 6) Program penatagunaan tanah.

Dimana dalam program diatas dilaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas dalam mencapai sasaran dan target indikator seperti:

- Menyusun dan memperbarui RTR sesuai dengan perkembangan wilayah



dan kebutuhan masyarakat.

- Melakukan sosialisasi RTR kepada pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat umum.
- Melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas pembangunan di berbagai sektor.
- Menindak tegas pelanggaran tata ruang dengan sanksi administratif, denda, atau pembongkaran bangunan ilegal.
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam implementasi RTR.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang.
- Mendorong pembangunan infrastruktur hijau dan kawasan yang ramah lingkungan sesuai RTR.
- Melakukan evaluasi RTR secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan.

#### 19. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah Program Kawasan Permukiman, sedang kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRKPLH dalam menunjang tercapainya target indikator adalah:

- Membangun dan memperbaiki jalan lingkungan agar lebih layak dan aman.
- Memperbaiki sistem drainase untuk mencegah banjir dan genangan air.
- Melakukan program bedah rumah bagi warga dengan rumah tidak layak huni.
- Memberikan bantuan renovasi atau subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Membangun tempat pembuangan sampah yang lebih baik dan meningkatkan layanan pengangkutan sampah.
- Mendorong program bank sampah dan daur ulang untuk mengurangi limbah.
- Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar permukiman untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
- Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### 20. INDEKS RESIKO BENCANA

Program Penanggulangan Bencana Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Banjar untuk mencapai target indikator kinerja IRB, dalam program ini dilaksanakan beberapa aktivitas atau kegiatan seperti, melakukan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana diantaranya melakukan Sosialisasi/Pelatihan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PPBM) di desa, kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat Kabupaten, Melaksanakan kegiatan sosialisasi, worksop,



sekaligus pembentukan desa tanggung bencana (DESTANA) pada desa Munggu Raya Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, serta dalam tahapan proses pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

## 21. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan melaksanakan berbagai aktivitas seperti:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak
- Memperbaiki sistem retribusi daerah, seperti retribusi pasar, parkir, dan pelayanan publik.
- Mengintegrasikan sistem keuangan daerah dengan layanan perbankan untuk mempercepat penerimaan pajak dan retribusi.
- Mengembangkan sistem pajak online untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi dan insentif bagi mereka yang membayar pajak tepat waktu.
- Mengoptimalkan pelaporan dan monitoring penggunaan PAD untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

## 22. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pada indikator ini program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaannya adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sedang kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Banjar sebagai penanggungjawab atas pencapaian target indikator ini adalah dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Berikut beberapa aktivitas utama dalam pencapaian indikator IKM ini:

- Mensosialisasikan kepada perangkat daerah dan unit kerja untuk melaksanakan SKM dan menyiapkan kuisisioner indikator kepuasan berdasarkan 9 unsur SKM (seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, kualitas layanan, pengaduan, dan sarana prasarana).
- Menghimpun data hasil survey kepuasan dari semua perangkat daerah dan unit kerja
- Membuat tabulasi data dan menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kabupaten sebagai nilai akumulasi atas nilai kepuasan masyarakat per perangkat daerah dan unit kerja.
- Menyampaikan laporan hasil perhitungan IKM kepada pihak pihak terkait.



### 23. NILAI SAKIP

Dalam pencapaian target Nilai SAKIP sejatinya ada tiga perangkat daerah yang bertugas mengawal, bertanggung jawab dan memiliki peranan paling besar yakni, Bappedalitbang, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi, namun sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 dicantumkan bahwa program yang menunjang pencapaian target ini cuma diambil dari perangkat daerah Bappedalitbang dan Sekretariat Daerah, karena peranan ITDA lebih ke tahapan evaluasi pelaksanaannya. Adapun program dimaksud adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pencapaian target ini antara lain:

#### **Bappedalitbang**

- Sinkronisasi Perencanaan Kinerja
- Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
- Pembinaan dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah

#### **Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)**

- Penyusunan Kebijakan dan Regulasi SAKIP
- Pembinaan dan Penguatan Budaya Kinerja
- Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Sedangkan titik sinergi antara keduanya adalah, Bappeda memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja daerah. Bagian Organisasi memastikan mekanisme tata kelola kinerja berjalan dengan baik sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Keduanya bekerja sama dalam evaluasi kinerja daerah, penyusunan laporan SAKIP, dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi.

### 24. NILAI OPINI BPK

BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) memiliki peran krusial dalam meningkatkan nilai opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di mana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi standar tertinggi. Adapun program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam pelaksanaan program diatas, aspek yang menjadi fokus utama pelaksanaannya adalah :

- Menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan daerah



- Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  - Optimalisasi penerimaan daerah dari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan sumber lainnya.
  - Peningkatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi.
  - Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah.
- Pengelolaan Belanja Daerah.
  - Pengawasan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
  - Penerapan sistem pengendalian internal dalam belanja daerah.
- Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  - Penyampaian laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran.
  - Peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
- Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Daerah.

## 25. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

Dalam mencapai target indikator kinerja ini ITDA Kab. Banjar sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaannya menjalankan program:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) karena lembaga ini bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut beberapa peranan ITDA dalam meningkatkan capaian nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).

- Melakukan audit, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran di tingkat daerah. Dengan pengawasan yang ketat, praktik korupsi dapat diminimalisir sehingga meningkatkan IPAK.
- Melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, ITDA membantu membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak korupsi.
- Mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik. Ketika masyarakat melihat pemerintah yang bersih, mereka akan lebih termotivasi untuk menolak praktik korupsi.
- Inspektorat Daerah sering menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di pemerintahan daerah. Dengan adanya tindak lanjut terhadap laporan ini, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap



sistem pengawasan, sehingga kesadaran dan kepedulian terhadap antikorupsi meningkat.

- Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawas internal pemerintahan daerah, yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan bersih dari korupsi. Dengan menjalankan fungsinya secara optimal, Inspektorat Daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, perilaku, dan budaya antikorupsi di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap IPAK.

## 26. INDEKS SPBE

DKISP (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian) memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang mengukur kualitas penerapan digitalisasi dalam pemerintahan. Dalam mencapai target indikator Indeks SPBE ini, ada tiga program yang dilaksanakan oleh DKISP Kab. Banjar yakni:

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Program Aplikasi Informatika
- 3) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Sedangkan beberapa hal yang dilaksanakan oleh DKISP dalam menunjang pencapaian target indikator Indeks SPBE adalah:

- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi di daerah, seperti jaringan internet, pusat data, dan aplikasi layanan publik.
- Memfasilitasi pembangunan aplikasi dan platform digital untuk layanan pemerintahan.
- Memastikan bahwa data pemerintahan dan masyarakat tetap aman dari ancaman siber.
- Bertanggung jawab dalam memastikan berbagai sistem pemerintahan terintegrasi dengan baik sehingga data dapat digunakan secara efisien antar instansi.
- Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam penggunaan teknologi informasi melalui pelatihan dan sosialisasi.

DKISP memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi SPBE di pemerintahan daerah. Melalui pengelolaan infrastruktur, layanan digital, keamanan data, integrasi sistem, dan peningkatan literasi digital, DKISP dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai Indeks SPBE, sehingga mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

## 27. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN pencapaiannya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar. Dalam menunjang pencapaian tersebut dilaksanakan 2 program yakni:



- 1) Program Kepegawaian Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun beberapa hal yang dilaksanakan oleh BKPSDM dalam menunjang pencapaian indikator ini yakni:

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pelatihan serta pendidikan ASN, baik dalam bentuk Diklat, workshop, maupun bimbingan teknis.
- Melakukan evaluasi kinerja ASN secara objektif melalui mekanisme Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Individu.
- Mengembangkan sistem penghargaan dan sanksi yang berbasis meritokrasi untuk memotivasi ASN agar bekerja lebih profesional.
- Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian untuk mempermudah pengelolaan data dan administrasi ASN secara efektif.
- Mengawasi penerapan kode etik dan disiplin ASN untuk memastikan pegawai bekerja sesuai dengan aturan dan nilai-nilai profesionalitas.

BKPSDM berperan dalam menciptakan ASN yang berkompeten, berintegritas, dan profesional melalui rekrutmen yang transparan, pelatihan yang berkelanjutan, serta manajemen kinerja yang efektif. Dengan upaya tersebut, Indeks Profesionalitas ASN dapat meningkat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan akuntabel.

## 28. ANGKA KASUS KONFLIK IDEOLOGI, SARA, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT YANG TERTANGANI.

Program yang dilaksanakan pada lingkup Badan Kesbangpol untuk mendukung pencapaian target indikator ini yakni:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Untuk aktivitas yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian indikator ini antara lain:

- Melakukan pemantauan dan analisis potensi konflik melalui koordinasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat.
- Dengan deteksi dini, pemerintah daerah dapat mencegah eskalasi konflik sebelum terjadi kekerasan atau kerusuhan.
- Sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik antar kelompok, masyarakat, atau individu melalui pendekatan dialog dan musyawarah.
- Menyenggarakan sosialisasi dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan, toleransi, dan keberagaman untuk mencegah konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Membentuk dan memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah komunikasi antar kelompok untuk



mencegah konflik.

- Bekerja sama dan menjalin koordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi lainnya untuk memastikan langkah-langkah penanganan konflik berjalan efektif.
- Mendorong penyelesaian konflik secara damai, adil, dan tanpa kekerasan

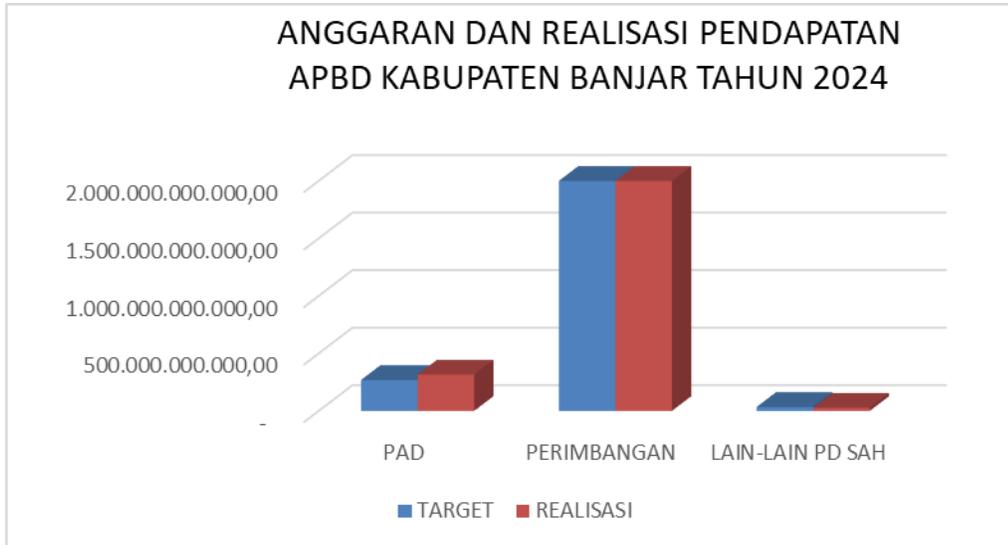
## H. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja APBD Kabupaten Banjar tahun 2024 masuk dalam Kategori Tinggi, ini dilihat dari komponen APBD Pendapatan Daerah tercapai 113,36 % atau sebesar Rp. 2.990.464.810.211,86 dari pagu rencana pendapatan sebesar Rp. 2.638.005.176.356,00, Kemudian realisasi Belanja Daerah mencapai 90,24 % dari realisasi belanja sebesar Rp. 2.744.178.174.292,26 dari target belanja sebesar Rp. 3.041.125.510.897,00, kemudian realisasi Pembiayaan sebesar 100,01% atau senilai Rp. 403.146.358.540,89 atas rencana pagu anggaran pembiayaan sebesar Rp. 403.120.334.541,00 sehingga terdapat Silpa anggaran senilai Rp. 649.432.994.460,49 dengan persentase rincian seperti grafik di bawah ini :



Dari komponen Pendapatan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Persentase realisasi PAD sebesar 117,30 persen atau Rp. 315.776.893.108,86 dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 269.195.238.027,00, Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.334.101.020.838,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.647.209.053.414,00 dengan persentase capaian 113,41 persen. Kemudian untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah targetnya pada 2024 adalah sebesar Rp. 34.708.917.491,00, dengan realisasi sebesar Rp. 27.478.863.689,00 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 79,17 persen.

Dengan rincian persentase sebagaimana grafik berikut ini :



Komponen Belanja terealisasi sebesar Rp. 2.744.178.174.292,26 atau 90,24 persen dari pagu belanja sebesar Rp. 3.041.125.510.897,00, Komponen Belanja terbagi menjadi 4 objek yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi dapat dilihat pada grafik berikut:



### Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2024

No.	Uraian	CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	112.811.617.107,00	130.670.608.239,00	115,83	109.824.795.009,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	6.616.430.250,00	7.173.930.214,00	108,43	8.367.069.839,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	11.008.793.672,00	11.008.793.672,00	100,00	8.916.250.334,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	138.758.396.998,00	166.923.560.983,86	120,30	150.833.459.844,04
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		269.195.238.027,00	315.776.893.108,86	117,30	277.941.575.026,04
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	57.236.998.000,00	57.236.999.000,00	100,00	36.971.401.241,00



No.	Uraian	CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	736.379.301.000,00	955.712.418.761,00	129,79	564.917.111.162,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	821.309.221.000,00	811.192.115.956,00	98,77	720.866.934.775,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	333.983.476.000,00	324.862.914.934,00	97,27	341.356.453.666,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.948.908.996.000,00	2.149.004.448.651,00	110,27	1.664.111.900.844,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	38.188.045.000,00	38.188.045.000,00	100,00	5.672.424.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	223.773.702.000,00	223.773.702.000,00	100,00	222.580.763.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		261.961.747.000,00	261.961.747.000,00	100,00	228.253.187.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		123.230.277.838,00	236.242.857.763,00	191,71	188.402.649.001,00
22	Total Pendapatan Transfer		2.334.101.020.838,00	2.647.209.053.414,00	113,41	2.080.767.736.845,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah		6.567.047.850,00	0,00	0,00	2.444.000.000,00
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		28.141.869.641,00	27.478.863.689,00	97,64	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		34.708.917.491,00	27.478.863.689,00	79,17	2.444.000.000,00
27	JUMLAH PENDAPATAN		2.638.005.176.356,00	2.990.464.810.211,86	113,36	2.361.153.311.871,04
28	BELANJA	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.128.120.928.209,00	967.689.238.104,00	85,78	806.633.031.475,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	840.045.250.913,00	751.010.064.067,75	89,40	604.259.697.529,02
32	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	112.423.465.582,00	110.285.853.619,00	98,10	88.112.346.572,00
33	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	3.649.600.000,00	3.538.774.973,00	96,96	5.016.009.329,00
34	Jumlah Belanja Operasi		2.084.239.244.704,00	1.832.523.930.763,75	87,92	1.504.021.084.905,02
35	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
36	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	3.615.000.000,00	2.620.790.400,00	72,50	5.332.333.880,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	124.951.640.416,00	119.703.156.020,20	95,80	92.930.369.497,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	86.804.990.119,00	81.543.291.953,81	93,94	78.000.133.887,96
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	321.041.819.096,00	297.042.963.062,50	92,52	198.503.513.797,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.467.805.100,00	3.426.392.790,00	98,81	1.287.834.008,00
41	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	653.350.000,00	528.510.001,00	80,89	314.900.000,00
42	Jumlah Belanja Modal		540.534.604.731,00	504.865.104.227,51	93,40	376.369.085.069,96
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34	5.889.091.877,00
45	Jumlah Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000,00	1.534.226.050,00	15,34	5.889.091.877,00



No.	Uraian	CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
46	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
47	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	8.916.525.800,00	7.819.777.589,00	87,70	8.508.135.897,00
48	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	397.435.135.662,00	397.435.135.662,00	100,00	367.089.196.864,00
49	Jumlah Belanja Transfer		406.351.661.462,00	405.254.913.251,00	99,73	375.597.332.761,00
50	JUMLAH BELANJA		3.041.125.510.897,00	2.744.178.174.292,26	90,24	2.261.876.594.612,98
51	SURPLUS(DE FISIT)		(403.120.334.541,00)	246.286.635.919,60	(61,10)	99.276.717.258,06
52	PEMBIAYAAN	5.1.3				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
54	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya		429.120.334.541,00	429.120.334.540,89	100,00	363.419.641.282,83
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	26.024.000,00		2.473.976.000,00
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		429.120.334.541,00	429.146.358.540,89	100,01	365.893.617.282,83
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00
59	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	36.050.000.000,00
61	PEMBIAYAAN NETO		403.120.334.541,00	403.146.358.540,89	100,01	329.843.617.282,83
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.4	0,00	649.432.994.460,49		429.120.334.540,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Secara detail anggaran dan realisasi belanja APBD Kabupaten Banjar tahun 2024 per Perangkat Daerah tertuang dalam tabel berikut:

### Anggaran dan Realisasi Belanja per Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	733.869.905.693	633.971.963.140	86,39
2	Dinas Kesehatan	418.017.174.827	361.441.095.338	86,47
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	206.159.289.682	189.328.339.450	91,84
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	379.725.862.017	348.303.866.171	91,73
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	106.632.785.429	102.461.486.256	96,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.599.622.062	19.324.674.722	89,47
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.389.895.423	12.802.406.811	88,97
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	25.734.615.064	21.863.611.257	84,96
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.841.956.259	30.015.786.957	88,69
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.660.248.443	10.004.700.874	79,02
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.185.739.771	16.806.399.451	92,42



No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.483.262.751	10.035.436.845	87,39
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	191.855.594.148	189.331.963.135	98,68
14	Dinas Perhubungan	18.128.478.967	16.478.393.680	90,90
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	20.655.705.130	19.698.160.368	95,36
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	19.624.865.831	18.232.509.499	92,91
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.194.240.908	14.438.921.265	95,03
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.586.782.361	7.512.661.520	87,49
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	26.307.078.912	24.722.557.417	93,98
20	Dinas Pertanian	52.303.202.802	47.924.250.542	91,63
21	Sekretariat Daerah	82.251.344.633	75.548.578.858	91,85
22	Inspektorat Daerah	20.046.993.895	15.876.196.521	79,19
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	16.554.949.916	14.927.896.712	90,17
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	317.454.039.013	300.757.669.397	94,74
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.175.029.644	17.854.411.221	84,32
26	Sekretariat DPRD	101.447.855.600	86.717.572.386	85,48
27	Kecamatan Kertak Hanyar	6.895.169.017	6.635.118.627	96,23
28	Kecamatan Astambul	2.604.856.444	2.341.064.000	89,87
29	Kecamatan Gambut	6.636.890.934	6.030.477.405	90,86
30	Kecamatan Karang Intan	3.367.218.857	2.819.265.257	83,73
31	Kecamatan Martapura	15.371.770.039	14.736.789.909	95,87
32	Kecamatan Aranio	2.847.716.747	2.589.802.173	90,94
33	Kecamatan Sungai Tabuk	6.057.917.961	5.637.912.949	93,07
34	Kecamatan Aluh-Aluh	3.269.445.173	3.106.155.965	95,01
35	Kecamatan Mataraman	3.004.569.771	2.643.952.922	88,00
36	Kecamatan Simpang Empat	2.624.613.272	2.447.605.740	93,26
37	Kecamatan Pengaron	3.628.865.249	2.732.447.768	75,30
38	Kecamatan Sungai Pinang	2.631.828.048	2.235.734.954	84,95
39	Kecamatan Beruntung Baru	2.712.328.614	2.576.938.597	95,01
40	Kecamatan Martapura Barat	3.165.627.872	2.977.624.852	94,06
41	Kecamatan Sambung Makmur	2.384.118.699	2.196.160.562	92,12
42	Kecamatan Martapura Timur	3.291.177.652	2.790.843.366	84,80
43	Kecamatan Paramasan	2.421.484.167	2.175.980.390	89,86
44	Kecamatan Tatah Makmur	2.932.664.022	2.685.519.232	91,57
45	Kecamatan Telaga Bauntung	2.581.189.967	2.008.766.368	77,82
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.544.268.073	2.130.520.592	83,74
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66.265.271.138	64.297.982.871	97,03
	Jumlah	3.041.125.510.897,00	2.744.178.174.292	88,81

Sumber: BPKPAD Banjar

Dari tabel tersebut di atas rata-rata capaian keuangan pada Perangkat Daerah adalah 88,81 persen. Capaian tertinggi realisasi keuangan ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan capaian realisasi



sebesar 98,68 sedangkan capaian realisasi keuangan terendah pada Kecamatan Pengaron dengan capaian realisasi sebesar 75,30 persen.

Dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja yang akan dilakukan ditahun berikutnya, harus dilakukan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang beorientasi hasil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala harus dilakukan oleh internal perangkat daerah maupun oleh Pemerintah Daerah.

Dalam mengukur efektivitas penggunaan anggaran perlu melihat sejauh mana belanja daerah mencapai tujuan yang telah direncanakan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sehingga monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran telah digunakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan menerapkan sistem pemantauan yang ketat dan evaluasi berbasis data, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta kesejahteraan Masyarakat.



### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Dana Tugas Pembantuan sangat berarti bagi daerah karena dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa membebani APBD dan tidak memerlukan pendamping dari APBD, Dana Tugas Pembantuan berasal anggaran Kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan.



Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan data dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Kabupaten Banjar tidak menerima Kegiatan Pembangunan dengan sumber pendanaan dari Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dana tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Banjar mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 - 2024**

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar	-	-	-	990.600.000	-	-	-	-	-
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjar	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar	12.419.039.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RSU Ratu Zaleha Martapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar	7.000.000.000	6.939.094.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar	1.261.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar	-	-	950.000.000	950.000.000	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>21.180.627.000</b>	<b>6.939.094.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>5.940.600.000</b>	-	-	-	-	-

Sumber : DPA Dana Tugas Pembantuan Masing-Masing Perangkat Daerah

Dari tabel tersebut diketahui jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan dari tahun ketahun baik dari jumlah dana yang diterima dan jumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi pengelola.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1. Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang:

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada:

- a. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Persentase anak usia dini yang mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- b. SPM Pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- c. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Persentase pendidikan kesetaraan yang mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2024 sebagai PD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



### Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

#### Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	19.099	16.022	83,89%	1. Angka partisipasi sekolah	100	77,75	77,75%
						2. Angka partisipasi murni	100	56,47	56,47%
						3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	72,22	72,18	99,94%
						4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	68,63	67,73	98,69%
						5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	67,11	67,11%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
						6. Kecukupan formasi guru ASN	100	98,96	98,96%
						7. Indeks distribusi guru	100	99	99%
						8. Proporsi PTK bersertifikat	100	44,14	44,14%
						9. Proporsi PTK penggerak	100	11,58	11,58%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.507	77.517	83,80%	<b>SD</b>			
						1. Angka partisipasi kasar	100	108,45	91,44%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	89,01	91,71%
						3. Kemampuan literasi	72,71	75,06	83,79%
						4. Kemampuan numerasi	68,74	72,26	100%
						5. Indeks iklim keamanan	75,63	72,26	100%
						6. Indeks iklim kebinekaan	76,19	73,62	100%
						7. Indeks iklim inklusivitas	62,01	57,56	100%
						8. Kecukupan formasi guru ASN	100	82	84,63%
						9. Indeks distribusi guru	100	94,8	100%
						10. Proporsi PTK bersertifikat	100	81,1	64,62%
						11. Proporsi PTK Penggerak	100	8,94	64,70%
						<b>SMP</b>			
						1. Angka partisipasi kasar	100	108,45	100%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	89,01	89,01%
						3. Kemampuan literasi	72,71	75,06	100%
						4. Kemampuan numerasi	68,74	72,26	100%
						5. Indeks iklim keamanan	75,63	72,26	95,54%
						6. Indeks iklim kebinekaan	76,16	73,62	96,63%
						7. Indeks iklim inklusivitas	62,01	57,56	92,82%
						8. Kecukupan formasi guru ASN	100	82	82%
						9. Indeks distribusi guru	100	94,8	94,80%
						10. Proporsi PTK bersertifikat	100	81,1	81,10%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (orang)	Realisasi (orang)	%	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
						11. Proporsi PTK Penggerak	100	8,94	8,94%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	27.847	23.800	85,47%	1. Angka partisipasi sekolah	100	46,6	46,60%
						2. Kemampuan literasi	57,33	56,1	97,85%
						3. Kemampuan numerasi	49,73	49,83	100%
						4. Indeks iklim keamanan	67,94	66,74	98,23%
						5. Indeks iklim kebinekaan	61,63	61,63	100%
						6. Indeks iklim inklusivitas	54,23	52,79	97,34%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

$$IP_{SPM} \text{ Pendidikan Anak Usia Dini} = (72,63\% \times 20) + (83,89\% \times 80) = 14,53\% + 67,11\% = 81,64\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pendidikan Dasar} = (88,41\% \times 20) + (83,80\% \times 80) = 17,68\% + 67,04\% = 84,72\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Pendidikan Kesetaraan} = (95,39\% \times 20) + (85,47\% \times 80) = 19,08\% + 68,37\% = 87,45\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 adalah Tuntas Madya dengan nilai 84,60%.

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2024 berasal dari dana lainnya yaitu APBD Murni sebesar Rp. 74.845.559.745,- APBD DAK Fisik sebesar Rp. 32.203.173.000,- dan APBD DAK Non Fisik sebesar Rp. 75.835.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

##### Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendidikan Anak Usia Dini	21.105.523.892	20.834.432.800
Pendidikan Dasar	139.435.209.353	135.225.983.257
Pendidikan Kesetaraan	22.343.399.500	21.956.614.900
<b>TOTAL</b>	<b>182.884.132.745</b>	<b>178.017.031.335</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2025

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:



#### Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas Pendidikan	IV / b	S2		
2	Sekretaris Dinas Pendidikan	IV / a	S2		
3	Kabid. Bina PAUD, Pendidikan Keluarga dan Dikmas	III / d	S2		
4	Kabid Bina SD	IV / a	S2		
5	Kabid Bina SMP	IV / a	S2		
6	Kabid Sarpras	III / c	S1		
7	Kasubbag Perencanaan	III / d	S1		
8	Kasubbag Keuangan dan Aset	III /	S1		
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III /	S1		
10	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	IV / a	S1		
11	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	III / d	S2		
12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	III / c	S1		
13	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	IV / b	S2		Bimtek / Diklat terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
14	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	III / d	S2		
15	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	IV / a	S2		
16	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	III / c	S2		
17	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	IV / a	S2		
18	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	III / d	S1		
19	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	III / d	S1		
20	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar				
21	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	IV / a	S2		
22	Operator SPM Bidang PAUD/PNF	III / a	D-II		
23	Operator SPM Bidang SD	III / d	S1		
24	Operator SPM Bidang SMP	III / d	S1		
25	Operator SPM Bidang SARPRAS	III / c	S1		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Banjar, 2024

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

##### Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	APK Paud yang belum mencapai 100 %	Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan Pra-SD/MI	Nota Kesepakatan Sinergi KOLASE PAUD dari Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar dalam rangka penuntasan PAUD minimal satu tahun Pra-SD/MI
2	Masih ada nya anak tidak sekolah (ATS)		Melakukan Validasi data ATS yang terdapat pada Pusdatin Bersama sama dengan Kemenag

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2025



## 4.2. Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang mengatur tentang:

1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM Kesehatan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. SPM Kesehatan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM kesehatan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada:
  - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- d. Pelayanan kesehatan balita;

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

$$\text{Persentase anak usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan pendidikan dasar sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua anak usia Pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$



f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

$$\text{Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten/Kota yang mendapat pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

$$\text{Persentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

$$\text{Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

$$\text{Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan kesehatan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

#### 4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2024 sebagai PD pelaksana SPM Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



### Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan kesehatan hamil	ibu	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
2	Pelayanan Kesehatan bersalin	ibu	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan baru lahir	bayi	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

#### 4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

##### Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7955	7056	88,70%	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	6364	5653	88,83%
						2. Tablet tambah darah	1431900	1372140	95,59%
						3. Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	8694	8694	95,83%
						4. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan HB	8694	8694	100%
						5. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaa golongan darah	8694	8694	100%
						6. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan glukoprotein urin	1304	1304	100%
						7. Alat deteksi resiko ibu hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sfililis dan HIV	8694	8694	100%
						8. Kartu ibu / rekam medis ibu	8694	8694	100%
						9. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	8694	8694	100%
						10. Media promosi komunikasi dan edukasi (KIE)	265	265	100%
						11. Gel USG	1050	1050	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar							
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%				
										12. Tenaga medis: Dokter / dokter spesialis obstetric dan ginekologi	270	66	24,44%
										13. Tenaga kesehatan : Perawat	661	492	74,43%
										14. Tenaga kesehatan : Bidan	585	504	86,15%
										15. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	106	106	100%
										16. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%
										17. kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	7955	7056	88,70%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7955	7485	94,09%	1. Formulir partograf	7955	7955	100%				
						2. Kartu ibu / rekam medis ibu	8694	8694	100%				
						3. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	8694	8694	100%				
						4. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	50	50	100%				
						5. Tenaga medis : dokter / dokter spesialis obstetric dan ginekologi	270	66	24,44%				
						6. Tenaga kesehatan : Bidan	585	504	86,15%				
						7. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%				
						8. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	106	106	100%				
						9. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%				
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7955	7763	97,59%	1. Vaksin hepatitis B dosis Tunggal (preffiled syringe)	7935	7927	99,90%				
						2. Vitamin K1 Injeksi	7955	7763	97,59%				
						3. Salep / tetes mata antibiotik	7955	7763	97,59%				
						4. Formulir bayi baru lahir	7955	7763	97,59%				
						5. Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	7955	7763	97,59%				
						6. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)	7955	7763	97,59%				
						7. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	8864	557	6,28%				
						8. Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis anak	235	67	28,51%				
						9. Tenaga kesehatan : Bidan	585	504	74,43%				
						10. Tenaga kesehatan : Perawat	661	492	100%				
						11. Tenaga kesehatan :	106	106	100%				



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
									tenaga kefarmasian
									12. Tenaga kesehatan : tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku
									52 52 100%
									13. Tenaga kesehatan : tenaga gizi
									80 80 100%
									14. Kader kesehatan
									2940 2945 100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	43774	30364	69,37%	1. Kuisisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	43774	30364	69,37%
						2. Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)	43774	30364	69,37%
						3. Buku kartu ibu dan anak (KIA)	43374	30364	70,01%
						4. Vitamin A Biru	4311	4311	100%
						5. Vitamin A Merah	39463	31128	78,88%
						6. Vaksin imunisasi dasar : BCG	10212	7334	71,82%
						7. Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	10212	7468	73,13%
						8. Vaksin imunisasi dasar : IPV	10212	5782	56,62%
						9. Vaksin imunisasi dasar : DPT - HB - Hib	10212	7062	69,15%
						10. Vaksin imunisasi dasar : Campak - Rubella	10212	7541	73,84%
						11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	19398	4007	20,66%
						12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	19398	4557	23,49%
						13. Jarum suntik dan bahan habis pakai (BHP)	43774	12038	27,50%
						14. Peralatan anafilaktik	43774	96	0,22%
						15. Formula terapi gizi buruk	292	292	100%
						16. Tenaga medis : dokter	234	64	27,35%
						17. Tenaga Kesehatan : bidan	585	504	86,15%
						18. Tenaga Kesehatan : perawat	661	492	74,43%
						19. Tenaga Kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%
						20. Kader Kesehatan	2940	2945	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92507	88502	95,67%	1. Form pencatatan / Buku raport kesehatanku	92507	88502	95,67%
						2. Form pencatatan / Buku pemantauan kesehatan	92507	88502	95,67%
						3. Kuesioner skrining kesehatan	92507	88502	95,67%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	92507	88502	95,67%	
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	92507	88502	95,67%	
					6. Tablet tambah dasar pada remaja putri kelas 7 – 9 dan usia 12 – 17 tahun diluar sekolah	24316	20850	85,75%	
					7. Alat pemeriksaan Hb	35	35	100%	
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	6342	4474	70,55%	
					9. Media promosi Kesehatan	75	75	100%	
					10. Vaksin campak rubella, DT, Td untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)	28554	27336	95,73%	
					11. Tenaga kesehatan : dokter / dokter gigi	260	94	36,15%	
					12. Tenaga kesehatan : bidan	585	504	86,15%	
					13. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%	
					14. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%	
					15. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	106	106	100%	
					16. Tenaga kesehatan : kader Kesehatan masyarakat	91	91	100%	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	391592	286136	73,07%	1. Media promosi komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	125	125	100%
					2. Alat : alat ukur lingkaran atas (LILA)	973	973	100%	
					3. Alat : tensimeter	435	435	100%	
					4. Alat : glucometer	75	75	100%	
					5. Alat : alat pemeriksa Hb	325	325	100%	
					6. Alat : tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol	391592	293300	74,90%	
					7. Alat : KIT IVA Tes	25	25	100%	
					8. Strip dan reagen pemeriksaan Hb	3483	3483	100%	
					9. Kit Ophthalmologi komunitas	1	1	100%	
					10. Kuesioner PUUMA	4901	4901	100%	
					11. Alat pelayanan KB	50	50	100%	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi system informasi penyakit tidak menular (SIPTM)	25	25	100%
						13. Vaksin tetanus difteri (td)	147006	6340	4,31%
						14. Tenaga medis : dokter	234	64	27,35%
						15. Tenaga kesehatan : bidan	585	504	86,15%
						16. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%
						17. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%
						18. Tenaga kesehatan : tenaga Kesehatan masyarakat	91	91	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	57400	47482	82,72%	1. Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas dan tensimeter	175	175	100%
						2. Glukometer / alat pemeriksaan gula darah	75	75	100%
						3. Alat pemeriksaan kolesterol	175	175	100%
						4. Bahan medis habis pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	57400	47482	82,72%
						5. Instrumeter skrining lansia sederhana (SKILAS), instrument aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) / activity daily living (ADL Barthel)	0	0	100%
						6. Buku Kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	650	650	100%
						7. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	650	650	100%
						8. Tenaga medis : dokter	234	64	27,35%
						9. Tenaga kesehatan : bidan	585	504	86,15%
						10. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%
						11. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%
						12. Tenaga kesehatan : tenaga Kesehatan masyarakat	91	91	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%			
									13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40356	40356	91,87%	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	50	50	100%			
						2. Tensimeter	40356	40356	100%			
						3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit menular (SIPTM)	435	435	100%			
						4.	25	25	100%			
						5.	7264	7264	100%			
						6. Tenaga Kesehatan : Dokter	234	64	27,35%			
						7. Tenaga kesehatan : bidan	585	504	86,15%			
						8. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%			
						9. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	80	80	100%			
						10. Tenaga kesehatan : tenaga promoso Kesehatan dan ilmu perilaku	52	52	100%			
						11. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	106	106	100%			
						12. Tenaga kesehatan : tenaga kesehatan masyarakat	91	91	100%			
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6800	6800	100%	1. Obat diabetes melitus	6800	6800	100%			
						2. Fotometer atau Glukometer	25	25	100%			
						3. BMHP (Bahan medis habis pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alcohol, lancet	6800	6800	100%			
						4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	75	75	100%			
						5. Media promosi komunikasi	6800	6800	100%			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						informasi dan edukasi (KIE)			
						6. Tenaga medis : dokter	234	64	27,35%
						7. Tenaga kesehatan : bidan	585	504	86,15%
						8. Tenaga kesehatan : perawat	661	492	74,43%
						9. Tenaga kesehatan : tenaga kefarmasian	106	106	100%
						10. Tenaga kesehatan : tenaga Kesehatan masyarakat	91	91	100%
						11. Tenaga kesehatan : tenaga gizi	106	106	100%
						12. Tenaga kesehatan : teknis medis ahli teknologi laboratorium medik (ATLM)	90	90	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1119	1119	100%	1. Buku pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	25	25	100%
						2. Penyediaan psikofarmaka	1119	1119	100%
						3. Penyediaan formulir skrining Kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	25	25	100%
						4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	25	25	100%
						5. Media informasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	1119	1119	100%
						6. Tenaga kesehatan : dokter	234	64	27,35%
						7. Tenaga kesehatan : tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa	2	2	100%
						8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	1	1	100%
						9. Tenaga profesional lainnya	53	53	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9264	9264	100%	1. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	9264	9264	100%
						2. Reagen Zn TB	110	110	100%
						3. Masker bedah dan masker N95	9264	9264	100%
						4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis	9264	9264	100%





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Indikator	Target	Realisasi	%
					6. Tenaga kesehatan Perawat :	585	504	86,15%	
					7. Tenaga kesehatan Bidan :	661	492	74,43%	
					8. Tenaga kesehatan Ahli teknologi laboratorium medis (ATLM) :	90	90	100%	
					9. Tenaga kesehatan masyarakat :	91	91	100%	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

##### Alokasi & Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.836.922.000	1.761.758.500
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	259.694.000	206.159.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	398.006.965	200.480.000
4	Pelayanan kesehatan balita	410.489.100	402.959.500
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	2.082.027.000	1.936.503.000
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	120.000.000	117.938.000
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	38.777.000	38.344.000
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	26.875.000	24.220.000
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	1.323.327.385	1.323.312.420
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	64.643.275	64.423.000
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	873.405.400	809.118.300
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	966.931.500	943.017.750
<b>TOTAL</b>		<b>8.401.098.625</b>	<b>7.828.233.470</b>

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

#### 4.2.5. Dukungan Personil

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam upaya memberikan pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagai berikut:

##### Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Madya	S2 Manajemen		Bimtek Permenkes No 6 tahun 2024
2	Sekretaris	Pembina Tk.I	S2 Manajemen	Bimtek tata laksana pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
3	Kabid Pelayanan Kesehatan	Pembina	S2 Manajemen Kesehatan	Diklat PIM	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
4	Kabid Kesehatan Masyarakat	Pembina	S2 Kesmas	Diklat PIM	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
5	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penata Tk.I	S1 Kesmas	Diklat PIM	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
6	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Penata Tk. I	S3	- Bimtek Kompetensi PPK Tipe C - Pelatihan kompetensi PBJP untk PP - Bimtek Kompetensi PPK Tipe B	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
				- Diklat PIM	
7	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembina Tk.I	S3		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pembina	S2	- Bimtek Kompetensi PPK Tipe C - Bimtek tata laksana pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
9	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembina	S2 Manajemen		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
10	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Pembina	S1 Keperawatan		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
11	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perizinan	Penata Tk.I	S1		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
12	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan	Penata Tk.I	S2 Kesmas		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
13	Kasubbag Keuangan	Penata Tk.I	S1 Kesmas	Bimtek tata laksana pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
14	Kasi Data, Informasi Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penata Tk.I	S2 Kesmas		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
15	Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan	Penata Tk.I	S1 Kesmas		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
16	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Penata Tk.I	S2 Kesmas		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
17	Kasubbag Perencanaan	Penata Tk.I	S1 Kesmas	- Bimtek PBJ Level 1 - Bimtek Kompetensi PPK Tipe C	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
18	Kasi Fasilitas Kesehatan	Penata	S1 Farmasi	Bimtek Kompetensi PPK Tipe c	Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
19	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Penata	S2 Manajemen		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
20	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Penata	D3 Keperawatan		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
21	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Akreditasi	Penata	S1 Keperawatan		Bimtek Permenkes No 6 Tahun 2024
22	Sanitarian Ahli Madya	Pembina Tk.I	S2 Kesmas		
23	Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya	Pembina Tk.I	S2 Kesmas		
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembina	S2		
25	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S1		
26	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S1		
27	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S1 Kesmas		
28	Pengolah Data dan Informasi	Penata Tk.I	S1		
29	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S1 Kesmas		
30	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S1 Kesmas		
31	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I	S2 Kesmas		



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
32	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Tk.I	S1 Kesmas		
33	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Tk.I	S1 Kesmas		
34	Pengolah Data dan Informasi	Penata Tk.I	D3 Analisis Kesehatan		
35	Pengolah Data dan Informasi	Penata Tk.I	D3 Kesehatan		
36	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Tk.I	S2 Kesmas		
37	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
38	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
39	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3		
40	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
41	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata	S1		
42	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		bimtek penerapan tata kelola keuangan BLUD dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran
43	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
44	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
45	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
46	Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda Tk.I	SLTA		
47	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	S1 Kesmas		
48	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	D3 Kesehatan		
49	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Muda Tk.I	D3		
50	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Muda Tk.I	S1 Kesmas		
51	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	S1 Keperawatan		
52	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	S1 Kesmas		
53	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	D3 Kesehatan		
54	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda	D3 Kesehatan		
55	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	D3 Kesehatan		
56	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk.I	D3 Kesehatan		
57	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Muda	S1 Ekonomi		Bimtek Pengelolaan keuangan Daerah
58	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Muda	S1 Gizi		
59	Penelaah Kebijakan Teknis	Penata Muda	S1 Kesmas		
60	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda	D3 Kesehatan		
61	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda	D4 Kesehatan		
62	Pengolah Data dan Informasi	Penata	D3 Kesehatan		
63	Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda	SLTA		
64	Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur	SLTA		
65	Operator Layanan Operasional	Juru Muda Tk 1	SLTP		
66	Apoteker Pertama ahli	PPPK	S1 Farmasi		
67	Apoteker Pertama Ahli	PPPK	S1 Farmasi		



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
68	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	PPPK	S1 Komputer	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Public Relation 2024	
69	Pranata Komputer Ahli Pertama	PPPK	S1 Komputer		
70	Perencana Ahli Pertama	PPPK	S1 Ekonomi		
71	Pranata Komputer Terampil	PPPK	D3	Pelatihan Junior Office Operaor Government Transformation Academy Digital Talent Scholaship 2024	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

#### 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2024 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

##### Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>			
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>		
	1. Faktor budaya dimana masyarakat masih ada yang malu diketahui orang lain akan hamil sehingga terlambat mendapat pelayanan kesehatan dan masih banyak yang beranggapan kehamilan itu adalah hal yang biasa untuk seorang wanita jadi tidak terlalu penting untuk memeriksakan kehamilannya	1. Meningkatkan edukasi/ penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat	1. Supervisi layanan KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan III di 25 Puskesmas se Kabupaten Banjar
	2. Pelaksanaan standar kualitas pelayanan ANC (10T) masih rendah dan Kohort Bidan masih belum lengkap terisi sehingga menyulitkan perhitungan ibu hamil yang memperoleh pelayanan sesuai standar	2. Meningkatkan Kapasitas Bidan	2. Kampanye Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil akan dilaksanakan pada triwulan II di Desa Lokus Stunting
			3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan akan dilaksanakan pada triwulan II di RSUD Ulin Banjarmasin.
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		
	1. Faktor budaya masih kental di masyarakat yaitu melahirkan di rumah karena adanya kepercayaan dan lebih nyaman dirumah untuk melahirkan tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan walaupun sudah dilengkapi peralatannya	1. Meningkatkan edukasi / penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat	1. Supervisi layanan KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan III di 25 Puskesmas se Kabupaten Banjar
	2. Masih ada Dukun Kampung (DK)	2. MOU antara Puskesmas dan Dukun Kampung	2. MOU antara Puskesmas dan Dukun Kampung
	3. Akses untuk menjangkau fasyankes sulit pada desa sangat terpencil	3. Kerjasama dan koordinasi dengan Desa	3. Kerjasama dan koordinasi dengan Desa di kegiatan rembuk/musdes di triwulan II
			4. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan akan dilaksanakan pada triwulan II di RSUD Ulin Banjarmasin.
3	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		
	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang tidak maksimal akan menyebabkan ibu melahirkan dengan bayi berisiko, terjadi komplikasi yang menyebabkan kematian pada bayi baru lahir sebelum umur bayi 28 hari	1. Meningkatkan edukasi / penyuluhan kepada Ibu hamil dan masyarakat	1. Kelas baduta Canting akan dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan II di Desa Lokus Stunting Tahun 2025
		2. Meningkatkan Kapasitas Bidan	2. Peningkatan Kapasitas Bidan dalam pelayanan Kesehatan neonatal essensial yang akan dilaksanakan pada triwulan II di Kabupaten Banjar



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
2.	Formulir MTBM belum terisi kunjungan neonatal ke 3 banyak yang terlewatkan		
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		
1.	Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang mempunyai bayi / balita untuk mendatangi tenaga kesehatan ataupun kefasilitas kesehatan tingkat desa untuk memantau kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka	1. Meningkatkan edukasi / penyuluhan kepada Ibu balita dan Masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan	1. Supervisi layanan KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan III di 25 Puskesmas se Kabupaten Banjar 2. Kelas baduta Canting akan dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan II di Desa Lokus Stunting Tahun 2025 3. Peningkatan Kapasitas Bidan di Desa dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Balita akan dilaksanakan pada Triwulan I di Kabupaten Banjar.
2.	Pengelola belum memahami Definisi Operasional		
3.	Formulir KPSP tidak dimanfaatkan secara optimal		
4.	Rapor SDIDTK di Buku KIA banyak kosong		
5	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		
1.	Belum tersedianya buku rapor kesehatan untuk semua sasaran	1. Pengadaan buku rapor Kesehatan untuk semua sasaran	1. Pengadaan buku rapor Kesehatan untuk semua sasaran akan dilaksanakan di triwulan I
2.	Cakupan TTD pada anak rematri anak usia pendidikan dasar masih rendah	2. Kerjasama lintas program dan sektor untuk meningkatkan capaian	2. Kerjasama lintas program dan sektor untuk meningkatkan capaian.
6	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>		
	Adanya kunjungan berulang dan didominasi oleh Perempuan pada kegiatan skrining faktor risiko penyakit tidak menular	Pelaksanaan posbindu mobile dan pelaksanaan Pandu PTM di FKTP	1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kader pada saat kegiatan refreshing kader di wilayah kerja UPTD Puskesmas se-Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan pelaksanaan posbindu secara mobile/berpindah-pindah maupun dalam setiap kegiatan keagamaan/Masyarakat seperti haul, pasar, yassinan, jumatan dll. Kegiatan refreshing kader dilaksanakan mulai triwulan I Tahun 2025, dengan mengumpulkan seluruh kader posbindu dan bertempat di aula puskesmas. 2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan ke UPTD Puskesmas se-Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan pelaksanaan Pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) setiap hari, tidak hanya pada kunjungan sakit tetapi juga terhadap pada kunjungan sehat.
7	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		
1.	Kurangnya kesadaran lansia untuk memeriksakan kesehatannya, dimana lansia menganggap dirinya sehat	1. Pengadaan buku rapor Kesehatan untuk semua sasaran 2. Meningkatkan edukasi / penyuluhan tentang kesehatan kepada Masyarakat	1. Pengadaan formulir skilas yang akan dilaksanakan di triwulan I 2. Meningkatkan edukasi / penyuluhan tentang kesehatan kepada Masyarakat 3. Kerjasama lintas program dan sektor untuk meningkatkan capaian.
2.	Belum tersedianya buku rapor kesehatan untuk semua sasaran		
3.	Cakupan TTD pada anak rematri anak usia pendidikan dasar masih rendah	3. Kerjasama lintas program dan sektor untuk meningkatkan capaian	
8	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		
	Masih banyaknya penderita hipertensi yang tidak rutin berkunjung dan memeriksakan diri (hanya datang Ketika ada keluhan)	Memaksimalkan Kerjasama dengan jaringan dan jejaring puskesmas untuk memantau pasien yang sudah terdata	1. Melaksanakan pendampingan teknis ke puskesmas se-Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan Kerjasama serta kolaborasi dengan jaringan puskesmas (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, pos kesehatan desa, bidan praktik mandiri) dan jejaring puskesmas (apotik, toko obat, klinik mandiri, tempat praktik mandiri dokter/TPMD, RS swasta) dalam



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
			<p>pemantauan penderita hipertensi. Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya mulai dari triwulan I Tahun 2025.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi program hipertensi dan peningkatan skrining hipertensi dengan menghadirkan kader untuk memaksimalkan penemuan kasus/penderita hipertensi melalui pelaksanaan skrining di posbindu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2025.</p> <p>3. Melaksanakan pendampingan teknis kepada kader untuk menjadi penggerak bagi Masyarakat terutama penderita hipertensi agar bersedia control/cek rutin setiap bulan. Pendampingan teknis ini direncanakan pelaksanaannya pada pertemuan refreshing kader yang dimulai dari triwulan I Tahun 2025.</p>
9	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b> Masih banyaknya penderita diabetes melitus yang tidak rutin berkunjung dan memeriksakan diri (hanya datang Ketika ada keluhan)	Memaksimalkan Kerjasama dengan jaringan dan jejaring puskesmas untuk memantau pasien yang sudah terdata	<p>1. Melaksanakan pendampingan teknis ke puskesmas se-Kabupaten Banjar untuk memaksimalkan Kerjasama serta kolaborasi dengan jaringan puskesmas (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, pos kesehatan desa, bidan praktik mandiri) dan jejaring puskesmas (apotik, toko obat, klinik mandiri, tempat praktik mandiri dokter/TPMD, RS swasta) dalam pemantauan penderita diabetes melitus. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari triwulan I Tahun 2025.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan Rapat kerja lintas program lintas sektor program diabetes melitus dengan menghadirkan lintas program (misalnya promkes) untuk memaksimalkan sosialisasi tentang penyakit diabetes melitus dan lintas sektor (misalnya ketua TP-PKK Tingkat kecamatan maupun desa) agar dapat menjadi penggerak bagi Masyarakat supaya mau dilakukan deteksi dini penyakit diabetes melitus. Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Bulan April Tahun 2025.</p> <p>3. Melaksanakan pendampingan teknis kepada kader untuk menjadi penggerak bagi Masyarakat terutama penderita hipertensi agar bersedia control/cek rutin setiap bulan. Pendampingan teknis ini dilaksanakan pada pertemuan refreshing kader yang dimulai dari triwulan I Tahun 2025</p>
10	<b>Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar</b> Masih adanya penderita ODGJ Berat yang tidak rutin berkunjung dan memeriksakan diri (mengambil obat)	Meningkatkan KIE yang efektif untuk keluarga penderita ODGJ berat	<p>1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis program kesehatan jiwa kepada pengelola program kesehatan jiwa puskesmas se-Kabupaten Banjar secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun 2025.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pertemuan monev dan validasi data program kesehatan jiwa dengan peserta pengelola program kesehatan jiwa puskesmas se-Kabupaten Banjar dengan menghadirkan narasumber pakar yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa sehingga pelayanan kesehatan terhadap penderita ODGJ Berat dapat dimaksimalkan. Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Bulan April Tahun 2025.</p> <p>3. Melaksanakan pertemuan Rapat Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM, Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/568/KUM/2023) dengan peserta sesuai dalam Keputusan Bupati Banjar untuk memaksimalkan peran serta lintas sektor dan kader kesehatan jiwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Bulan Mei Tahun 2025.</p>
11	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b> Belum optimalnya tatalaksana TB oleh pengelola program dan tenaga medis	Mengoptimalkan tata laksana TB oleh pengelola program dan tenaga medis	Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Tatalaksana Tuberkulosis (TB) Workshop akan diadakan pada Triwulan 3 Tahun 2025



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Belum optimalnya kegiatan pemeriksaan orang beresiko HIV
		Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan pada orang beresiko terinfeksi HIV.	Pertemuan Kegiatan Konselor HIV AIDS Tingkat Kabupaten akan dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2025

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara

### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengatur tentang:

- Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- SPM pekerjaan umum didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar.
- Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, dan tata cara pemenuhan standar.
- Penerima pelayanan dasar pada:
  - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

$$\text{Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari} = \frac{\text{Jumlah kumulatif Masyarakat (rumah tangga atau warga negara) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga atau warga negara di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$$

#### b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

$$\text{Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

#### 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024									
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022



#### 4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut:

**Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Sampai dengan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9.400	9.400	100%	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2.487	2.487	100%
						Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.648	3.648	100%	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	965	965	100%
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
						berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
						Ukuran kualitas pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	915	915	100%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan, 2025

$$P_{\text{SPM}}^{\text{Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari}} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{\text{SPM}}^{\text{Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik}} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%.

Capaian kinerja tersebut, merupakan capaian kinerja tahunan berdasarkan alokasi keuangan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun, namun jika dilihat dari progres keseluruhan capaian kinerja Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 76,25% dan capaian kinerja pengolahan air limbah domestik mencapai 77,47%.

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD DAK Fisik sebesar Rp. 19.411.779.000 dan APBD Murni sebesar Rp. 20.499.789.191. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

##### Alokasi & Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	23.093.384.117	22.085.240.940
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	16.818.184.074	16.258.168.560
<b>TOTAL</b>	<b>39.911.568.191</b>	<b>38.343.409.500</b>

Sumber : Dinas PUPRP, 2025



#### 4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil dalam mencapai target SPM terdiri dari:

**Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023**

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2	Bimbingan terkait Menteri Umum	Teknis Peraturan Pekerjaan dan
2	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2	Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023	Standar
3	Kepala Bidang Cipta Karya	Pembina (IV/a)	S-1	Tentang Teknis Pelayanan Bidang Umum dan Perumahan Rakyat	Standar Minimal Pekerjaan
4	Kepala Seksi Air Minum	Penata (III/c)	D3		
5	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata Tk. I (III/d)	S-1		

Sumber : Dinas PUPRP, 2025

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

**Permasalahan, Solusi dan Tindakanjnt Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024**

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	<p>Pelayanan Air Minum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan klasifikasi dalam penentuan akses layanan air minum jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan, air minum layak dan air minum aman.</li> <li>Belum adanya koordinasi dengan pihak desa terkait kebutuhan air minum karena banyaknya jumlah desa serta sebaran yang sangat luas. Serta seringkali terjadi pergantian aparat desa, sehingga desa tidak memiliki database yang valid.</li> <li>Untuk memenuhi kebutuhan air minum aman dan layak diperlukan pendanaan yang besar, sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Banjar dan kondisi kualitas air yang memerlukan sistem pengolahan. Sehingga perlu pendanaan dari APBD dan APBN.</li> <li>Pada pekerjaan peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum sudah dilaksanakan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam perencanaan teknis, adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan yaitu adanya perubahan daftar penerima manfaat, perubahan sumber air baku akibat debit air yang tidak cukup serta koordinasi antar aparat desa.</li> </ol>	<p>Membuat kebijakan terkait penentuan klasifikasi dalam penentuan akses layanan air minum jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan, air minum layak dan air minum aman.</p> <p>Penyusunan database terkait data kebutuhan air minum</p> <p>Mengikuti program-program pendanaan APBN</p> <p>Membuat komitmen dengan pihak desa terkait dengan perubahan data, baik perubahan daftar penerima manfaat maupun perubahan jenis sumber air baku</p>	<p>Melaksanakan koordinasi dengan Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan untuk penyusunan kebijakan tersebut</p> <p>Melakukan survei investigasi untuk penyusunan database tersebut</p> <p>Melakukan pengusulan Penyelenggaraan SPAM melalui pembiayaan dana APBN</p> <p>Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak desa sebagai penerima manfaat terhadap batas waktu pengumpulan dan perubahan data (jika ada)</p>
2	<p>Pelayanan Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan klasifikasi dalam menentukan akses layanan layak &gt;25jiwa / ha dan aman perkotaan atau &lt;25jiwa/ha.</li> <li>Perbedaan data yang dimana akses sanitasi ternyata belum sinkron dengan data desa.</li> <li>Pemenuhan akses sanitasi baik layak maupun aman memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan juga diperlukan pendanaan dari APBD dan APBN</li> <li>Adanya kondisi gahar dimana pembangunan dilokasi yang sulit seperti di bantaran sungai yang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan penentuan dengan klasifikasi perkotaan dan perdesaan melalui RTRW</li> <li>Memerlukan survei atau data yang lebih akurat terkait dengan sanitasi</li> <li>Pengusulan melalui APBN DAK, CSR, maupun pendanaan lainnya untuk memaksimalkan pembangunan sanitasi</li> <li>Melakukan pekerjaan fisik konstruksi pada musim kering (kemarau) dan melakukan backup volume sesuai yang terpasang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi denganbidang Tata Ruang mengenai klasifikasi perkotaan dan perdesaan sesuai dengan RTRW</li> <li>Dinas PUPRP Kab, Banjar melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data yang akurat untuk sanitasi</li> <li>Melakukan pengusulan melalui APBN DAK Sanitasi dan juga perencanaan melalui APBD</li> <li>Membuat <i>time schedule</i> terkait dengan pembangunan fisik</li> </ul>



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
	memerlukan biaya konstruksi lebih mahal		dan mempercepat pembangunan untuk menghindari musim basah (Penghujan)

Sumber : Dinas PUPRP Kab.Banjar, 2024

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengatur tentang:

- a. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- b. SPM perumahan rakyat didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar.
- c. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, dan tata cara pemenuhan standar.
- d. Penerima pelayanan dasar pada:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

$$\text{Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

$$\text{Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$$

##### 4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2024 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



### Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

#### 4.4.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yaitu:

#### Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	82	82	100%	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	24	24	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100%				

Sumber : DPRKPLH, 2024

$$IP_{SPM} \text{ Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

$$IP_{SPM} \text{ Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota} = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%.



#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di tahun 2024 yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

**Anggaran & Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	180.767.100	177.899.600
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	612.136.700	611.529.200
<b>TOTAL</b>	<b>792.903.800</b>	<b>789.428.800</b>

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2025

#### 4.4.3. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai berikut:

**Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024**

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Tk.I (IV/b)	S-2		
2	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	Pembina (IV/a)	S-2	- Sosialisasi Permen PUJPR No.19/PRT/M/2018 - Sosialisasi Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Tahun 2024	Bimbingan Teknis terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023
3	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Penata Tk.I/ III d	S-1	- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Tahun 2024	tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk.I/ III d	S-1		
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Penata/ III c	S-1		

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2025

#### 4.4.4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat yaitu :



## Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Kabupaten Banjar rawan bencana angin puting beliung dan tanah longsor sepanjang tahun dengan skala bervariasi. Penyusunan Rencana Aksi tahunan terkendala pengumpulan data yang harus menunggu akhir tahun. Keterbatasan anggaran dan personel juga menjadi kendala, serta penerbitan SK Bupati terhambat kajian kebencanaan OPD terkait.	Menggunakan SK perubahan status Rawan Bencana/ Siaga Bencana	Setelah berkonsultasi dengan Bangda, untuk tahun selanjutnya ditekankan hanya menggunakan SK Tanggap Darurat yaitu surat pernyataan telah terjadinya yang dikeluarkan Kepala Daerah
2	Jumlah kejadian bencana tahun sebelumnya tidak sepenuhnya dapat ditangani pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan personel. Dalam penyusunan Rencana Aksi, penentuan skala prioritas penerima bantuan menjadi krusial dan membutuhkan data lapangan yang akurat. Namun, pengumpulan data tersebut menghadapi tantangan karena luasnya cakupan wilayah administrasi dan sebaran kejadian bencana di Kabupaten Banjar	Pendataan bertahap dengan pembagian wilayah	Melakukan pendataan bertahap melalui sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana dan Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana dengan wilayah data menyesuaikan anggaran yang tersedia
3	Keterbatasan anggaran daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), menyebabkan banyak rumah terdampak bencana tidak tertangani.	Penanganan rumah terdampak akan dimasukkan dalam perencanaan dan rencana aksi tahun berikutnya, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.	Menjalankan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika SK Tanggap Darurat dapat diterbitkan maka pelaksanaan SPM dalam dilakukan sesuai dengan rencana aksi
4	Pelaksanaan kegiatan fisik SPM yang sesuai sasaran memerlukan proses pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan penganggaran yang memadai.	Melengkapi pendataan untuk memaksimalkan pekerjaan bantuan sosial	Menjalankan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber : Dinas DPRKPLH Kab.Banjar, 2025

### 4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

##### 1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

$$\text{Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum} = \frac{\text{Jumlah warga negara terdampak penegakan PERDA atau PERKADA yang sesuai mutu + jumlah warga yang terlayani (pengaduan dan temuan) di Kabupaten/Kota}}{\text{Proyeksi warga negara terdampak penegakan PERDA atau PERKADA yang sesuai mutu + jumlah warga yang terlayani (pengaduan dan temuan) di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

##### 2. Pelayanan informasi rawan bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:

- Penyusunan kajian risiko bencana; dan
- Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.

$$\text{Persentase pelayanan informasi rawan bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah penduduk yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$



### 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana paling sedikit memuat:

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- Pembuatan rencana kontijensi;
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

$$\text{Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah penduduk yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

### 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat:

- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas;
- Respon cepat darurat bencana;
- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

$$\text{Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Perkiraan jumlah korban bencana secara keseluruhan}} \times 100\%$$

### 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

$$\text{Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran dan penyelamatan}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X}} \times 100\%$$

#### 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal target SPM terkait trantibumlinmas yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

**Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan ketenteraman	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	dan ketertiban umum	layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota				sumber daya manusia	layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

### 4.5.3. Realisasi

#### Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota	3580	3580	100%	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	736	736	100%
						2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	100%
						3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	3	1	33,33%
						4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	273.956	273.956	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100%
						Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	5451	5451	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	273956	273956	100%
						4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	231	231	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	345	345	100%	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	327	327	100%
						2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	345	345	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	100%	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	0	0	100%
						2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0	0	100%
						3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	0	0	100%
						4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	152	152	100%	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	64	62	96,88%
						2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	16	16	100%
						3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	1248	1248	20,18%
						4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	69	69	31,87%
						5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	64	64	99,41%





No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telaah diikuti	Harus diikuti
					Perlindungan Masyarakat
7	KASI TEKFUNG LATDAS	Penata Tk.I / III.d	S 1		Bimtek administrasi peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
8	KASI LIDIK & PENYIDIKAN	Penata Tk.I / III.d	S 1		PPNS UMUM
9	KASUBBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	Penata Muda Tk.I / III.b	S 1		Bimtek Teknis E-SPM
10	KASI OPERASI DAN PENINDAKAN	Penata Tk.I / III.d	S 1		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
11	KASUBBAG UMPEG	Penata Tk.I / III.d	S 1		
12	KASI PENGENDALIAN & KERJASAMA	Penata Tk.I / III.d	S 1	PPNS UMUM	Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
13	KASI BINA POTENSI MASYARAKAT DAN SATLINMAS	Penata Tk.I / III.d	S.2		Bimtek administrasi peningkatan kapasitas Satlinmas
14	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	Penata Tk.I / III.d	S 1		
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Penata Muda Tk.I / III.b	SMA		
16	POL PP AHLI MUDA	Penata / III.c	S 1		INTELIJEN
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Penata Muda Tk.I / III.b	STM		
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Penata Muda / III.a	SMA		
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Penata Muda / III.a	SMA		
20	POL PP PELAKSANA MAHIR	Penata Muda / III.a	SMA	INTELIJEN	
21	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
22	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
23	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
26	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
27	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
28	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		
29	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		INTELIJEN
30	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
31	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
32	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
33	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
34	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
35	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		INTELIJEN
36	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		INTELIJEN
37	POL PP PELAKSANA	Pengatur Tk.I / II.d	SMA		INTELIJEN
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
39	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
40	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
41	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Penata Muda / III.a	SMA		
43	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengatur / II.c	SMA		
45	POL PP PEMULA	Pengatur Muda / II.a	SMA		Bimtek SDM Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
46	PERENCANA AHLI PERTAMA	IX	S 1		Bimtek Teknis E-SPM
47	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	IX	S 1		
48	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	IX	S 1		
49	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
51	ANGGOTA / PTT	Non ASN	D.3	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
52	ANGGOTA / PTT	Non ASN	MA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
53	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
54	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
55	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
56	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
57	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
58	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
59	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
60	ANGGOTA / PTT	Non ASN	MA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
61	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SPP	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
62	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
63	ANGGOTA / PTT	Non ASN	D.3	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
64	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
65	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
66	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
67	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
68	ANGGOTA / PTT	Non ASN	MA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
69	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
70	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
71	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telaah diikuti	Harus diikuti
72	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
73	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
74	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
75	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
76	ANGGOTA / PTT	Non ASN	MA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
77	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
78	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
79	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
80	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
81	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
82	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
83	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
84	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
85	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
86	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
87	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
88	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SPP	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
89	ANGGOTA / PTT	Non ASN	D.3	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
90	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
91	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
92	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
93	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
94	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
95	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
96	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
97	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMT	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
98	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
99	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
100	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
101	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
102	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
103	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
104	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
105	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
106	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
107	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
108	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
109	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
110	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
111	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
112	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
113	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
114	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
115	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
116	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
117	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
118	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
119	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
120	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
121	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.2	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
122	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
123	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
124	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
125	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
126	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
127	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
128	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
129	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
130	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
131	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
132	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
133	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
134	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
135	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
136	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
137	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
138	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA	LATSAR	Diklat Teknis Satpol PP
139	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1		Diklat Teknis Satpol PP
140	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
141	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1		Diklat Teknis Satpol PP
142	ANGGOTA / PTT	Non ASN	D.3		Diklat Teknis Satpol PP
143	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA		Diklat Teknis Satpol PP
144	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA		Diklat Teknis Satpol PP
145	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA		Diklat Teknis Satpol PP
146	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA		Diklat Teknis Satpol PP
147	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
148	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
149	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMA		Diklat Teknis Satpol PP
150	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK		Diklat Teknis Satpol PP
151	ANGGOTA / PTT	Non ASN	MA		Diklat Teknis Satpol PP
152	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SMK		Diklat Teknis Satpol PP
153	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
154	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
155	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
156	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
157	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
158	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
159	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
160	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
161	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
162	ANGGOTA / PTT	Non ASN	S.1		Diklat Teknis Satpol PP
163	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
164	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
165	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP
166	ANGGOTA / PTT	Non ASN	SLTA		Diklat Teknis Satpol PP

Sumber : Satpol PP, 2025

#### Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Pelaksana	Pembina TK.I	S.2		
2	Sekretaris	Pembina	S.1		
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembina	S.2		
4	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pembina	S.1		
5	Kabid kedaruratan dan Logistik	Pembina	S.1		
6	Kasi Rehabilitasi	Pembina	S.2	Diklat TOT Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	
7	Kasi Rekonstruksi	Penata TK.I	S.1		Bimtek Penyusunan Dokumen R3P Jltu Pasna
8	Kasi Kedaruratan	Penata TK.I	S.1		
9	Kasi Logistik	Penata TK.I	S.1		
10	Kasi Pencegahan	Penata TK.I	S.1	Fasilitator Destana (2023) Bimtek teknis penyusunan Dok. KRB	
11	Kasi Kesiapsiagaan	Penata TK.I	S.1		
12	Kasubbag Perencanaan dan Program	Penata TK.I	D.3	Bimtek Teknis E-SPM	
13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata TK.I	S.1		
14	Kasubbag Keuangan	Penata TK.I	S.1		
14	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata	S.1		Bimtek Penyusunan Dokumen R3P Jltu Pasna
15	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata TK.I	S.1		
16	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	S.1		
17	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	S.1	Bimtek Teknis E-SPM	
18	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	S.1	Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
19	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	S.1		Bimtek Tata Cara Penyusunan Tentang Mitigasi Bencana Alam Dan Penanganan Pengungsi Bencana Bimtek penyusunan kawasan rawan bencana Bimtek pembentukan desa tangguh bencana
21	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Penata Muda	S.1	Pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pemetaan	dan drone dunia
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	S.1		
23	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Penata Muda	S.1	Bimtek penyusunan KRB	teknis Dok.
24	Perencana Ahli Pertama	Penata Muda	S.1		
25	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Penata Muda	S.1		
26	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Penata Muda	S.1	(Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut	
27	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Penata Muda	S.1	Pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pemetaan	dan drone dunia
28	Pengadministrasi Umum	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
29	Pengadministrasi Umum	-	SMA		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
30	Pengadministrasi Kepegawaian	-	S.1		Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Kepegawaian
31	Pengadministrasi Kepegawaian	-	SMA	Pelatihan Pembekalan Fasilitator Sistem Peringatan Dini Bencana	Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Kepegawaian
32	Pengemudi	-	SMA		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
33	Pengelola Data	-	S.1	Pembekalan Fasilitator system peringatan dini bencana , Diklat penyuluh mitigasi bencana gerakan tanah dan kaji cepat TRC	In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
34	Penyuluh Bencana	-	S.1	Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana	In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
35	Analisis Mitigasi Bencana	-	S.1		In House Traning Dapur



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
36	Pengadministrasi Umum	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
37	Pengolah Data Kedaruratan	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
38	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
39	Koordinator Gudang Peralatan	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
40	Koordinator Gudang Logistik	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
41	Pengadministrasi Umum	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
42	Pengadministrasi Umum	-	SMA		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
43	Pengolah Data Rekonstruksi	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
44	Pengumpul Data	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
45	RESCUE	-	S.1		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
46	RESCUE	-	D3		In House Traning Dapur Umum , Logistik, penyelamatan di air , Latber relawan , Vertikal Rescue
47	RESCUE	-	SMA		In House Traning Dapur Umum ,



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Logistik, penyelamatan di air, Latber relawan, Vertikal Rescue
58	Petugas PUSDALOPS	-	S.1	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air Water Rescue Training	

Sumber : BPBD, 2025

#### Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Seksi Sarpras Informasi dan Pengolahan Data	Penata TK.I	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
2	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
3	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
4	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
5	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
6	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
7	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Golongan IX	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
8	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
9	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
10	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
11	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
12	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
13	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Kualifikasi Pemadam I
14	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
15	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
16	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
17	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
18	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
19	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
20	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
21	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
22	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
23	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
24	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
25	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
26	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
27	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
28	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
29	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Kualifikasi Pemadam I
30	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
31	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
32	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
33	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
34	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
35	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
36	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
37	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
38	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
39	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
40	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
41	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
42	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
43	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
44	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
45	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
					Kualifikasi Pemadam I
46	Pemadam Kebakaran Pemula	Golongan V	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
47	Pemadam Kebakaran Pemula	Golongan V	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
48	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
49	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
50	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	D-III		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
51	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
52	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	S-1		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
53	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
54	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	S-1		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
55	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
56	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
57	Petugas Bidang Pemadaman Teknis	Non ASN	S1		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
58	Petugas Bidang Pencegahan Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
59	Petugas Bidang Pencegahan Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
60	Petugas Sekretariat Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
61	Petugas Sekretariat Teknis	Non ASN	SMA		Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat		
				Telah diikuti	Harus diikuti	
					Kualifikasi Pemadam I	
62	Petugas Sekretariat	Teknis	Non ASN	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
63	Petugas Sekretariat	Teknis	Non ASN	S-1	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
64	Petugas Sekretariat	Teknis	Non ASN	D-III	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
65	Petugas Sekretariat	Teknis	Non ASN	SMA	Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
66	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Diklat Rescue	Fire
67	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Diklat Rescue	Fire
68	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Diklat Rescue	Fire
69	Pemadam Kebakaran	Pemula	Golongan V	SMA	Diklat Rescue	Fire

Sumber Data : DPKP, 2025

Dalam pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar selain ditunjang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga dibantu oleh Relawan Kebakaran sebagaimana terjadi dalam tabel berikut ini:

#### Dukungan Relawan Kebakaran di Kabupaten Banjar Tahun 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
1	H. Muhammad Sofyani Noor S.Sos, M.Pd	laki-laki	1968-08-17	Regu Komunikasi dan Informasi
2	Nusri	laki-laki	1995-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan
3	Muhammad Ramadhan Nor	laki-laki	1999-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan
4	M. Hamdani	laki-laki	1999-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan
5	Abdul Haris	laki-laki	2001-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan
6	Muhammad Syarwani	laki-laki	1997-09-07	Pemadaman dan Penyelamatan
7	Hasan	laki-laki	2002-10-04	Pemadaman dan Penyelamatan
8	Muhammadhanif Asyrofi	laki-laki	1998-05-19	Pemadaman dan Penyelamatan
9	Muhammad Agil	laki-laki	1995-05-20	Pemadaman dan Penyelamatan
10	Nur Hilalliyah	perempuan	1999-11-26	Regu Penyuluh
11	Muniroh	perempuan	2001-01-14	Regu Penyuluh
12	Muhammad Rizki Abdilah	laki-laki	1999-08-01	Pemadaman dan Penyelamatan
13	Muhammad Fauzan Noor	laki-laki	2002-12-23	Pemadaman dan Penyelamatan
14	Muhammad Aryadi Saputra	laki-laki	2001-06-02	Pemadaman dan Penyelamatan
15	Ahmad Syarif	laki-laki	1978-08-14	Regu Komunikasi dan Informasi
16	Hendra	laki-laki	1987-06-14	Regu Komunikasi dan Informasi
17	Arif Haryo Kusuma	laki-laki	1988-01-04	Regu Komunikasi dan Informasi
18	Soraya Aldena	perempuan	2002-12-18	Regu Penyuluh
19	Dedy Helmi Kurniawan	laki-laki	1994-12-09	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
20	Muhammad Saukani	laki-laki	1986-03-10	Pemadaman dan Penyelamatan
21	Abdul Hakim	laki-laki	1996-07-02	Pemadaman dan Penyelamatan
22	Andy Amrullah	laki-laki	1999-09-15	Pemadaman dan Penyelamatan
23	Widi Harto	laki-laki	1983-11-30	Pemadaman dan Penyelamatan
24	Didik Prasetyo	laki-laki	1995-02-20	Pemadaman dan Penyelamatan
25	Sibawaihi	laki-laki	1981-01-03	Pemadaman dan Penyelamatan
26	Deddy Rusmadi	laki-laki	1972-02-10	Pemadaman dan Penyelamatan
27	H.Abdullah	laki-laki	1991-03-08	Pemadaman dan Penyelamatan
28	Muhammad Rosyad	laki-laki	1978-06-07	Regu Komunikasi dan Informasi
29	Ahmad Ripai	laki-laki	1975-12-31	Regu Komunikasi dan Informasi
30	Fakhruzzaki	laki-laki	1995-07-03	Pemadaman dan Penyelamatan
31	Dody Risandy	laki-laki	1997-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan
32	Muhammad Wildan, Sp, Mp	laki-laki	1986-07-26	Pemadaman dan Penyelamatan
33	Muhammad Safii	laki-laki	1977-07-16	Regu Komunikasi dan Informasi
34	Usman	laki-laki	1984-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan
35	M.Irfaniannur	laki-laki	1993-07-18	Pemadaman dan Penyelamatan
36	Ahmad Kurniawan	laki-laki	1986-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan
37	Jarkasi	laki-laki	1949-06-01	Regu Komunikasi dan Informasi
38	Halimah	perempuan	1991-10-30	Regu Penyuluh
39	Muhammad Hidayat	laki-laki	1996-11-14	Pemadaman dan Penyelamatan
40	Muhammad Taufik	laki-laki	1998-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan
41	Muhammad Yusuf	laki-laki	2001-07-07	Pemadaman dan Penyelamatan
42	Riski	laki-laki	2001-07-19	Pemadaman dan Penyelamatan
43	Hasan Baseri	laki-laki	1977-05-01	Regu Komunikasi dan Informasi
44	Irfan Noor	laki-laki	2003-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan
45	Jumberi	laki-laki	1982-04-11	Pemadaman dan Penyelamatan
46	Muhammad Safii	laki-laki	1992-10-26	Pemadaman dan Penyelamatan
47	Mahyuddin	laki-laki	1972-09-05	Regu Komunikasi dan Informasi
48	Gusti Akhmad Hafizi	laki-laki	2003-08-15	Pemadaman dan Penyelamatan
49	H.Tatak Kusdaryono	laki-laki	1969-01-05	Regu Komunikasi dan Informasi
50	Muhammad Amin	laki-laki	2003-04-05	Pemadaman dan Penyelamatan
51	Ahmad Sojarwo	laki-laki	1983-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan
52	Muhammad Wildan Najib	laki-laki	1999-03-21	Pemadaman dan Penyelamatan
53	M.Ilham Muhaimin	laki-laki	2003-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan
54	Salmani	laki-laki	1982-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan
55	M. Saadillah	laki-laki	1962-02-22	Regu Komunikasi dan Informasi
56	H.Muhammad Arifin,S.Sos.Map	laki-laki	1965-06-07	Regu Komunikasi dan Informasi



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
57	Taberani	laki-laki	1971-02-13	Regu Komunikasi dan Informasi
58	Ahmad Juliansyah	laki-laki	2001-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan
59	Muhammad Zaini Ikhsan	laki-laki	1996-04-25	Pemadaman dan Penyelamatan
60	Nain	laki-laki	1979-11-11	Regu Komunikasi dan Informasi
61	Hamzah	laki-laki	1973-08-15	Regu Komunikasi dan Informasi
62	Gazali Rahman H	laki-laki	1970-09-27	Regu Komunikasi dan Informasi
63	Muhammad Room	laki-laki	1994-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan
64	Muhammad Syaipulah	laki-laki	2000-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan
65	Achmad Zulfiqri	laki-laki	2000-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan
66	Wahyunita	perempuan	1989-08-22	Regu Penyuluh
67	Ahmad Rasyid Fajrillah	laki-laki	1998-02-18	Pemadaman dan Penyelamatan
68	Ardiansyah	laki-laki	1977-04-10	Regu Komunikasi dan Informasi
69	Said Al Akhsani	laki-laki	1977-11-06	Regu Komunikasi dan Informasi
70	Muhammad Zaini	laki-laki	1982-04-03	Pemadaman dan Penyelamatan
71	Jahri Padli	laki-laki	1983-03-01	Pemadaman dan Penyelamatan
72	Jani	laki-laki	1996-11-06	Pemadaman dan Penyelamatan
73	Muhammad Sayuti	laki-laki	2001-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
74	Ardiansyah	laki-laki	1999-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan
75	Mashudi.S.Sos,M.Si	laki-laki	1970-07-14	Regu Komunikasi dan Informasi
76	Jum'ah	perempuan	1982-01-12	Regu Penyuluh
77	Ahmad Saputra	laki-laki	2001-10-08	Pemadaman dan Penyelamatan
78	Muhammad Ramadhani	laki-laki	1999-12-28	Pemadaman dan Penyelamatan
79	Mifatahul Jannah	perempuan	1996-10-19	Regu Penyuluh
80	Bridge Bounty Martha	laki-laki	1990-07-28	Pemadaman dan Penyelamatan
81	Irwan	laki-laki	1996-01-24	Pemadaman dan Penyelamatan
82	Tikrimah	perempuan	1970-04-03	Regu Penyuluh
83	Zainal Abidin	laki-laki	1986-05-22	Pemadaman dan Penyelamatan
84	A Murtada	laki-laki	1986-10-28	Pemadaman dan Penyelamatan
85	Muhammad Ropiq	laki-laki	2003-08-06	Pemadaman dan Penyelamatan
86	Marzuki M	laki-laki	1979-08-12	Regu Komunikasi dan Informasi
87	Jamal Mirdad	laki-laki	1991-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
88	Teguh Yuwono	laki-laki	1975-08-15	Regu Komunikasi dan Informasi
89	Haderi	laki-laki	1964-02-02	Regu Komunikasi dan Informasi
90	Shobirin	laki-laki	1972-09-06	Regu Komunikasi dan Informasi
91	Suhaimi	laki-laki	1969-01-04	Regu Komunikasi dan Informasi
92	Ahmad Siddik Al Mansyawi	laki-laki	2003-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan
93	Hanafi	laki-laki	1974-05-29	Regu Komunikasi dan Informasi
94	Ahmad Guzali	laki-laki	1981-10-09	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
95	Muliyadi	laki-laki	1966-08-07	Regu Komunikasi dan Informasi
96	Sumar Yuni	laki-laki	1987-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan
97	Yudha Setiawan	laki-laki	1984-03-17	Pemadaman dan Penyelamatan
98	Baihaki	laki-laki	2000-10-05	Pemadaman dan Penyelamatan
99	Abu Sofyan	laki-laki	1972-09-11	Regu Komunikasi dan Informasi
100	Rahimah	perempuan	1999-12-26	Regu Penyuluh
101	Padelianyah	laki-laki	1970-09-09	Regu Komunikasi dan Informasi
102	Husin Qadri	laki-laki	2000-12-29	Pemadaman dan Penyelamatan
103	Muhammad Fahrani Hasbi	laki-laki	1972-05-20	Regu Komunikasi dan Informasi
104	Bahrin	laki-laki	1968-08-06	Regu Komunikasi dan Informasi
105	Akhmad Kharisma Adzandy	laki-laki	1994-10-29	Pemadaman dan Penyelamatan
106	Ali Akbar	laki-laki	1998-05-25	Pemadaman dan Penyelamatan
107	Ahmad Zainuri	laki-laki	1993-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan
108	Sarifudin	laki-laki	1993-07-23	Pemadaman dan Penyelamatan
109	Feri Rusadi	laki-laki	1997-02-17	Pemadaman dan Penyelamatan
110	Sanusi	laki-laki	1972-03-05	Regu Komunikasi dan Informasi
111	Ahmad Raiz	laki-laki	1986-09-10	Pemadaman dan Penyelamatan
112	Muhammad Asro	laki-laki	1996-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan
113	M. Lambri	laki-laki	1987-03-17	Pemadaman dan Penyelamatan
114	Tanjung Heru Nurtama	laki-laki	1993-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan
115	M Said Jailani	laki-laki	2000-12-20	Pemadaman dan Penyelamatan
116	Budiansyah	laki-laki	1993-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan
117	Aspihan	laki-laki	1996-09-10	Pemadaman dan Penyelamatan
118	Muhammad Rehan	laki-laki	2002-06-10	Pemadaman dan Penyelamatan
119	Zulkani	laki-laki	1994-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan
120	Zulkani	laki-laki	1994-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan
121	Muhklis Fuadi	laki-laki	2003-08-06	Pemadaman dan Penyelamatan
122	Muhammadziyad	laki-laki	2001-12-28	Pemadaman dan Penyelamatan
123	Aridon	laki-laki	2001-03-03	Pemadaman dan Penyelamatan
124	Muhammad Rizky Andika Putra	laki-laki	2002-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan
125	Rommy Akmal	laki-laki	1995-04-10	Pemadaman dan Penyelamatan
126	M. Fajrian Noor	laki-laki	1997-08-08	Pemadaman dan Penyelamatan
127	Gt. Khalimatus Sa'diah	perempuan	2001-01-08	Regu Penyuluh
128	Muhammad	laki-laki	1992-04-25	Pemadaman dan Penyelamatan
129	Abdurrahman	laki-laki	1995-08-25	Pemadaman dan Penyelamatan
130	Muhammad Rasyid	laki-laki	2003-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan
131	Rafi'i Hamdi	laki-laki	1984-01-01	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
132	Muhammad Rasyad	laki-laki	2003-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan
133	Muhammad Muhtar	laki-laki	2000-07-20	Pemadaman dan Penyelamatan
134	Mahmudin	laki-laki	1999-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan
135	Muhammad Tamin	laki-laki	1994-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan
136	Iwan	laki-laki	1999-07-10	Pemadaman dan Penyelamatan
137	Abdurrahman	laki-laki	1996-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan
138	Fitrianoor	laki-laki	1999-01-20	Pemadaman dan Penyelamatan
139	Muhammad Suri	laki-laki	1999-11-10	Pemadaman dan Penyelamatan
140	Abdul Majid	laki-laki	1995-06-02	Pemadaman dan Penyelamatan
141	M.Yasir Wahyudi	laki-laki	1990-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan
142	Muhammad Muhtadin	laki-laki	2001-11-23	Pemadaman dan Penyelamatan
143	Ahmad Hadi Saputra	laki-laki	2003-02-15	Pemadaman dan Penyelamatan
144	Fitrianoor	laki-laki	1999-12-20	Pemadaman dan Penyelamatan
145	Rizali Hadi	laki-laki	1987-05-26	Pemadaman dan Penyelamatan
146	Akhmad Sakhbanie	laki-laki	1999-11-14	Pemadaman dan Penyelamatan
147	Kurnaini	laki-laki	1985-08-07	Pemadaman dan Penyelamatan
148	Mahdian Syahrane	laki-laki	1993-11-21	Pemadaman dan Penyelamatan
149	Zaini	laki-laki	1993-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan
150	M.Riduan	laki-laki	1996-07-29	Pemadaman dan Penyelamatan
151	Ahmad Fargali	laki-laki	2002-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan
152	Haderansyah	laki-laki	1996-09-19	Pemadaman dan Penyelamatan
153	Muhammad Al Khudairi	laki-laki	1995-10-26	Pemadaman dan Penyelamatan
154	M.Iلمي	laki-laki	2003-07-13	Pemadaman dan Penyelamatan
155	Muhammad Aripin	laki-laki	2002-06-18	Pemadaman dan Penyelamatan
156	Muhammad Nawawi	laki-laki	2004-02-13	Pemadaman dan Penyelamatan
157	Muhammad Maulidi	laki-laki	1998-07-06	Pemadaman dan Penyelamatan
158	Muhammad Zacky	laki-laki	2002-05-22	Pemadaman dan Penyelamatan
159	Abdullah	laki-laki	1981-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan
160	Pahmi	laki-laki	2003-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan
161	Aditya Wijaya	laki-laki	2000-11-01	Pemadaman dan Penyelamatan
162	Achmad Hudayan	laki-laki	1974-08-31	Regu Komunikasi dan Informasi
163	Putri Sekar Wijayanti	perempuan	2001-04-28	Regu Penyuluh
164	Dana	laki-laki	1992-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan
165	Dardiansyah Mariadi	laki-laki	1986-05-23	Pemadaman dan Penyelamatan
166	M. Rudi Iwan	laki-laki	1971-09-16	Regu Komunikasi dan Informasi
167	Ahmad Dimiati	laki-laki	1982-10-17	Pemadaman dan Penyelamatan
168	Muhammad Ikhwan	laki-laki	2000-10-16	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
169	Rakhmat Hidayat	laki-laki	2002-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan
170	Muhammad Hulaifi	laki-laki	1999-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
171	Hasrul Abdilah F. Mastho	laki-laki	1997-03-04	Pemadaman dan Penyelamatan
172	Muhammad Ihdi	laki-laki	2001-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan
173	Muhammad Amin Ramadan	laki-laki	2002-11-30	Pemadaman dan Penyelamatan
174	Muhammad Ihdi	laki-laki	2001-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan
175	Maulana Ikhsan	laki-laki	2001-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan
176	Nafsul Mutmainah	perempuan	1996-07-15	Regu Penyuluh
177	Muhammad Saufi Ansori	laki-laki	1998-05-19	Pemadaman dan Penyelamatan
178	Muhammad Amin	laki-laki	1988-08-27	Pemadaman dan Penyelamatan
179	Rusdi	laki-laki	1968-11-09	Regu Komunikasi dan Informasi
180	Agra Aji Nugraha	laki-laki	1999-10-17	Pemadaman dan Penyelamatan
181	Musthopa	laki-laki	1979-09-06	Regu Komunikasi dan Informasi
182	Hari Santoso	laki-laki	1994-06-06	Pemadaman dan Penyelamatan
183	Muhammad Rizky	laki-laki	2000-09-24	Pemadaman dan Penyelamatan
184	Resiyono	laki-laki	1972-08-27	Regu Komunikasi dan Informasi
185	Gevangga Syahid Al Ra'afi	laki-laki	1997-11-07	Pemadaman dan Penyelamatan
186	Muhammad Arie Murtadha	laki-laki	1990-10-11	Pemadaman dan Penyelamatan
187	Zainal Ukhtaini	laki-laki	1971-06-02	Regu Komunikasi dan Informasi
188	Yudhi Ariyanto	laki-laki	1980-12-18	Regu Komunikasi dan Informasi
189	Ahmad Rifa'i	laki-laki	2001-02-16	Pemadaman dan Penyelamatan
190	Hendri Setiawan	laki-laki	1992-01-20	Pemadaman dan Penyelamatan
191	Abdus Samad	laki-laki	1996-09-01	Pemadaman dan Penyelamatan
192	Yoga Maulana	laki-laki	2001-09-16	Pemadaman dan Penyelamatan
193	Yunus Adi Putra	laki-laki	2003-10-30	Pemadaman dan Penyelamatan
194	Abdus Salam	laki-laki	1996-07-14	Pemadaman dan Penyelamatan
195	Wahidun	laki-laki	1973-03-13	Regu Komunikasi dan Informasi
196	Abdulhadi	laki-laki	2001-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan
197	Abqari Wajidi	laki-laki	1998-09-20	Pemadaman dan Penyelamatan
198	Apreiza Rosada	laki-laki	2001-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan
199	Muhammad Norhafiji	laki-laki	1998-12-30	Pemadaman dan Penyelamatan
200	Hasbullah	laki-laki	1974-11-09	Regu Komunikasi dan Informasi
201	Syahril	laki-laki	1976-07-27	Regu Komunikasi dan Informasi
202	Asra	laki-laki	1989-09-03	Pemadaman dan Penyelamatan
203	Abd Kadir Zailani	laki-laki	1976-01-01	Regu Komunikasi dan Informasi
204	Arif Rahman	laki-laki	1998-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan
205	Ahmad Yani	laki-laki	1982-11-09	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
206	Ahmad Habibi	laki-laki	1998-05-21	Pemadaman dan Penyelamatan
207	A Riduan	laki-laki	1993-08-21	Pemadaman dan Penyelamatan
208	Sarbani	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
209	Abdul Halim	laki-laki	1992-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan
210	Hasan Baseri	laki-laki	1977-05-01	Regu Komunikasi dan Informasi
211	Syamsul Hadi	laki-laki	1971-11-28	Regu Komunikasi dan Informasi
212	Ahmad Rizali	laki-laki	1996-05-12	Pemadaman dan Penyelamatan
213	A. Faisal	laki-laki	1993-10-13	Pemadaman dan Penyelamatan
214	Siti Jamilah	perempuan	1999-04-07	Regu Penyuluh
215	Supian Noor	laki-laki	2004-07-10	Pemadaman dan Penyelamatan
216	Nasrullah	laki-laki	1990-07-06	Pemadaman dan Penyelamatan
217	Jamani	laki-laki	1976-06-15	Regu Komunikasi dan Informasi
218	Abd Syukur	laki-laki	1989-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan
219	Hairuni	laki-laki	2001-10-01	Pemadaman dan Penyelamatan
220	Muhammad Saufi Rahman	laki-laki	2002-10-08	Pemadaman dan Penyelamatan
221	Bahrian Nor	laki-laki	1996-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan
222	Muhammad Sanusi	laki-laki	1993-09-30	Pemadaman dan Penyelamatan
223	Muhammad Rifansyah	laki-laki	2002-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan
224	Muhammad Abdul Gaffur	laki-laki	1994-01-11	Pemadaman dan Penyelamatan
225	Ahmad Murjani	laki-laki	1997-03-07	Pemadaman dan Penyelamatan
226	Fakhrian	laki-laki	1965-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan
227	Bilhakim	laki-laki	1976-09-01	Regu Komunikasi dan Informasi
228	Ahmad Zulkani	laki-laki	1997-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan
229	Zul Fahma	laki-laki	2000-09-15	Pemadaman dan Penyelamatan
230	M Nurdin	laki-laki	1998-03-04	Pemadaman dan Penyelamatan
231	Muhammad Ghiffary Arrizani Maulani	laki-laki	2002-07-24	Pemadaman dan Penyelamatan
232	Muhammad Mulkani	laki-laki	1991-03-08	Pemadaman dan Penyelamatan
233	Muhammad Fahrurraji	laki-laki	2003-09-20	Pemadaman dan Penyelamatan
234	Anshari Arsyad	laki-laki	2003-04-07	Pemadaman dan Penyelamatan
235	Sulaiman	laki-laki	1981-01-21	Pemadaman dan Penyelamatan
236	Ahmad Zaini	laki-laki	1976-10-15	Regu Komunikasi dan Informasi
237	Akhmad Kadri	laki-laki	2002-11-25	Pemadaman dan Penyelamatan
238	Fadeli	laki-laki	1982-05-09	Pemadaman dan Penyelamatan
239	Muhammad Alwi	laki-laki	1987-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan
240	M.Baidawi	laki-laki	1999-03-25	Pemadaman dan Penyelamatan
241	Sairaji	laki-laki	1999-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan
242	Akhmad Rafi Aufari Fahmi	laki-laki	2002-01-11	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
243	Muhtar	laki-laki	1969-03-03	Regu Komunikasi dan Informasi
244	M.Zacky	laki-laki	2004-05-22	Pemadaman dan Penyelamatan
245	Edyrahman	laki-laki	1993-09-18	Pemadaman dan Penyelamatan
246	Rizki Ananda	laki-laki	1991-01-02	Pemadaman dan Penyelamatan
247	Muhammad Syauqi	laki-laki	2003-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
248	Muhammad Ariyani	laki-laki	1989-12-08	Pemadaman dan Penyelamatan
249	Ahmad Kaprawi	laki-laki	1979-04-21	Regu Komunikasi dan Informasi
250	Nor Halimah	perempuan	2002-07-02	Pemadaman dan Penyelamatan
251	Muhammad Hamidi	laki-laki	1993-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan
252	Ade Rizky Puspa Ningrum	perempuan	1993-06-28	Pemadaman dan Penyelamatan
253	Maulida Rahmafany	perempuan	2000-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan
254	M.Rizalianoor	laki-laki	1999-09-27	Pemadaman dan Penyelamatan
255	Isriani Hidayah	perempuan	1994-12-27	Pemadaman dan Penyelamatan
256	Husairi	laki-laki	1991-11-30	Pemadaman dan Penyelamatan
257	Nova Indriyani	perempuan	1999-03-11	Pemadaman dan Penyelamatan
258	Ahmad Hijaji	laki-laki	2004-04-29	Pemadaman dan Penyelamatan
259	Rahmadani	laki-laki	1981-05-15	Pemadaman dan Penyelamatan
260	Gusti Ernawati	perempuan	1987-08-31	Regu Penyuluh
261	Edi Prasetyo	laki-laki	1996-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan
262	Ahmad Yazid	laki-laki	1989-02-13	Pemadaman dan Penyelamatan
263	Gusti Abdurrahman	laki-laki	1997-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan
264	Gusti Mauliani Kusuma	perempuan	1988-10-10	Regu Penyuluh
265	Ghina Aulia	perempuan	2004-10-03	Regu Penyuluh
266	Fajrillia Firmanda Qudsi	perempuan	2001-07-26	Regu Penyuluh
267	Dwi Noor Wahidah	perempuan	1997-11-12	Regu Penyuluh
268	Ahmad Saufi Ma'rup	laki-laki	1997-05-30	Pemadaman dan Penyelamatan
269	M.Samlawi	laki-laki	1999-12-12	Pemadaman dan Penyelamatan
270	Muhammad Hifni	laki-laki	2000-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan
271	Ahmad Rizkiawan	laki-laki	2003-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan
272	Abdul Hadi	laki-laki	2003-02-08	Pemadaman dan Penyelamatan
273	Muhammad Shobron	laki-laki	1988-07-16	Pemadaman dan Penyelamatan
274	Abdul Kholiq	laki-laki	1976-01-16	Regu Komunikasi dan Informasi
275	Khesia Kartika Primesti	perempuan	1987-11-10	Regu Penyuluh
276	Ahmad Muhammad	laki-laki	1987-06-12	Pemadaman dan Penyelamatan
277	Muhammad Hakim Abdillah	laki-laki	2002-09-29	Pemadaman dan Penyelamatan
278	A.Shofwani	laki-laki	1992-09-01	Pemadaman dan Penyelamatan
279	Muhammad Fakhri	laki-laki	1988-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan
280	M. Kholil	laki-laki	1983-01-04	Pemadaman dan Penyelamatan
281	Marhani	laki-laki	1973-05-19	Regu Komunikasi dan Informasi



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
282	Akhmad Lukman Karimullah	laki-laki	2002-09-29	Pemadaman dan Penyelamatan
283	Fathul Arifin	laki-laki	1980-10-03	Regu Komunikasi dan Informasi
284	Muhammad Irwansyah	laki-laki	2002-01-07	Pemadaman dan Penyelamatan
285	Muhammad Shobi Rahman	laki-laki	1998-05-30	Pemadaman dan Penyelamatan
286	Wahyu Rahmad Bawani Putra	laki-laki	2000-09-12	Pemadaman dan Penyelamatan
287	Muhammad Hadya	laki-laki	2000-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan
288	Rasidul Gapur	laki-laki	1987-08-08	Pemadaman dan Penyelamatan
289	Ahmad Rahmadi	laki-laki	1997-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan
290	Muhammadgozi	laki-laki	2003-02-16	Pemadaman dan Penyelamatan
291	Muhammad Hasbi	laki-laki	1991-04-06	Pemadaman dan Penyelamatan
292	Muhamad Hafizi	laki-laki	2003-01-13	Pemadaman dan Penyelamatan
293	Muhammad Hilmani	laki-laki	1989-04-08	Pemadaman dan Penyelamatan
294	M. Aminnullah	laki-laki	2003-03-11	Pemadaman dan Penyelamatan
295	Ahmad Berkati	laki-laki	2002-04-23	Pemadaman dan Penyelamatan
296	Ahmad Salim	laki-laki	1998-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan
297	Muhammad Syafi'i	laki-laki	2002-11-15	Pemadaman dan Penyelamatan
298	Gusti M. Azril	laki-laki	2004-09-02	Pemadaman dan Penyelamatan
299	Muhammad Mustopa	laki-laki	1995-05-31	Pemadaman dan Penyelamatan
300	Muhammad Pauroni	laki-laki	2000-05-31	Pemadaman dan Penyelamatan
301	M.Hasir	laki-laki	1989-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan
302	Muhammad_Rusdi	laki-laki	2001-08-09	Pemadaman dan Penyelamatan
303	Muhammad Aklian Nor	laki-laki	1993-08-20	Pemadaman dan Penyelamatan
304	Afrian	laki-laki	2002-09-12	Pemadaman dan Penyelamatan
305	Muhammad Nazir	laki-laki	2002-06-17	Pemadaman dan Penyelamatan
306	Habibi	laki-laki	1986-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan
307	Muhammad Halim	laki-laki	1994-08-09	Pemadaman dan Penyelamatan
308	Hiro Rahman	laki-laki	1992-09-26	Pemadaman dan Penyelamatan
309	Zainudin	laki-laki	1996-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan
310	Zainal Hakim	laki-laki	1998-07-29	Pemadaman dan Penyelamatan
311	Kabian	laki-laki	1968-12-30	Pemadaman dan Penyelamatan
312	Heria Asmarani	laki-laki	1993-11-26	Pemadaman dan Penyelamatan
313	Muhammad Jaelani	laki-laki	1998-06-15	Pemadaman dan Penyelamatan
314	Jamaluddin	laki-laki	1977-05-21	Pemadaman dan Penyelamatan
315	Muhammad Naubi	laki-laki	2002-12-27	Pemadaman dan Penyelamatan
316	Muhammad Zaki	laki-laki	2003-04-20	Pemadaman dan Penyelamatan
317	Abdul Hadi	laki-laki	2000-08-04	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
318	Muhammadseman	laki-laki	2002-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan
319	M. Wahyu Fajriannor	laki-laki	1990-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan
320	Muhammad Maulidi	laki-laki	1997-07-06	Pemadaman dan Penyelamatan
321	Rahmat Apriani Pratama	laki-laki	1995-04-07	Pemadaman dan Penyelamatan
322	M.Iqbal	laki-laki	2003-09-19	Pemadaman dan Penyelamatan
323	Rahmat Akbar Ritonga	laki-laki	1988-08-18	Pemadaman dan Penyelamatan
324	Muhammad Rifqi Mukarram	laki-laki	2000-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan
325	Muhammad_Gozali	laki-laki	2003-04-12	Pemadaman dan Penyelamatan
326	Muhammad Amin	laki-laki	1986-12-22	Pemadaman dan Penyelamatan
327	Muhammad Isroni	laki-laki	1998-11-04	Pemadaman dan Penyelamatan
328	Muhammad Rifky Maulana	laki-laki	2004-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan
329	Saiful Ansari	laki-laki	1983-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
330	Muhammad Mulyani	laki-laki	2002-10-02	Pemadaman dan Penyelamatan
331	M. Rifqy Ihsani Salim	laki-laki	2004-09-28	Pemadaman dan Penyelamatan
332	Mudera	laki-laki	1975-01-01	Regu Komunikasi dan Informasi
333	Ahmad Saubari	laki-laki	1999-02-14	Pemadaman dan Penyelamatan
334	Muhammad Kurniawan	laki-laki	1997-11-09	Pemadaman dan Penyelamatan
335	Hasnan	laki-laki	1983-03-04	Regu Komunikasi dan Informasi
336	Abdillahdarajad	laki-laki	1998-08-06	Pemadaman dan Penyelamatan
337	Muhammad Riski	laki-laki	2002-11-20	Pemadaman dan Penyelamatan
338	Ahmad Gapuri	laki-laki	1979-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan
339	Aliansyah	laki-laki	1979-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
340	Muhammad Ferdy Setia	laki-laki	2002-07-08	Pemadaman dan Penyelamatan
341	Taufik Fikriyadi	laki-laki	1970-01-26	Regu Komunikasi dan Informasi
342	Masrani	laki-laki	1970-02-04	Regu Komunikasi dan Informasi
343	Noria Rahman Hidayat	laki-laki	1984-05-02	Pemadaman dan Penyelamatan
344	H. Syakhrudin, S.Pd	laki-laki	1956-12-12	Regu Komunikasi dan Informasi
345	Syahrul	laki-laki	1973-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
346	Reza Maulana	laki-laki	2001-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan
347	Abdulrahim	laki-laki	1986-06-12	Regu Komunikasi dan Informasi
348	Muhammad Maulana	laki-laki	1991-08-28	Pemadaman dan Penyelamatan
349	Syahrudin	laki-laki	1985-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan
350	Syamsuri	laki-laki	1968-05-03	Regu Komunikasi dan Informasi
351	Yudha Setiawan	laki-laki	1984-03-17	Pemadaman dan Penyelamatan
352	M. Ala	laki-laki	1983-08-17	Regu Komunikasi dan Informasi
353	Gusti Bayu Anzani Akhfira	laki-laki	1989-09-04	Pemadaman dan Penyelamatan
354	Dewi Erliyani	perempuan	1979-04-21	Regu Penyuluh



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
355	Ahmad Noval	laki-laki	2003-02-20	Pemadaman dan Penyelamatan
356	Surahyo	laki-laki	1987-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan
357	Muhammad Fadillah	laki-laki	1997-08-19	Pemadaman dan Penyelamatan
358	Abdurrahim	laki-laki	2002-06-24	Pemadaman dan Penyelamatan
359	Wahyudin Noor	laki-laki	1969-12-31	Regu Komunikasi dan Informasi
360	Ruhamah Faisal	perempuan	1967-02-14	Regu Penyuluh
361	Hj. Nane Andriadne, Sh	perempuan	1970-03-12	Regu Penyuluh
362	Muhammad Rayhan	laki-laki	2003-01-23	Pemadaman dan Penyelamatan
363	Muhammad Qozwaini	laki-laki	2004-01-05	Pemadaman dan Penyelamatan
364	Saufan Sauri	laki-laki	2004-01-08	Pemadaman dan Penyelamatan
365	Ari Anugerah	laki-laki	2003-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan
366	Rizkoini	laki-laki	2001-10-22	Pemadaman dan Penyelamatan
367	Nurkamalia	perempuan	2003-05-26	Regu Penyuluh
368	Hasanudin	laki-laki	2000-09-06	Pemadaman dan Penyelamatan
369	Zaini Gani	laki-laki	1994-04-28	Pemadaman dan Penyelamatan
370	Ahmad Rasyidi	laki-laki	1995-12-11	Pemadaman dan Penyelamatan
371	Muhammad Hapis	laki-laki	1997-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan
372	Zainal Makmun	laki-laki	1960-07-09	Regu Komunikasi dan Informasi
373	Muhammad Hairi	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
374	Alfiannor	laki-laki	1994-10-11	Pemadaman dan Penyelamatan
375	Abdul Aziz Awwali	laki-laki	2002-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan
376	Sugiannor	laki-laki	1982-11-05	Regu Komunikasi dan Informasi
377	Ahmad Zaini	laki-laki	2004-03-19	Pemadaman dan Penyelamatan
378	Ahmad Nujuli	laki-laki	2004-06-14	Pemadaman dan Penyelamatan
379	Muhammad Noval	laki-laki	2001-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan
380	Ajijayadi	laki-laki	1976-07-05	Regu Komunikasi dan Informasi
381	Ardiansyah	laki-laki	1999-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan
382	Muhammad Fiqri Haykal	laki-laki	2002-05-10	Pemadaman dan Penyelamatan
383	H. Salam	laki-laki	1952-07-13	Regu Komunikasi dan Informasi
384	Yuda Asmara	laki-laki	1980-11-23	Pemadaman dan Penyelamatan
385	Sandiabdillah	laki-laki	1993-05-05	Pemadaman dan Penyelamatan
386	Taofik Rahman	laki-laki	2001-03-01	Pemadaman dan Penyelamatan
387	Muhammad Hilman	laki-laki	1997-06-30	Pemadaman dan Penyelamatan
388	Muhammad Nasrullah	laki-laki	1997-12-03	Pemadaman dan Penyelamatan
389	Fahmi Ridlani	laki-laki	1977-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan
390	Ahmad Zainuddin	laki-laki	1994-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan
391	Abdul Basit	laki-laki	1996-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan
392	Muhammad Refani	laki-laki	1996-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
393	Nidaul Khair	laki-laki	1994-07-18	Pemadaman dan Penyelamatan
394	Ahmad Mujahid	laki-laki	1978-07-11	Pemadaman dan Penyelamatan
395	Muhammad Nor Ihsan	laki-laki	2000-05-29	Pemadaman dan Penyelamatan
396	Muhammad Fahrurrazi	laki-laki	1993-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan
397	Muhammad Irwan Wijaya	laki-laki	1988-02-12	Pemadaman dan Penyelamatan
398	M.Rafi'i	laki-laki	2000-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan
399	Sabirin	laki-laki	1991-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan
400	Zainal Abidin	laki-laki	2003-04-08	Pemadaman dan Penyelamatan
401	M Asanu Amala	laki-laki	1997-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan
402	Muhammad Ramdhani	laki-laki	2001-10-11	Pemadaman dan Penyelamatan
403	Achyani	laki-laki	1981-05-27	Pemadaman dan Penyelamatan
404	Ahmad Rifki	laki-laki	2001-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan
405	Abdul Zakir Muhadi	laki-laki	1979-10-01	Pemadaman dan Penyelamatan
406	Ahmad Rifki	laki-laki	2001-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan
407	Muhammad Andi Ramadansyah	laki-laki	1986-05-25	Pemadaman dan Penyelamatan
408	Muhammad Alfian	laki-laki	1992-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan
409	Lukmanul Hakim	laki-laki	1973-06-06	Regu Komunikasi dan Informasi
410	Muhammad Sauqi	laki-laki	2004-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
411	Nor Yasin	laki-laki	1973-04-20	Regu Komunikasi dan Informasi
412	Gt. Muhammad Kusumayuda	laki-laki	1985-03-15	Pemadaman dan Penyelamatan
413	Syarkawi	laki-laki	1975-01-03	Regu Komunikasi dan Informasi
414	Achmad Zarqowi	laki-laki	1987-04-01	Pemadaman dan Penyelamatan
415	Muhammad Sendi Rianto	laki-laki	1991-10-07	Pemadaman dan Penyelamatan
416	Adi Rachman	laki-laki	1972-08-04	Regu Komunikasi dan Informasi
417	Dwi Saputra	laki-laki	2001-11-24	Pemadaman dan Penyelamatan
418	Abdullah	laki-laki	2003-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan
419	Muhammad Arsyad	laki-laki	1988-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan
420	Risa Ayu Chairani	perempuan	1987-07-11	Regu Penyuluh
421	Muhammad Rizky	laki-laki	2001-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan
422	H.Abd.Munir	laki-laki	1979-04-03	Regu Komunikasi dan Informasi
423	Yudita Apriadi Putra	laki-laki	2002-12-21	Pemadaman dan Penyelamatan
424	Sugiyon Nur	laki-laki	1984-10-28	Pemadaman dan Penyelamatan
425	Fahriansyah	laki-laki	1982-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan
426	Salimi	laki-laki	1981-01-02	Pemadaman dan Penyelamatan
427	Muhammad Abdul Haris	laki-laki	2000-09-30	Pemadaman dan Penyelamatan
428	Rahmatur Rabani	laki-laki	1997-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan
429	Mulyadi	laki-laki	1995-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
430	Abdulhakim	laki-laki	1979-07-15	Regu Komunikasi dan Informasi
431	Muhammad Amrullah	laki-laki	1992-05-10	Pemadaman dan Penyelamatan
432	Ahmad Junaidi	laki-laki	1992-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan
433	Ahmad Rabbani	laki-laki	1986-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan
434	Ahmadsupian	laki-laki	2000-11-24	Pemadaman dan Penyelamatan
435	Aji Budiono	laki-laki	1976-02-02	Regu Komunikasi dan Informasi
436	Ahmadkamaluddin	laki-laki	2001-09-25	Pemadaman dan Penyelamatan
437	Najib	laki-laki	2000-10-28	Pemadaman dan Penyelamatan
438	Muhammad Iqbal	laki-laki	2001-08-01	Pemadaman dan Penyelamatan
439	Muhammad Fiqri	laki-laki	2004-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan
440	Sholahuddin	laki-laki	2005-02-08	Pemadaman dan Penyelamatan
441	Ahmad Rafi'i	laki-laki	1992-09-13	Pemadaman dan Penyelamatan
442	Rahman	laki-laki	1987-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan
443	Sholhan	laki-laki	1985-12-17	Pemadaman dan Penyelamatan
444	Khalilurrahman	laki-laki	1992-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan
445	Jambri	laki-laki	1984-02-03	Pemadaman dan Penyelamatan
446	Nestriyanto	laki-laki	1982-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan
447	Ahsani	laki-laki	1975-02-10	Regu Komunikasi dan Informasi
448	Muhammad Nor	laki-laki	1981-04-02	Regu Komunikasi dan Informasi
449	Zulkifli	laki-laki	1984-09-23	Pemadaman dan Penyelamatan
450	Mursidi	laki-laki	1987-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan
451	Jainal Pikri	laki-laki	2000-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan
452	Subkiannoor	laki-laki	1999-07-20	Pemadaman dan Penyelamatan
453	Ahmad Najli	laki-laki	1997-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan
454	Solihin	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
455	Muhammad Alfiani	laki-laki	1997-07-13	Pemadaman dan Penyelamatan
456	Ahmad Syahbana	laki-laki	1997-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan
457	Hasanuddin	laki-laki	1990-12-19	Pemadaman dan Penyelamatan
458	RIF'AN	laki-laki	1992-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan
459	Muhammad Hilman Nabawi	laki-laki	2005-02-18	Pemadaman dan Penyelamatan
460	MUJAJIDIN	laki-laki	1982-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan
461	WAHYUDI	laki-laki	1980-07-01	Regu Komunikasi dan Informasi
462	TAUPIK	laki-laki	1975-01-07	Regu Komunikasi dan Informasi
463	Miftahul aripin	laki-laki	1985-03-05	Pemadaman dan Penyelamatan
464	ABDUL HAKIM	laki-laki	1979-03-09	Regu Komunikasi dan Informasi
465	AHYANI	laki-laki	1971-04-01	Regu Komunikasi dan Informasi



NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN
466	Muhammad Rafii Ramli	laki-laki	1986-04-19	Pemadaman dan Penyelamatan
467	najiyulah	laki-laki	1993-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan
468	MUHAMMAD ALFANI	laki-laki	1993-12-15	Pemadaman dan Penyelamatan
469	sahmi raji	laki-laki	1994-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan
470	noor hairi ipansyah	laki-laki	1988-11-07	Pemadaman dan Penyelamatan
471	Akhmad Junaidi	laki-laki	1992-05-05	Pemadaman dan Penyelamatan
472	Muhaini	laki-laki	1988-10-12	Pemadaman dan Penyelamatan
473	Muhammad rasyad	laki-laki	1992-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan
474	Ahmad Rayhan	laki-laki	2004-12-17	Pemadaman dan Penyelamatan
475	Rahmat raehan	laki-laki	1994-09-23	Pemadaman dan Penyelamatan
476	SANDI IRWANDA	laki-laki	1989-06-23	Pemadaman dan Penyelamatan
477	Hasdianor Efendi	laki-laki	1999-11-21	Pemadaman dan Penyelamatan
478	Muhammad Mahdi	laki-laki	1999-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
479	KHAIDIR	laki-laki	2004-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan
480	Muhammad Mahdi	laki-laki	1999-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan
481	M Rudiansyah	laki-laki	1994-01-19	Pemadaman dan Penyelamatan
482	Najamudin	laki-laki	2000-09-22	Pemadaman dan Penyelamatan
483	Ayan Saputra	laki-laki	1991-05-12	Pemadaman dan Penyelamatan
484	Muhammad Hendrayani	laki-laki	1989-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan
485	zulkifli	laki-laki	1992-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan
486	muhammad najamuddin	laki-laki	2004-12-01	Pemadaman dan Penyelamatan
487	Lukman	laki-laki	1993-02-06	Pemadaman dan Penyelamatan
488	Muhammad khalil	laki-laki	1992-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan
489	Muhmmad Mirza	laki-laki	2002-05-02	Pemadaman dan Penyelamatan
490	Muhammad Syarkawi	laki-laki	1985-01-29	Pemadaman dan Penyelamatan
491	Rusli Padli	laki-laki	1977-06-14	Regu Komunikasi dan Informasi
492	Saipullah	laki-laki	1983-07-15	Pemadaman dan Penyelamatan
493	AHMAD NAUFAL	laki-laki	1998-08-04	Pemadaman dan Penyelamatan
494	Muhammad Noorrahim	laki-laki	2000-08-11	Pemadaman dan Penyelamatan
495	Hermansyah	laki-laki	1986-12-24	Pemadaman dan Penyelamatan
496	Ariansyah	laki-laki	2000-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan
497	Muhammad Fikri	laki-laki	2004-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan
498	Muhammad Syahid	laki-laki	2000-11-03	Pemadaman dan Penyelamatan

Sumber : DPKP, 2025



#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM yaitu:

##### Bidang Trantibum

##### Permasalahan, Solusi dan Tindakanlanjutan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Trantibum Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil	Memaksimalkan SDM yang ada dengan membagi jadwal kegiatan secara proporsional	Pengaturan jadwal operasional sesuai porsi antara jumlah anggota dan luas cakupan wilayah
2	Masih kurangnya tenaga PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) bagi pelaksanaan Penyelenggaraan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Satpol PP di Kabupaten Banjar	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan Perda/Perkada untuk menciptakan Kabupaten Banjar yang aman, tertib dan kondusif	Akan mengagendakan anggota yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Diklat PPNS yang direncanakan pada TA 2025
3	Belum optimalnya kerjasama antara dinas pemilik Perda / Perkada dengan Satpol PP dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan	Mengoptimalkan koordinasi secara intensif terhadap SKPD pengampu Perda/Perkada	Melaksanakan koordinasi maupun konsultasi kepada SKPD pengampu Perda/Perkada
4	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakkan perda dan perkada	Mengusulkan pembaharuan sarana prasarana khususnya dalam rangka operasional	Pengajuan sarana dan prasarana dalam RKBMD
5	Keterbatasan lahan untuk berusaha menyebabkan sektor informal beraktifitas pada lahan yang dilaran	Koordinasi dengan SKPD pengampu urusan khususnya perdagangan atau Perusahaan Daerah yang berwenang untuk mencari solusi dalam permasalahan pedagang kaki lima	Melaksanakan koordinasi maupun konsultasi kepada Dinas yang berperan sebagai pengampu Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima
6	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Banjar	Mengintensifkan sosialisasi produk hukum daerah kepada semua lapisan masyarakat	Melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah khususnya mengenai produk hukum yang memuat sanksi lebih komprehensif dari tingkat desa / kelurahan

Sumber : Satpol PP, 2025

##### Bidang Kebencanaan

##### Permasalahan, Solusi dan Tindakanlanjutan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Sulitnya mendapatkan bukti dukung (KK/KTP) untuk pendataan BNBA pada saat kondisi darurat bencana	Dilakukan Pendataan semaksimal mungkin di lapangan terkait nama dan alamat korban /terdampak bencana dan di lakukan koordinasi /verifikasi kepada RT/Kades ybs	Data dilengkapi secara bertahap
2	Kurangnya pemahaman yg sama dari aparat desa / kecamatan tentang pentingnya data korban / terdampak bencana yang lengkap pada saat melaporkan korban / terdampak bencana	Sosialisasi menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pendataan korban/ terdampak bencana	Menyampaikan informasi terkait pentingnya data korban bencana yang benar benar pada setiap kesempatan yang ada
3	Belum adanya pemahaman yang sama terkait 4 tahapan SPM, karena minimnya sosialisasi/bimtek khusus SPM	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan informasi yang diterima dan mohon kepada kemandagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail, khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Memohon kepada pihak terkait SPM untuk melakukan bimtek tentang SPM kepada SKPD pengampu SPM dan berharap melalui form ini yang berkepentingan dapat merespon hal tersebut
4	Kurangnya kemampuan SDM	Meningkatkan kemampuan melalui Pelatihan	Memohon kepada pihak terkait SPM untuk melakukan bimtek tentang SPM kepada SKPD pengampu SPM dan berharap melalui form ini yang berkepentingan dapat merespon hal tersebut
5	Jarak dan Demografi wilayah Kabupaten Banjar yang luas	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melibatkan relawan	Melakukan pembinaan kepada relawan di daerah rawan bencana



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
6	Kesulitan memprediksi jumlah kejadian bencana dan jumlah korban bencana	Menggunakan angka perkiraan rata rata 5 tahun terakhir Menggunakan target yang sudah terencana di dokumen renstra	Mengupdate data review dokumen berikutnya
7	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.B.1 dan 5.B.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan infdormasi yang diterima dan mohon kepada kemendagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikaasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain
8	Belum ditetapkannya kebijakan perhitungan yang jelas dalam menentukan target kinerja, indikator kinerja dan capaian kinerja	Merumuskan dan menetapkan kebijakan	Mengusulkan untuk dibuat dan atau kebijakan terkait perhitungan , target kinerja ,indikator kinerja dan capaian kinerja SPM
9	Belum jelas ketentuan dan belum ada kebijakan terkait Definisi Operasional	Nerumuskan Definisi Operasional	Mengusulkan untuk dilakukan pembuatan Definisi Operasional SPM berdasarkan kearifan lokal
10	Keterbatasan pagu anggaran	Menyusun dan merencanakan Kembali anggaran yang disesuaikan dengan SPM	Mengusulkan rencana kegiatan yang menyesuaikan dengan SPM
11	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.C.1 dan 5.C.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan infdormasi yang diterima dan mohon kepada kemendagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikaasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain
12	Sulitnya dalam menetapkan target karena kondisi darurat merupakan situasi yang tidak diharapkan	Menggunakan angka perkiraan rata rata 5 tahun terakhir Menggunakan target yang sudah terencana di dokumen renstra	Mengupdate data review dokumen berikutnya
13	Belum maksimalnya koordinasi dengan masyarakat wilayah tempat pelaksanaan kegiatan	Bentuk tim Bersama untuk memastikan pelaksanaan kegiatan	Mengusulkan untuk kebijakan dan penetapan susunan tim koordinasi di lingkup SKPD/Pengampu SPM Kab.Banjar
14	Kurangnya pemahaman untuk pengisian Form 5.D.1 dan 5.D.2	Mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman dan infdormasi yang diterima dan mohon kepada kemendagri/ pihak terkait yang mengeluarkan regulasi SPM untuk memberikan informasi dan penjelasan detail,khususnya kebencanaan termasuk pengisian form aplikasi SPM yang ada	Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana pengaplikaasian SPM dan mencari Referensi pengisian pada SKPD lain
15	Pendataan penerima layanan PPE saat keadaan darurat bencana belum optimal	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	Melakukan pengusulan rekrutmen pegawai baru melalui bagian umpeg
16	Pelayanan PPE terhadap korban terluar / terjauhbelum optimal-Kurang luasannya merencanakan kegiatan di karenakan anggaran sdh di pagu, sehingga perencanaan di sesuaikan dengan dana yang ada dan sdh ditetapkan	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mengusulkan penambahan sumberdaya untuk kegiatan tersebut	Menyediakan anggaran untuk dapat menggunakan lebih banyak tenaga relawan pada saat keadaan darurat

Sumber : BPBD, 2025

## Bidang Damkar

### Permasalahan, Solusi dan Tindakanjnt Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Damkar Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
1	Sulitnya Mendapatkan Bukti Dukung Berupa KK/KTP Untuk Pendataan Korban Kebakaran	Koordinasi dengan pihak kecamatan dan dukcapil untuk mendapatkan data sesuai dengan tempat atau wilayah yang terdampak kebakaran	Menjalin kesepakatan (MoU) dengan dukcapil untuk akses data kependudukan korban kebakaran
2	Belum Adanya Pemahaman Yang Sama Terkait 4 Tahapan SPM , Karna Minimnya Sosialisasi / Bimtek Khusus SPM	Pembuatan panduan SPM berupa susunan panduan tertulis yang jelas dan terstruktur mengenai	Menyusun panduan SPM yg mudah dipahami dan mendistribusikannya.



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT
		tahapan SPM untuk dijadikan referensi.	
3	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Kebakaran Yang Berhak Mendapat Layanan Tidak Pasti	Kerja sama dengan RT/RW serta kelurahan setempat untuk memperoleh data korban secara cepat dan akurat	Perlunya ditunjuk tim pendataan pasca kebakaran yang bekerjasama dengan Rt/RW setempat untuk mendata korban
4	Sulitnya Dalam Menetapkan Target Karena Kondisi Kebakaran Merupakan Sesuatu Yang Tidak Diharapkan Dan Tidak Dapat Diprediksi	Menetapkan target yang bersifat fleksibel dan penyesuaian berkala sesuai kondisi lapangan	Membuat SK penetapan target sasaran SPM dimana perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun menggunakan data real sebagai denumeratur.
5	Keberadaan Redkar Belum Tersebar Merata Di Beberapa Wilayah Kecamatan/Desa	Mendorong pembentukan dan penguatan Redkar di kecamatan/desa yang belum aktif	Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa untuk memfasilitasi pembentukan Redkar baru
6	Masih Minimnya Keterampilan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Dini Kebakaran, Khususnya Di Tingkat Rumah Tangga. Hal Ini Disebabkan Dominannya Ibu Rumah Tangga Yang Berada Di Rumah, Yang Cenderung Memiliki Tingkat Kepanikan Lebih Tinggi Dibandingkan Laki-Laki Saat Menghadapi Situasi Darurat.	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada rumah tangga sebagai sasaran utama, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan dini kebakaran yang sederhana dan praktis.	Bekerja sama dengan pemerintah desa (Pemdes) untuk melakukan koordinasi, mengumpulkan warga desa sebagai sasaran sosialisasi dan edukasi, serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Edukasi dapat dilakukan melalui simulasi langsung, penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana, dan penanganan situasi darurat di rumah.
7	Masih Rendahnya Pemahaman Relawan Redkar Tentang Peran Dan Tugas Pencegahan Kebakaran	Melaksanakan pelatihan teknis khusus tentang pencegahan kebakaran kepada anggota Redkar	Menyusun modul pelatihan Redkar dan mengundang narasumber ahli untuk pelatihan

Sumber : DPKP, 2025

## 4.6. Urusan Sosial

### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota bahwa ada 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

#### 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

$$\text{Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}} \times 100\%$$

#### 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

$$\text{Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti} = \frac{\text{Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}} \times 100\%$$

#### 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

$$\text{Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti} = \frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}} \times 100\%$$



#### 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

$$\text{Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti} = \frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}} \times 100\%$$

#### 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten

$$\text{Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten atau Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten atau Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial}} \times 100\%$$

#### 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2024 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

**Target SPM Urusan Sosial Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

#### 4.6.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 yaitu:



### Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		416		1. Layanan data dan pengaduan		196	
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		416	
						3. Penyediaan permakanaan		45	
						4. Penyediaan sandang		53	
						5. Penyediaan alat bantu		56	
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		3	
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		38	
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		15	
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan		3	
						10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		25	
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		11	
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		11	
						13. Layanan rujukan		25	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		242		1. Layanan data dan pengaduan		76	
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		18	
						3. Penyediaan permakanaan		242	
						4. Penyediaan sandang		15	
						5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		2	
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		17	
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar		15	
						8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan		4	
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		23	
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		12	
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		12	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						12. Layanan rujukan		17	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		2500		1. Layanan data dan pengaduan		413	
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		43	
						3. Penyediaan permakanaan		2500	
						4. Penyediaan sandang		200	
						5. Penyediaan alat bantu		32	
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		3	
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		20	
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar		15	
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan		3	
						10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan		14	
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		40	
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		40	
						13. Layanan rujukan		14	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		27		1. Layanan data dan pengaduan		47	
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		6	
						3. Penyediaan permakanaan		27	
						4. Penyediaan sandang		0	
						5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		2	
						6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		0	
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		15	
						8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan		2	
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		3	
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		29	
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		29	
						12. Layanan rujukan		3	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota		1609		1. Penyediaan permakanaan		1609	
					2. Penyediaan sandang		70		
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		89		
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		334		
					5. Pelayanan dukungan Psikososial		119		

Sumber : DinsosP3AP2KB, 2025

$IP_{SPM}$  Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti =  $(100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$

$IP_{SPM}$  Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti =  $(100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$

$IP_{SPM}$  Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti =  $(100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$

$IP_{SPM}$  Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti =  $(83,33\% \times 20) + (100\% \times 80) = 16,67\% + 80\% = 96,67\%$

$IP_{SPM}$  Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota =  $(100\% \times 20) + (100\% \times 80) = 20\% + 80\% = 100\%$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 adalah Tuntas Utama dengan nilai 99,33%.

Capaian kinerja tersebut, merupakan capaian kinerja tahunan berdasarkan alokasi keuangan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun, namun jika dilihat dari progres keseluruhan capaian kinerja penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti mencapai 75,815% dan capaian kinerja korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana daerah mencapai 100%.

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Banjar dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, tidak ada mealokasikan anggaran SPM baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagai berikut:

#### Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	609.581.500	543.567.500
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1.616.884.500	1.491.785.000
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1.256.115.000	1.152.092.500
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	57.765.500	11.730.000



Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	1.322.978.500	998.113.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.863.325.000</b>	<b>4.197.288.000</b>

Sumber : DinsosP3AP2KB, 2025

#### 4.6.3. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar terdiri dari:

##### Dukungan Personil SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda	S2		
2	Sekretaris	Pembina Tk. I / IV. b	S2		
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Pembina / IV.a	S2		
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pembina / IV.a	S2		
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina / IV.a	S2		
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Pembina / IV.a	S1		
7	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Pembina / IV.a	S2		
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pembina / IV.a	S2		
9	Kasubbag Perencanaan	Penata TK. I / III.d	S1		
10	Kasubbag Keuangan dan Aset	Penata TK. I / III.d	S1		
11	Kasi Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia	Penata TK. I / III.d	S1		
12	Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Napza	Penata TK. I / III.d	S2		
13	Kasi Perlindungan dan Jaminan sosial	Penata TK. I / III.d	S1		
14	Kasi Pemberdayaan Sosial	Penata TK. I / III.d	S2		
15	Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Pembina / IV.a	S2		
16	Kasi Data dan Informasi Sosial	Penata TK. I / III.d	S2		
17	Kasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Pembina / IV.a	S2		
18	Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata TK. I / III.d	S1		
19	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penata TK. I / III.d	S1		
20	Kasi Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan	Pembina / IV.a	S1		
21	Kasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi serta Data Informasi	Pembina / IV.a	S2		
22	Kasi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Penata TK. I / III.d	S1		
23	Kasi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi	Penata TK. I / III.d	S1		
24	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penata TK. I / III.d	S1		
25	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	IX	D4/S1		
26	Staf PNS	Penata, Penata Muda, pengatur muda, juru Tk. I	SLTA, D1, S1		
27	Staf Non PNS	-	SLTA, D3,S1		

Sumber : DinsosP3AP2KB, 2025



#### 4.6.4. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

##### Permasalahan, Solusi dan Tindaklanjut Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT
<b>A. Pengumpulan Data</b>			
1	Pengumpulan data dan pemilahan data PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama karena adanya kesulitan mengintegrasikan data yang relevan dan akurat	Melakukan update data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkala untuk di jadikan data dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Update data PPKS melalui kegiatan verval yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2	Belum optimal dalam pengelolaan dan pengolahan data		
3	Masih terdapat data yang belum sinkron, karena kemungkinan adanya data ganda atau data tidak konsisten		
<b>B. Penghitungan Kebutuhan</b>			
1	Penghitungan kebutuhan masih terhitung satu per satu orang PPKS, sehingga banyak data yang tercantum berulang (data ganda)	Memastikan kembali penghitungan kebutuhan PPKS dan jumlah target yang dimiliki	Menentukan target jumlah PPKS penerima layanan SPM disesuaikan dengan target DPA dan SPM pada tahun 2025
2	Penghitungan kebutuhan untuk kebencanaan tidak bisa diprediksi pada tahun berjalan, data hanya mengacu/mengikuti pada data capaian tahun sebelumnya		
<b>C. Perencanaan dan Penganggaran</b>			
1.	Kurang optimalnya penghitungan kebutuhan data dan layanan sehingga dalam pembuatan rencana dan anggaran SPM terminimalisir	Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran dalam SPM dan memastikan mutu layanan SPM untuk tahun berikutnya teranggarkan lebih merata	Menganggarkan kembali dengan meningkatkan jumlah target dan mutu layanan untuk layanan tahun 2025 dengan menyesuaikan mutu layanan pada SPM
2.	Adanya mutu layanan yang belum teranggarkan pada seksi rehsos anak, penyandang disabilitas, lanjut usia telantar		
<b>D. Pelaksanaan</b>			
	Pemberian layanan SPM kepada PPKS yang menjadi sasaran SPM masih ditujukan kepada satu per satu PPKS	Mencermati kembali pelaksanaan pemberian layanan SPM kepada PPKS yang menjadi sasaran, mutu layanan dan anggaran	Memastikan pemberian layanan kepada PPKS dengan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
	Mutu layanan pada penerima layanan gelandangan pengemis masih ada yang kosong, dikarenakan SKPD belum mengakomodir anggaran dimaksud		
	Adanya perubahan jumlah target pada mutu layanan di triwulan akhir pada tahun berjalan		
	Pada sub kegiatan bimbingan fisik gelandangan pengemis tidak terlaksana sesuai target, dikarenakan adanya kendala pada pendataan		
	Adanya pemberian layanan pada gelandangan pengemis dari luar daerah, tetapi tidak termasuk dalam penghitungan		
<b>E. Lain-Lain</b>			
	Masih harus lebih banyak belajar, berdiskusi dan juga konsultasi dengan pihak terkait yang kompeten untuk informasi dan pelaksanaan layanan SPM	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang berkompeten dalam SPM	Koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam hal SPM melalui virtual/ langsung seperti dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kab/Kota dan Pemerintah Daerah.
	Adanya ketidaksesuaian dalam kegiatan kebencanaan antara tanggap darurat dan siaga bencana, seperti pada penganggaran hanya tersedia untuk bencana tanggap darurat sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah daerah tidak menetapkan status bencana tanggap darurat		

Sumber : DinsosP3AP2KB, 2025

#### 4.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mendukung pelaksanaan SPM pada tahun 2024 yaitu:

##### Program, Kegiatan & Sub Kegiatan yang Menunjang Penerapan SPM di Kabupaten Banjar Tahun 2024

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	<b>Urusan Pendidikan</b>	182.884.132.745	178.017.031.335
	Dinas Pendidikan	182.884.132.745	178.017.031.335
	Program Pengelolaan Pendidikan	182.884.132.745	178.017.031.335



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	21.105.523.892	20.834.432.800
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.556.951.400	2.485.490.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	896.811.350	882.442.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.150.000	295.899.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	199.969.000	199.622.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	350.000.000	349.741.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	240.000.000	240.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	972.430.883	963.796.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	949.487.000	948.182.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.000.000	5.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	423.084.600	420.834.600
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138.900.000	138.500.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.784.780.000	8.730.146.400
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	107.500.000	106.300.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	35.000.000	34.550.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000	32.549.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.000.000	59.910.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	330.000.000	317.825.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	472.282.750	420.761.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.480.528.728	2.448.068.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK	-	-
	Sub Kegiatan Penataan Ruang / Sudut Baca	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Serba Guna / Aula	-	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang / PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	765.375.000	762.715.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.002.273.181	992.101.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar	97.317.477.749	94.122.583.257
	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru	35.000.000	33.500.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	1.812.788.749	1.680.219.700
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.338.675.710	1.226.924.000



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.795.315.199	2.651.584.700
	Sub Kegiatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.228.665.282	3.208.694.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	1.233.598.999	1.222.238.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	1.586.171.249	1.557.275.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan sekolah	858.552.750	850.285.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	960.039.374	956.105.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	341.277.000	340.119.500
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.352.658.000	6.322.586.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.000.000.000	3.999.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.140.634.618	3.123.970.001
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	544.861.500	537.426.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.378.500	7.378.500
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.521.479.000	1.436.744.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	838.050.892	650.858.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.780.338.133	39.828.557.006
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.125.540.000	1.044.390.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.118.525.000	2.794.071.300
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium Sekolah Dasar	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	149.880.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	100.000.000	99.630.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000	39.580.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000	9.880.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000	99.700.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	-	-
	Sub Kegiatan Penataan Ruang / Sudut Baca	-	-
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.234.724.499	2.103.562.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.155.959.499	1.127.523.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang / PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	226.300.000	212.980.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	883.900.800	741.188.050
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	16.787.042.996	16.066.734.000



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42.117.731.604	41.103.400.378
	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000	25.500.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	1.045.656.500	1.029.803.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	480.888.250	477.170.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	2.219.520.000	2.075.351.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna / Aula	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	233.058.250	232.008.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.214.864.775	1.206.774.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.122.500.820	1.087.312.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	5.114.704.000	4.736.052.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	97.550.000	87.385.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan sekolah	894.187.825	882.043.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	1.369.513.750	1.315.515.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Serba Guna / Aula	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Fasilitas Parkir	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Kantin Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	966.790.000	941.299.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	710.747.000	707.625.400
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	302.760.000	300.645.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	225.000.000	225.000.000
	Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	361.980.000	358.500.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.175.252.500	2.156.782.750
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	776.101.100	768.595.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.000.000	5.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	842.954.000	811.329.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	462.530.000	418.100.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.801.015.084	15.775.735.453
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	260.000.000	248.330.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang TU	334.000.000	308.555.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kepala Sekolah	102.500.000	102.171.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.000.000	34.625.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	75.000.000	73.350.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000	29.655.000



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.000.000	24.670.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	60.000.000	59.655.500
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	-	-
	Sub Kegiatan Penataan Ruang / Sudut Baca	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	589.631.500	577.881.500
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.038.841.250	1.968.310.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang / PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000	99.655.000
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.029.087.000	1.000.152.675
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Asrama Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	981.098.000	952.865.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.343.399.500	21.956.614.900
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal / Kesetaraan	553.860.250	550.270.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	400.000.000	397.792.900
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Stauan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	3.322.407.000	3.279.157.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	10.470.760.000	10.204.370.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000	14.965.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK	137.575.000	135.469.500
	Sub Kegiatan Penataan Ruang / Sudut Baca	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang / PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Laboratorium	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	6.170.500.000	6.109.892.500
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	600.000.000	597.660.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	199.654.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	468.297.250	467.384.000
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>		
	Dinas Kesehatan	8.401.098.625	7.828.233.470
	Program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.401.098.625	7.828.233.470
	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota	8.401.098.625	7.828.233.470
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	1.836.922.000	1.761.758.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	259.694.000	206.159.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	398.006.965	200.480.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	410.489.100	402.959.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2.082.027.000	1.936.503.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	120.000.000	117.938.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	38.777.000	38.344.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	26.875.000	24.220.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	1.323.327.385	1.323.312.420
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	64.643.275	64.423.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	873.405.400	809.118.300
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	966.931.500	943.017.750
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>	39.911.568.191	38.343.409.500
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	39.911.568.191	38.343.409.500
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.093.384.117	22.085.240.940
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	23.093.384.117	22.085.240.940
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	11.417.218.800	10.982.748.690
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	423.644.000	376.178.000
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.020.790.000	2.013.150.000
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.231.731.317	8.713.164.250
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	-	-
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	16.818.184.074	16.258.168.560
	Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.818.184.074	16.258.168.560
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi / peningkatan / perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi / peningkatan / perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan / penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan / penyediaan sarana dan prasarana IPLT	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi / peningkatan / perluasan sarana dan prasarana IPLT	-	-
	Sub Kegiatan Supervisi pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / perluasan sarana dan prasarana IPLT	-	-
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	-	-
	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-	-
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.182.300	188.071.700



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.536.160.274	15.289.909.760
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	791.841.500	780.187.100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-
<b>4</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat</b>	<b>792.903.800</b>	<b>789.428.800</b>
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	792.903.800	789.428.800
	Program Pengembangan Perumahan	792.903.800	789.428.800
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	180.767.100	177.899.600
	Sub Kegiatan Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	-	-
	Sub Kegiatan Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	76.561.600	74.791.600
	Sub Kegiatan Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	-	-
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	104.205.500	103.108.000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	612.136.700	611.529.200
	Sub Kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	612.136.700	611.529.200
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	-	-
<b>5</b>	<b>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>25.811.737.200</b>	<b>23.068.887.567</b>
	Satuan Polisi Pamong Praja	9.308.520.200	7.505.081.038



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.308.520.200	7.505.081.038
	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	9.149.396.000	7.353.002.000
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	8.241.844.000	6.480.042.000
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	81.865.000	54.250.000
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	875.000	875.000
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	-	-
	Sub Kegiatan Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	-
	Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	-	-
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	682.400.000	682.320.000
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	135.912.000	135.515.000
	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	6.500.000	-
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	159.124.200	152.079.038
	Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	27.553.800	27.551.788
	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	63.503.000	63.469.850
	Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	68.067.400	61.057.400
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	-	-
	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-
	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	-	-
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>5.510.265.200</b>	<b>4.873.778.951</b>
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.510.265.200</b>	<b>4.873.778.951</b>
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	703.225.500	656.852.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota	287.050.000	281.450.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	416.175.500	375.402.000
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.026.647.000	1.903.832.884
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	120.706.000	102.753.500
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	33.621.500	30.524.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	189.090.000	184.650.000
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	43.930.000	42.280.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	190.250.000	184.650.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	33.173.500	28.430.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	351.776.000	322.655.384
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.064.100.000	1.007.890.000
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.654.764.200	2.203.570.067
	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	-	-
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	133.752.500	103.300.000
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	25.000.000	10.600.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	605.577.000	484.564.970
	Sub Kegiatan Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	-	-
	Sub Kegiatan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.890.434.700	1.605.105.097
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.628.500	109.524.000
	Sub Kegiatan Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	67.067.000	55.778.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	58.561.500	53.745.500
	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	-	-
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.992.951.800	10.690.027.578
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10.992.951.800	10.690.027.578
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.209.961.100	7.096.510.578
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	213.656.400	213.500.040
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	337.045.000	322.190.838
	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	-
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	495.000.000	457.403.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	-



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	-	-
	Sub Kegiatan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.083.589.700	6.044.134.700
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	10.535.000	5.339.500
	Sub Kegiatan Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	70.135.000	53.942.500
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	129.615.500	62.155.000
	Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	38.015.500	12.782.000
	Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	91.600.000	49.373.000
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-
	Sub Kegiatan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	314.003.300	267.483.100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	143.263.800	141.285.600
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	112.588.000	87.650.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	58.151.500	38.547.500
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	3.339.371.900	3.263.878.900
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	-
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	3.339.371.900	3.263.878.900
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>	<b>4.863.325.000</b>	<b>4.197.288.000</b>
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4.863.325.000	4.197.288.000
	Program Rehabilitasi Sosial	4.863.325.000	4.197.288.000
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.540.346.500	3.199.175.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	2.398.790.000	2.261.035.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	331.350.000	290.065.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	619.000.000	537.745.000
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	38.500.000	30.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75.106.500	18.010.000
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	11.900.000	11.900.000



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	-
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000	4.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	34.800.000	31.020.000
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-
	Sub Kegiatan Layanan Rujukan	20.900.000	15.400.000
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	1.322.978.500	998.113.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	478.974.000	324.050.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	403.660.000	289.009.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	428.444.500	379.315.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	11.900.000	5.739.000

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjara, 2025

## 1. Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh 1 Program, 4 Kegiatan dan beberapa sub kegiatan berikut ini:

Program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp 182.884.132.745 dengan realisasi keuangan Rp. 178.017.031.335 (97,34%). Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu:

### 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 21.105.523.892 dengan realisasi keuangan Rp. 20.834.432.800 (98,72%).

Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu:

#### 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.556.951.400 dengan realisasi keuangan Rp. 2.485.490.000 (97,21%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sejumlah 17 Unit dari 17 Unit dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
	Pembangunan Halaman/Area Bermain PAUD		
1	TK Negeri Permata 2	1	unit
2	TK Tanjung Rema Darat	1	unit
3	TK Negeri Jawa	1	unit
	Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang (DAK)		
4	TK Negeri Tunas Pratama	1	unit
5	TK Negeri Pembina Pengaron	1	unit
6	TK Negeri Pembina Martapura Timur	1	unit
	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah beserta perabotnya		
7	TK Negeri Tunas Pratama	1	unit
8	TK Negeri Pembina Pengaron	1	unit
9	TK Negeri Pembina Martapura	1	unit
	Pembangunan Toilet/Jamban beserta sanitasinya		
10	TK Negeri Jawa	1	unit
11	TK Negeri Permata 2	1	unit
12	TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam	1	unit
13	TK Negeri Pembina Beruntung Baru	1	unit
14	TK Negeri Pertiwi Podok	1	unit
15	TK Al Amin Pengaron	1	unit
16	TK Arraudah Aluh-Aluh	1	unit



2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 896.811.350 dengan realisasi keuangan Rp. 882.442.000 (98,40%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD yang dilakukan sejumlah 11 Unit dari 11 Unit dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Ruang Kelas			
1	TK Negeri Tanjung Rema Darat dan TK Negeri Sekumpul	1	unit
2	TK Negeri Pembina Kertak Hanyar	1	unit
3	TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam	1	unit
Rehabilitasi Ruang Guru/Ruang Kelas			
4	TK Negeri Pembina Simpang Empat	1	unit
5	Rahabilitasi Ruang Kelas TK Permata Bunda	1	unit

3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 300.150.000 dengan realisasi keuangan Rp. 295.899.000 (98,58%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sejumlah 3 Unit dari 3 Unit dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Pembangunan Halaman/Area Bermain			
1	TK Negeri Pembina Telaga Bauntung	1	unit
2	TK Negeri Pembina Mataraman	1	unit
3	TK Negeri Pembina Aranio	1	unit

4) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 199.969.000 dengan realisasi keuangan Rp. 199.622.000 (99,83%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pengadaan Mebel PAUD sejumlah 20 paket dengan realisasi 20 paket dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TK NEGERI	DESA/KEL	KECAMATAN	JUMLAH PAKET
1	TK NEGERI PEMBINA PENGARON	PENGARON	PENGARON	1
2	TK NEGERI PEMBINA CINTAPURI DARUSSALAM	CINTAPURI	CINTAPURI DARUSSALAM	1
3	TK NEGERI PEMBINA KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR I	KERTAK HANYAR	1
4	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PINANG	KUPANG REJO	SUNGAI PINANG	1
5	TK NEGERI PEMBINA BERUNTUNG BARU	JAMBU RAYA	BERUNTUNG BARU	1
6	TK NEGERI PERTIWI PODOK	PODOK	ALUH ALUH	1
7	TK NEGERI PEMBINA TELAGA BAUNTUNG	TELAGA BARU	TELAGA BAUNTUNG	1
8	TK NEGERI JAWA	JAWA	MARTAPURA	1
9	TK NEGERI PEMBINA MATARAMAN	MATARAMAN	MATARAMAN	1
10	TK NEGERI PEMBINA ALUH ALUH	BUNIPAH	ALUH ALUH	1
11	TK NEGERI PEMBINA MARTAPURA	JAWA	MARTAPURA	1
12	TK NEGERI TUNAS PRATAMA	CINDAI ALUS	MARTAPURA	1
13	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1



14	TK NEGERI INTAN LESTARI	INDRASARI	MARTAPURA	1
15	TK NEGERI SEKUMPUL	SEKUMPUL	MARTAPURA	1
16	TK NEGERI TANJUNG REMA DARAT	TANJUNG REMA DARAT	MARTAPURA	1
17	TK NEGERI PERTIWI KERATON	KERATON	MARTAPURA	1
18	TK NEGERI PEMBINA MARTAPURA TIMUR	MELAYU TENGAH	MARTAPURA TIMUR	1
19	TK NEGERI PEMBINA ARANIO	ARANIO	ARANIO	1
20	TK NEGERI PERMATA 2	BINCAU	MARTAPURA	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>20</b>

#### 5) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 350.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 349.741.800 (99,93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pengadaan Perlengkapan PAUD dengan jumlah 302 paket dan realisasi 302 paket dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satuan PAUD	Kecamatan	Volume	Satuan
1	KB MELATI	ALUH-ALUH	2	Paket
2	PAUD AL-FATAH	ALUH-ALUH	3	Paket
3	PAUD KB NURUL HUDA	ALUH-ALUH	2	Paket
4	PAUD KENANGA	ALUH-ALUH	4	Paket
5	PAUD PERMATA MULIA	ALUH-ALUH	2	Paket
6	PAUD SEROJA	ALUH-ALUH	2	Paket
7	TK ANTASARI	ALUH-ALUH	3	Paket
8	TK NEGERI PEMBINA ALUH ALUH	ALUH-ALUH	2	Paket
9	TK NEGERI PERTIWI PODOK	ALUH-ALUH	1	Paket
10	TK NEGERI PODOK 2	ALUH-ALUH	2	Paket
11	KB ANGGREK	ARANIO	1	Paket
12	KB MELATI	ARANIO	2	Paket
13	PAUD KASIH BUNDA	ARANIO	2	Paket
14	TK NEGERI PEMBINA ARANIO	ARANIO	11	Paket
15	KB CEMPAKA PUTIH	ASTAMBUL	2	Paket
16	KB HARAPAN BANGSA	ASTAMBUL	2	Paket
17	KB HARAPAN BUNDA	ASTAMBUL	1	Paket
18	PAUD ANAK SEJAHTERA	ASTAMBUL	3	Paket
19	PAUD CAHAYA	ASTAMBUL	1	Paket
20	PAUD CITRA BANGSA	ASTAMBUL	2	Paket
21	PAUD KB CERIA	ASTAMBUL	2	Paket
22	PAUD NUSA INDAH	ASTAMBUL	1	Paket
23	PAUD PANDAN SARI	ASTAMBUL	3	Paket
24	PAUD PELANGI	ASTAMBUL	1	Paket
25	TK AZZAHRA	ASTAMBUL	2	Paket
26	TK TUNAS KENCANA	ASTAMBUL	4	Paket
27	PAUD MATAHARI	BERUNTUNG BARU	4	Paket
28	PAUD MELATI	BERUNTUNG BARU	5	Paket
29	PAUD TUNAS MEKAR	BERUNTUNG BARU	7	Paket
30	TKN PEMBINA BERUNTUNG BARU	BERUNTUNG BARU	7	Paket
31	KB KARTINI	CINTAPURI DARUSSALAM	2	Paket
32	KB PERMATA IBU	CINTAPURI DARUSSALAM	1	Paket
33	KB TERATAI	CINTAPURI DARUSSALAM	1	Paket
34	PAUD INTAN PERMATA BUNDA	CINTAPURI DARUSSALAM	2	Paket
35	TK TUNAS PERTIWI	CINTAPURI DARUSSALAM	4	Paket
36	KB ABNAUS SHOLAHA	GAMBUT	2	Paket
37	KB CAHAYA MENTARI	GAMBUT	7	Paket
38	KB DINARMAS	GAMBUT	5	Paket
39	TK ISLAM THALABUL AMIN	GAMBUT	1	Paket
40	TK NEGERI MAWAR GAMBUT	GAMBUT	3	Paket
41	TK NOOR LATIFAH	GAMBUT	1	Paket
42	TK NURUL HIDAYAH	GAMBUT	6	Paket
43	KB KAMBOJA	KARANG INTAN	1	Paket
44	KB SEJAHTERA	KARANG INTAN	1	Paket
45	KB SULLAMUL ULUM	KARANG INTAN	2	Paket
46	PAUD MENTARI	KARANG INTAN	3	Paket
47	PAUD QATHRUNNADA	KARANG INTAN	2	Paket
48	TK ABA SEI BESAR	KARANG INTAN	3	Paket
49	TK AL HIDAYAH	KARANG INTAN	4	Paket
50	TK MANGGIS	KARANG INTAN	2	Paket



No	Nama Satuan PAUD	Kecamatan	Volume	Satuan
51	TK PERMATA BUNDA SEJAHTERA	KARANG INTAN	2	Paket
52	TK TERPADU LAMPINI	KARANG INTAN	2	Paket
53	KB KAMBOJA	KERTAK HANYAR	2	Paket
54	KB PELITA BANGSA	KERTAK HANYAR	1	Paket
55	PAUD FAJAR HARAPAN	KERTAK HANYAR	1	Paket
56	KB AISYAH	MARTAPURA	1	Paket
57	KB ANGGREK	MARTAPURA	2	Paket
58	KB YASHMA	MARTAPURA	1	Paket
59	PAUD ANAK PERMATA KASIH	MARTAPURA	2	Paket
60	PAUD DARUNNAJAH	MARTAPURA	6	Paket
61	PAUD TERPADU IT SBB AR RAHMAH	MARTAPURA	2	Paket
62	PAUD TERPADU NURUL MA'RIFAH	MARTAPURA	1	Paket
63	PAUD TRISULA	MARTAPURA	1	Paket
64	TK AISIYIAH CABANG	MARTAPURA	2	Paket
65	TK AISIYIAH RANTING IV	MARTAPURA	3	Paket
66	TK AISIYIAH RANTING V	MARTAPURA	1	Paket
67	TK AL KHAIRIYAH	MARTAPURA	2	Paket
68	TK AL-AMIN	MARTAPURA	2	Paket
69	TK AN-NAJAH	MARTAPURA	5	Paket
70	TK ASSALAM	MARTAPURA	2	Paket
71	TK MAWAR	MARTAPURA	5	Paket
72	TK NEGERI PEMBINA MARTAPURA	MARTAPURA	6	Paket
73	TK NEGERI PERMATA 2	MARTAPURA	1	Paket
74	TK NUSA INDAH	MARTAPURA	2	Paket
75	TK PERTIWI RANTING	MARTAPURA	3	Paket
76	TK YASHMA	MARTAPURA	1	Paket
77	KB SARI ABULUNG	MARTAPURA BARAT	1	Paket
78	KB SETIA BERSAMA	MARTAPURA BARAT	1	Paket
79	PAUD BUANA	MARTAPURA BARAT	1	Paket
80	PAUD TUNAS BANGSA	MARTAPURA BARAT	5	Paket
81	TK TUNAS MANDIRI	MARTAPURA BARAT	2	Paket
82	KB HARAPAN KITA	MARTAPURA TIMUR	1	Paket
83	KB NURI	MARTAPURA TIMUR	1	Paket
84	KB NURUL IBADAH	MARTAPURA TIMUR	2	Paket
85	KB RAUDATUL JANNAH	MARTAPURA TIMUR	2	Paket
86	TK AL FARRAZ	MARTAPURA TIMUR	2	Paket
87	KB HARAPAN BUNDA	MATARAMAN	2	Paket
88	PAUD BUAH HATI	MATARAMAN	1	Paket
89	PAUD SRIKANDI	MATARAMAN	2	Paket
90	PAUD TUNAS MEKAR	MATARAMAN	4	Paket
91	PAUD TUNAS MUDA HARAPAN BUNDA	MATARAMAN	3	Paket
92	TK DARUL HUDA	MATARAMAN	1	Paket
93	TK PEDESAAN	MATARAMAN	1	Paket
94	TK EL-KARIEEM	PARAMASAN	7	Paket
95	KB DAHLIA	PENGARON	2	Paket
96	PAUD MIFTAKHUSSIBYAN	PENGARON	3	Paket
97	TK AL-AMIN	PENGARON	6	Paket
98	TK NUSA INDAH	PENGARON	1	Paket
99	TKN PEMBINA PENGARON	PENGARON	4	Paket
100	KB KENANGA	SAMBUNG MAKMUR	3	Paket
101	TK AL MANSYUR	SAMBUNG MAKMUR	3	Paket
102	KB AL FATIH	SIMPANG EMPAT	3	Paket
103	KB AL-ISHLAH	SIMPANG EMPAT	6	Paket
104	TKN PEMBINA SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	3	Paket
105	PAUD PANDAN WANGI	SUNGAI TABUK	1	Paket
106	PAUD TUNAS HARAPAN BANGSA	SUNGAI TABUK	5	Paket
107	TK HARAPAN BANGSA	SUNGAI TABUK	5	Paket
108	TK AL IHSAN	SUNGAI TABUK	1	Paket
109	TK ANANDA	SUNGAI TABUK	1	Paket
110	TK DAMBAAN IBU	SUNGAI TABUK	3	Paket
111	TK KENANGA	SUNGAI TABUK	5	Paket
112	TK MAWAR	SUNGAI TABUK	3	Paket



No	Nama Satuan PAUD	Kecamatan	Volume	Satuan
113	TK MELATI	SUNGAI TABUK	3	Paket
114	TK NURUL HIDAYAH	SUNGAI TABUK	2	Paket
115	TK PERMATA BUNDA	SUNGAI TABUK	2	Paket
<b>Jumlah</b>			<b>302</b>	Paket

#### 6) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 240.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 240.000.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD untuk 200 peserta didik dengan realisasi 200 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN	VOLUME	SATUAN
ALUH-ALUH	10	Peserta Didik
ARANIO	2	Peserta Didik
ASTAMBUL	21	Peserta Didik
BERUNTUNG BARU	20	Peserta Didik
BERUNTUNG BARU	3	Peserta Didik
CINTAPURI DARUSSALAM	10	Peserta Didik
GAMBUS	13	Peserta Didik
KARANG INTAN	15	Peserta Didik
KERTAK HANYAR	4	Peserta Didik
MARTAPURA	30	Peserta Didik
MARTAPURA BARAT	10	Peserta Didik
MARTAPURA TIMUR	1	Peserta Didik
MATARAMAN	11	Peserta Didik
PARAMASAN	7	Peserta Didik
PENGARON	11	Peserta Didik
SIMPANG EMPAT	8	Peserta Didik
SUNGAI TABUK	24	Peserta Didik
<b>JUMLAH</b>	<b>200</b>	Peserta Didik

#### 7) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 972.430.883 dengan realisasi keuangan Rp. 963.796.000 (99.11%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD sebanyak 7 paket dengan realisasi 7 paket, dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah APE Dalam untuk PAUD Swasta	1	Paket
2	Belanja Hibah Pengadaan APE Luar untuk PAUD Swasta	1	Paket
3	Belanja Hibah Pengadaa APE TK Sinar Pelangi	1	Paket
4	Pengadaan APE Dalam, Mebeluer serta Perllengkapan PAUD	1	Paket
5	Pengadaan APE dan Alat Pembelajaran TK Negeri Pembina Pengaron (DAK-PAUD) dan TK Negeri Pembina Martapura Timur(DAK-PAUD)	1	Paket
6	Pengadaan APE Luar untuk TK Negeri	1	Paket
7	Pengadaan Speaker + Wireless + USB PAUD	1	Paket

#### 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 949.487.000 dengan realisasi keuangan Rp. 948.182.000 (99,86%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD sebanyak 10.774 peserta didik dengan realisasi 10.774, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	KB	TK	TPA	Jumlah
1	Aluh-Aluh	359	174		533
2	Aranio	182	35		217
3	Astambul	516	79		595
4	Beruntung Baru	197	61		258
5	Cintapuri Darussalam	142	77		219
6	Gambut	229	721		950
7	Karang Intan	428	445		873
8	Kertak Hanyar	306	785	18	1.109



9	Martapura	416	1.950	39	2.405
10	Martapura Barat	90	87		177
11	Martapura Timur	304	192		496
12	Mataraman	97	389		486
13	Paramasan		11		11
14	Pengaron	84	136		220
15	Sambung Makmur	80	29		109
16	Simpang Empat	260	192		452
17	Sungai Pinang	71	151		222
18	Sungai Tabuk	408	831		1.239
19	Tatah Makmur	108	33		141
20	Telaga Bauntung	19	43		62
<b>Jumlah</b>		<b>4.296</b>	<b>6.421</b>	<b>57</b>	<b>10.774</b>

9) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 5.000.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yaitu 15 orang dengan realisasi 15 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Satuan pendidikan baru
1	Aidha utami	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	TK negeri mawar gambut
2	Erni minarsih	Guru pada satuan pendidikan	TK negeri sekumpul
3	Mainaniah	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	SD negeri tanjung rema darat
4	Mursinah	Guru pada satuan pendidikan	SD negeri melayu tengah
5	Nita syahrini	Guru pada satuan pendidikan	SD negeri tambak anyar
6	Noor hasanah	Guru pada satuan pendidikan	TK negeri intan lestari
7	Nyai zakiah, s.pd	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	SD negeri jawa laut 2
8	Raudah.b	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	TK negeri sekumpul
9	Rusminah hendrayana	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	TK negeri tanjung rema darat
10	Siti masunah	Guru pada satuan pendidikan	TK negeri tunas pratama
11	Siti noraisyah	Guru pada satuan pendidikan	Tk negeri sekumpul
12	Tuti ariyani	Kepala sekolah pada satuan pendidikan	Tk negeri pembina kertak hanyar
13	Umi kasum	Guru pada satuan pendidikan	TK negeri pembina kertak hanyar
14	Yuliati, s.pd	Guru pada satuan pendidikan	SD negeri cindai alus 2
15	Netta yuyun handayani	Guru pada satuan pendidikan	TK negeri permata

10) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 423.084.600 dengan realisasi keuangan Rp. 420.834.600 (99,47 %). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yaitu 930 orang dengan realisasi 930 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NAMA KEGIATAN	Jumlah Peserta
Penguatan Literasi PAUD	500
Rapat Pengawas TK (PTK PAUD)	22
Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru bagi Kepala TK	100



Bimbingan Teknis Penyusunan Modul Ajar dan KOSP bagi Pamong dan Tutor	100
Bimbingan Teknis Pengembangan Literasi dan Numerasi Guru PAUD	100
Bimbingan Teknis Penguatan 8 Standar Nasional Pendidikan bagi Pengawas, Penilik dan TLD	29
Penguatan Edukasi Gizi dan Kesehatan bagi PTK PAUD	79
<b>TOTAL</b>	<b>930</b>

#### 11) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 138.900.000 dengan realisasi keuangan Rp. 138.500.000 (99,71%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD kepada 437 satuan pendidikan dengan realisasi 437 satuan pendidikan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	TK	KB	TPA	Jumlah
1	Kec. Aluh-Aluh	6	18	0	24
2	Kec. Aranio	1	12	0	13
3	Kec. Astambul	3	23	0	26
4	Kec. Beruntung Baru	3	14	0	17
5	Kec. Gambut	15	15	0	30
6	Kec. Karang Intan	13	22	0	35
7	Kec. Kertak Hanyar	15	15	4	34
8	Kec. Martapura	40	30	8	78
9	Kec. Martapura Barat	5	8	0	13
10	Kec. Martapura Timur	8	15	0	23
11	Kec. Mataraman	16	17	0	33
12	Kec. Pengaron	3	4	0	7
13	Kec. Sambung Makmur	1	6	0	7
14	Kec. Simpang Empat	6	12	0	18
15	Kec. Sungai Pinang	6	5	0	11
16	Kec. Sungai Tabuk	19	17	0	36
17	Kec. Tatah Makmur	2	12	0	14
18	Kec. Telaga Bauntung	2	4	0	6
19	Kec. Cintapuri Darussalam	4	8	0	12
20	Kec. Paramasan	0	0	0	0
<b>Kab. Banjar</b>		<b>168</b>	<b>257</b>	<b>12</b>	<b>437</b>

#### 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 8.784.780.000 dengan realisasi keuangan Rp. 8.730.146.400 (99,38%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Pengelolaan Dana BOP PAUD kepada 405 satuan Pendidikan dengan realisasi 405 satuan pendidikan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Asal Sekolah Penerima BOP	Volume	Satuan
Kec. Aluh-Aluh	23	Satuan Pendidikan
Kec. Aranio	13	Satuan Pendidikan
Kec. Astambul	25	Satuan Pendidikan
Kec. Beruntung Baru	17	Satuan Pendidikan
Kec. Cintapuri Darussalam	12	Satuan Pendidikan
Kec. Gambut	30	Satuan Pendidikan
Kec. Karang Intan	36	Satuan Pendidikan
Kec. Kertak Hanyar	31	Satuan Pendidikan
Kec. Martapura	74	Satuan Pendidikan
Kec. Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
Kec. Martapura Timur	23	Satuan Pendidikan
Kec. Mataraman	34	Satuan Pendidikan
Kec. Pengaron	8	Satuan Pendidikan
Kec. Sambung Makmur	7	Satuan Pendidikan
Kec. Simpang Empat	19	Satuan Pendidikan
Kec. Sungai Pinang	11	Satuan Pendidikan
Kec. Sungai Tabuk	36	Satuan Pendidikan
Kec. Tatah Makmur	14	Satuan Pendidikan
Kec. Telaga Bauntung	6	Satuan Pendidikan
<b>Grand Total</b>	<b>432</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>



- 13) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD  
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 107.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 106.300.000 (98,88%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD kepada 433 orang dengan realisasi 433 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Asal Sekolah Penerima BOP	Volume	Satuan
Kec. Aluh-Aluh	23	Orang
Kec. Aranio	13	Orang
Kec. Astambul	25	Orang
Kec. Beruntung Baru	17	Orang
Kec. Cintapuri Darussalam	12	Orang
Kec. Gambut	30	Orang
Kec. Karang Intan	36	Orang
Kec. Kertak Hanyar	31	Orang
Kec. Martapura	74	Orang
Kec. Martapura Barat	13	Orang
Kec. Martapura Timur	23	Orang
Kec. Mataraman	34	Orang
Kec. Pengaron	8	Orang
Kec. Sambung Makmur	7	Orang
Kec. Simpang Empat	19	Orang
Kec. Sungai Pinang	11	Orang
Kec. Sungai Tabuk	37	Orang
Kec. Tatah Makmur	14	Orang
Kec. Telaga Bauntung	6	Orang
<b>Grand Total</b>	<b>432</b>	<b>Orang</b>

- 14) Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 35.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 34.550.000 (98,71%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah pengembangan 1 konten digital untuk pendidikan dengan realisasi 1 konten digital yaitu Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) bagi Guru PAUD.

- 15) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 35.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 32.549.000 (93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan kepada 100 orang dengan realiasi 100 orang yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS
1	Hamdanah, S.HI	Pokja IV PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Aluh-aluh
2	Shofia Maulida	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Aluh-aluh
3	Maulidah	Bendahara Gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Aluh-aluh
4	Rusmiati, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Aluh-aluh
5	Normila	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Aluh-aluh
6	Banderiyah, S.Pd	Bendahara PKG	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Aranio
7	Mun'Imah, S.Pd	Ketua Gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Aranio
8	Antung Nor Rahmi	Bendahara Gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Aranio
9	Khairul Ummah	Ketua Gugus 2	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Aranio
10	Siti Maryam	Sekretaris Gugus 2	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Aranio
11	Rusmidawati, S.Pd	Bendahara Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Astambul
12	Lamsiyah, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Astambul
13	Siti Nabilah, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Astambul



NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS
14	Nurba, S.Pd	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Astambul
15	Nairoh, S.Pd	Anggota Gugus VI	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Astambul
16	Herlin Faulina, S.Pd	Sekretaris PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Beruntung Baru
17	Siti Fatimah, S. Pd	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Beruntung Baru
18	Jamiyaturrasyidah, S. T	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Beruntung Baru
19	Erni Fauziah,A.Ma	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Beruntung Baru
20	Uswatul Bariah, S. Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Beruntung Baru
21	Ani	bendahara gugus 1V	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
22	Halimatus sa'diyah S.pd	ketua gugus 1V	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
23	Nor Syarifah	Anggota gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
24	Octaviani, S. Pd	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
25	Ratih Herlianti	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
26	Lita Yulia Buana, S.Pd	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
27	Siti Norhana, S. Sos	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
28	Amalia Mardhiah S.Pd.	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
29	Ade Wulan Sari, S. Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
30	Radiatul Adawiah, S. Pd. Gr	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Gambut
31	Salamiah, S.Pd	Ketua PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Karang Intan
32	Mariani Olfah, S.Pd	Anggota Gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Karang Intan
33	Sa'adiyah, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Karang Intan
34	Husnul Khotimah, S.Pd	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Karang Intan
35	Siti Sulthonah	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Karang Intan
36	Nur Irfah, S.Pd	Anggota gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
37	Noor Ainah, S.Pd	Anggota gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
38	Nazwa salsabila	Anggota gugus 1	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
39	Annastya Nur Alisha, S.Pd	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
40	Rachmawati,S.Pd	Ketua PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
41	Halimatusadiyah,S.Pd	Angggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
42	Ira Septiarini,M.Pd	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
43	Saibah,S.Pd	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Kertak Hanyar
44	HANISAH	Ketua PKG	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Martapura Barat
45	AZIZAH	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Martapura Barat
46	ROHIMAH	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Martapura Barat
47	PAIDAH, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Martapura Barat
48	FITRIAH	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Martapura Barat
49	Rahma Seftiana, S.Pd	Sekretaris PKG PAUD	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
50	Susilawati, S.Pd	Pokja Kurikulum	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
51	Rizqia Nurkhalida, S.Pd	Pokja TIK	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
52	Amnia Ulfah, A.Md	Pokja TIK	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
53	Siti Mutmainnah	Anggota Gugus PAUD I	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
54	Siti Safa'ah, S.Pd I	Anggota Gugus PAUD II	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
55	Noor Latifah, S.Pd	Anggota Gugus PAUD III	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura



NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS
56	Nezma Khairani	Sekretaris Gugus PAUD IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
57	Azmi Husna, S.Pd	Sekretaris Gugus PAUD V	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
58	Siska Sarmila	Anggota Gugus PAUD VI	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
59	Maria Ulfah, S.Pd	Anggota Gugus PAUD VII	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
60	Mardina Herlianie, S.Pd	Bendahara Gugus PAUD VIII	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
61	Fitriyah	Ketua Gugus PAUD IX	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
62	Selvi Agustine, S.Pd	Bendahara Gugus PAUD IX	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
63	Nur Syifa Khairina, S.Pd	Anggota Gugus PAUD X	PKG dan Gugus PAUD I s.d V Kecamatan Martapura
64	Rusma Hartati, S.Pd	Pokja I (Kurikulum)	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Martapura Timur
65	Amelia Rizkina	Anggota gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Martapura Timur
66	Laila	Ketua Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Martapura Timur
67	Ernawati	Anggota gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Martapura Timur
68	Siti Nur Muhibbah	Anggota gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d III Kecamatan Martapura Timur
69	Mumaisarah, S.Pd	Sekretaris Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Mataraman
70	Herlina Yanti, S. Pd	Plt. Ketua Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Mataraman
71	Sugi Puji Astuti	Plt. Ketua Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Mataraman
72	Yuliana, S. Pd	Plt. Sekretaris PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Mataraman
73	Retno Setianingsih, S.Pd	Plt. Ketua Gugus V	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Mataraman
74	Siti Rohemah, S. Pd	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
75	Jumaliah	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
76	Arini	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
77	Saidah	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
78	Eka Nurul Fatimah	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d II Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
79	Misbatun Nisa, S. Pd	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
80	Nabila, S.Kom	Anggota PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
81	Maimuna, S.Pd	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
82	Wahidatin Oktaviani, S.Pd	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
83	Asmiati	Anggota gugus III	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
84	Hj. Asmaniah, S.Pd	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
85	Ernawati, S.Pd	Anggota Gugus V	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung
86	Yeni Ariani, S.Pd.	Sekretaris Gugus VI	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam dan Telaga Bauntung



NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS
87	Maskanah	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD Kecamatan Gambut
88	Nurlina, S.Pd	Anggota Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD Kecamatan Gambut
89	Tasya Amelia, S.Pd	Sekretaris PKG	PKG dan Gugus PAUD Kecamatan Gambut
90	Maria Ulfah, S.Pd	Anggota Gugus III	PKG dan Gugus PAUD Kecamatan Gambut
91	Lia Fatmawati,S.Pd	Anggota Gugus	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
92	Masliah ,S.Pd	Ketua Gugus	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
93	Rita Rahmawati	Ketua gugus 3	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
94	Diana	Ketua PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
95	Desy Yulianti,S.Pd	Ketua Gugus IV	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
96	Rusda Hartati, S.Pd	Sekretaris Gugus V	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
97	Sulisyani	Pengurus PKG	PKG dan Gugus PAUD I s.d IV Kecamatan Sungai Tabuk
98	fatimah.S.Pd	Ketua Pkg	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Tatah Makmur
99	Siti Jubaidah S.pd.I	Anggota Gugus II	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Tatah Makmur
100	Dewi Fitriyani, S.Pd	Anggota Gugus I	PKG dan Gugus PAUD I Kecamatan Tatah Makmur

16) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 60.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 59.910.000 (99,85%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen yaitu dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pendampingan dan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pendampingan Pemutakhiran Dapodik PAUD Semester Ganjil.

17) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 330.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 317.825.000 (96,31%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 7 dokumen dengan realisasi 7 dokumen yaitu:

- Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka
- Dokumen Sosialisasi Akreditasi
- Dokumen Bimtek PLG
- Dokumen Sosialisasi PAUD HI
- Dokumen Sosialisasi Stunting
- Dokumen Seminar Parenting
- Dokumen Rakerda Pokja Bunda PAUD

18) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 472.282.750 dengan realisasi keuangan Rp. 420.761.000 (89,09%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 ruang dengan realisasi 2 ruang yaitu ruang guru dan/atau kepala sekolah beserta perabotnya (DAK-PAUD) di TK Negeri Tunas Pratama dan TK Negeri Pembina Martapura.



19) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 2.480.528.728 dengan realisasi keuangan Rp. 2.448.068.000 (98,69%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 ruang dengan realisasi 10 ruang yaitu:

No	Belanja	Volume	Satuan
	Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)		
1	TK Nusa Indah Desa Antasan Sutun	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		
2	TK Negeri Pembina Beruntung Baru	1	Ruang
3	TK Negeri Permata2	1	Ruang
4	TK Negeri Pembina Aranio	1	Ruang
5	TK Negeri Pertiwi Podok	1	Ruang
	Pembangunan Ruan Aula Terbuka		
6	TK Negeri Permata 2	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Halaman Bermain		
7	TK Negeri Pertiwi	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya (DAK-PAUD)		
8	TK Negeri Tunas Pratama	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		
9	TK Negeri TK Negeri Permata 2	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah		
10	TK Negeri Permata 2	1	Ruang

20) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 765.375.000 dengan realisasi keuangan Rp. 762.715.000 (99,65%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 400 orang dengan realisasi 400 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
	Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
1	Aluh-aluh	17	Orang
2	Aranio	9	Orang
3	Astambul	23	Orang
4	Beruntung baru	15	Orang
5	Cintapuri darussalam	13	Orang
6	Gambut	32	Orang
7	Karang intan	34	Orang
8	Kertak hanyar	32	Orang
9	Martapura	70	Orang
10	Martapura barat	12	Orang
11	Martapura timur	33	Orang
12	Mataraman	22	Orang
13	Paramasan	1	Orang
14	Pengaron	8	Orang
15	Sambung makmur	6	Orang
16	Simpang empat	19	Orang
17	Sungai pinang	5	Orang
18	Sungai tabuk	29	Orang
19	Tatah makmur	14	Orang
20	Telaga bauntung	6	Orang
	<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>Orang</b>

21) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 1.002.273.181 dengan realisasi keuangan Rp. 992.101.000 (98,99%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 5 unit dengan realisasi 5 unit. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit
2	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit
3	Pembangunan Toilet/Jamban Beserta Sanitasinya TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit



4	Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit
5	Pembangunan Halaman/Area Bermain TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit

## 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp. 22.343.399.500 dengan realisasi keuangan Rp. 21.956.614.900 (98,27%). Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu:

### a) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal / Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 553.860.250 dengan realisasi keuangan Rp. 550.270.000 (99,35%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 3 Unit dengan realisasi 3 Unit yaitu:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru PKBM Benteng Muda	1	Unit
2	Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru PKBM Anggrek Meratus	1	Unit
3	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) SPNF-SKB	1	Unit

### b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 397.792.900 (99,45%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 paket dengan realisasi 4 paket yaitu:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Alat Praktik Keterampilan Tata Busana/Menjahit SPNF-SKB	1	Paket
2	Pengadaan Alat Praktik Keterampilan Tata Rias/Kecantikan SPNF-SKB (DAK-SKB)	1	Paket
3	Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Annisa (DAK-SKB)	1	Paket
4	Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Sinar Baru	1	Paket

### c) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.322.407.000 dengan realisasi keuangan Rp. 3.279.157.000 (98,70%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 31 satuan pendidikan dengan realisasi 31 satuan pendidikan yaitu:

No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	Hidayatutthalibin	Aranio
2	Sullamut Taufiq	Astambul
3	An Najah	Beruntung Baru
4	Takhashush Diniyah	Beruntung Baru
5	Syaichona Moh.Cholil	Gambut
6	Al Mursyidul Amin	Gambut
7	Ahsanul Insan	Gambut
8	Darul Falah	Gambut
9	Syafa'at Bukhari Muslim	Karang Intan
10	Miftahussibyan	Karang Intan
11	Manbau'ul 'Ulum	Kertak Hanyar
12	Tahfiz Amanah Umat	Kertak Hanyar
13	Darussalam	Martapura
14	Hidayatullah	Martapura
15	Syekh Muhammad Arsyad Albanjari	Martapura Timur
16	Ushuluddin	Martapura Timur
17	Raudhatul Ulum	Pengaron
18	Nurul Hidayah	Sambung Makmur



No	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
19	Miftahul Khair	Sambung Makmur
20	Miftahul ulum	Sambung Makmur
21	l'Anatutthalibin	Sambung Makmur
22	Al Muhajirin	Sambung Makmur
23	Al-Ihsany	Sambung Makmur
24	Atthahiriyah	Sambung Makmur
25	Asshirotol Mustaqim	Simpang Empat
26	Darutta'lim	Sungai Pinang
27	Miftahul Khair	Sungai Pinang
28	sullamul Ulum	Sungai Pinang
29	Nurul Hidayah	Sungai Tabuk
30	Ishlahul Aulad	Tatah Makmur
31	Inayatul Marzuki	Tatah Makmur

- d) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.470.760.000 dengan realisasi keuangan Rp. 10.204.370.000 (97,46%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 26 satuan pendidikan dengan realisasi 25 satuan pendidikan yaitu:

No	Belanja	Volume	Satuan
BOP Kesetaraan Reguler			
1	PKBM Abnaul Amin	1	Tahun
2	PKBM Al Firdaus	1	Tahun
3	PKBM Al Hidayah	1	Tahun
4	PKBM Al Husana	1	Tahun
5	PKBM Al Muhajirin	1	Tahun
6	PKBM Anggrek Metaus	1	Tahun
7	PKBM An Nisa	1	Tahun
8	PKBM Arsyadiyah	1	Tahun
9	PKBM Banua	1	Tahun
10	PKBM Barakat	1	Tahun
11	PKBM Batu Sawar	1	Tahun
12	PKBM Benteng Muda	1	Tahun
13	PKBM Darussalam	1	Tahun
14	PKBM Harapan Kita	1	Tahun
15	PKBM Hj. Muflihah	1	Tahun
16	PKBM Insan Sekumpul	1	Tahun
17	PKBM Karya Bersama	1	Tahun
18	PKBM Makmur Berkah	1	Tahun
19	PKBM Mandiri	1	Tahun
20	PKBM Mekar Jaya	1	Tahun
21	PKBM Nur Huda	1	Tahun
22	PKBM Pematton	1	Tahun
23	PKBM Pelangi	1	Tahun
24	PKBM Sinar Baru	1	Tahun
25	PKBM Wanna	1	Tahun

- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 14.965.000 (74,83%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 25 SKB dan 1 PKBM.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 137.575.000 dengan realisasi keuangan Rp. 135.469.500 (98,47%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket Pengadaan Peralatan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) PKBM Sinar Baru (DAK-SKB) (Internet Starlink)



- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.170.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 6.109.892.500 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 8971 peserta didik dengan realisasi 8971 peserta didik. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Satuan Pendidikan	Paket A	Paket B	Paket C	Jlh
1	PKBM HARAPAN KITA	89	302	501	892
2	PKBM PAMATON	10	113	187	310
3	PKBM BATU SAWAR	11	66	127	204
4	PKBM KARYA BERSAMA	8	53	199	260
5	PKBM ABNAUL AMIN		40	61	101
6	PKBM AL-HIDAYAH	10	96	192	298
7	PKBM ANNISA	15	91	329	435
8	PKBM AL-MUHAJIRIN	48	122	159	329
9	PKBM BANUA	37	134	157	328
10	PKBM BARAKAT	96	156	124	376
11	PKBM DARUSSALAM	146	420	251	817
12	PKBM INSAN SEKUMPUL	15	11	11	37
13	PKBM NURHUDA	105	144	126	375
14	PKBM WANNA	24	232	300	556
15	PKBM AL-HUSNA	49	71	273	393
16	PKBM ARSYADIYAH	13	89	162	264
17	PKBM MANDIRI	66	112	159	337
18	PKBM MEKAR JAYA	73	117	65	255
19	PKBM BENTENG MUDA	39	45	109	193
20	PKBM HAJJAH MUFLIAH	11	29	45	85
21	PKBM PELANGI	43	59	151	253
22	PKBM AL-FIRDAUS	16	107	191	314
23	PKBM ANGGREK MERATUS	84	274	345	703
24	PKBM SINAR BARU	8	92	196	296
25	PKBM MAKMUR BERKAH	4	38	42	84
26	SPNF SKB BANJAR	90	188	198	476
<b>JUMLAH</b>		<b>1110</b>	<b>3201</b>	<b>4660</b>	<b>8971</b>

- h) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 597.660.000 (99,02%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket pengadaan meubeler di SPNF SKB Kabupaten Banjar.
- i) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 199.654.000 (99,83%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 3 unit dengan realisasi 1 unit Halaman Sanggar Kegiat Belajar/Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Banjar seluas 446 m<sup>2</sup>.
- j) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 468.297.250 dengan realisasi keuangan Rp. 467.384.000 (99,80%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 unit dengan realisasi 2 unit yaitu rehabilitasi ruang praktik PKBM Annisa dan rehabilitasi ruang kelas PKBM Al Firdaus.



### 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 97.317.477.749 dengan realisasi keuangan Rp. 94.122.583.257 (96,72%).

Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu:

#### 1) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 33.500.000 (95,71%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 unit pembangunan sekolah baru dengan realisasi 0 unit dan menghasilkan Dokumen Uji Kelayakan Dalam Rencana Pembangunan Sekolah Dasar yang akan di realisasikan pada tahun 2025.

#### 2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.812.788.749 dengan realisasi keuangan Rp. 1.680.219.700 (92,69%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 7 ruang dengan realisasi sebanyak 7 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang guru beserta perabotnya (DAK)			
1	SDN Bunglai	1	Ruang
2	SDN Bunipah 2	1	Ruang
3	SDN Gambut 6	1	Ruang
4	SDN Mandikapau Timur	1	Ruang
5	SDN Pulau Nyiur 2	1	Ruang
6	SDN Tambak Anyar Ulu	1	Ruang
7	SDN Tungkaran	1	Ruang

#### 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.338.675.710 dengan realisasi keuangan Rp. 1.226.924.000 (91,65%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 9 ruang dengan realisasi sebanyak 9 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK)			
1	SDN Bunglai	1	ruang
2	SDN Bunipah 2	1	ruang
3	SDN Gambut 6	1	ruang
4	SDN Garis Hanyar	1	ruang
5	SDN Malintang 2	1	ruang
6	SDN Mekar Raya	1	ruang
7	SDN Melayu Tengah	1	ruang
8	SDN Pulau Nyiur 2	1	ruang
9	SDN Sungai Batang 2	1	ruang

#### 4) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.795.315.199 dengan realisasi keuangan Rp. 2.651.584.700 (94,86%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 ruang dengan realisasi sebanyak 10 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotannya (DAK)			
1	SDN Bunipah 2	1	ruang
2	SDN Malintang 2	1	ruang
3	SDN Melayu Tengah	1	ruang
4	SDN Pulau Nyiur 2	1	ruang
5	SDN Sungai Batang 2	1	ruang
6	SDN Banua Anyar Danau Salak 1	1	ruang



7	SDN Bumi Rata	1	ruang
8	SDN Kaliukan 1	1	ruang
9	SDN Kelampaian Ilir 1	1	ruang
10	SDN Lok Buntar	1	ruang

- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.228.665.282 dengan realisasi keuangan Rp. 3.208.694.000 (99,38%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 22 unit dengan realisasi sebanyak 22 unit. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pemagaran			
1	SDN Cabi	1	unit
2	SDN Keramat	1	unit
3	SDN Keraton 1	1	unit
4	SDN Mangkauk 1	1	unit
5	SDN Pulau Nyiur 1	1	unit
Pembangunan Toilet (jamban)			
6	SDN Hakim	1	unit
7	SDN Keraton 5	1	unit
8	SDN Dalam Pagar Ulu 2	1	unit
9	SDN Jawa 1	1	unit
10	SDN Keliling Benteng Ilir	1	unit
11	SDN Mali-Mali	1	unit
12	SDN Melayu	1	unit
13	SDN Sungai Pinang Baru 2	1	unit
Pengurugan/Paving Halaman			
14	SDN Jawa Laut 2	1	unit
15	SDN Madurejo 2	1	unit
16	SDN Pematang Baru	1	unit
17	SDN Sngai Pinang	1	unit
18	SDN Aluh-Aluh Besar 2	1	unit
19	SDN Batu Balian 3	1	unit
20	SDN Simpang Empat	1	unit
21	SDN Sungai Rangas	1	unit
22	SDN Tatah Pemangkih Tengah	1	unit

- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.233.598.999 dengan realisasi keuangan Rp. 1.222.238.000 (99,08%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 6 unit dengan realisasi sebanyak 6 unit. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru Sekolah			
1	SDN Antaruku	1	unit
2	SDN Belimbing Lama 2	1	unit
3	SDN Kahelaan 3	1	unit
4	SDN Pakutik	1	unit
5	SDN Paramasan Bawah 1	1	unit
6	SDN Paramasan Bawah 3	1	unit

- 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.586.171.249 dengan realisasi keuangan Rp. 1.557.275.000 (98,18%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 ruang dengan realisasi sebanyak 10 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SDN Garis Hanyar	1	ruang
2	SDN Malintang 2	1	ruang
3	SDN Melayu tengah	1	ruang
4	SDN Sungai Batang 2	1	ruang
5	SDN Tambak baru Ilir	1	ruang



6	SDN Gambut 8	1	ruang
7	SDN Mandiangin Timur 1	1	ruang
8	SDN Tambak Padi 2	1	ruang
9	SDN Bunglai	1	ruang
10	SDN Malintang 2	1	ruang

8) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 858.552.750 dengan realisasi keuangan Rp. 850.285.000 (99,04%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 ruang dengan realisasi sebanyak 4 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	1	ruang
2	SDN Lok Buntar	1	ruang
3	SDN Pasayangan 1	1	ruang
4	SDN Kelampaian Ilir 1	1	ruang

9) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 960.039.374 dengan realisasi keuangan Rp. 956.105.000 (99,59%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 6 unit dengan realisasi sebanyak 6 unit. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Rumah			
1	SDN Paramasan Bawah 3	1	unit
2	SDN Antaraku	1	unit
3	SDN Paramasan Bawah 1	1	unit
4	SDN Kahelaan 3	1	unit
5	SDN Belimbing Lama 2	1	unit
6	SDN Pakutik	1	unit

10) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 340.119.500 dengan realisasi keuangan Rp. 341.277.000. (99,66%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 paket dengan realisasi sebanyak 2 paket yaitu paket meja dan kursi murid tunggal kayu lurus sebanyak 523 pasang serta paket meja dan kursi guru alas busa kayu lurus sebanyak 62 buah.

11) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.352.658.000 dengan realisasi keuangan Rp. 6.322.586.000 (99,53%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 paket dengan realisasi sebanyak 2 paket yaitu 1 paket pengadaan chromebook SDN Dalam Pagar dan 1 paket pengadaan TIK (DAK).

12) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 3.999.000.000 (99,98%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1.333 peserta didik dengan realisasi 1.333 peserta didik. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Asal Sekolah	Jumlah Penerima	Asal Sekolah	Jumlah Penerima
SD Negeri Gudang Hiranng 3	1	SDN LUBANG BARU 2	5
SD Negeri Gudang Hiranng 3	9	SDN MADUREJO 2	6



Asal Sekolah	Jumlah Penerima	Asal Sekolah	Jumlah Penerima
SD Negeri Melayu	8	SDN MANARAP LAMA 1	5
SD SULLAMUL ULUM	6	SDN MANDIANGIN TIMUR 1	10
SDIT USHULUDDIN	2	SDN MANDIKAPAU TIMUR	4
SDN ABIRAU	5	SDN MANGKAUK 1	7
SDN AKAR BAGANTUNG	7	SDN MANGKAUK 2	6
SDN ALIMUKIM	4	SDN MANGKAUK 3	4
SDN ALUH - ALUH KECIL 1	2	SDN MANIAPUN	5
SDN ALUH-ALUH KECIL 2	5	SDN MATARAMAN 1	3
SDN ALUH-ALUH KECIL MUARA	5	SDN MATARAMAN 3	8
SDN ANGKIPIH	5	SDN MEKAR	4
SDN ANTARAKU	5	SDN MEKAR SARI	3
SDN ARANIO 1	15	SDN MELAYU	1
SDN ARANIO 2	4	SDN MUARA HALAYUNG	3
SDN ASTAMBUL SEBERANG	5	SDN MUNGGU RAYA	8
SDN ATAYAU	4	SDN PAKU	4
SDN ATIIM	5	SDN PAKU ALAM	5
SDN AWANG BANGKAL BARAT	5	SDN PARING TALI	6
SDN AWANG BANGKAL TIMUR	4	SDN PASAR JATI 1	5
SDN BALAU	3	SDN PASAR JATI 3	4
SDN BALIANGIN	5	SDN PASAYANGAN 1	4
SDN BANYU HIRANG	19	SDN PEJAMBUAN 2	4
SDN BATU BALIAN 1	9	SDN PEKAUMAN 2	7
SDN BATU BALIAN 2	4	SDN PEMATANG BARU	8
SDN BATU BALIAN 3	6	SDN PEMATANG DANAU 1	6
SDN BAWAHAN SELAN 1	5	SDN PEMATANG PANJANG	19
SDN BAWAHAN SELAN 2	2	SDN PEMBANTANAN 1	6
SDN BAWAHAN SELAN 3	2	SDN PEMBANTANAN 2	8
SDN BAWAHAN SELAN 5	3	SDN PEMURUS 1	4
SDN BAWAHAN SELAN 6	6	SDN PENGARON 2	6
SDN BELANGIAN	8	SDN PENGARON 3	6
SDN BELIMBING BARU	5	SDN PENYAMBARAN 2	8
SDN BELIMBING LAMA 2	2	SDN PINGARAN 1	4
SDN BENTENG SEBERANG	17	SDN PINGARAN 2	4
SDN BENUA ANAYR DANAU SALAK 2	5	SDN PINGARAN ULU	7
SDN BENUA ANYAR SUNGAI TUAN	5	SDN RANTAU BAKULA	5
SDN BIIH	3	SDN SALAT MAKMUR	1
SDN BUMI RATA	6	SDN SEKUMPUL 1	9
SDN BUNGLAI	10	SDN SEKUMPUL 2	25
SDN BUNIPAH 1	6	SDN SIMPANG EMPAT 1	6
SDN CABI	7	SDN SIMPANG EMPAT 2	4
SDN CINTAPURI 2	3	SDN SIMPANG EMPAT 3	4
SDN DALAM PAGAR ULU 2	5	SDN SIMPANG EMPAT 4	4
SDN DANAU SALAK 1	4	SDN SIMPANG TIGA	9
SDN DANAU SALAK 2	3	SDN SIMPANG WARGA 1	9
SDN DESA BARU 1	1	SDN SUMBER BARU 1	7
SDN GAMBUT 10	23	SDN SUMBER BARU 2	7
SDN GAMBUT 11	28	SDN SUMBER HARAPAN 1	4
SDN GAMBUT 2	5	SDN SUMBER HARAPAN 2	5
SDN GAMBUT 3	6	SDN SUNGAI ALANG 2	3
SDN GAMBUT 4	17	SDN SUNGAI ALAT 1	7
SDN GAMBUT 5	17	SDN SUNGAI ALAT 2	8
SDN GAMBUT 6	12	SDN SUNGAI ARPAT 2	3
SDN GAMBUT 7	5	SDN SUNGAI ASAM	7
SDN GAMBUT 8	4	SDN SUNGAI BANGKAL	6
SDN GAMBUT 9	5	SDN SUNGAI BATANG 1	4
SDN GUDANG HIRANG 2	6	SDN SUNGAI BATANG BANYU	10
SDN GUDANG HIRANG 3	2	SDN SUNGAI BATANG ILIR 1	12
SDN GUNTUNG UJUNG 1	12	SDN SUNGAI KUPANG	6
SDN GUNTUNG UJUNG 2	3	SDN SUNGAI LULUT 1	5
SDN GUNUNG BATU	5	SDN SUNGAI LULUT 2	15
SDN HANDIL BUJUR 1	4	SDN SUNGAI LULUT 3	2
SDN HANDIL PURAI 1	4	SDN SUNGAI LURUS	4
SDN HANDIL PURAI 2	4	SDN SUNGAI MUSANG	4
SDN INDRASARI 1	12	SDN SUNGAI PINANG	8
SDN JAMBU BURUNG	5	SDN SUNGAI PINANG BARU 1	5
SDN JATI 1	6	SDN SUNGAI PINANG BARU 2	12
SDN JATI 2	7	SDN SUNGAI PULANTAN	7
SDN JAWA 1	16	SDN SUNGAI RANGAS	5
SDN JAWA LAUT 2	8	SDN SUNGAI RANGAS HAMBUKU	4
SDN KAHELAAN 1	3	SDN SUNGAI RANGAS ULU	3
SDN KAHELAAN 3	6	SDN SUNGAI RAYA 1	3
SDN KALIUKAN 2	3	SDN SUNGAI RAYA 2	3
SDN KAMPUNG BARU	5	SDN SUNGAI TABUK KERAMAT 1	5
SDN KARANG INTAN 1	4	SDN SUNGAI TABUK KERAMAT 2	8



Asal Sekolah	Jumlah Penerima	Asal Sekolah	Jumlah Penerima
SDN KARANG INTAN 2	2	SDN SUNGAI TABUK KERAMAT 3	4
SDN KAYU BAWANG 1	22	SDN SUNGAI TUAN	4
SDN KECIL REMO	3	SDN SUNGAI UYAK	25
SDN KELADAN BARU	6	SDN SINGKAI 1	9
SDN KELAMPAIAN	10	SDN SINGKAI 2	4
SDN KELAMPAIAN ILIR 1	2	SDN SINGKAI BARU	5
SDN KELAMPAIAN ULU	4	SDN TAJAU LANDUNG 1	20
SDN KELILING BENTENG ILIR	6	SDN TAJAU LANDUNG 2	6
SDN KERAMAT	1	SDN TAMBAK ANYAR	2
SDN KERATON 3	8	SDN TAMBAK ANYAR ULU	4
SDN KERATON 4	6	SDN TAMBAK PADI 1	3
SDN KERATON 5	8	SDN TAMBAK SIRANG DARAT	8
SDN KERTAK EMPAT	4	SDN TAMPANG AWANG	6
SDN KERTAK HANYAR 1-1	9	SDN TANAH HABANG	18
SDN KIRAM	4	SDN TANAH INTAN	4
SDN KUIN KECIL	8	SDN TANIPAH	8
SDN KUPANG	1	SDN TATAH LAYAP 1	5
SDN KUPANG REJO	5	SDN TATAH LAYAP 3	10
SDN LAWAHAN	4	SDN TATAH LAYAP BARU	2
SDN LAWIRAN	4	SDN TATAH PEMANGKIH BARU	4
SDN LIMAMAR	7	SDN TATAH PEMANGKIH DARAT	3
SDN LOK BANTAN	2	SDN TATAH PEMANGKIH LAUT 1	11
SDN LOK BANTAN DALAM	6	SDN TATAH PEMANGKIH LAUT 2	4
SDN LOK BUNTAR	6	SDN TATAH PEMANGKIH TENGAH	9
SDN LOK CANTUNG	5	SDN TERAPU	6
SDN LOK GABANG	5	SDN TIWINGAN BARU	4
SDN LOK TANGGA	7	SDN TIWINGAN LAMA	6
SDN LOK TUNGGUL	6	SDN TUNGKARAN	10
SDN LUBANG BARU 1	6	<b>JUMLAH</b>	<b>1333</b>

13) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.140.634.618 dengan realisasi keuangan Rp. 3.123.970.001 (98,64%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi sebanyak 1 paket Pengadaan Alat Praktik Olahraga Untuk Sekolah Dasar.

14) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 544.861.500 dengan realisasi keuangan Rp. 537.426.500 (98,64%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 990 peserta didik dengan realisasi 1029 peserta didik. realisasi lebih dari target karena antusiasme peserta didik pada kegiatan turnamen sepak bola u-12 melebihi dari yang di targetkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	Festival Tunas Bahasa Ibu	120	Orang
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar	137	Orang
3	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	197	Orang
4	Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD	127	Orang
5	Turnamen Sepak Bola Piala Bupati (U12)	448	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1029</b>	<b>Orang</b>

15) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.378.500 dengan realisasi keuangan Rp. 7.378.500 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini



adalah 60 orang dengan realisasi 60 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	Rapat Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran Penempatan Tenaga Kependidikan	20	Orang
2	Rapat Kebutuhan PPPK Guru	20	Orang
3	Rapat Pemenuhan Kekurangan Kepala Sekolah	20	Orang

16) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.521.479.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.436.744.000 (94,43%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 638 orang dengan realisasi 636 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kegiatan	Volume	Satuan
Bimtek SIM Pengawas Sekolah Dasar	30	Orang
Coaching Clinic Peningkatan Kompetensi Guru SD untuk Transisi Paud ke SD yang menyenangkan	250	Orang
Diklat Asesor Penilaian Kinerja Guru dan Kepsek SD	10	Orang
Diklat Pendampingan Pengembangan Pedagogik, Profesional dan Kompetensi bagi Calon PPG SD	50	Orang
Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi SD Angkatan II	72	Orang
Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi SD	50	Orang
Biaya Pendidikan Profesi Guru PAI SD	84	Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>636</b>	<b>Orang</b>

17) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 838.050.892 dengan realisasi keuangan Rp. 650.858.000 (77,66%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 360 satuan pendidikan dengan realisasi 360 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Kec. Martapura	32	Satuan Pendidikan
2	Kec. Karang Intan	29	Satuan Pendidikan
3	Kec. Sungai Tabuk	32	Satuan Pendidikan
4	Kec. Gambut	24	Satuan Pendidikan
5	Kec. Aluh-Aluh	26	Satuan Pendidikan
6	Kec. Astambul	29	Satuan Pendidikan
7	Kec. Mataraman	21	Satuan Pendidikan
8	Kec. Kertak Hanyar	17	Satuan Pendidikan
9	Kec. Martapura Timur	17	Satuan Pendidikan
10	Kec. Simpang Empat	21	Satuan Pendidikan
11	Kec. Sungai Pinang	17	Satuan Pendidikan
12	Kec. Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
13	Kec. Cintapuri Darussalam	14	Satuan Pendidikan
14	Kec. Beruntung Baru	10	Satuan Pendidikan
15	Kec. Pengaron	15	Satuan Pendidikan
16	Kec. Aranio	11	Satuan Pendidikan
17	Kec. Tatah Makmur	11	Satuan Pendidikan
18	Kec. Sambung Makmur	7	Satuan Pendidikan
19	Kec. Paramasan	9	Satuan Pendidikan
20	Kec. Telaga Bauntung	5	Satuan Pendidikan
	<b>Total</b>	<b>360</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>

18) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.780.338.133 dengan realisasi keuangan Rp. 39.828.557.006 (97,67%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 372 satuan pendidikan dengan realisasi 372 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Kec. Martapura	39	Satuan Pendidikan
2	Kec. Karang Intan	29	Satuan Pendidikan



3	Kec. Sungai Tabuk	31	Satuan Pendidikan
4	Kec. Gambut	25	Satuan Pendidikan
5	Kec. Aluh-Aluh	22	Satuan Pendidikan
6	Kec. Astambul	29	Satuan Pendidikan
7	Kec. Mataraman	26	Satuan Pendidikan
8	Kec. Kertak Hanyar	34	Satuan Pendidikan
9	Kec. Martapura Timur	18	Satuan Pendidikan
10	Kec. Simpang Empat	18	Satuan Pendidikan
11	Kec. Sungai Pinang	17	Satuan Pendidikan
12	Kec. Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
13	Kec. Cintapuri Darussalam	16	Satuan Pendidikan
14	Kec. Beruntung Baru	10	Satuan Pendidikan
15	Kec. Pengaron	11	Satuan Pendidikan
16	Kec. Aranio	11	Satuan Pendidikan
17	Kec. Tatah Makmur	8	Satuan Pendidikan
18	Kec. Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
19	Kec. Paramasan	9	Satuan Pendidikan
20	Kec. Telaga Bauntung	5	Satuan Pendidikan
<b>Total</b>		<b>372</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>

19) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.125.540.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.044.390.000 (92,79%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 744 orang dengan realisasi 744 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	Kepala Sekolah SD	372	Orang
2	Bendahara Sekolah	372	Orang

20) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.118.525.000 dengan realisasi keuangan Rp. 2.794.071.300 (89,60%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 12 ruang dengan realisasi sebanyak 12 sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya			
1	SDN Bunglai	1	Ruang
2	SDN Bunipah 2	1	Ruang
3	SDN Gambut 6	1	Ruang
4	SDN Gambut 8	1	Ruang
5	SDN Garis Hanyar	1	Ruang
6	SDN Malintang 2	1	Ruang
7	SDN Mekar Raya	1	Ruang
8	SDN Melayu Tengah	1	Ruang
9	SDN Pulau Nyiur 2	1	Ruang
10	SDN Sungai Batang 2	1	Ruang
11	SDN Tambak Baru Ilir	1	Ruang
12	SDN Tampang Awang	1	Ruang

21) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 149.880.000 (99,92%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 373 orang dengan realisasi 373 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Kec. Martapura	39	Orang
2	Kec. Karang Intan	29	Orang
3	Kec. Sungai Tabuk	32	Orang
4	Kec. Gambut	25	Orang
5	Kec. Aluh-Aluh	26	Orang
6	Kec. Astambul	29	Orang
7	Kec. Mataraman	21	Orang
8	Kec. Kertak Hanyar	19	Orang



No	Kecamatan	Volume	Satuan
9	Kec. Martapura Timur	18	Orang
10	Kec. Simpang Empat	21	Orang
11	Kec. Sungai Pinang	17	Orang
12	Kec. Martapura Barat	13	Orang
13	Kec. Cintapuri Darussalam	14	Orang
14	Kec. Beruntung Baru	10	Orang
15	Kec. Pengaron	16	Orang
16	Kec. Aranio	11	Orang
17	Kec. Tatah Makmur	11	Orang
18	Kec. Sambung Makmur	8	Orang
19	Kec. Paramasan	9	Orang
20	Kec. Telaga Bauntung	5	Orang
<b>Total</b>		<b>373</b>	<b>Orang</b>

- 22) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 99.630.000 (99,63%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 konten digital dengan realisasi 2 konten digital yaitu: Konten Digital Modul Pembelajaran Digital dan Konten Digital Video Pembelajaran Game Edukasi.
- 23) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 39.580.000 (79,16%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 372 orang dengan realisasi 372 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Peserta	Volume	Satuan
1	Operator SD Kec. Martapura	39	Orang
2	Operator SD Kec. Karang Intan	29	Orang
3	Operator SD Kec. Sungai Tabuk	31	Orang
4	Operator SD Kec. Gambut	25	Orang
5	Operator SD Kec. Aluh-Aluh	22	Orang
6	Operator SD Kec. Astambul	29	Orang
7	Operator SD Kec. Mataraman	26	Orang
8	Operator SD Kec. Kertak Hanyar	34	Orang
9	Operator SD Kec. Martapura Timur	18	Orang
10	Operator SD Kec. Simpang Empat	18	Orang
11	Operator SD Kec. Sungai Pinang	17	Orang
12	Operator SD Kec. Martapura Barat	13	Orang
13	Operator SD Kec. Cintapuri Darussalam	16	Orang
14	Operator SD Kec. Beruntung Baru	10	Orang
15	Operator SD Kec. Pengaron	11	Orang
16	Operator SD Kec. Aranio	11	Orang
17	Operator SD Kec. Tatah Makmur	8	Orang
18	Operator SD Kec. Sambung Makmur	1	Orang
19	Operator SD Kec. Paramasan	9	Orang
20	Operator SD Kec. Telaga Bauntung	5	Orang
<b>Total</b>		<b>372</b>	<b>Orang</b>

- 24) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 9.880.000 (98,80%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 dokumen dengan realisasi dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan Pengawas dan dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Progam Kerja Korwil.
- 25) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 99.700.000 (99,70%). Indikator kinerja pada sub



kegiatan ini adalah 2 dokumen dengan realisasi dokumen Penguatan Literasi dan Numerasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan dokumen Pemanfaatan Buku bacaan bermutu dan Komunitas Belajar.

26) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.234.724.499 dengan realisasi keuangan Rp. 2.103.562.000 (94,13%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 ruang dengan realisasi sebanyak 10 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang kelas baru			
1	SDN Gambut 6	1	Ruang
2	SDN Pulau Nyiur 2	2	Ruang
3	SDN Cindai Alus 2	2	Ruang
4	SDN Guntung Ujung 2	1	Ruang
5	SDN Kecil Kiram	1	Ruang
6	SDN Keraton 4	1	Ruang
7	SDN Pasar Kamis 1	1	Ruang
8	SD IT Sulamul Ulum	1	Ruang

27) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.155.959.499 dengan realisasi keuangan Rp. 1.127.523.000 (97,54%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 unit dengan realisasi sebanyak 10 unit sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi WC/ toilet			
1	SDN Tambak Baru Ilir	1	unit
2	SDN Tampang Awang	1	unit
3	SDN Alu Aluh Besar 3	1	unit
4	SDN Balau	1	unit
5	SDN Bawahhan Selan 6	1	unit
6	SDN Gudang Hirang 3	1	unit
7	SDN Kelampaian Ulu	1	unit
8	SDN Melayu	1	unit
9	SDN Pakutik	1	unit
10	SDN Sungai Alat	1	unit

28) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 226.300.000 dengan realisasi keuangan Rp. 212.980.000 (94,11%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 56 orang dengan realisasi 56 orang guru penggerak sekolah dasar.

29) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 883.900.800 dengan realisasi keuangan Rp. 741.188.050 (83,85%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 360 satuan pendidikan dengan realisasi 360 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Kec. Martapura	32	Satuan Pendidikan
2	Kec. Karang Intan	29	Satuan Pendidikan
3	Kec. Sungai Tabuk	32	Satuan Pendidikan
4	Kec. Gambut	24	Satuan Pendidikan
5	Kec. Aluh-Aluh	26	Satuan Pendidikan
6	Kec. Astambul	29	Satuan Pendidikan
7	Kec. Mataraman	21	Satuan Pendidikan



No	Kecamatan	Volume	Satuan
8	Kec. Kertak Hanyar	17	Satuan Pendidikan
9	Kec. Martapura Timur	17	Satuan Pendidikan
10	Kec. Simpang Empat	21	Satuan Pendidikan
11	Kec. Sungai Pinang	17	Satuan Pendidikan
12	Kec. Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
13	Kec. Cintapuri Darussalam	14	Satuan Pendidikan
14	Kec. Beruntung Baru	10	Satuan Pendidikan
15	Kec. Pengaron	15	Satuan Pendidikan
16	Kec. Aranio	11	Satuan Pendidikan
17	Kec. Tatah Makmur	11	Satuan Pendidikan
18	Kec. Sambung Makmur	7	Satuan Pendidikan
19	Kec. Paramasan	9	Satuan Pendidikan
20	Kec. Telaga Bauntung	5	Satuan Pendidikan
<b>Total</b>		<b>360</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>

### 30) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.787.042.996 dengan realisasi keuangan Rp. 16.066.734.000 (95,71%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 125 ruang dengan realisasi sebanyak 125 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi ruang kelas(DAK)			
1	SDN Bunglai	6	Ruang
2	SDN Bunipah 2	3	Ruang
3	SDN Gambut 6	7	Ruang
4	SDN Garis Hanyar	6	Ruang
5	SDN Malintang 2	6	Ruang
6	SDN Mekar Raya	6	Ruang
7	SDN Melayu Tengah	4	Ruang
8	SDN Pulau Nyiur 2	3	Ruang
9	SDN Sungai Batang 2	6	Ruang
10	SDN Tambak Baru Ilir	6	Ruang
11	SDN Tampang Awang	4	Ruang
12	SDN Batu Balian 2	6	Ruang
13	SDN Bincau Muara	3	Ruang
14	SDN Cindai Alus 1	4	Ruang
15	SDN Indrasari 1	3	Ruang
16	SDN Jawa 2	3	Ruang
17	SDN Kalaan Baru	6	Ruang
18	SDN Kitano 2	4	Ruang
19	SDN Kupang Rejo	4	Ruang
20	SDN Munggu Raya	3	Ruang
21	SDN Panyuruan	4	Ruang
22	SDN Paring Tali	3	Ruang
23	SDN Panyambaran 2	3	Ruang
24	SDN Pingaran 1	3	Ruang
25	SDN Pingaran 2	3	Ruang
26	SDN Pingaran Ulu	4	Ruang
27	SDN Sungai Alat 2	3	Ruang
28	SDN Sungai Lulut 2	3	Ruang
29	SDN Sungkai 2	3	Ruang
30	SDN Tambak Sirang Baru	3	Ruang

### 4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 42.117.731.604 dengan realisasi keuangan Rp. 41.103.400.378 (97,59%). Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu :

#### 1) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 25.500.000 (72,86%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi dokumen rapat uji kelayakan.



- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.045.656.500 dengan realisasi keuangan Rp. 1.029.803.000 (98,48%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 ruang dengan realisasi sebanyak 4 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang guru/kepsek/ TU			
1	SMPN 6 Martapura	1	Ruang
2	SMPN 5 Karang Intan	1	Ruang
3	SMPN 3 Gambut	1	Ruang
4	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	Ruang

- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 480.888.250 dengan realisasi keuangan Rp. 477.170.000 (99,23%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 3 ruang dengan realisasi sebanyak 3 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah			
1	SMPN 1 Paramasan	1	Ruang
2	SMPN 3 Gambut	1	Ruang
3	SMPN 4 Aranio	1	Ruang

- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.219.520.000 dengan realisasi keuangan Rp. 2.075.351.000 (93,50%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 6 ruang dengan realisasi sebanyak 6 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Laboratorium IPA			
1	SMPN 3 Sungai Tabuk	1	Ruang
2	SMPN 1 Paramasan	1	Ruang
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabot			
3	SMPN 3 Gambut	1	Ruang
4	SMPN 1 Paramasan	1	Ruang
5	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	Ruang
6	SMPN 3 Mataraman	1	Ruang

- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 233.058.250 dengan realisasi keuangan Rp. 232.008.000 (99,55%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 unit dengan realisasi 1 unit pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah / Guru di SMPN 6 Aluh-Aluh.

- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.214.864.775 dengan realisasi keuangan Rp. 1.206.774.000 (99,33%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 8 unit dengan realisasi sebanyak 8 unit sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Fasilitas Parkir			
1	SMPN 1 Astambul	1	unit
2	SMPN 1 Aluh Aluh	1	unit
3	SMPN 6 Aluh Aluh	1	unit
4	SMPN 7 Aluh ALuh	1	unit
5	SMPN 1 Tatah Makmur	1	unit



No	Belanja	Volume	Satuan
6	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	1	unit
7	Smpn 4 Sungai Tabuk	1	unit
8	SMPN 1 Gambut	1	unit

- 7) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.122.500.820 dengan realisasi keuangan Rp. 1.087.312.000 (96,87%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 8 unit dengan realisasi sebanyak 8 unit sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan lapangan olahraga			
1	SMPN 3 Astambul	1	unit
2	SMPN 1 Beruntung Baru	1	unit
3	SMPN 2 Simpang Empat	1	unit
4	SMPN 8 Aluh Aluh	1	unit
Pembangunan Toilet/ WC			
5	SMPN 1 Martapura	1	unit
6	SMPN 2 Martapura	1	unit
7	SMPN 2 Cintapuri Darussalam	1	unit
8	SMPN 2 Martapura Barat	1	unit

- 8) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.114.704.000 dengan realisasi keuangan Rp. 4.736.052.000 (92,60%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 6 ruang dengan realisasi sebanyak 6 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi ruang ibadah			
1	SMPN 3 Mataraman	1	ruang
2	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas			
3	SMPN 3 Gambut	7	ruang
4	SMPN 1 Martapura	5	ruang
5	SMPN 3 Mataraman	3	ruang
6	SMPN 1 Paramasan	3	ruang
7	SMPN 2 Simpang Empat	2	ruang
8	SMPN 4 Sungai Tabuk	6	ruang
10	SMPN 3 Sungai Pinang	1	ruang
11	SMPN 2 Astambul	1	ruang
12	SMPN 4 Martapura	1	ruang
13	SMPN 2 Aluh Aluh	1	ruang

- 9) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.550.000 dengan realisasi keuangan Rp. 87.385.000 (89,58%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 ruang dengan realisasi sebanyak 1 ruang UKS di SMPN 3 Mataraman.

- 10) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 894.187.825 dengan realisasi keuangan Rp. 882.043.000 (98,64%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 ruang dengan realisasi sebanyak 4 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi ruang perpustakaan			
1	SMPN 3 Mataraman	1	ruang
2	SMPN 1 Sungai Pinang	1	ruang
3	SMPN 7 Aluh Aluh	1	ruang
4	SMPN 1 Telaga Bauntung	1	ruang



11) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.369.513.750 dengan realisasi keuangan Rp. 1.315.515.000 (96,06%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 ruang dengan realisasi sebanyak 4 ruang sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium			
1	SMPN 2 Gambut	1	ruang
2	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	1	ruang
Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA dengan kerusakan minimal beserta perabotnya			
3	SMPN 1 Martapura	1	ruang
4	SMPN 2 Astambul	1	ruang

12) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 966.790.000 dengan realisasi keuangan Rp. 941.299.000 (97,36%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 10 unit dengan realisasi sebanyak 10 unit sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya			
1	SMPN 1 Martapura	1	unit
2	SMPN 2 Simpang Empat	1	unit
3	SMPN 3 Gambut	1	unit
4	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah beserta Sanitary			
5	SMPN 2 Astambul	1	unit
6	SMPN 3 Simpang Empat	1	unit
7	SMPN 5 Martapura	1	unit
8	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	unit
9	SMPN 1 Karang Intan	1	unit
10	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	1	unit

13) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 710.747.000 dengan realisasi keuangan Rp. 707.625.400 (99,56%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket alat laboratorium berupa meja kursi tunggal sebanyak 1856 pasang.

14) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 302.760.000 dengan realisasi keuangan Rp. 300.645.000 (99,30%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket pengadaan mebel guru / TU berupa meja kursi alas busa kayu lurus sebanyak 135 buah.

15) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 225.000.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 75 peserta didik dengan realisasi 75 peserta didik. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Asal Sekolah	Jumlah Penerima
SMPN 1 Aranio	1
SMPN 1 Astambul	1



Asal Sekolah	Jumlah Penerima
SMPN 1 Beruntung Baru	4
SMPN 1 Cintapuri Darussalam	1
SMPN 1Kertak hanyar	1
SMPN 1 Martapura	1
SMPN 1 Martapura Barat	1
SMPN 1 Martapura Timur	2
SMPN 1 Paramasan	3
SMPN 1 Sambung Makmur	2
SMPN 1 Simpang Empat	2
SMPN 1 Sungai Pinang	1
SMPN 2 Aluh Aluh	3
SMPN 2 Cintapuri Darussalam	1
SMPN 2 Kertak hanyar	1
SMPN2 Karang Intan	1
SMPN 2 Simpang Empat	2
SMPN 3 Aluh Aluh	4
SMPN 3 Aranio	2
SMPN 3 Astambul	1
SMPN 3 Cintapuri Darussalam	1
SMPN 3 Karang Intan	2
SMPN 3 Mataraman	1
SMPN 3 Pengaron	2
SMPN 3 Sungai Pinang	2
SMPN 3 Sungai Tabuk	2
SMPN 3 Smpang Empat	1
SMPN 4 Aluh Aluh	2
SMPN 4 Aranio	4
SMPN 4 Cintapuri Darussalam	1
SMPN 4 Simpang Empat	2
SMPN 5 Aluh Aluh	4
SMPN 5 Martapura	2
SMPN 6 Karang Intan	2
SMPN 7 Aluh Aluh	4
SMPN 7 Karang Intan	1
SMPN 8 Aluh Aluh	3
SMPS Hidayatullah	2
SMPS Muhammadiyah Biih	2
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>

16) Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 361.980.000 dengan realisasi keuangan Rp. 358.500.000 (99,04%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket pengadaan paket alat tulis siswa yang disebar keseluruh Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjar.

17) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.175.252.500 dengan realisasi keuangan Rp. 2.156.782.750 (99,15%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 5 paket dengan realisasi 5 paket. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA	1	Paket
2	Pengadaan Peraga PJOK	1	Paket
3	Pengadaan TIK	2	Paket
4	Pengadaan Penguat Jaringan	1	Paket

18) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 776.101.100 dengan realisasi keuangan Rp. 768.595.000 (99,03%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1018 peserta didik dengan realisasi 1347 peserta didik. Adapun rinciannya sebagai berikut:



No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	Festival Tunas Bahasa Ibu	172	Orang
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama	123	Orang
3	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	205	Orang
4	Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	198	Orang
5	Lomba Volly	296	Orang
6	Lomba Karakter Islami	227	Orang
7	Lomba Gala Siswa Indonesia (sepak Bola)	126	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.347</b>	<b>Orang</b>

19) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 5.000.000 (100%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 25 orang dengan realisasi 25 orang pada Rapat penyediaan data PTK (Kabid, Kasi, dan Pengawas Bidang Sekolah Menengah Peratama).

20) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 842.954.000 dengan realisasi keuangan Rp. 811.329.000 (96,25%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 628 orang dengan realisasi 628 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
Kegiatan Bimtek Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMP	76
Kegiatan Diklat Pembagi Kabar Pembelajaran Berbasis Digital SMP	76
Kegiatan Pelatihan Guru PJOK Jenjang SMP	85
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Dapodik SMP	76
Kegiatan Pendampingan Calon Guru Penggerak (Coaching Clinic) Jenjang SMP	85
Kegiatan Pendampingan Calon Peserta Pendidikan Guru (PPG) Jenjang SMP	85
Kegiatan Seminar Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional	130
Biaya Pendidikan (PPG) Guru PAI Jenjang SMP	15
<b>TOTAL</b>	<b>628</b>

21) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 462.530.000 dengan realisasi keuangan Rp. 418.100.000 (90,39%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 75 satuan pendidikan dengan realisasi 75 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan.
1	Aluh-Aluh	12	Satuan Pendidikan
2	Aranio	8	Satuan Pendidikan
3	Astambul	4	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	3	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	8	Satuan Pendidikan
6	Gambut	4	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	4	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	2	Satuan Pendidikan
9	Martapura	3	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	4	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	3	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	2	Satuan Pendidikan
13	Pengaron	4	Satuan Pendidikan
14	Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
15	Simpang Empat	3	Satuan Pendidikan
16	Sungai Pinang	4	Satuan Pendidikan
17	Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
18	Tatah Makmur	3	Satuan Pendidikan
19	Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
20	Prasmanan	1	Satuan Pendidikan
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>Satuan Pendidikan</b>



22) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.801.015.084 dengan realisasi keuangan Rp. 15.775.735.453 (99,84%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 75 satuan pendidikan dengan realisasi 75 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan.
1	Aluh-Aluh	12	Satuan Pendidikan
2	Aranio	8	Satuan Pendidikan
3	Astambul	4	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	3	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	8	Satuan Pendidikan
6	Gambut	4	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	4	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	2	Satuan Pendidikan
9	Martapura	3	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	4	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	3	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	2	Satuan Pendidikan
13	Pengaron	4	Satuan Pendidikan
14	Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
15	Simpang Empat	3	Satuan Pendidikan
16	Sungai Pinang	4	Satuan Pendidikan
17	Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
18	Tatah Makmur	3	Satuan Pendidikan
19	Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
20	Prasmanan	1	Satuan Pendidikan
<b>Total</b>		<b>75</b>	Satuan Pendidikan

23) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 260.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 248.330.000 (95,51%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 306 orang dengan realisasi 306 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS			
1	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS	156	Orang
2	Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Jenjang SMP	150	Orang

24) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang TU

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 334.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 308.555.000 (92,38%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 ruang dengan realisasi 2 ruang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi ruang TU (DAK)			
1	SMPN 2 Simpang Empat	1	ruang
2	SMPN 3 Mataraman	1	ruang

25) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kepala Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 102.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 102.171.000 (99,68%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 ruang dengan realisasi 2 ruang. Adapun rinciannya sebagai berikut:



No	Belanja	Volume	Satuan
	Rehabilitasi Ruang Kepsek/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)		
1	SMPN 3 Mataraman	1	ruang
2	SMPN 4 Simpang Empat	1	ruang

26) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 34.625.000 (98,93%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 76 orang dengan realisasi 76 orang Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Banjar pada Kegiatan Pelatihan Platform Merdeka Mengajar.

27) Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 73.350.000 (97,80%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 konten digital dengan realisasi 1 konten digital "Modul Digital".

28) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 29.655.000 (98,85%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 76 orang dengan realisasi 76 orang Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Banjar.

29) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 24.670.000 (98,68%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen koordinasi pendataan anak tidak sekolah.

30) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 59.655.500 (99,43%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen bimtek cegah pernikahan dini dan Pendidikan seks untuk remaja.

31) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 589.631.500 dengan realisasi keuangan Rp. 577.881.500 (98,01%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 76 satuan pendidikan dengan realisasi 76 satuan pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Volume	Satuan.
1	Aluh-Aluh	12	Satuan Pendidikan
2	Aranio	8	Satuan Pendidikan
3	Astambul	4	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	3	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	8	Satuan Pendidikan
6	Gambut	4	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	4	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	3	Satuan Pendidikan
9	Martapura	3	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	4	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	3	Satuan Pendidikan



No	Kecamatan	Volume	Satuan.
12	Mataraman	2	Satuan Pendidikan
13	Pengaron	4	Satuan Pendidikan
14	Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
15	Simpang Empat	3	Satuan Pendidikan
16	Sungai Pinang	4	Satuan Pendidikan
17	Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
18	Tatah Makmur	3	Satuan Pendidikan
19	Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
20	Prasmanan	1	Satuan Pendidikan
<b>Total</b>		<b>76</b>	Satuan Pendidikan

### 32) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.038.841.250 dengan realisasi keuangan Rp. 1.968.310.000 (96,54%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 8 ruang dengan realisasi 8 ruang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya			
1	SMPN 3 Mataraman (DAK)	1	ruang
2	SMPN 4 Sungai Tabuk (DAK)	1	ruang
3	SMPN 1 Martapura (DAK)	1	ruang
4	SMPN 4 Aluh Aluh	1	ruang
5	SMPN 1 Gambut	1	ruang
6	SMPN 3 Karang Intan	2	ruang
7	SMPN 3 Gambut	1	ruang

### 33) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 99.655.000 (99,66%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 95 orang dengan realisasi 95 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
Bimtek Pengembangan PEDAGODIK Profesional dan Kompetensi			
1	Guru Mapel Bahasa Indonesia	15	Orang
2	Guru Mapel Bahasa Inggris	8	Orang
3	Guru Mapel Matematika	7	Orang
4	Guru Mapel IPA	15	Orang
5	Guru Mapel PKN	6	Orang
6	Guru TIK	20	Orang
7	Guru BK	24	Orang
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>Orang</b>

### 34) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.029.087.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.000.152.675 (97,19%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 16.394 buku dengan realisasi 16.394 buku. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Buku Pengetahuan untuk Siswa SMP (Kamus Indonesia-Inggris)	1.170	eksemplar
2	Pengadaan Buku Karakter SMP	925	eksemplar
3	Pengadaan Buku Bacaan Bermutu	66	paket
4	Pengadaan Buku Muatan Lokal Arab Melayu	14.233	buah



35) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 981.098.000 dengan realisasi keuangan Rp. 953.865.000 (97,12%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 7 ruang dengan realisasi 6 ruang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Belanja	Volume	Satuan
	Rehabilitasi ruang guru (DAK)		
1	SMPN 2 Simpang Empat	1	ruang
2	SMPN 3 Mataraman	1	ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru		
3	SMPN 1 Aluh Aluh	1	ruang
4	SMPN 7 Karang Intan	1	ruang
5	SMPN 2 Sungai Pinang	1	ruang
6	SMPN 1 Astambul	1	ruang

## 2. Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh 1 program, 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan berikut ini: Program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.

Pagu anggaran program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat sebesar Rp. 151.275.487.895 dengan realisasi keuangan Rp 145.872.185.811 (96,43%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama dengan target sebesar 52% dan realisasi 100%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang salah satunya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu: Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sebesar Rp. 8.401.098.625,- dengan realisasi keuangan Rp 7.828.233.470 (93,18%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase capaian SPM Puskesmas sebesar 92% dan realisasi 93,18%. Kegiatan ini didukung oleh 28 Sub Kegiatan dan 12 diantaranya yang adalah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp. 1.836.922.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.761.758.500 (95,91%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil diukur dengan indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target 10.645 orang dengan realisasi 7.056 orang.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp. 259.694.000 dengan realisasi keuangan Rp. 206.159.000 (79,39%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin diukur dengan indikator jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai



standar dan target kinerja sebesar 10.161 orang dengan realisasi 7.485 orang.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp. 398.006.965 dengan realisasi keuangan Rp. 200.480.000 (50,37%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diukur dengan indikator jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar dan target kinerja sebesar 9.309 orang dengan realisasi 7.763 orang.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan balita sebesar Rp. 410.489.100 dengan realisasi keuangan Rp. 402.959.500 (98,17%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan balita diukur dengan indikator jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar standar dan target kinerja sebesar 38.677 orang dengan realisasi 30.364 orang.

5) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sebesar Rp. 2.082.027.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.936.503.000 (93,01%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar diukur dengan indikator jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 79.524 orang dengan realisasi 88.502 orang.

6) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp. 120.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 117.938.000 (98,28%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif diukur dengan indikator jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 382.904 orang dengan realisasi 286.136 orang.

7) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp. 38.777.000 dengan realisasi keuangan Rp. 38.344.000 (98,88%). Capaian kinerja sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut diukur dengan indikator jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 96.812 orang dengan realisasi 47.482 orang.

8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah Rp. 26.875.000 dengan realisasi keuangan Rp. 24.220.000 (90,12%). Capaian kinerja sub kegiatan diukur dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target kinerja 38.160 orang dan realisasi 37.074 orang (85,1%).



9) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus adalah Rp. 1.323.327.385 dengan realisasi keuangan Rp. 1.323.312.420 (88,86%). Capaian kinerja sub kegiatan diukur dengan jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target kinerja 5.046 orang dan realisasi 6.800 orang.

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat adalah Rp. 64.643.275 dengan realisasi keuangan Rp. 64.423.000 (99,66%). Capaian kinerja sub kegiatan diukur dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 848 orang dengan realisasi 1.119 orang.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pagu anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp. 873.405.400 dengan realisasi keuangan Rp. 809.118.300 (92,64%). Capaian kinerja sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis diukur dengan indikator jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan target kinerja sebesar 10.020 orang dan realisasi 9.264 orang.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pagu anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sebesar Rp. 966.931.500 dengan realisasi keuangan Rp. 943.017.500 (97,53%). Capaian kinerja sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV diukur dengan indikator jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan target kinerja 10.020 orang dan realisasi 18.188 orang.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 23.093.384.177 dengan realisasi sebesar Rp. 22.085.240.940. Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum diukur dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan layak. Adapun target program ini adalah:

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan indikator :

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak dengan target 100% dan realisasi 100%.



- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman dengan target 18,17% dan realisasi 17,798%.

Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11.417.218.800 dengan realisasi Rp 10.982.748.690 (96,19%). Adapun target capaian 1.400 unit dengan realisasi 1.367 unit. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Realisasi	Keterangan
1	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Atas HAMP	251 Unit
2	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Bawah HAMP	258 Unit
3	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Tengah HAMP	290 Unit
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balau Kec. Karang Intan	172 Unit
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul	28 Unit
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Padang Panjang Kec. Karang Intan	60 Unit
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk	144 Unit
8	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan	75 Unit
9	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Takuti Kec. Mataraman	35 Unit
10	Pengembangan Jaringan SPAM Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan	0 Unit
11	Pemeliharaan Air Santri - Pembuatan 100 Unit SR	54 Unit
12	Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Pengaron Mangkauk	0 Unit

Realisasi kinerja tidak mencapai target sebesar 1.400 Unit dikarenakan adanya perubahan BNBA sehingga item panjang jaringan pipa SR bertambah yang mengakibatkan output SR berkurang.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 423.644.000 dengan realisasi Rp 376.178.000 (100%). Adapun target capaian 8 Unit dengan realisasi 9 Unit, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
1	Desa Belangian Kec. Aranio	1 Unit
2	Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	1 Unit
3	Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat	1 Unit
4	Desa Abirau Kec. Karang Intan	1 Unit
5	Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	1 Unit
6	Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk	1 Unit
7	Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat	1 Unit
8	Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk	1 Unit
9	Desa Mangkalawat Kec. Mataraman	1 Unit

- 3) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.020.790.000 dengan realisasi Rp 2.013.150.000 (99,62%). Adapun target capaian 700 Unit SR dengan realisasi 1.120 Unit SR, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
1	Desa Belangian Kec. Aranio	1 Unit
2	Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	1 Unit
3	Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat	1 Unit
4	Desa Abirau Kec. Karang Intan	1 Unit
5	Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	1 Unit



No	Realisasi	Keterangan
6	Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk	1 Unit
7	Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat	1 Unit
8	Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk	1 Unit
9	Desa Mangkalawat Kec. Mataraman	1 Unit

4) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 9.231.731.317 dengan realisasi Rp 8.713.164.250 (94,38%). Adapun target capaian 700 Unit SR dengan realisasi 1.120 Unit SR, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Haur Kuning Kec. Beruntung Baru	128 Unit SR
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaliukan Kec. Astambul	119 Unit SR
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar	71 Unit SR
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tatah Pemangkih Darat Kec. Tatah Makmur	57 Unit SR
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tungkaran Kec. Martapura	427 Unit SR
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk	11 Unit SR
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jambu Burung, Desa Jambu Raya dan Desa Muara Halayung Kec. Beruntung Baru	214 Unit SR
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jingah Habang Ilir Kec. Karang Intan	93 Unit SR

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 1.120 Unit SR dikarenakan terdapat dana insentif pada APBD-P (2 paket) serta efisiensi dana pada beberapa paket APBD. Sehingga jumlah SR bertambah banyak dibandingkan dengan perencanaan.

Pelayanan Dasar : Penyediaan Akses Air Limbah Domestik

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diukur dengan indikator:

- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah dengan target 100% dan realisasi 100%;
- Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 9,81% dan realisasi 10,22%;
- Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 100% dan realisasi 100%.

Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator:

- Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 100% dan realisasi 100%;
- Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 9,81% dan realisasi 10,22%.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 490.182.300 dengan realisasi Rp 188.071.700 (38,37%). Adapun target capaian 1 Unit dengan realisasi 2 Unit, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
Pemeliharaan Tangki Septik Komunal berlokasi di:		
1	Desa Murung Kenanga, Kec. Martapura	1 Unit
2	Desa Karang Intan, Desa Mali-Mali, dan Desa Lihung, Kec. Karang Intan	1 Unit



Realisasi keuangan hanya mencapai 38,37% dikarenakan hasil perencanaan, kebutuhan untuk pemeliharaan diperlukan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia dan fokus dari pekerjaan untuk melakukan pemeliharaan, operasional dilakukan di luar dari DPUPRP (BLUD Intan Banjar). Sedangkan Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 2 Unit dikarenakan pada saat awal penetapan target pemeliharaan terfokus pada Desa Murung Kenang, selanjutnya setelah dipelajari infrastruktur yang dibangun (IPAL) di wilayah Karang Intan memerlukan penyedotan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 15.536.160.274 dengan realisasi Rp 15.289.909.760 (98,41%). Terdapat kesalahan penginputan target pada penyusunan DPPA dimana target DPPA 500 Rumah Tangga dimana seharusnya target yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebanyak 800 Rumah Tangga. Adapun target capaian 800 Rumah Tangga dengan realisasi 965 Rumah Tangga, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
Pembangunan tangki septik individual dan Bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan desa Open Defecation Free (ODF) di Desa:		
1	Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk	52 Rumah Tangga
2	Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh	51 Rumah Tangga
3	Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk	52 Rumah Tangga
4	Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk	52 Rumah Tangga
5	Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
6	Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
7	Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
8	Desa Lokbuntar, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
9	Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
10	Desa Baru, Kec. Mataraman	52 Rumah Tangga
11	Desa Pingaran Ilir, Kec. Astambul	51 Rumah Tangga
12	Desa Limamar, Kec. Astambul	51 Rumah Tangga
13	Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
14	Desa Gudang Hiran, Kec. Sungai Tabuk	51 Rumah Tangga
15	Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat	50 Rumah Tangga
16	Desa Guntung Ujung, Kec. Gambut	30 Rumah Tangga
17	Desa Jingah Habang Ilir, Kec. Karang Intan	16 Rumah Tangga
18	Desa Lihung, Kec. Karang Intan	16 Rumah Tangga
19	Desa Tambangan, Kec. Astambul	30 Rumah Tangga
20	Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan	50 Rumah Tangga
21	Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan	55 Rumah Tangga

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 965 Rumah Tangga dikarenakan Adanya tambahan dana dari insentif fiskal terkait penanganan SPALD-S

3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 791.841.500 dengan realisasi Rp 780.187.100 (98,53%). Adapun target sesungguhnya 800 Orang dengan realisasi 800 Orang, yaitu:

No	Realisasi	Keterangan
Pembangunan tangki septik individual dan Bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan desa Open Defecation Free (ODF) di Desa:		
1	Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk	52 Orang
2	Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh	51 Orang
3	Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk	52 Orang
4	Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk	52 Orang
5	Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
6	Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
7	Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
8	Desa Lokbuntar, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang



No	Realisasi	Keterangan
9	Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
10	Desa Baru, Kec. Mataraman	52 Orang
11	Desa Pingaran Ilir, Kec. Astambul	51 Orang
12	Desa Limamar, Kec. Astambul	51 Orang
13	Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
14	Desa Gudang Hiran, Kec. Sungai Tabuk	51 Orang
15	Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat	50 Orang
16	Desa Guntung Ujung, Kec. Gambut	30 Orang
17	Desa Jingah Habang Ilir, Kec. Karang Intan	16 Orang
18	Desa Lihung, Kec. Karang Intan	16 Orang
19	Desa Tambangan, Kec. Astambul	30 Orang
20	Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan	50 Orang
21	Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan	55 Orang

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh Program Pengembangan Perumahan. Pagu anggaran program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 929.526.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 922.246.450,- (99,22%), program ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan, namun hanya 2 (dua) kegiatan yang mendukung penerapan SPM dengan anggaran Rp. 792.903.800 dan realisasi sebesar Rp. 789. 428.800. Adapun 2 (dua) kegiatan dimaksud yaitu:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 180.767.100 dengan realisasi keuangan Rp. 177.899.600 (98,41%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

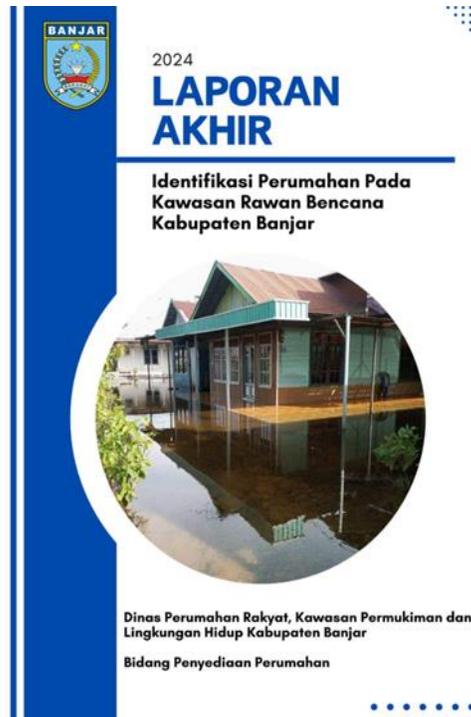
Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 76.561.600 dengan realisasi keuangan Rp. 74.791.600 (97,69%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota.





2) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 104.205.500 dengan realisasi keuangan Rp. 103.108.000 (98,95%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota.



2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 180.767.100 dengan realisasi keuangan Rp. 177.899.600 (98,41%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

Pagu anggaran ini sebesar Rp. 612.136.700 dengan realisasi keuangan Rp. 611.529.200 (99,90%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Pagu anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp. 326.996.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 324.627.200 (99,27%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah 24 unit rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi dengan realisasi sebesar 24 unit sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar No.



188.45/303/KUM/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2024. Berikut adalah data dan dokumentasi kegiatan.

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NILAI BANTUAN (Rp)	TINGKAT KERUSAKAN
1	2	3	4	5	6
1	Suriansyah	6303010506650000	Desa Aluh-Aluh Besar RT. 08, Kecamatan Aluh-Auh	25.000.000,00	Sedang
2	Aminah	6303014107650070	Desa Aluh-Aluh Besar RT.08, Kecamatan Aluh-Aluh	25.000.000,00	Sedang
3	Ruzali.A	6303011008620000	Desa Aluh-Aluh Besar RT. 08, Kecamatan Aluh-Aluh	25.000.000,00	Sedang
4	Salim	6303012107660000	Desa Bunipah RT. 04 RW. 02, Kecamatan Aluh-Aluh	25.000.000,00	Sedang
5	Hamdi Arifin	6303131203540000	Desa Babirik RT. 03, Kecamatan Beruntung Baru	25.000.000,00	Sedang
6	Masitah	6303194103450000	Desa Thaibah Raya RT. 06, Kecamatan Tatah Makmur	25.000.000,00	Sedang
7	Fazri	6303023009730000	Desa Thaibah Raya RT.01, Kecamatan Tatah Makmur	25.000.000,00	Sedang
8	Raudah	6303025208750000	Desa Pasar Kamis RT. 04, Kecamatan Kertak Hanyar	25.000.000,00	Sedang
9	Muhaidi	6371011203900000	Desa Lok Baintan RT. 04, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
10	Jumani	6303041006650000	Desa Lok Baintan RT. 04, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
11	Animar	6303040711800000	Desa Lok Baintan Dalam RT. 02, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
12	Khairiah	6303045809790000	Desa Lok Baintan Dalam RT. 02, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
13	Moh Sholeh	6303040303780000	Desa Lok Baintan Dalam RT. 02, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
14	Nurliani	6303046001700000	Desa Sungai Tandipah RT. 03, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
15	AnangJami	6303040505600000	Os. Sungai Tandipah RT. 03, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
16	Mas'ud	6371020204580000	Jalan Handil Kalua Desa Banyu Hirang RT. 03, Kecamatan Sungai Tabuk	25.000.000,00	Sedang
17	M. Ardiansyah	6303080302910000	Desa Garis Hanyar RT. 03, Kecamatan Cintapuri Darussalam	25.000.000,00	Sedang
18	Noorsinah	6303084311420000	Desa Surian Hanyar RT.01, Kecamatan Cintapuri Darussalam	25.000.000,00	Sedang
19	Halidi	6303140101710000	Desa Penggalaman RT. 01, Kecamatan Martapura Barat	25.000.000,00	Sedang
20	Ruminah	6303034107530280	Desa Tambak Sirang Darat RT. 03, Kecamatan Gambut	25.000.000,00	Sedang
21	Bahrih	6303021211450000	Desa Banua Hanyar RT. 01, Kecamatan Kertak Hanyar	25.000.000,00	Sedang
22	Salasiah	6303024105650000	Desa Banua Hanyar RT. 01, Kecamatan Kertak Hanyar	25.000.000,00	Sedang
23	Halimah	6303025006430000	Desa Banua Hanyar RT. 03, Kecamatan Kertak Hanyar	25.000.000,00	Sedang
24	Latifah	6303025901670000	Desa Mekar Raya RT. 02, Kecamatan Kertak Hanyar	25.000.000,00	Sedang



Berikut disampaikan dokumentasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana yaitu:

Suriansyah (Aluh-Aluh Besar)

0%



100%



Aminah (Aluh-Aluh Besar)

0%



100%



Ruzali. A (Aluh-Aluh Besar)

0%



100%



Salim (Bunipah)

0%



100%



Hamdi Arifin (Babirik)

0%



100%





Masitah (Thaibah Raya)

0%



100%



Fazri (Thaibah Raya)

0%



100%



Raudah (Pasar Kamis)

0%



100%



Muhaidi (Lok Baintan)

0%



100%



Jumani (Lok Baintan)

0%



100%





Animar (Lok Baintan)

0%



100%



Khairiah (Lok Baintan Dalam)

0%



100%



Moh Sholeh (Lok Baintan)

0%



100%



Nurliani (Sungai Tandipah)

0%



100%



Anang Jami (Sungai Tandipah)

0%



100%



Mas'ud (Banyu Hirang)

0%

100%



M. Ardiansyah (Garis Hanyar)

0%



100%



Noorsinah (Surian Hanyar)

0%



100%



Halidi (Penggalaman)

0%



100%



Ruminah (Tambak Sirang Darat)

0%



100%



Bahrih (Banua Hanyar)

0%



100%





### Salasiah (Banua Hanyar)

0%



100%



### Halimah (Banua Hanyar)

0%



100%



### Latifah (Mekar Raya)

0%



100%



## 5. Urusan Trantibumlinmas

### Bidang Trantibum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum merupakan merupakan program utama dimana besar pagu anggaran tahun ini sebesar Rp. 9.308.520.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.505.081.038,- (80,63%). Pencapaian target kinerja program tersebut diatas didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 9.149.396.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.353.002.000,- (80,37%). Capaian kinerja Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase gangguan trantibum/K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang dapat diselesaikan, target 100% dan realisasi 100%.
- Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan linmas dengan target 100% dan realisasi 100%.



- Rasio jumlah Satlinmas aktif target 5 orang per desa/ kelurahan dan realisasi 5 orang per desa/ kelurahan.

Capaian kinerja pada tahun ini sebesar 100%, dimana jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 456 kasus.

NO.	JENIS KASUS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGAR				JUMLAH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	KEBERSIHAN	0	0	0	0	0
2	KETERTIBAN SOSIAL	0	30	0	19	49
3	ANJAL	0	50	30	11	91
4	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	0	20	0	8	28
5	PKL	40	20	80	41	181
6	GEPENG	30	16	18	3	67
7	JALUR HIJAU	0	0	0	0	0
8	EVENT MASYARAKAT/ PEMERINTAH	0	0	0	0	0
9	KEGIATAN MENGGANGGU TERTIBAN UMUM	0	5	0	8	13
10	KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN	0	0	0	0	0
11	AKSI MASSA/DEMO	0	0	0	0	0
12	KEARIFAN LOKAL	0	0	0	0	0
13	LINGKUNGAN	0	0	0	0	0
14	JAM SEKOLAH	0	0	0	0	0
15	PERIZINAN DAN TATA RUANG	0	0	0	0	0
16	PEREDARAN MIRAS ILEGAL	0	0	0	0	0
17	MINUMAN OPLOSAN	0	20	5	2	27
18	KTP	0	0	0	0	0
19	KAWASAN BEBAS ROKOK	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>70</b>	<b>161</b>	<b>133</b>	<b>92</b>	<b>456</b>

Pencapaian target kinerja kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.241.844.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.480.042.000,- (78,62%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 5 dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan realisasi 5 dokumen sebagaimana dirinci di bawah ini:

- 4 laporan triwulan hasil kegiatan pemberdayaan perlindungan Masyarakat.
- 1 dokumen pemutakhiran data satlinmas.

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 81.865.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.250.000,- (66,27%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 150 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dengan realisasi 150 orang.



3) Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 875.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 875.000,- (100%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 3 dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan dengan realisasi 3 dokumen.

4) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 682.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 682.320.000,- (99,99%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 12 laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan dengan realisasi sebanyak 12 laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 100%. Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan di tahun 2024 sebanyak 331 kasus.

NO.	JENIS KASUS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGAR				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	JUMLAH
1	KEBERSIHAN	0	0	0	0	0
2	KETERTIBAN SOSIAL	0	25	0	15	40
3	ANJAL	0	45	20	8	73
4	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	0	20	0	5	25
5	PKL	30	0	55	26	111
6	GEPENG	25	11	18	3	57
7	JALUR HIJAU	0	0	0	0	0
8	EVENT MASYARAKAT/ PEMERINTAH	0	0	0	0	0
9	KEGIATAN MENGGANGGU TERTIBAN UMUM	0	0	0	5	5
10	KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN	0	0	0	0	0
11	AKSI MASSA/DEMO	0	0	0	0	0
12	KEARIFAN LOKAL	0	0	0	0	0
13	LINGKUNGAN	0	0	0	0	0
14	JAM SEKOLAH	0	0	0	0	0
15	PERIZINAN DAN TATA RUANG	0	0	0	0	0
16	PEREDARAN MIRAS ILEGAL	0	0	0	0	0
17	MINUMAN OPLOSAN	0	20	0	0	20
18	KTP	0	0	0	0	0
19	KAWASAN BEBAS ROKOK	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>55</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>331</b>

Dalam sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum aktifitas yang dilakukan adalah:

- Melaksanakan kegiatan deteksi dini yaitu kegiatan pengumpulan bahan keterangan secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman



masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.



- Melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini yaitu kegiatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.



- Pelaksanaan patroli yaitu kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau tempat-tempat yang dianggap rawan.



- Pengamanan, dan pengawalan yaitu segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset, lokasi, upacara dan acara penting, dan dokumen agar aman dan kondusif.



- 5) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 135.912.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.515.000,- (99,71%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 12 laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan dengan realisasi 12 laporan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Capaian pada sub kegiatan ini sebesar 100%. Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa di tahun 2024 sebanyak 125 kasus.

NO.	JENIS KASUS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGAR				JUMLAH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	KEBERSIHAN					
2	KETERTIBAN SOSIAL	0	5	0	4	9
3	ANJAL		5	10	3	18
4	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	0	0	0	3	3
5	PKL	10	20	25	15	70
6	GEPENG	5	5	0	0	10
7	JALUR HIJAU	0	0	0	0	0
8	EVENT MASYARAKAT/ PEMERINTAH	0	0	0	0	0
9	KEGIATAN MENGGANGGU TERTIBAN UMUM	0	5	0	3	8
10	KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN	0	0	0	0	0
11	AKSI MASSA/DEMO	0	0	0	0	0
12	KEARIFAN LOKAL	0	0	0	0	0
13	LINGKUNGAN	0	0	0	0	0
14	JAM SEKOLAH	0	0	0	0	0
15	PERIZINAN DAN TATA RUANG	0	0	0	0	0
16	PEREDARAN MIRAS ILEGAL	0	0	0	0	0
17	MINUMAN OPLOSAN	0	0	5	2	7
18	KTP	0	0	0	0	0
19	KAWASAN BEBAS ROKOK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	15	40	40	30	125



- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah  
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani dengan realisasi 1 laporan SPM urusan trantibum.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 159.124.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 152.079.038,- (95,57%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yaitu sebesar 65,57% dengan realisasi sebesar 72,22%. Pencapaian target kinerja kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut di atas didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.553.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.551.788,- (99,99%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan realisasi 4 laporan pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah triwulan I, II, III dan IV.





2) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 65.503.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.469.850,- (99,95%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan realisasi 4 laporan pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah triwulan I, II, III dan IV.



3) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.067.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.057.400,- (89,70%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP dengan realisasi 4 laporan pelaksanaan penanganan atas



pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota triwulan I, II, III dan IV.



### **Bidang Kebencanaan**

#### **Program Penanggulangan Bencana**

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 5.510.265.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.873.778.951,- (88,45%). Capaian kinerja Program Penanggulangan Bencana diukur dengan tiga (3) indikator yaitu :

- Indeks Meningkatnya efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, target Kinerja 0,39 Indeks dengan realisasi kinerja 0,53.
- Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, target Kinerja 0,68 Indeks dengan realisasi kinerja 0,58.
- Indeks Pengembangan Pemulihan Sistem Bencana, target kinerja 0,81 Indeks dengan realisasi kinerja 0,85.

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**

Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 703.225.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 656.852.000,- (93,41%). Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota diukur dengan indikator Indeks Meningkatnya efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Adapun target kegiatan ini adalah 0,38 Indeks dengan realisasi 0,53 Indeks. Capaian kinerja kegiatan ini 100%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

##### **1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 287.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 281.450.000,- (98,05%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan realisasi 1 dokumen KRB.



Penyusunan Dokumen KRB merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh BPBD, karena dokumen KRB ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. Bagi masyarakat umum, KRB diharapkan bisa jadi salah satu dasar untuk menyusun rencana aksi atau program praktis dalam rangka mengurangi risiko bencana, membangun kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan untuk menentukan tempat tinggal.

2) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 416.175.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 375.402.000,- (90,20%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1.420 warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 1.420 warga negara. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Apel Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta kekeringan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 dan diikuti sebanyak 300 warga negara.
- Apel Siaga Bencana Banjir, Tanah Longsor , Angin Puting Beliung yang dilaksanakan pada tanggal 5 November dan diikuti sebanyak 300 warga negara
- Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul dan tanggal 28 Februari 2024 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat yang diikuti sebanyak 100 warga negara
- Pelatihan Penguatan Kelembagaan PBBM yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 Di Kecamatan Karang Intan dan pada tanggal 23 April 2024 di Kecamatan Sungai Tabuk dan diikuti sebanyak 100 warga negara
- Sosialisasi PRB Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 dan diikuti sebanyak 100 warga negara
- Sosialisasi Kecamatan Tangguh Bencana (Dana Insentif Fiskal) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 dan diikuti sebanyak 70 warga negara
- Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Dana Insentif Fiskal) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 di SMPN 5 Martapura Desa Labuan Tabu , Tanggal 19 November 2024 di SMPN 1 Aluh Aluh , Tanggal 20 November 2024 di MTS Swasta Pembangunan Beruntung Baru , Tanggal 21 November 2024 di MTSN 2 Banjar Gambut yang diikuti sebanyak 200 warga negara



- Kegiatan Publikasi Media cetak dan elektronik

## 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.026.647.000,- dengan realisasi Rp. 1.903.832.884,- (93,94%). Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana diukur dengan dua (2) indikator Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana target kinerja 0,38 dengan realisasi 0,38 dan Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana target kinerja 0,67 dengan realisasi 0,54 indeks.

kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

### 1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 120.706.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.753.500,- (85,13%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan realisasi 1 kawasan yaitu Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Munggu Raya Kecamatan Astambul. Pembentukan DESTANA dilaksanakan 9 hari terdiri dari aparatur pemerintah desa, lembaga desa, babinsa, babinkamtibnas dan masyarakat Desa Munggu Raya. kegiatan berupa *workshop*, pelatihan dan Gladi Penanggulangan Bencana.

### 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.621.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.524.000,- (90,79%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 100 personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dengan realiasasi 100 orang. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan bertempat di Tahura Sultan Adam pada Tanggal 13 November 2024 dan Bukit Batu pada tanggal 14 November 2024.

### 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 189.090.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 184.650.000,- (97,65%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasikan dengan realisasi 1 dokumen rencana kontijensi bencana longsor.

### 4) Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.930.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.280.000,- (96,24%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 100 aparatur warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan dengan realisasi 100 orang yang dilakukan di Desa



Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan pada Tanggal 10 September 2024.

5) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 190.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 184.650.000,- (97,06%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi dengan realisasi 1 dokumen. Dokumen RPKB disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan bertujuan untuk: mengurangi risiko bencana, mempersiapkan diri menghadapi bencana, memastikan respons yang efektif terhadap bencana, memulihkan kondisi pasca bencana di Kabupaten/Kota

6) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.173.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.430.000,- (85,70%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 100 keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam target kinerja dengan realisasi 100 keluarga dengan rincian sebagai berikut:

- Pelatihan keluarga berencana dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul diikuti sebanyak 50 Orang (Keluarga).
- Pelatihan keluarga berencana dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Desa Jati Baru Kecamatan Astambul diikuti oleh 50 orang (Keluarga).

Kegiatan KATANA tersebut dilaksanakan dengan tujuan masyarakat terutama sektor keluarga agar menjadi keluarga yang siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, sehingga tercipta keluarga yang maju mandiri dan agamis yang mana sasaran ibu rumah tangga karena ada potensi kecelakaan atau bencana yang bisa terjadi di rumah dan bisa mengakibatkan ibu rumah tangga menjadi korban bencana

7) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 351.776.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 322.655.384,- (91,72%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah/legal dengan realisasi 1 dokumen. Dokumen RPB sendiri sangat penting untuk disusun karena merupakan pedoman untuk mempersiapkan langkah-langkah apa saja dalam penanggulangan bencana di suatu wilayah, dokumen RPB juga dapat meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota.



8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.064.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.007.890.000,- (94,72%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 327 unit peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman di Kawasan tempat tinggalnya dengan realisasi 327 unit. Adapun rincian unitnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Sumber Dana
1.	Mesin Perahu	1	Unit	Alokasi Umum
2.	Tandon	25	Unit	Alokasi Umum
3.	Mesin Pompa Portable	4	Unit	Alokasi Umum
4.	Selang Pemadam	4	Unit	Alokasi Umum
5.	Nozzel Pemadam Kebakaran	4	Unit	Alokasi Umum
6.	Mesin Alkon Apung	3	Unit	Alokasi Umum
7.	Tenda Regu / Tenda Pengungsi	2	Unit	Alokasi Umum
8.	Tenda Posko	3	Unit	Alokasi Umum
9.	Handy Talkie	4	Unit	Alokasi Umum
10.	Perahu Karet	2	Unit	Alokasi Umum
11.	Tenda Posko	2	Unit	Insentif Fiskal
12.	Powerbank Portable Travel Fast	2	Unit	Insentif Fiskal
13.	Mesin Pompa Mini Strike (Sumbut) untuk Pemadaman pada Lahan Gambut	7	Unit	Insentif Fiskal
14.	Nozzle Pemadam Kebakaran	10	Unit	Insentif Fiskal
15.	Stel Wearpack Rescue	50	Buah	Insentif Fiskal
16.	Helm Safet	50	Buah	Insentif Fiskal
17.	Sarung Tangan Safety	50	Pasang	Insentif Fiskal
18.	Kacamatan Safety	50	Buah	Insentif Fiskal
19.	Sepatu Boot Safety	50	Pasang	Insentif Fiskal
20.	Velbed	4	Unit	Insentif Fiskal
	<b>Jumlah</b>	<b>327</b>		

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.654.764.200,- dengan realisasi Rp. 2.203.570.067,- (83%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Darurat Bencana dengan target 0,68 Indeks dan realisasi 0,56 Indeks. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 133.752.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.300.000,- (77,23%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 dokumen keputusan penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat dengan realisasi 1 Keputusan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan 1 Keputusan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan / lahan dan kekeringan.

2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.600.000,- (42,40%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 7.000 korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan di evakuasi per jenis kejadian bencana dengan realisasi 4.336 orang yang berhasil ditolong dan dievakuasi.



No	Kecamatan	Jumlah Korban
1	Aluh-Aluh	19
2	Aranio	0
3	Astambul	237
4	Beruntung Baru	1.652
5	Cintapuri Darussalam	0
6	Gambut	1.191
7	Karang Intan	17
8	Kertak Hanyar	1
9	Martapura	57
10	Martapura Barat	50
11	Martapura Timur	0
12	Mataraman	139
13	Paramasan	133
14	Pengaron	0
15	Sambung Makmur	320
16	Simpang Empat	7
17	Sungai Pinang	63
18	Sungai Tabuk	439
19	Tatah Makmur	11
20	Telaga Bauntung	0
<b>Total</b>		<b>4.336</b>

3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 605.577.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.564.970,- (80,02%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1.200 korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan realisasi 872 korban bencana.

No	Kecamatan	Jumlah Korban
1	Aluh-Aluh	24
2	Aranio	0
3	Astambul	249
4	Beruntung Baru	10
5	Cintapuri Darussalam	0
6	Gambut	45
7	Karang Intan	15
8	Kertak Hanyar	8
9	Martapura	25
10	Martapura Barat	47
11	Martapura Timur	119
12	Mataraman	2
13	Paramasan	134
14	Pengaron	2
15	Sambung Makmur	34
16	Simpang Empat	2
17	Sungai Pinang	20
18	Sungai Tabuk	128
19	Tatah Makmur	8
20	Telaga Bauntung	0
<b>Total</b>		<b>872</b>

4) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.890.434.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.605.105.097,- (84,91%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 2 laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi 1 Laporan Pelaksanaan Posko Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan 1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Posko Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 125.628.500,- dengan realisasi Rp. 109.524.000,- (87,18%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur



dengan indikator indeks pengembangan pemulihan sistem bencana dengan target 0,81 Indeks dan realisasi 0,85 Indeks. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 67.067.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.778.500,- (83,17%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 4 dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dengan realisasi 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor, 1 Dokumen Laporan Rapat koordinasi / *Focus Group Discussion* (FGD) Perhitungan Mandiri IKD Kabupaten Banjar dan 1 Dokumen laporan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.561.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.745.500,- (91,78%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1 kegiatan pasca bencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten yang dilegalkan dengan realisasi 1 kegiatan berupa kegiatan Jitu Pasma, Verifikasi Kerusakan dan penyaluran bantuan dan Rapat koordinasi pemulihan sarpras Infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Banjar.

### **Bidang Damkar**

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 10.992.951.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.690.027.578 (97,24%). Capaian kinerja Program ini diukur dengan 5 indikator yaitu :

- Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, Target 86,65%. Capaian 83.92% (Persentase 96,88%).
- Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, Target 100%, Realisasi Capaian 100%.
- Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, Target 100%, Realisasi Capaian 100%.
- Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, Target 20,69%, Realisasi Capaian 20.69%, Persentase 100%.
- Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran Target 100%, Realisasi Capaian 100%.

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 7.209.961.100,- dengan realisasi keuangan Rp.7.096.510.578,- (98,43%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan Indikator Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 213.656.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 213.500.040,- (99,93%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 365 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

2) Sub Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 337.045.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 322.190.838,- (95,59%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 365 Dokumen Hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.

3) Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 495.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 457.403.000,- (92,40%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan target sebesar sebesar 65 Orang dan realisasi 69 Orang. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan kegiatan dilakukan pada tanggal 07 s/d 13 bulan Juli 2024 dan bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

No	Nama	JABATAN
1	ERRI WIBOWO	Pemadam Pemula Kebakaran
2	M. SHOBI RAHMAN	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
3	RAHMADANI	Pemadam Pemula Kebakaran
4	RUDY MUZAKIR, S.SOS	Kepala Seksi Sarpras Informasi dan Pengolahan Data
5	ANNISA ZURAIIDA, S.T.	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
6	DONY PERMADI, ST..	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
7	ERMA, S.T.	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
8	MUHAMMAD NAZAR KHULAIFI, S.T.	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
9	MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN, S.T.	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
10	RIZKY MIRAJI, S.T.	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
11	ABDUL HAFIZ	Pemadam Pemula Kebakaran



No	Nama	JABATAN
12	AGUS MAULIDI	Pemadam Pemula Kebakaran
13	AHMAD RIFALDI	Pemadam Pemula Kebakaran
14	AKHMAD KHARISMA ADZANDY	Pemadam Pemula Kebakaran
15	AKHMAD YANI	Pemadam Pemula Kebakaran
16	ANANG SUBHAN	Pemadam Pemula Kebakaran
17	ANDRI RIFA'I	Pemadam Pemula Kebakaran
18	ARIEF YUDIANTO	Pemadam Pemula Kebakaran
19	EDI PRASETYO	Pemadam Pemula Kebakaran
20	EDWIN NUGRAHA PERMANA	Pemadam Pemula Kebakaran
21	FAJAR MAULANA	Pemadam Pemula Kebakaran
22	GT. RIDKA NOOR IFANSYAH	Pemadam Pemula Kebakaran
23	HARIS AFRIZAL	Pemadam Pemula Kebakaran
24	HARNITA	Pemadam Pemula Kebakaran
25	HAROEN AL RASYID	Pemadam Pemula Kebakaran
26	HARRY NATHA SAPUTRA	Pemadam Pemula Kebakaran
27	KARINA ARSITA	Pemadam Pemula Kebakaran
28	M. SAMLAWI	Pemadam Pemula Kebakaran
29	MAULIDA RAHMAFANY	Pemadam Pemula Kebakaran
30	MISRAN HARIYANTO	Pemadam Pemula Kebakaran
31	MUHAMMAD BAYU RINALDI	Pemadam Pemula Kebakaran
32	MUHAMMAD BUSIRI	Pemadam Pemula Kebakaran
33	MUHAMMAD IRWANSYAH	Pemadam Pemula Kebakaran
34	MUHAMMAD NASYID	Pemadam Pemula Kebakaran
35	MUHAMMAD NOOR	Pemadam Pemula Kebakaran
36	MUHAMMAD NUR	Pemadam Pemula Kebakaran
37	MUHAMMAD REVEN RENALDY	Pemadam Pemula Kebakaran
38	MUHAMMAD RIKY SAPUTRA	Pemadam Pemula Kebakaran
39	MUHAMMAD RIZA RAHMAN	Pemadam Pemula Kebakaran
40	NOFIADI	Pemadam Pemula Kebakaran
41	RIDHA RASYID HIDAYAT	Pemadam Pemula Kebakaran
42	RIDHO RIZKY WIJAYA	Pemadam Pemula Kebakaran
43	RONI FITRIANI	Pemadam Pemula Kebakaran
44	RUDINI	Pemadam Pemula Kebakaran
45	SAIFI RIZWANA	Pemadam Pemula Kebakaran
46	SAMLANI	Pemadam Pemula Kebakaran
47	SAYID MUHAMMAD ROJIB	Pemadam Pemula Kebakaran
48	SERI MURNI YANTI	Pemadam Pemula Kebakaran
49	AHMAD YAZID	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
50	GT. MAULIANI KUSUMA	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
51	GUSTI ABDURRAHMAN	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
52	HUSAIRI	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
53	IBRAHIM	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
54	MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Kom	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
55	MUHAMMAD ARYADI SAPUTRA	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
56	WAHYU RAHMAD BAWANI PUTRA	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
57	WIRA PERMADI AZHAR	Petugas Teknis Bidang Pemadaman
58	GHINA AULIA	Petugas Teknis Bidang Pencegahan
59	TANJUNG HERU NURTAMA	Petugas Teknis Bidang Pencegahan
60	YUDITA APRIADI PUTRA	Petugas Teknis
61	M. HAMIDI	Petugas Teknis
62	MUHAMMAD LUTHFI EKAYUDA	Petugas Teknis
63	NAFSUL MUTMAINAH	Petugas Teknis
64	GT. KHALIMATUS SA'DIAH	Petugas Teknis
65	NURHIKMAH	Petugas Teknis
66	MUHAMMAD IRWANSYAH	Pemadam Pemula Kebakaran
67	MUHAMMAD ARIE MAULIDIN	Pemadam Pemula Kebakaran
68	H. MUHAMMAD HAZMI	Pemadam Pemula Kebakaran
69	AHMAD SAYUTI	Pemadam Pemula Kebakaran

- 4) Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.083.589.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.044.134.700,- (99,35%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait sebanyak 188 unit. Terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan target pada kepala DPA yang tercatat sebanyak 188 unit, sementara pada rincian DPA atau realisasi menunjukkan jumlah sebanyak 500 unit, sebagaimana terlampir:

Uraian	Volume	Satuan
Baju Kaos	100	Buah
Sarung Tangan	50	Buah



Uraian	Volume	Satuan
Mesin Alcon	2	Unit
Floating Fire Pump	1	Unit
Mobil Rescue Kajama	1	Unit
Fire Truck Kajama	1	Unit
Tangga Pemadam	5	Unit
Fire Helmet	50	Buah
Fire Jaket	50	Buah
SCBA	11	Buah
Harvik	50	Buah
Selang Pemadam	4	Buah
Fire Hose 1,5"	22	Buah
Fire Hose 2,5"	12	Buah
Nozzel Gun 1,5"	12	Buah
Nozzel Gun 2,5"	6	Buah
Y Connection	12	Buah
Adapter drat	2	Buah
Rak Fire Jaket	5	Buah
Saringan Bawah Isap	2	Buah
Scuba	1	Buah
Selang Sepiral Isap	20	Buah
Tas Pemadaman	81	Buah
<b>Jumlah</b>	<b>500</b>	

- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.535.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.339.500,- (50,68%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisas 1 Dokumen. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, telah dilakukan Nota Kesepakatan antara Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III A Martapura, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Pemerintah Kabupaten Banjar mengenai penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan.

Selain itu, dilakukan pula Nota Kesepakatan antara Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Pemerintah Kabupaten Banjar terkait penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan.

- 6) Sub Kegiatan Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
- Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.135.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.942.500,- (76,91%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tanggap Kebakaran dengan target sebesar 250 keluarga dan realisasi 250 Keluarga. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tanggap Kebakaran bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, khususnya



keluarga dan ibu-ibu PKK, dalam menghadapi risiko kebakaran rumah tangga

NO	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	JUMLAH KELUARGA	
1	Pelatihan Tanggap Rumah Tangga	Keluarga Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Selasa, 17 September 2024	60
2	Pelatihan Tanggap Rumah Tangga	Keluarga Kebakaran	Desa Jati	Rabu, 18 September 2024	50
3	Pelatihan Tanggap Rumah Tangga	Keluarga Kebakaran	Desa Pasar Jati	Kamis, 19 September 2024	50
4	Pelatihan Tanggap Rumah Tangga	Keluarga Kebakaran	Desa Sungai Bangkal	Rabu, 2 Oktober 2024	25
5	Pelatihan Tanggap Rumah Tangga	Keluarga Kebakaran	Posyandu Dahlia IV, Desa Sungai Sipai	Selasa, 8 Oktober 2024	65
<b>Jumlah</b>					<b>250</b>

## 2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 129.615.500,- dengan realisasi Rp. 62.155.000,- (47,95%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan Persentase terlaksananya Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

### 1) Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.015.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.782.000,- (33,62%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen yaitu:

- Berita Acara Pendataan Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung Triwulan I.
- Berita Acara Pendataan Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung Triwulan II.
- Berita Acara Pendataan Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung Triwulan III.
- Berita Acara Pendataan Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung Triwulan IV

### 2) Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.373.000,- (53,90%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen yaitu:

- Berita Acara Inspeksi Asistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung PT. Hero Super Market, Tbk.



- Berita Acara Inspeksi Asistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung PT. Indosat, Tbk – MSC Kertak Hanyar .
- Berita Acara Inspeksi Asistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung PT. Trakindo Utama.
- Berita Acara Pendataan Sistem dan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung PT. Tiga Dua Delapan.

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah Sertifikat Laik Kebakaran (SLK) diberikan jika bangunan atau gedung telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif terkait keselamatan kebakaran.

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Pagu Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 314.003.300,- dengan realisasi Rp. 267.483.100,- (85,18%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan Indikator Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat  
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 143.263.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.285.600,- (98,62%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya dengan target sebesar 500 orang dan realisasi 500 Orang. Peserta Pada sub kegiatan ini menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau memfasilitasi usulan yang telah diusulkan terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

No	Lokasi Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Aula Kantor Desa Pembantanan	Kamis, 5 Desember 2024	50
2	Aula Kantor Kelurahan Sungai Lulut	Kamis, 21 November 2024	100
3	Aula Kantor kecamatan Martapura	Rabu, 13 November 2024	150
4	PT. Palma Utama	Kamis, 29 Agustus 2024	50
5	PT. Nindya Karya	Jum'at, 23 Agustus 2024	85
6	Forum Anak Kabupaten Banjar	Selasa, 30 Juli 2024	15
7	Gedung PT. Elnusa Petrofin	Jum'at, 26 Juli 2024	30
8	UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Banjar	Kamis, 25 Juli 2024	20
Jumlah			500

- 2) Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 112.588.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.650.000,- (77,85%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya dengan target sebesar 20 Desa/Kelurahan dan realisasi 20 Desa/Kelurahan.



Kegiatan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran (Redkar) merupakan langkah strategis dalam membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dan tanggap terhadap potensi bencana kebakaran.

NO	KEGIATAN	LOKASI	HARI/ TANGGAL	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pembinaan dan Pembentukan REDKAR BPK REGAP	Desa Pingaran Ulu	Jum'at, 2 Agustus 2024	26	1 Desa
2	Pembinaan dan Pembentukan Redkar di Kecamatan Gambut	Kantor Kecamatan Gambut	Senin, 26 Agustus 2024	28	2 kelurahan 12 desa
3	Pembinaan dan Pembentukan Redkar Desa Sungai Bangkal di Kecamatan Sungai Tabuk	Kecamatan Sungai Tabuk	Rabu, 2 Oktober 2024	14	1 Desa
4	Pembinaan Redkar Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk	Kecamatan Sungai Tabuk	Kamis, 21 November 2024	25	1 Desa
5	Pembinaan Redkar Desa Pembantanan di Kecamatan Sungai Tabuk	Kecamatan Sungai Tabuk	Kamis, 5 Desember 2024	28	1 Desa
6	Pembinaan dan Pembentukan Redkar Desa Pemangih Darat di Kecamatan Tatah Makmur	Kecamatan Tatah makmur	Selasa, 10 Desember 2024	35	1 desa
7	Pembinaan dan Pembentukan Redkar Desa Tajau Landung di Kecamatan Sungai Tabuk	Kecamatan Sungai Tabuk	Senin, 16 Desember 2024	29	1 Desa
8	Pembinaan dan Pembentukan Redkar Desa Penyambaran di Kecamatan Karang Intan	Kecamatan Karang Intan	Senin, 16 Desember 2024	29	1 Desa

3) Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.151.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.547.500,- (66,29%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen yaitu:

- Dokumen Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Triwulan I.
- Dokumen Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Triwulan II.
- Dokumen Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Triwulan III.



- Dokumen Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Triwulan IV.

#### 4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.339.371.900,- dengan realisasi Rp. 3.263.878.900,- (97,74%). Capaian kinerja kegiatan ini diukur dengan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis dengan realisasi target 612 unit. Kegiatan ini didukung Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.339.371.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.263.878.900,- (97,74%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 612 unit, sementara pada rincian DPA atau realisasi menunjukkan jumlah sebanyak 613 unit.

Uraian	Volume	Satuan
Carabiners	24	Buah
Grab Stick 150cm	2	Buah
Gunting Potong Besi	1	Buah
Tas P3K	2	Buah
Portable Fire Pump	1	Unit
Ascender non Handle	3	Buah
Double Pulley	4	Buah
Figure Eight	4	Buah
Ful Body Harness	6	Buah
Helm Rescue	91	Buah
Inpanic Descender	3	Buah
Pelampung	18	Buah
Pro Traxion	2	Buah
Rescuender	3	Buah
Sarung Tangan Rescue	91	Buah
Sepatu Rescue	91	Buah
Tali Prusik 5mm	2	Buah
Tali Webbing	2	Buah
Tas Rescue	91	Buah
Mobil Komando	1	Buah
Perahu Water Rescue	1	Buah
Handy Talkie	20	Buah
Tenda	2	Buah
Velbed	20	Buah
Tali Kernmantle	4	Buah
Ascender Handle	3	Buah
Baju Lebah	2	Buah
Baju Rescue	91	Buah
Rak Life Jacket	4	Buah
Rak Wearpack	4	Buah
Senter Rescue	20	Buah
<b>Jumlah</b>	<b>613</b>	

## 6. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Program Rehabilitasi Sosial



Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 3.728.499.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.364.963.000,- (90,25%). Capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial diukur dengan indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial dengan target 15,75% dan realisasi sebesar 18,45%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, namun hanya 1 (satu) kegiatan yang menunjang penerapan SPM yaitu: Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.540.346.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.199.175.000,- (90,36%). Capaian Kinerja kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial diukur dengan indikator persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dengan target sebesar 75% dan realisasi 75%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.398.790.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.261.035.000,- (94,26%). Target kinerja pada sub kegiatan penyediaan permakanan adalah jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Penyediaan Permakanan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	416	416
Anak Terlantar	242	242
Lanjut Usia Terlantar	2500	2500
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	27	27
<b>Total</b>	<b>3185</b>	<b>3185</b>

2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 331.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 290.065.000,- (87,54%). Target kinerja pada sub kegiatan penyediaan sandang adalah jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Penyediaan Sandang</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	53	53
Anak Terlantar	15	15
Lanjut Usia Terlantar	200	200
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	0	0
<b>Total</b>	<b>268</b>	<b>268</b>

3) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 619.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 537.745.000,- (86,87%). Target kinerja pada sub kegiatan penyediaan alat bantu adalah jumlah orang yang mendapatkan



pemenuhan kebutuhan alat bantu sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Penyediaan Alat Bantu</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	56	56
Anak Terlantar	0	0
Lanjut Usia Terlantar	32	32
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	0	0
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

4) Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (77,92%). Target kinerja pada sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Layanan Reunifikasi Keluarga</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	11	11
Anak Terlantar	12	12
Lanjut Usia Terlantar	40	40
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	29	29
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

5) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 75.106.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.010.000,- (23,98%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	38	38
Anak Terlantar	17	17
Lanjut Usia Terlantar	20	20
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	15	0
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>75</b>

6) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.900.000,- (100%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.

<b>Penerima Layanan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Penyandang Disabilitas Terlantar	15	15
Anak Terlantar	15	15
Lanjut Usia Terlantar	15	15
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	15	15
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

7) Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak



Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak kewenangan Kabupaten/Kota.

Penerima Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Target	Realisasi
Penyandang Disabilitas Terlantar	3	3
Anak Terlantar	4	4
Lanjut Usia Terlantar	3	3
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	2	2
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

8) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000,- (80%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota.

Penerima Layanan Data dan Pengaduan	Target	Realisasi
Penyandang Disabilitas Terlantar	196	196
Anak Terlantar	76	76
Lanjut Usia Terlantar	413	413
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	47	47
<b>Total</b>	<b>732</b>	<b>732</b>

9) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.020.000,- (89,14%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota.

Penerima Layanan Kedaruratan	Target	Realisasi
Penyandang Disabilitas Terlantar	45	45
Anak Terlantar	18	18
Lanjut Usia Terlantar	43	43
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	6	6
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

10) Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.400.000,- (73,68%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota.

Penerima Layanan Rujukan	Target	Realisasi
Penyandang Disabilitas Terlantar	25	25
Anak Terlantar	17	17
Lanjut Usia Terlantar	14	14
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	3	3
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

Program Penanganan Bencana

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.440.044.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.394.978.500,- (96,8%). Capaian kinerja Program Penanganan Bencana diukur dengan indikator persentase bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial yang tersalurkan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan, namun



hanya 1 (satu) kegiatan yang menunjang penerapan SPM yaitu: Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.322.978.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 998.113.000,- (75,44%). Capaian Kinerja kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota diukur dengan indikator persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 478.974.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 324.050.000,- (67,66%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 1.609 orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi 1.609 orang korban bencana alam dan sosial.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 403.660.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.009.000,- (71,60%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 70 orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebanyak 70 orang.

3) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 428.444.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 379.315.000,- (88,53%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 334 orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebanyak 334 orang.

4) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.739.000,- (48,23%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah 119 orang yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebanyak 119 orang.



## BAB V PENUTUP

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Bupati Banjar Tahun 2024, Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

Syukur Alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan saat ini kita telah melewati Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024 mengacu pada visi Kabupaten Banjar “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Dan Agamis” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
- 5) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

LPPD ini secara dominan menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penerapan standar pelayanan minimal, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Adapun simpulan dari penjelasan LPPD tahun 2024 sebagai berikut:

Capaian kinerja makro Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari tahun 2023 sebesar 74,01 menjadi 74,41 ditahun 2024.
- 2) Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3,279% dari 2,44% ditahun 2023 menjadi 2,36% ditahun 2024.
- 3) Tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari 2,73 ditahun 2023 menjadi 2,71 ditahun 2024.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari 4,35 menjadi 4,76.
- 5) Pendapatan per kapita dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 38.266.000 tahun 2023 menjadi Rp. 40.027.390 tahun 2024.



- 6) Ketimpangan pendapatan dengan pendekatan *Gini ratio* mengalami penurunan dari 0,297 pada tahun 2023 menjadi 0,297 pada tahun 2024.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah 46 perangkat daerah. Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Banjar per Tahun 2024 sebanyak 8.035 yang terdiri atas 2.920 laki-laki dan 5.115 perempuan.
- 2) Total Anggaran Pendapatan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp. 2.638.005.176.356,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.990.464.810.211,86,- (113,36%).
- 3) Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp. 3.041.125.510.897,- dengan realisasi Belanja APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2.744.178.174.292,26,- dengan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp. 649.432.994.460,49,-

Capaian penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Kabupaten Banjar belum maksimal dalam menerapkan SPM Pelayanan Dasar tahun 2024 dikarenakan beberapa hal berikut ini :

- 1) Keterbatasan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM);
- 2) Program dan kegiatan standar pelayanan minimal (SPM) belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan; dan
- 3) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Walaupun terdapat banyak kendala dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dapat disampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan SPM pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Urusan SPM bidang Pendidikan mempunyai indeks pencapaian sebesar 84% dengan kategori Tuntas Madya.
- 2) Urusan SPM bidang Kesehatan mempunyai indeks pencapaian sebesar 90,17% dengan kategori Tuntas Utama.
- 3) Urusan SPM bidang Pekerjaan Umum memiliki indeks pencapaian sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.
- 4) Urusan SPM bidang perumahan rakyat memiliki indeks pencapaian sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.
- 5) Urusan SPM bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat memiliki indeks pencapaian sebesar 97,78% dengan kategori Tuntas Utama.
- 6) Urusan SPM bidang sosial memiliki indeks pencapaian sebesar 99,33% dengan kategori Tuntas Utama.

Meskipun standar pelayanan minimal secara ideal target harus tetap konsisten 100% namun dikarenakan banyak permasalahan dalam kendalanya menyebabkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Banjar belum maksimal.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam target kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kerjanya:



- 1) Indikator Indeks Kesehatan dengan realisasi 82,38.
- 2) Indikator Indeks Pendidikan dengan realisasi 62,72.
- 3) Indikator Indeks Daya beli dengan realisasi 79,72.
- 4) Indikator Indeks Ketahanan Pangan dengan realisasi 81,54.
- 5) Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan realisasi 0,53.
- 6) Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan realisasi 59,2.
- 7) Indikator Indeks Konektivitas dengan realisasi 84,44.
- 8) Indikator LPE sub sektor pertanian dengan realisasi 6,71.
- 9) Indikator LPE sub sektor perikanan dengan realisasi 4,13.
- 10) Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dengan realisasi 114,35.
- 11) Indikator LPE sektor industri Pengolahan dengan realisasi 4,26.
- 12) Indikator Jumlah kunjungan wisatawan dengan realisasi 5.763.538.
- 13) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 2,71.
- 14) Indikator Persentase Koperasi Berkualitas dengan realisasi 41,61.
- 15) Indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan realisasi 16,71.
- 16) Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dengan realisasi 0,7743.
- 17) Indikator Indeks Infrastruktur dengan realisasi 87,723
- 18) Indikator Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dengan realisasi 94,526.
- 19) Indikator Persentase Kawasan Kumuh dengan realisasi 8,58.
- 20) Indikator Indeks Resiko Bencana dengan realisasi 118,31.
- 21) Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi 13,61.
- 22) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 86,67.
- 23) Indikator Nilai SAKIP dengan realisasi 67,06.
- 24) Indikator Nilai Opini BPK dengan realisasi WTP.
- 25) Indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi dengan realisasi 3,96.
- 26) Indikator Indeks SPBE dengan realisasi 2,87.
- 27) Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan realisasi 78,22.
- 28) Indikator Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani dengan realisasi 0.

Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif DPRD Kabupaten Banjar selaku mitra Pemerintah serta semua unsur yang terlibat. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.